

PEMERINTAH KABUPATEN
KONawe UTARA



RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KONawe UTARA TAHUN 2025-2029

RANHIR RPJMD

“KONawe Utara sebagai Rumah BerSama yang semakin Maju dan Sejahtera”



PEMERINTAH KABUPATEN
KONawe UTARA



RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025-2029

RANHIR RPJMD

"KONawe Utara sebagai Rumah BerSama yang semakin Maju dan Sejahtera"



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan kerunia-Nya sehingga Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai kelanjutan dari dokumen Rancangan RPJMD yang telah disusun sebelumnya dan telah melalui proses fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta Musrenbang RPJMD. Di dalam Rancangan Akhir RPJMD ini, telah mengkolaborasikan pendekatan politik, yaitu memasukkan komponen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 47 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rancangan RPJMD ini mencakup penyempurnaan rancangan awal RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan Daerah, perumusan program Perangkat Daerah, dan KLHS.

Rancangan Akhir RPJMD ini akan disempurnakan melalui pembahasan di DPRD Konawe Utara, review APIP dan Fasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, Rancangan Akhir RPJMD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pijakan dalam tahapan selanjutnya dari proses penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029. Tak lupa kami mohon diberikan kritik dan saran yang membangun demi menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih baik yang mampu menjawab permasalahan daerah.

Wanggudu, Juli 2025
Bupati Konawe Utara,

Ttd.

H. Ikbar, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	10
1.3.1. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS)	11
1.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045	12
1.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029	15
1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan RPJMD Sulawesi Tenggara	18
1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan RPJPD Kabupaten Konawe Utara	18
1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Utara	21
1.3.7. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	21
1.3.8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034	22
1.3.9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032	22
1.3.10. RPJMD Daerah Sekitar	23
1.3.11. Dokumen Perencanaan Multi Sektor	23
1.3.12. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)	24
1.3.13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah	24

1.4.	Maksud dan Tujuan	24
1.5.	Sistematika Penulisan	25
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	27
2.1	Aspek Geografi Dan Demografi	27
2.1.1	Posisi dan Peran Strategis Daerah	27
2.1.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	27
2.1.1.2	Kondisi Topografi	29
2.1.1.3	Kondisi Geologi	29
2.1.1.4	Hidrologi dan Hidrogeologi	30
2.1.1.5	Kondisi Klimatologi	31
2.1.1.6	Penggunaan Lahan	32
2.1.1.7	Kontribusi Ekonomi	33
2.1.2	Potensi Sumber Daya Alam	34
2.1.3	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	38
2.1.4	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan.. ..	40
2.1.5	Lingkungan Hidup Berkualitas	42
2.1.6	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim ...	44
2.1.7	Demografi	48
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	52
2.2.1	Kesejahteraan Ekonomi	52
2.2.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	52
2.2.1.2	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	53
2.2.1.3	PDRB Perkapita	63
2.2.1.4	Laju Inflasi	64
2.2.1.5	Koefisien Gini	65
2.2.1.6	Tingkat Kemiskinan	66
2.2.2	Kesehatan Untuk Semua	68
2.2.3	Pendidikan Berkualitas Yang Merata	70
2.2.3.1	Angka Harapan Lama Sekolah	70
2.2.3.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	71
2.2.3.3	Angka Literasi/Numerasi	72

2.2.3.4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	74
2.2.4	Perlindungan Sosial Yang Adaptif	75
2.2.4.1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	75
2.2.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.....	76
2.2.5.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	76
2.2.5.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan.....	77
2.2.6	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	78
2.3	Aspek Daya Saing Daerah.....	79
2.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	79
2.3.1.1	Angka Ketergantungan.....	79
2.3.2	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	80
2.3.2.1	Rasio PDRB Industri Pengolahan.....	80
2.3.2.2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	82
2.3.2.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	83
2.3.2.4	Indeks Inovasi Daerah	84
2.3.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	85
2.3.4	Transformasi Digital.....	86
2.3.4.1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	86
2.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.....	87
2.3.5.1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	87
2.3.5.2	Ekspor Barang dan Jasa	88
2.3.6	Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	89
2.3.6.1	Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	89
2.3.6.2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	90
2.3.6.3	Indeks Desa Membangun	91
2.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro.....	98
2.3.7.1	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	

Tingkat Inflasi	98
2.4 Aspek Layanan Umum	99
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	99
2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum.....	99
2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100
2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik	101
2.4.2 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	102
2.4.3 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah	104
2.4.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	104
2.4.3.1.1 Pendidikan	104
2.4.3.1.2 Kesehatan	109
2.4.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	121
2.4.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	127
2.4.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat..	132
2.4.3.1.6 Sosial.....	134
2.4.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	136
2.4.3.2.1 Tenaga Kerja.....	136
2.4.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	138
2.4.3.2.3 Pangan.....	141
2.4.3.2.4 Pertanahan.....	142
2.4.3.2.5 Lingkungan Hidup.....	143
2.4.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	144

2.4.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	146
2.4.3.2.8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.....	147
2.4.3.2.9	Perhubungan	152
2.4.3.2.10	Komunikasi Dan Informatika	157
2.4.3.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	160
2.4.3.2.12	Penanaman Modal	161
2.4.3.2.13	Kepemudaan dan Olahraga.....	162
2.4.3.2.14	Statistik.....	163
2.4.3.2.15	Persandian	163
2.4.3.2.16	Kebudayaan	164
2.4.3.2.17	Perpustakaan.....	164
2.4.3.2.18	Kearsipan.....	165
2.4.3.3	Fokus Layanan Urusan Pilihan	165
2.4.3.3.1	Kelautan dan Perikanan.....	165
2.4.3.3.2	Pariwisata	167
2.4.3.3.3	Pertanian	167
2.4.3.3.4	Perkebunan.....	169
2.4.3.3.5	Kehutanan	170
2.4.3.3.6	Energi dan Sumber Daya Mineral	170
2.4.3.3.7	Perdagangan	171
2.4.3.3.8	Perindustrian.....	172
2.4.3.3.9	Transmigrasi.....	173
2.4.3.4	Unsur Pendukung	174
2.4.3.4.1	Sekretariat Daerah.....	174
2.4.3.4.2	Sekretariat DPRD.....	175
2.4.3.5	Unsur Penunjang.....	176
2.4.3.5.1	Perencanaan.....	176
2.4.3.5.2	Keuangan	178
2.4.3.5.3	Kepegawaian, Pendidikan,	

	Pelatihan.....	181
2.4.3.6	Unsur Pengawasan.....	182
	2.4.3.6.1 Pengawasan (Inspektorat Daerah)	182
2.4.3.7	Unsur Kewilayahan.....	185
2.5	Gambaran Keuangan Daerah	185
2.5.1	Kinerja Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	186
	2.5.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	187
	2.5.1.2 Ruang dan Kapasitas Fiskal Daerah.....	195
	2.5.1.3 Neraca Daerah	200
2.5.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	206
	2.5.2.1 Kinerja Belanja Daerah	206
	2.5.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran	212
	2.5.2.3 Analisis Pembiayaan	213
2.5.3	Kerangka Pendanaan	220
	2.5.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah	220
2.5.4	Perhitungan Kerangka Pendanaan	224
2.6	Permasalahan dan Isu Strategis	227
2.6.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	227
2.6.2	Isu Strategis	228
	2.6.2.1 Isu Global/Internasional	228
	2.6.2.2 Isu Strategis Wilayah Sulawesi pada RPJPD 2025-2045	231
	2.6.2.3 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara ...	232
	2.6.2.4 Isu Strategis Kabupaten Konawe Utara	232
	1. Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara.....	232
	2. Daya Saing Ekonomi Daerah	234
	3. Infrastruktur Wilayah Dan Sarana Prasarana Kawasan Permukiman	236
	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	238
	5. Kualitas Lingkungan Hidup Dan Mitigasi	

	Bencana Alam.....	238
	6. Pembangunan Kebudayaan Dan Kehidupan Keagamaan Masyarakat	239
BAB III	VISI, MISI, PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	240
3.1	Visi	240
1.	Rumah Bersama	241
2.	Maju	241
3.	Sejahtera	241
3.2	Misi	242
1.	Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Produktif	242
2.	Mempercepat Kenektivitas Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Serta Sarana Prasarana Permukiman Yang Berkualitas	243
3.	Menciptakan Perekonomian Daerah Yang Produktif Dan Berdaya Saing	243
4.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Responsif Dan Inovatif	243
5.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Serta Penanggulangan Bencana	244
6.	Pengembangan Kebudayaan Dan Nilai-Nilai Keagamaan masyarakat	244
3.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	247
3.4	Strategi	260
3.5	Arah Kebijakan	262
3.6	Program Unggulan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	270
3.7	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	293
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	296
4.1	Sub Bab Program Perangkat Daerah	297

4.1.1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan	
	Dasar	297
4.1.1.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan..	297
4.1.1.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan...	297
4.1.1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	298
4.1.1.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	298
4.1.1.5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	298
4.1.1.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	299
4.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	299
4.1.2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	299
4.1.2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	299
4.1.2.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	300
4.1.2.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.	300
4.1.2.5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	301
4.1.2.6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	301
4.1.2.7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	301
4.1.2.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	302
4.1.2.9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	302
4.1.2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.....	302
4.1.2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	302

4.1.2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.....	303
4.1.2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	303
4.1.2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	303
4.1.2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	303
4.1.2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	304
4.1.2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	304
4.1.3	Urusan Pilihan	304
4.1.3.1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	304
4.1.3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata....	304
4.1.3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	305
4.1.3.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	305
4.1.3.5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	305
4.1.3.6	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	305
4.1.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	306
4.1.4.1	Sekretariat Daerah	306
4.1.4.2	Sekretariat Dprd	306
4.1.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	306
4.1.5.1	Perencanaan	306
4.1.5.2	Keuangan.....	306
4.1.5.3	Kepegawaian	307
4.1.5.4	Pendidikan Dan Pelatihan.....	307
4.1.5.5	Penelitian Dan Pengembangan	307
4.1.6	Unsur Pengawasan	307
4.1.6.1	Inspektorat	307
4.1.7	Unsur Kewilayahan	307
4.1.7.1	Kecamatan Administrasi	307
4.1.8	Unsur Pemerintahan Umum	308
4.1.8.1	Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	308
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	353

BAB V	PENUTUP.....	380
5.1	Pedoman Transisi.....	381
5.2	Kaidah Pelaksanaan	381

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030	11
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara	28
Tabel 2.2	Luas Wilayah dan Jenis Tanah di Kabupaten Konawe Utara	30
Tabel 2.3	Keadaan Curah Hujan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.....	31
Tabel 2.4	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	32
Tabel 2.5	Data Capaian Komoditas Sektor Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2023	36
Tabel 2.6	Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2023	36
Tabel 2.7	Komoditas Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2023	38
Tabel 2.8	Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030	39
Tabel 2.9	Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030	40
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	48
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.....	49
Tabel 2.12	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.....	50
Tabel 2.13	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	51
Tabel 2.14	Perkembangan IPM Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	52
Tabel 2.15	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara	55

Tabel 2.16	Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Konawe Utara.....	58
Tabel 2.17	Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) di Kabupaten Konawe Utara.....	60
Tabel 2.18	Perkembangan Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Konawe Utara	62
Tabel 2.19	Perkembangan PDRB Perkapita di Kabupaten Konawe Utara	64
Tabel 2.20	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara	67
Tabel 2.21	Cakupan Kepesertaan Ketenagakerjaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2024	75
Tabel 2.22	Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024.....	84
Tabel 2.23	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024.....	88
Tabel 2.24	Jumlah Rumah Berdasarkan Kelayakan di Rinci Per Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2024	90
Tabel 2.25	Status Desa di Kabupaten Konawe Utara Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024	92
Tabel 2.26	Kondisi PAUD di Kabupaten Konawe Utara	104
Tabel 2.27	Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Konawe Utara	105
Tabel 2.28	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 - 2024.....	106
Tabel 2.29	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022-2024.....	107
Tabel 2.30	Sekolah Terakreditasi di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 ..	107
Tabel 2.31	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Utara	108
Tabel 2.32	Rasio Posyandu Per 1000 Balita di Kabupaten Konawe Utara	109

Tabel 2.33	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara	110
Tabel 2.34	Penilaian Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Konawe Utara	110
Tabel 2.35	Rasio Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes di Kabupaten Konawe Utara	112
Tabel 2.36	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara.....	112
Tabel 2.37	Rasio Jumlah Dokter Per Jumlah 1000 Penduduk di Kabupaten Konawe Utara.....	113
Tabel 2.38	Rasio Tenaga Medis Per Jumlah 1000 Penduduk di Kabupaten Konawe Utara.....	113
Tabel 2.39	Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara	114
Tabel 2.40	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Konawe Utara	115
Tabel 2.41	Anka Kesakitan di Kabupaten Konawe Utara	116
Tabel 2.42	Persentase PHBS di Kabupaten Konawe Utara	116
Tabel 2.43	Pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.....	117
Tabel 2.44	Jumlah Balita Pendek (stunting) di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2024	119
Tabel 2.45	Panjang Jalan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024....	121
Tabel 2.46	Kondisi Jalan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023	121
Tabel 2.47	Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024.....	122
Tabel 2.48	Daerah Irigasi Yang Teraliri Dengan Baik di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	123
Tabel 2.49	Tingkat Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023	124
Tabel 2.50	Penyediaan Air Minum Menurut Sumbernya di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023	126

Tabel 2.51	Pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023.....	127
Tabel 2.52	Ketersediaan Sarana Perumahan Kabupaten Konawe Utara	127
Tabel 2.53	Proyek Kebutuhan Rumah setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara.....	128
Tabel 2.54	Ketersediaan Prasarana Perumahan Kabupaten Konawe Utara ...	129
Tabel 2.55	Luas Kawasan Pemukiman Kumuh Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021.....	130
Tabel 2.56	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023.....	132
Tabel 2.57	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	133
Tabel 2.58	Pelaksanaan SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.....	133
Tabel 2.59	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023	135
Tabel 2.60	Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.....	135
Tabel 2.61	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023-2024	136
Tabel 2.62	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023-2024.....	137
Tabel 2.63	Pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024.....	138
Tabel 2.64	Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan PA di Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2024.....	138
Tabel 2.65	Jumlah korban berdasarkan jenisnya Tahun 2021-2023	139
Tabel 2.66	Partisipasi Perempuan Dalam Berpolitik Tahun 2020-2024.....	140
Tabel 2.67	Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024.....	142

Tabel 2.68	Perkembangan Status Hak Tanah di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2023	142
Tabel 2.69	Kinerja Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024.....	143
Tabel 2.70	Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022-2024	145
Tabel 2.71	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	145
Tabel 2.72	Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	146
Tabel 2.73	Kepersertaan Keluarga Berencana di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	147
Tabel 2.74	Jumlah Kasus Pernikahan dan Perceraian yang tercatat Tahun 2019-2024	148
Tabel 2.75	Jumlah Kampung KB di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024... .	148
Tabel 2.76	Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Konawe Utara tahun 2024.....	152
Tabel 2.77	Prasarana Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.....	153
Tabel 2.78	Kondisi Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.....	155
Tabel 2.79	Jumlah Sarana Transportasi Darat, Laut, Sungai dan Danau di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	156
Tabel 2.80	Jumlah Kecelakaan dan Korban Kecelakaan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	157
Tabel 2.81	Jumlah Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	157
Tabel 2.82	Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	158
Tabel 2.83	Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Penerapan Sistem Informasi/Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	158

Tabel 2.84	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	160
Tabel 2.85	Perkembangan Modal dan Aset Koperasi di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	160
Tabel 2.86	Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023	161
Tabel 2.87	Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023.....	161
Tabel 2.88	Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	162
Tabel 2.89	Perkembangan Olahraga di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024.....	162
Tabel 2.90	Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	164
Tabel 2.91	Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023	164
Tabel 2.92	Kondisi Pengelolaan Sub Sektor Perikanan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	166
Tabel 2.93	Kondisi Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	167
Tabel 2.94	Perkembangan Kinerja Sektor Pertanian di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	168
Tabel 2.95	Perkembangan Produktivitas Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	169
Tabel 2.96	Data Kondisi Pasar Tradisional/Rakyat di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.....	171
Tabel 2.97	Jumlah Industri Kecil Menengah di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.....	172
Tabel 2.98	Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Konawe Utara tahun 2023	173
Tabel 2.99	Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara	173

Tabel 2.100	Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara.....	174
Tabel 2.101	Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan dan Kelitbangan di Kabupaten Konawe Utara	177
Tabel 2.102	Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan.....	179
Tabel 2.103	Kondisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Konawe Utara.....	181
Tabel 2.104	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan di Kabupaten Konawe Utara... ..	181
Tabel 2.105	Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Konawe Utara	182
Tabel 2.106	Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Konawe Utara.....	184
Tabel 2.107	Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan dan Status Leveling APIP di Kabupaten Konawe Utara	184
Tabel 2.108	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	189
Tabel 2.109	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Rupiah).....	194
Tabel 2.110	Pendapatan dan Proporsi Unsur Pendapatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023	196
Tabel 2.111	Uraian Pendapatan Yang Penggunaannya Telah Ditentukan dan Belanja Tertentu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	197
Tabel 2.112	Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024.....	201
Tabel 2.113	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024.....	205
Tabel 2.114	Rasio Solvabilitas Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024... ..	205
Tabel 2.115	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Rupiah).....	210
Tabel 2.116	Analisis Proporsi Belanja Pegawai	212

Tabel 2.117	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Rupiah).....	216
Tabel 2.118	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024.....	218
Tabel 2.119	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024.....	218
Tabel 2.120	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030	221
Tabel 2.121	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030	225
Tabel 2.122	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030	226
Tabel 3.1	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029, Misi RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2045, Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029, dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029	245
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029	248
Tabel 3.3	Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 ..	256
Tabel 3.4	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029	260
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029	263
Tabel 3.6	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029	272
Tabel 4.1	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030	309
Tabel 4.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030	354

Tabel 4.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030	362
-----------	---	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	10
Gambar 1.2	Visi, Misi, Program Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	17
Gambar 1.3	Keselarasan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dan RPJMN	17
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Utara	28
Gambar 2.2	Struktur Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	33
Gambar 2.3	Potensi Mineral Logam Kabupaten Konawe Utara	34
Gambar 2.4	Cadangan Nikel Kabupaten Konawe Utara	35
Gambar 2.5	Capaian Indikator Ketahanan Energi, Air dan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023	41
Gambar 2.6	Capaian Indikator-Indikator Lingkungan Hidup Berkualitas	42
Gambar 2.7	Capaian Indeks Resiko Bencana Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023	45
Gambar 2.8	Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023	46
Gambar 2.9	Stok Karbon CO ₂ /Ha Kabupaten Konawe Utara	47
Gambar 2.10	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nasional	55
Gambar 2.11	Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023	57
Gambar 2.12	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	64
Gambar 2.13	Gini Rasio Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2024	66
Gambar 2.14	Indikator-Indikator Kesehatan Untuk Semua	69

Gambar 2.15	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2020-2024	71
Gambar 2.16	Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2020-2024	72
Gambar 2.17	Angka Melek Huruf Tahun 2020-2024	73
Gambar 2.18	Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat	74
Gambar 2.19	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2020-2023	76
Gambar 2.20	Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020-2023	77
Gambar 2.21	Indikator Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	78
Gambar 2.22	Angka Ketergantungan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	80
Gambar 2.23	Rasio PDRB Pengolahan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024.....	81
Gambar 2.24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024.....	82
Gambar 2.25	TPAK Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024.....	83
Gambar 2.26	Capaian IP-TIK Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2023	87
Gambar 2.27	Nilai IDM Kabupaten se Sulawesi Tenggara Tahun 2024	97
Gambar 2.28	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	98
Gambar 2.29	Indeks SPBE Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	100
Gambar 2.30	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	101
Gambar 2.31	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	103
Gambar 2.32	Gambaran Umum Realisasi APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)	188

Gambar 2.33	Proporsi Unsur Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Persen)	191
Gambar 2.34	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	192
Gambar 2.35	Perkembangan Pendapatan Dana Transfer Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	192
Gambar 2.36	Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	193
Gambar 2.37	Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	200
Gambar 2.38	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	208
Gambar 2.39	Proporsi Unsur Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Persen)	208
Gambar 2.40	Realisasi Unsur Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	209
Gambar 2.41	Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	217
Gambar 2.42	Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	217
Gambar 2.43	Perkembangan SILPA Tahun Berjalan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	219



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk periode 2025-2029 telah terpilih Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara, maka perlu disusun Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara : (5-241/2024));
29. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe

- Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2025 – 2045;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 - 2029.**

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan

kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

14. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara.
15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
16. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten untuk mencapai sasaran.
25. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan RPJM Desa.

BAB III TATA CARA PERENCANAAN

Pasal 3

RPJMD berorientasi pada proses, dengan menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis;
- d. atas bawah (*top down*); dan
- e. bawah atas (*bottom up*)

Pasal 4

RPJMD berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2025-2029 terdiri dari :

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, proses penyusunan RPJMD dan sistematika penyusunan

Bab II : GAMBARAN UMUM DAERAH

Sub Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat : Aspek geografi dan demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Daya Saing Daerah; serta Aspek Pelayanan Umum.

Sub Bab Gambaran Keuangan Daerah, memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis memuat: Permasalahan pembangunan daerah; dan Isu strategis daerah.

Bab III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran memuat : Visi dan Misi; dan Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah memuat: Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 1.1.

Subbab Program Perangkat Daerah memuat: Daftar program

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat: Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 7

- (1) RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renja Perangkat daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (5) RPJMD menjadi acuan Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat daerah.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (5) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.

- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan memperhatikan target kinerja RPJMD 2025-2029 yang belum tercapai, sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

BAB IX PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal Agustus 2025
BUPATI KONAWE UTARA,

ttd

IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

SAFRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 264 ayat (4) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala daerah terpilih dilantik. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD dijabarkan kedalam siklus rencana tahunan sebagai RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan beserta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman serta komitmen bersama antara semua pemangku kepentingan di Kabupaten Konawe Utara,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan teknokratik” adalah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan partisipatif” adalah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan politis” adalah dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up)” adalah hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan holistik-tematik” adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensial, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan integratif” adalah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan spasial” adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas



BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis Kabupaten Konawe Utara terletak di bagian selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara $02^{\circ}97'$ dan $03^{\circ}86'$ LS, membujur dari Barat ke Timur antara $121^{\circ}49'$ dan $122^{\circ}49'$ BT. Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 510.176 Ha atau sekitar 13,38 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan laut (termasuk perairan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan) $\pm 11.960 \text{ Km}^2$ atau 10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara. Secara administrasi Kabupaten Konawe Utara berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Routa (Kabupaten Konawe).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Laut Banda.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bondoala, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Anggaberri, Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Abuki (Kabupaten Konawe).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Utara.

Secara administratif Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 13 kecamatan. Kecamatan Wiwirano adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu $968,06 \text{ km}^2$ atau 19,34 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Motui dengan luas $61,30 \text{ km}^2$ atau hanya 1,22 persen dari luas Kabupaten Konawe Utara.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Utara



Selain itu, wilayah Kabupaten Konawe Utara juga terbagi atas 159 desa dan 11 kelurahan, dengan jumlah desa yang terbanyak terletak di Kecamatan Asera dan Oheo, yaitu masing – masing 17 desa. Sementara kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Lasolo Kepulauan, yaitu 6 desa Secara rinci klasifikasi wilayah desa di Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah		
				Desa	Kel.	UPT
1.	Sawa	Sawa	93,76	13	1	–
2.	Motui	Bende	61,3	14	1	1
3.	Lembo	Lembo	78,12	11	1	–
4.	Wawolesea	Wawolesea	139,4	9	–	–
5.	Lasolo	Tinobu	149,4	13	1	–
6.	Lasolo Kepulauan	Boenaga	62,42	6	–	–

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah		
				Desa	Kel.	UPT
7.	Molawe	Molawe	365,06	8	1	-
8.	Andowia	Andowia	863,32	14	1	-
9.	Asera	Asera	595,9	17	2	1
10.	Oheo	Linomoiyo	738,5	17	1	1
11.	Langgikima	Langgikima	476,75	11	1	-
12.	Landawe	Hialu	603,53	10	-	-
13.	Wiwirano	Lamonae	874,3	15	1	1
Total			5.101,76	159	11	4

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka Tahun 2025

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Wilayah Konawe Utara berada pada ketinggian 0 - >2000 mdpl dengan kemiringan lereng antara 0 - >40%. Kemiringan antara 25% sampai dengan >40% berada pada hulu Sungai Lasolo yang merupakan wilayah Pegunungan Matarombeo. Wilayah dengan kemiringan lereng 0-8% umumnya berada pada kaki bukit, lembah antar sungai, dan wilayah di muara-muara sungai. Wilayah dengan ketinggian >2000 meter dan kemiringan lebih dari 40% berada pada sekitar hulu Sungai Konawehea, yaitu Pegunungan Mekongga mengarah ke utara sampai Pegunungan Matarombeo umumnya berbukit hingga bergunung.

Seperti halnya dengan kondisi topografi Kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara memiliki topografi permukaan tanah yang pada umumnya bergunung, bergelombang dan berbukit yang mengelilingi dataran rendah yang sangat potensial untuk perkembangan sektor pertanian.

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Berdasarkan himpunan batuan dan pencirinya, geologi Lembar Lasusua-Kendari dapat dibedakan dalam dua lajur, yaitu Lajur Tinodo dan Lajur Hialu. Lajur Tinodo dicirikan oleh batuan endapan paparan benua dan Lajur Hialu oleh endapan kerak samudra/ofiolit, secara garis besar kedua mendala ini dibatasi oleh Sesar Lasolo.

Struktur geologi yang dijumpai di wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah sesar, lipatan dan kekar. Sesar dan kelurusan umumnya berarah barat laut-tenggara searah dengan sesar geser lurus mengiri Lasolo. Sesar Lasolo bahkan masih aktif hingga saat ini. Sesar

tersebut diduga ada kaitannya dengan Sesar Sorong yang aktif kembali pada Kala Oligosen (Simandjuntak, dkk., 1983). Sesar naik ditemukan di daerah Wawo sebelah barat Tampakura dan di Tanjung Labuandala di selatan Lasolo, yaitu beranjaknya Batuan Ofiolit ke atas Batuan Malihan Mekonga, Formasi Meluhu, dan Formasi Matano.

Adapun jenis tanah di Kabupaten Konawe Utara meliputi Latosol 116.829 Ha atau 23,35%, Podzolik 140.845 Ha atau 28,15%, Organosol 23.566 Ha atau 4,71%, Mediteran 16.961 Ha atau 3,39%, Aluvial 24.067 Ha atau 4,80% dan tanah campuran 178.071 Ha atau 35,59%.

Tabel 2.2
Luas Wilayah dan Jenis Tanah
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Tanah	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Latosol	1.168,29	23,35
2.	Podzolik	1.408,45	28,15
3.	Organosol	235,66	4,71
4.	Mediteran	169,61	3,39
5.	Aluvial	240,16	4,80
6.	Tanah Campuran	1.780,71	35,39
Jumlah		5.003,39	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032

2.1.1.4 Hidrologi dan Hidrogeologi

Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi pada kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dimana air meresap dan/atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan.

Daerah Aliran Sungai yang melalui Kabupaten Konawe Utara adalah wilayah Sungai Lasolo Sampara dengan sub wilayah sungai terdiri dari SWS Sungai Lasolo, SWA Lalindu, SWS Tinobu, SWS Sampara, dan SWS S. Lambuti. SWS Lasolo-Sampara mempunyai 63 DPS dengan jumlah total luas DPS 14.979,6 km² dan total panjang sungainya 847,2 km.

Adanya Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu dicermati sebagai potensi bagi sumber daya air untuk keperluan irigasi pertanian, energi listrik, sarana. Hal lain yang harus dicermati terkait

dengan keberadaan daerah aliran sungai yakni kerentanan terhadap bencana banjir seperti halnya yang terjadi pada titik muara sungai pertemuan Sungai Lasolo dan Sungai Landawe di perbatasan kecamatan Molawe–Asera adalah yang telah menjadi daerah banjir tahunan.

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Konawe Utara tidak jauh berbeda dengan kondisi iklim di daratan Provinsi Sulawesi Tenggara, keduanya memiliki dua musim dalam setahun (musim hujan dan musim panas). Pada musim hujan, angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudra Pasifik. Rata-rata suhu udara maksimum 33,5°C. Tekanan udara rata-rata maksimum 1.013,95 milibar dengan kelembaban udara rata-rata 87,15 persen, kecepatan angin pada umumnya berjalan normal yaitu sekitar 0,76 knot.

Pada tahun 2024, Bulan Maret merupakan bulan dengan jumlah hari hujan terbanyak yakni sebanyak 28 hari hujan dengan total curah hujan terbesar yakni sebesar 83 mm. Dalam kurun waktu kalender tahun 2024, total 227 hari diantaranya terjadi hujan dengan curah hujan 33 mm sampai hujan deras dengan intensitas 982 mm yang merupakan hujan terderas yang terjadi di bulan Desember.

Tabel 2.3
Keadaan Curah Hujan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2024

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (HH)
1.	Januari	304	16
2.	Februari	332	12
3.	Maret	83	28
4.	April	124	25
5.	Mei	397	26
6.	Juni	240	20
7.	Juli	243	27
8.	Agustus	122	19
9.	September	47	7
10.	Oktober	33	10
11.	November	99	9
12.	Desember	982	28

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (HH)
	Jumlah	3006	186
	Rata-rata	250,50	18,91

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 500.339 Ha. Penggunaan lahan terbesar adalah hutan negara seluas 350.962 Ha dan perkebunan seluas 143.086 Ha. Sebesar 0,39 persen atau sekitar 1.963 Ha dimanfaatkan sebagai lahan sawah yang luasnya mengalami penambahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Data selengkapnya penggunaan lahan di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2024

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
I.	a. Diusahakan	2.344	0,47
	b. Tidak Diusahakan	862	0,17
II.	Lahan Pertanian Bukan Sawah		
	a. Tegal/kebun	92.397	18,47
	b. Ladang/huma	23.985	4,79
	c. Perkebunan	142.033	28,39
	d. Ditanami pohon/hutan rakyat	21.095	4,22
	e. Padang penggembalaan/padang rumput	8.617	1,72
	f. Sementara tidak diusahakan	22.186	4,43
	g. Lainnya (tambak, kolam, hutan negara, dll)	63.908	12,77
III.	Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dll)	122.912	24,57
	Jumlah	500.339	500.339

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

2.1.1.7 Kontribusi Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 dari sisi transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor nampaknya mengalami sedikit perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga sektor tersebut adalah :

1. Sektor primer (62,88%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (2) Pertambangan dan Penggalian;
2. Sektor sekunder (13,86%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Industri Pengolahan; (2) Pengadaan Listrik dan Gas; (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan (4) Konstruksi.;
3. Sektor tersier (23,25%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (2) Transportasi dan Pergudangan; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Jasa Keuangan; (6) Real Estate; (7) Jasa Perusahaan; (8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (9) Jasa Pendidikan ; (10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (11) Jasa lainnya.

**Gambar 2.2 Struktur Ekonomi Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020 – 2024**



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara tahun 2025, diolah

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

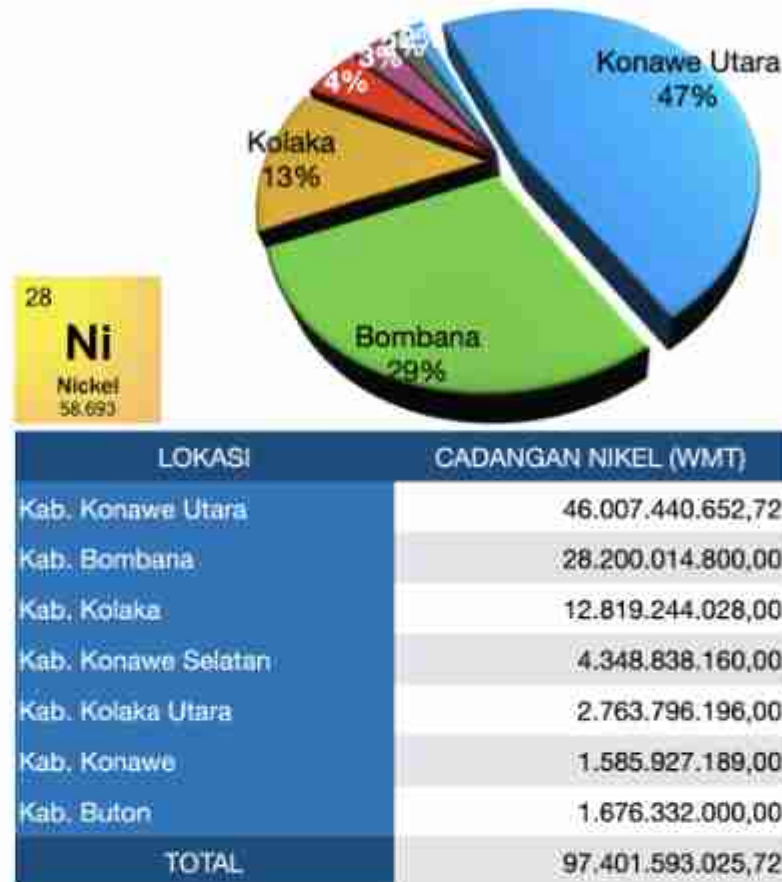
Kabupaten Konawe Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beragam, yang menjadi modal dasar dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Potensi sumber daya alam terbesar terletak pada sektor pertambangan, khususnya nikel, yang tersebar di beberapa kecamatan dan telah menarik investasi skala besar baik nasional maupun internasional. Berdasarkan data geoportal ESDM, Kabupaten Konawe Utara memiliki mineral logam (nikel) terbanyak dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gambar 2.3 Potensi Mineral Logam Kabupaten Konawe Utara



Sumber : <https://geoportal.esdm.go.id/minerba/>

Gambar 2.4 Cadangan Nikel Kabupaten Konawe Utara



Sumber : Bappeda Prov. Sultra, 2015

Potensi nikel ini telah menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah, terutama sejak meningkatnya aktivitas pertambangan dan hilirisasi mineral yang didorong oleh kebijakan nasional. Keberadaan kawasan industri pertambangan juga menjadi magnet investasi dan membuka peluang percepatan pembangunan infrastruktur penunjang. Selain sektor pertambangan, sektor penopang utama PDRB terbesar di Kabupaten Konawe Utara yaitu pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Pada sektor Pertanian memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur perekonomian daerah serta menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat di wilayah pedesaan. Potensi ini tercermin dari ketersediaan lahan yang relatif luas dan subur, iklim yang mendukung sistem tanam sepanjang tahun, serta keberagaman komoditas yang dapat dikembangkan baik pada subsektor tanaman pangan, perkebunan, maupun hortikultura,. Berikut data capaian komoditas sektor pertanian, perkebunan dan hortikultura di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.5 Data Capaian Komoditas Sektor Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kab. Konawe Utara Tahun 2021 - 2023

No	Uraian	Luas Panen (Ha)			Produktivitas (Ton/Ha)			Produksi (Ton)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Padi	2.155,96	2.261,20	2.296,85	3,5	4,0	3,5	7.588,82	9.142,98	8.103,40
2	Jagung	917	736	197	4,7	6,1	5,2	4.393	4.511	1.033
3	Kedelai	18	255	85	1,5	1,6	1,3	28	432	113
4	Kacang Tanah	80	55	83	7,0	10,5	9,5	57	58	79
5	Ubi Jalar	12	7	2	10,2	8,0	9,0	117	53	18
6	Kacang Hijau	39	24	17	8,5	7,8	7,7	33	19	13
7	Cabai Besar	8	7	12	10	17,8	18,1	800	1.250	2.180
8	Bawang Merah	22	13	8	7,4	7,5	7,5	1.645	975	600
9	Cabai Rawit	44	26	30	20,6	21,2	16,5	10.400	5.525	4.955
10	Tomat	31	36	22	28,9	26	19,5	8.961	9.360	4.300
11	Bayam	51	78	61	12,9	11,0	12,0	6.601	8.590	7.330
12	Kangkung	66	91	64	10,9	11,3	11,8	7.229	10.320	7.555
13	Kubis	0	10	5	0	16,5	20,0	0	1.650	1.000

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, 2024.

Untuk sektor perikanan juga memiliki potensi yang menjanjikan dalam pembangunan perekonomian daerah, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pada produksi perikanan tangkap, potensi sumber daya ikan laut tergolong melimpah dengan komoditas utama seperti teri, kembung dan lemuru. Aktivitas nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap tradisional masih mendominasi, namun peningkatan kapasitas armada, sarana pendukung pelabuhan perikanan, serta akses pasar menjadi kunci dalam mendorong volume produksi dan daya saing hasil tangkapan. Berikut data produksi perikanan tangkap Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.6 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 – 2023

No	Kelompok Ikan	Volume (Ton)			Nilai (Rp. Juta)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Alu-Alu	201,96	68,86	236,13	201,96	1.509,00	4.722,00
2	Baronang	176,50	376,93	93,36	176,50	13.192,00	3.734,00
3	Belanak	192,91	201,65	169,23	192,91	4.157,00	4.231,00
4	Beloso	3,17	34,59	24,92	3,17	865,00	623,00
5	Betok	24,53	20,81	17,08	24,53	416,00	598,00

No	Kelompok Ikan	Volume (Ton)			Nilai (Rp. Juta)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
6	Cakalang	67,98	17,83	14,90	67,98	334,00	335,00
7	Cumi-Cumi	204,38	146,45	92,00	204,38	5.095,00	2.760,00
8	Ekor Kuning	523,61	378,53	428,42	523,61	10.494,00	12.187,00
9	Gabus	112,09	180,95	145,45	112,09	4.524,00	5.818,00
10	Gurita	6,95	30,13	0,54	6,95	753,00	16,00
11	Kakap	363,58	459,70	266,19	363,58	16.559,00	11.674,00
12	Kembung	1.344,54	1.326,63	561,70	1.344,54	33.166,00	14.042,00
13	Kepiting	103,85	123,22	75,44	103,85	4.747,00	2.656,00
14	Kerang	444,00	416,00	305,20	444,00	2.696,00	1.526,00
15	Kerapu	271,59	329,77	156,96	271,59	12.533,00	6.346,00
16	Kurisi	207,92	781,26	542,23	207,92	16.902,00	5.910,00
17	Kuwe	610,77	828,86	371,76	610,77	29.010,00	14.870,00
18	Layang	444,02	210,68	169,39	444,02	3.912,00	3.388,00
19	Lele	30,52	17,39	13,01	30,52	391,00	390,00
20	Lemuru	1.160,40	1.937,15	3.145,40	1.160,40	19.371,00	25.829,00
21	Lencam	196,61	134,97	279,42	196,61	3.374,00	8.383,00
22	Lobster	1,84	0,31	0,46	1,84	20,00	136,00
23	Manfish	154,08	147,80	48,68	154,08	2.956,00	974,00
24	Mas	18,97	7,37	3,54	18,97	258,00	152,00
25	Mujair	111,67	185,48	161,55	111,67	4.976,00	6.462,00
26	Nila	83,48	14,46	29,78	83,48	404,00	1.191,00
27	Pari	17,23	1,36	3,96	17,23	34,00	99,00
28	Peperek	615,25	781,25	976,14	615,25	12.517,00	19.523,00
29	Rajungan	29,94	37,47	19,26	29,94	1.456,00	771,00
30	Sebelah	104,01	40,20	18,37	104,01	804,00	551,00
31	Selar	704,84	787,11	129,21	704,84	15.742,00	2.584,00
32	Sepat	20,79	37,00	31,87	20,79	740,00	1.116,00
33	Sidat	0,31	0,99	0,50	0,31	59,00	40,00
34	Sotong	103,42	8,40	4,79	103,42	280,00	144,00
35	Tardore	297,87	142,01	75,20	297,87	2.840,00	1.880,00
36	Tenggiri	114,70	245,05	135,73	114,70	14.145,00	7.702,00
37	Teri	5.962,98	4.454,41	6.513,50	5.962,98	71.444,00	113.466,00
38	Udang	209,79	352,80	210,60	209,79	16.358,00	11.704,00

Sumber : <https://portaldata.kkp.go.id/>

Pada perikanan budidaya memiliki potensi strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman. Karakteristik geografis daerah yang memiliki akses terhadap perairan laut, sungai, dan danau menciptakan peluang besar dalam pengembangan berbagai komoditas budidaya perikanan, termasuk lele, bandeng, nila, udang, ikan mas dan kerapu sebagaimana data capaian komoditas perikanan budidaya sebagai berikut.

Tabel 2.7 Komoditas Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2023

No	Komoditas	2021		2022		2023	
		Volume (Ton)	Nilai (Rp Juta)	Volume (Ton)	Nilai (Rp Juta)	Volume (Ton)	Nilai (Rp Juta)
1	Lele	-	-	-	-	349,50	12.232,50
2	Nilu	1.216	42.560,35	1,14	39.897,00	987,20	34.552,00
3	Ikan Mas	808	24.245,70	791,00	23.742,00	611,10	21.388,50
4	Kakap	154	4.615,29	154,00	4.618,00	313,26	12.490,49
5	Bandeng	5.781	144.517,50	5,53	138.262,00	5.400,16	189.005,43
6	Kerapu			221,00	10.244,00	297,04	14.852,05
7	Udang	2.012	137.552,48	1,97	135.182,00	1.570,85	135.154,50
8	Ikan Lainnya	469	14.849,24	246,00	7.776,00	-	-

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, 2025

Pengembangan perikanan budidaya di Konawe Utara masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan teknologi budidaya, akses modal yang rendah, serta infrastruktur pendukung yang belum optimal. Penggunaan teknologi modern dan praktik budidaya berkelanjutan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, keterbatasan akses pasar dan rantai distribusi yang belum merata juga menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya di tingkat regional dan nasional.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Konawe Utara menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan dan keberlanjutan sumber daya alam. Daya dukung pangan Kabupaten Konawe Utara masih relatif memadai, didukung oleh ketersediaan lahan pertanian yang produktif dan potensi pengembangan komoditas unggulan seperti padi dan jagung. Namun demikian, konversi lahan pertanian ke non-pertanian, khususnya untuk pertambangan dan permukiman, perlu diwaspadai agar tidak mengganggu ketahanan pangan daerah.

Hasil kajian KLHS RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2045, menunjukkan ketersediaan pangan Kabupaten Konawe Utara masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Produksi Pangan (beras) di Kabupaten Konawe Utara mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan rincian yaitu pada tahun 2020 sebesar 6.560,7 ton, tahun 2021 sebesar 7.589,00 ton, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 9.134,00 ton, sementara kebutuhan pangan berdasarkan jumlah penduduk tahun 2022 dengan 70.314 jiwa sebesar 7.031,00 ton sehingga masih terdapat selisih sebesar 2.111,60 ton. Berikut proyeksi hasil analisis daya dukung pangan kabupaten tahun 2025 – 2030.

**Tabel 2.8 Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2025 - 2030**

Tahun	Jumlah Penduduk	Produksi Pangan Beras (Ton)	Kebutuhan Pangan (Ton)	Selisih (DP x DD)	Daya Dukung Pangan
2025	70595	10209,98	7059,55	3150,43	3,24
2026	70736	10594,47	7073,64	3520,83	3,01
2027	70948	10978,97	7094,84	3884,12	2,83
2028	71161	11363,46	7116,09	4247,38	2,68
2029	71445	11747,96	7144,51	4603,45	2,55
2030	71730	12132,45	7173,02	4959,44	2,45

Sumber : KLHS RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 – 2045

Dari sisi ketersediaan air, Kabupaten Konawe Utara memiliki sejumlah sumber air permukaan seperti sungai dan mata air. Hasil perhitungan ketersediaan air Kabupaten Konawe Utara sebesar 7.725.811.098,78 m³/tahun, sementara kebutuhan air berdasarkan jumlah penduduk mencapai 70.314.000,00 m³/tahun pada tahun 2022, sehingga masih ada selisih sebesar 7.655.497.098,78 m³/tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air masih sangat surplus. Berikut proyeksi daya dukung air Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2030 berdasarkan KLHS RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2045.

Tabel 2.9 Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2030

Tahun	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (WHO) (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Status
2025	70595	7.725.811.098,78	70.595.466,94	7.665.215.631,84	Surplus
2026	70736	7.725.811.098,78	70.736.446,51	7.655.074.652,27	Surplus
2027	70948	7.725.811.098,78	70.948.444,28	7.654.862.654,50	Surplus
2028	71161	7.725.811.098,78	71.160.865,19	7.654.650.233,59	Surplus
2029	71445	7.725.811.098,78	71.445.083,39	7.654.366.015,39	Surplus
2030	71730	7.725.811.098,78	71.730.152,11	7.654.080.946,67	Surplus

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yang tercermin melalui kenaikan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP adalah indikator komprehensif yang mencerminkan sejauh mana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan, baik dari aspek ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan pangan.

Peningkatan IKP dari 70,34 pada 2019 menjadi 78,67 pada 2023 menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam berbagai aspek penyokong ketahanan pangan. Meskipun terdapat sedikit stagnasi pada tahun 2021, tren secara keseluruhan tetap menunjukkan arah yang positif.

Capaian ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Konawe Utara:

- Semakin mampu memproduksi pangan secara mandiri,
- Memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi, serta
- Meningkatkan kualitas konsumsi dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan

Gambar 2.5 Capaian Indikator Ketahanan Energi, Air dan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 - 2023



Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek ketahanan air, khususnya dalam penyediaan akses rumah tangga terhadap sumber air minum yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan tajam selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2019, hanya sekitar 37,71% rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Namun, pada tahun 2020, terjadi lonjakan drastis hingga 75,76%, menandakan adanya intervensi kebijakan atau proyek penyediaan air bersih yang berdampak nyata. Tren positif ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya: 81,06% di tahun 2021, 89,02% pada 2022, dan sedikit terkoreksi menjadi 87,9% di tahun 2023. Meskipun ada penurunan tipis pada tahun terakhir, capaian ini tetap mencerminkan tingkat ketahanan air yang tinggi. Kemajuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Konawe Utara kini telah menikmati akses air bersih yang aman dan layak konsumsi, yang merupakan faktor penting dalam mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat. Ke depan, tantangan yang perlu dihadapi adalah menjaga keberlanjutan infrastruktur air bersih, pemerataan akses di wilayah terpencil, serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat memengaruhi sumber daya air.

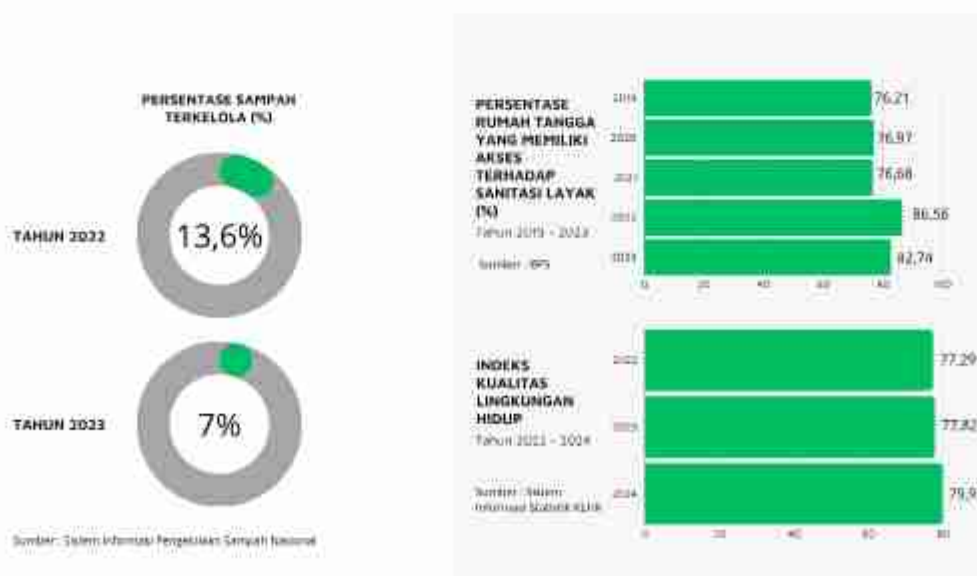
Dari sisi ketahanan energi Kabupaten Konawe Utara mencatat kemajuan signifikan yang tercermin dari tingginya rasio elektrifikasi di wilayah ini. Rasio elektrifikasi yang nyaris mencapai 100% menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Konawe Utara telah menikmati akses terhadap listrik, baik dari jaringan PLN maupun sumber non-PLN.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Konawe Utara terus menunjukkan perbaikan, salah satunya tercermin dari peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak. Sanitasi yang memadai merupakan indikator penting dalam mendukung lingkungan sehat, mencegah penyebaran penyakit, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pada tahun 2019, sebesar 76,21% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sanitasi layak. Angka ini relatif stabil hingga tahun 2021, berada pada kisaran 76–77%. Namun, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana capaian meningkat menjadi 86,56%, sebelum sedikit menurun ke 82,74% di tahun 2023. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam pembangunan infrastruktur sanitasi, seperti fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), sistem pembuangan air limbah, dan edukasi perilaku hidup bersih. Meskipun terdapat sedikit penurunan di tahun terakhir, secara keseluruhan kondisi sanitasi di Konawe Utara tergolong baik dan mendukung pencapaian lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas.

Gambar 2.6 Capaian Indikator-Indikator Lingkungan Hidup Berkualitas



Selain itu Kabupaten Konawe Utara menunjukkan tren positif dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin melalui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks ini merupakan ukuran komprehensif yang mencakup aspek kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan, serta mencerminkan keberlanjutan lingkungan dan kesehatan ekosistem.

Pada tahun 2022, IKLH Kabupaten Konawe Utara berada pada angka 77,29, dan mengalami peningkatan menjadi 77,82 di tahun 2023. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dengan indeks mencapai 79,97, mendekati ambang batas kategori "baik". Selanjutnya Pengelolaan sampah merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan signifikan, dari 13,6% pada tahun 2022 menjadi hanya 7% pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam sistem pengelolaan sampah daerah, baik dari aspek infrastruktur, kesadaran masyarakat, maupun pengawasan kebijakan lingkungan. Volume sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran tanah dan air, penyebaran penyakit, hingga penurunan estetika lingkungan permukiman.

Meskipun indeks kualitas lingkungan hidup secara umum menunjukkan tren membaik (naik dari 77,29 di 2022 menjadi 79,97 di 2024), rendahnya angka pengelolaan sampah bisa menjadi potensi penghambat dalam jangka panjang. Ketimpangan ini mengisyaratkan bahwa perbaikan di bidang lain seperti air dan udara belum sepenuhnya diimbangi oleh pengelolaan limbah padat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas layanan pengelolaan sampah, edukasi masyarakat tentang pemilahan dan daur ulang, serta pengembangan inovasi pengelolaan limbah berbasis masyarakat perlu menjadi prioritas strategis daerah. Langkah-langkah tersebut akan menjadi fondasi penting bagi Konawe Utara dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan sehat

2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan iklim

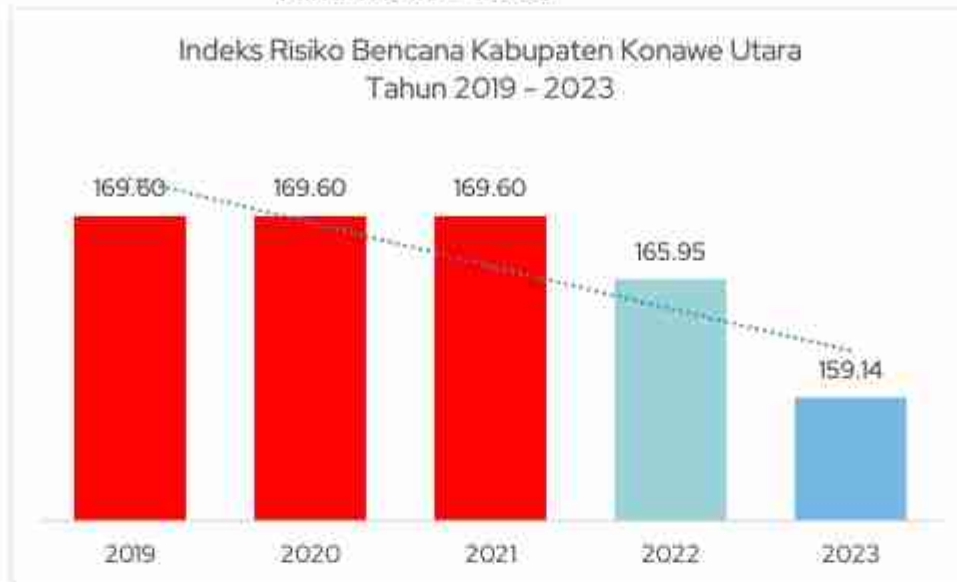
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim adalah kemampuan suatu wilayah, masyarakat, dan ekosistem dalam menghadapi, menyesuaikan, serta pulih kembali dari dampak bencana alam dan perubahan iklim secara berkelanjutan. Pembangunan yang tangguh terhadap bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya penguatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kabupaten Konawe Utara menghadapi tantangan nyata dalam membangun ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, meskipun menunjukkan beberapa indikator positif dari sisi kapasitas ekosistem.

1. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko suatu wilayah terhadap potensi bencana alam. Indeks ini mencerminkan kerentanan wilayah dalam menghadapi berbagai jenis bencana, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan kekeringan, serta kapasitas wilayah tersebut dalam melakukan mitigasi dan respons terhadap bencana. IRB disusun berdasarkan 3 komponen yaitu Bahaya (Hazard), Kerentanan (Vulnerability), dan Kapasitas (Capacity).

Indeks Risiko Bencana menjadi alat penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat menggunakan IRB sebagai dasar dalam mengidentifikasi area rawan bencana dan menyusun strategi mitigasi yang tepat, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, penguatan sistem peringatan dini, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Berikut capaian IRB Kabupaten Konawe Utara tahun 2019 – 2023.

Gambar 2.7 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 – 2023



Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Konawe Utara menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Penurunan IRB ini mengindikasikan keberhasilan program mitigasi dan adaptasi bencana di Kabupaten Konawe Utara, seiring dengan penguatan tata kelola bencana yang lebih baik. Meskipun demikian, upaya peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat risiko yang lebih rendah, terutama dengan mempertimbangkan potensi bencana alam yang beragam di Kabupaten Konawe Utara.

2. Indeks Ketahanan Pangan

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik ditingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor – faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Ada sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP yang merupakan turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Kategori IKP Kabupaten/Kota dikelompokkan dalam enam kelompok, yaitu

Prioritas 1 (Sangat Rentan), Prioritas 2 (Rentan), Prioritas 3 (Agak Rentan), Prioritas 4 (Agak Tahan), Prioritas 5 (Tahan), dan Prioritas 6 (Sangat Tahan).

Gambar 2.8 Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kab. Konawe Utara Tahun 2019 – 2023



Hasil perhitungan IKP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 – 2023 menunjukkan tren ketahanan pangan yang naik tiap tahunnya, selain itu Kabupaten Konawe Utara selalu berada dalam kelompok tahan, dan ditahun 2023 ini masuk dalam Prioritas 6 atau Sangat Tahan. Pencapaian ini mencerminkan kemampuan Kabupaten Konawe Utara dalam mengelola potensi sumber daya alamnya untuk mendukung ketersediaan pangan yang mencukupi, aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang terjamin, serta pemanfaatan pangan yang optimal dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

3. Indeks Ketahanan Daerah

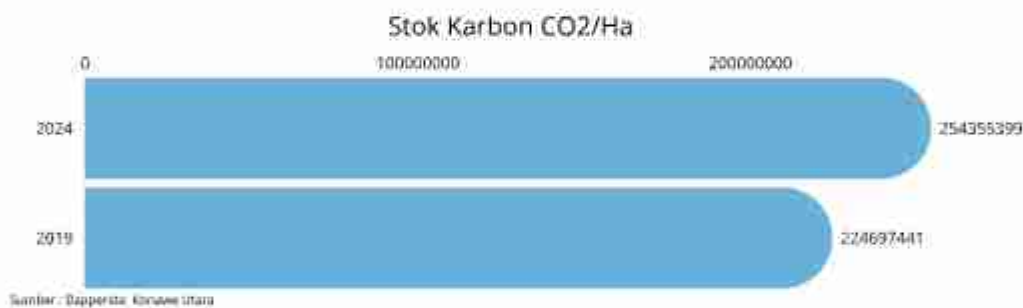
Indeks Ketahanan Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kapasitas suatu wilayah dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat alamiah seperti bencana alam, perubahan iklim, maupun non-alamiah seperti krisis sosial dan ekonomi. Indeks ini mencakup aspek-aspek utama yang mendukung daya tahan suatu daerah dalam mengantisipasi, merespons, dan pulih dari gangguan yang terjadi, sehingga mampu mempertahankan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Komponen utama dalam indeks ketahanan daerah yaitu ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan lingkungan, ketahanan infrastruktur, dan ketahanan pemerintahan.

Hingga saat ini, data Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Konawe Utara belum tersedia, sehingga analisis secara kuantitatif mengenai daya tahan wilayah terhadap bencana, perubahan iklim, dan ancaman lainnya masih belum dapat diukur secara spesifik. Meskipun demikian, penyediaan data dan pengukuran secara berkala menjadi langkah penting dalam rangka memperkuat kesiapan daerah terhadap berbagai potensi risiko.

4. Stok Karbon/Indikator Kapasitas Ekosistem

Stok Karbon merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kapasitas ekosistem dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida (CO_2) dari atmosfer. Kapasitas ini sangat relevan dalam konteks mitigasi perubahan iklim, karena karbon yang tersimpan dalam vegetasi dan tanah membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.

Gambar 2.9 Stok Karbon CO_2/Ha Kabupaten Konawe Utara



Peningkatan stok karbon CO_2/Ha dari 22.469.7441 ton (2019) menjadi 25.435.5399 ton (2024) menunjukkan bahwa kapasitas kawasan hijau atau penyerapan karbon di wilayah ini semakin meningkat. Peningkatan ini merupakan indikator positif dalam upaya mitigasi perubahan iklim, karena hutan dan vegetasi berperan penting dalam menyerap emisi karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi ekosistem yang kuat dalam hal penyerapan karbon dan ketahanan pangan yang cukup stabil. Namun, tingginya risiko bencana dan rendahnya ketahanan daerah menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara alam dengan kesiapsiagaan sosial.

2.1.7 Demografi

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 sebanyak 81.355 jiwa yang terdiri dari 41.853 jiwa laki-laki dan 39.502 jiwa perempuan, dengan angka sex rasio jenis kelamin sebesar 105,95. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun di Kabupaten Konawe Utara sebesar 3,84 persen.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
2020	35.112	32.759	67.871	107,18
2021	35.636	33.314	68.950	106,97
2022	36.305	34.009	70.314	106,75
2023	39.823	37.568	77.391	106,00
2024	41.853	39.502	81.355	105,95

Sumber : Dirangkum dari BPS, Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2019 s.d 2024

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Lasolo, Molawe, Andowia, dan Asera. Hal ini terjadi karena keempat kecamatan tersebut merupakan konsentrasi penduduk setelah Kabupaten Konawe Utara terbentuk menjadi daerah otonomi baru, selain itu kecamatan tersebut merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dilokasi tersebut.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berprespektif gender. Data pada tabel 2.6 menunjukkan jumlah penduduk perempuan semakin meningkat dan lebih banyak dari penduduk laki-laki, oleh sebab itu dalam menentukan suatu kebijakan perlu mempertimbangkan kesetaraan gender. Salah satunya

mungkin dapat memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk dapat turut berperan aktif dalam pemerintahan.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sawa	2.656	2.492	5.148
2.	Motui	3.042	2.904	5.946
3.	Lembo	3.111	2.996	6.107
4.	Lasolo	5.017	4.729	9.746
5.	Wawolesea	1.966	1.935	3.901
6.	Lasolo Kep.	1.419	1.382	2.801
7.	Molawe	3.991	3.812	7.803
8.	Asera	4.680	4.411	9.091
9.	Andowia	4.620	4.525	9.145
10.	Oheo	2.885	2.735	5.620
11.	Langgikima	3.460	3.031	6.491
12.	Wiwirano	3.206	2.945	6.151
13.	Landawe	1.800	1.605	3.405
TOTAL		41.853	39.502	81.355

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

Ditilik dari kepadatan penduduk kecamatan, penyebaran penduduk belum merata. Kecamatan dengan luas wilayah yang lebih kecil mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki luas wilayah lebih besar, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.12
Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tahun 2024			Kepadatan (jiwa/km ²)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sawa	93,76	2.656	2.492	5.148	54,91
2	Motui	61,3	3.042	2.904	5.946	97,00
3	Lembo	78,12	3.111	2.996	6.107	78,17
4	Lasolo	139,4	5.017	4.729	9.746	69,91
5	Wawolesea	149,4	1.966	1.935	3.901	26,11
6	Lasolo Kep.	62,42	1.419	1.382	2.801	44,87
7	Molawe	365,06	3.991	3.812	7.803	21,37
8	Asera	863,32	4.680	4.411	9.091	10,53
9	Andowia	595,9	4.620	4.525	9.145	15,35
10	Oheo	738,5	2.885	2.735	5.620	7,61
11	Langgikima	476,75	3.460	3.031	6.491	13,62
12	Wiwirano	874,3	3.206	2.945	6.151	7,04
13	Landawe	603,53	1.800	1.605	3.405	5,64
Konawe Utara		5.101,76	41.853	39.502	81.355	15,95

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025, dianalisis

Statistik penduduk menurut kelompok umur akan menggambarkan jumlah usia produktif atau non produktif di Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2024 tercatat kelompok umur di bawah 15 tahun berjumlah 21.970 jiwa yang merupakan penduduk usia sekolah, kelompok umur 20-65 tahun sebanyak 48.920 jiwa adalah penduduk usia produktif atau angkatan kerja, sedangkan lanjut usia atau kelompok umur 65+ berjumlah 2.960 jiwa.

Berdasarkan komposisi penduduk, menggambarkan bahwa jumlah penduduk produktif atau tenaga kerja di Kabupaten Konawe Utara lebih besar dari penduduk yang tidak produktif (usia sekolah dan lanjut usia). Bonus demografi ini menjadi potensi dalam proses pembangunan dalam kaitannya dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber-sumber daerah.

Tabel 2.13
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

Tingkat Umur	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)		Total
	Laki - Laki	Perempuan	
0 - 4	3,85	3,78	7,63
5 - 9	3,84	3,76	7,60
10 - 14	3,37	3,37	6,74
15 - 19	3,26	3,08	6,35
20 - 24	3,25	3,23	6,47
25 - 29	3,19	2,92	6,11
30 - 34	3,20	3,06	6,26
35 - 39	3,04	2,71	5,75
40 - 44	2,70	2,49	5,19
45 - 49	2,40	2,16	4,55
50 - 54	1,93	1,64	3,57
55 - 59	1,46	1,27	2,73
60 - 64	1,01	0,92	1,94
65 - 69	0,70	0,69	1,39
70 - 74	0,44	0,41	0,85
75 +	0,37	0,35	0,72
Jumlah	37,99	35,84	73,83

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa struktur penduduk Kabupaten Konawe Utara didominasi oleh penduduk usia sekolah dan usia produktif, sehingga diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terkait pendidikan dan ketenagakerjaan.

Proporsi penduduk Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 didominasi kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 60,13%, sementara itu penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 27%, dan kelompok usia lanjut (di atas 65 tahun) sebesar 3,64%. Penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut disebut juga penduduk non produktif. Berdasarkan komposisi tersebut, rasio beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif sebesar 50,88%, yang menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 51 orang penduduk yang belum/tidak produktif.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, dengan melalui pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. IPM menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Data IPM Kabupaten Konawe Utara terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan manusia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Meskipun menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, capaian IPM Kabupaten Konawe Utara masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pemerataan akses layanan dasar, kualitas pendidikan, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Tabel 2.14
Perkembangan IPM Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020-2024

Tahun	IPM Konawe Utara	IPM Sulawesi Tenggara	IPM Nasional
2020	69,86	71,45	71,94
2021	70,23	71,66	72,29
2022	71,10	72,23	72,91
2023	72,11	72,94	74,39
2024	72,71	73,62	75,02

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, 2025

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Konawe Utara menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih dibawah angka rata-rata provinsi dan nasional. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 69,86 pada tahun 2020 hingga mencapai 72,71 pada tahun 2024, untuk ketiga kalinya termasuk dalam kategori tinggi ($70 < \text{IPM} < 80$).

IPM Kabupaten Konawe Utara masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas MCK penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTP) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dll.

2.2.1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Konawe Utara yaitu PDRB. PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Dari PDRB dapat diketahui nilai tambah dari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi guna penyusunan atau menggariskan kebijakan lebih lanjut. Berdasarkan data BPS, sampai dengan tahun 2020, secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Utara berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan berdasarkan beberapa indikator, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi yang tumbuh cukup baik.

Namun, kondisi tersebut berubah seiring terjadinya pandemi Covid-19 pada Tahun 2021. Data Tahun 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2021 terkoreksi cukup tajam bahkan masuk kategori resesi karena pertumbuhannya minus yaitu sebesar -2,07 dan -0,65. Memasuki Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara berangsur-angsur

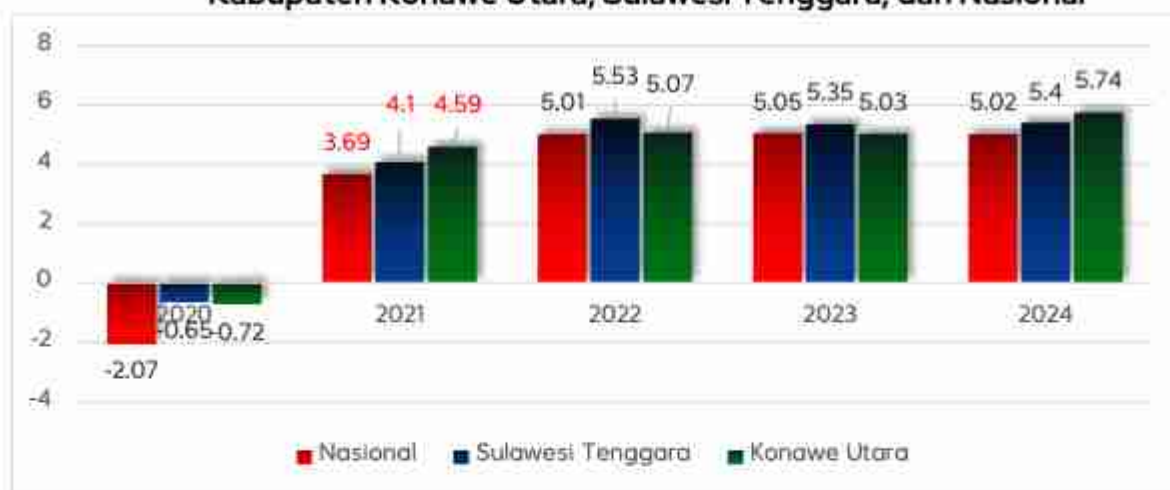
mengalami pemulihan dan mampu mengalami pertumbuhan positif. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan III-2022 terhadap triwulan III-2021 mampu mengalami pertumbuhan sebesar 3,97 persen (y-on-y).

Pemulihan ekonomi Nasional dan Sulawesi Tenggara terus berlanjut hingga tahun 2023. Ekonomi Nasional pada Triwulan IV-2023 yang tumbuh solid sebesar 5,05% (yoy). Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2023 juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (ctc). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2023, tumbuh sebesar 5,35% (yoy), sangat baik melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejalan dengan pulihnya ekonomi nasional dan Sulawesi Tenggara, Memasuki tahun 2022, perekonomian Kabupaten Konawe Utara mulai menunjukkan perubahan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mampu mencapai 5,07 persen dibanding tahun 2021 sebesar 4,59 persen. Adanya kebijakan mengizinkan kegiatan masyarakat mengakibatkan kegiatan ekonomi mulai berjalan sehingga pertumbuhan ekonomi mulai membaik. Memasuki tahun 2023, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara pada mengalami sedikit penurunan. Ekonomi tumbuh sebesar 5,07 seiring dengan pertumbuhan sektor-sektor unggulan Kabupaten Konawe Utara. Capaian ini lebih tinggi dari capain pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,05% (yoy) namun lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.

Tahun 2024, Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen seiring dengan pertumbuhan sektor-sektor unggulan Kabupaten Konawe Utara. Capaian ini lebih tinggi dari capain pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy) dan capain pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang tumbuh sebesar 5.40 persen. Visualisasi perbandingan pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Utara tahun 2020-2024 disajikan dalam Gambar berikut.

Gambar 2.10 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2025

Perekonomian Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan fluktuasi terutama pada tahun 2023 akibat badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi. Pada tahun 2021 hingga 2023 Ekonomi Kabupaten Konawe Utara menguat kembali dan berhasil tumbuh menjadi 5,07 pada tahun 2022 dan terus berlanjut mengalami peningkatan hingga mencapai pertumbuhan 5,03 persen pada tahun 2023.

Sumber utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara terutama didukung oleh kinerja pada sektor : (1) Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintahan, (2) Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (4) Jasa lainnya, dan (5) Informasi dan Komunikasi.

Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara

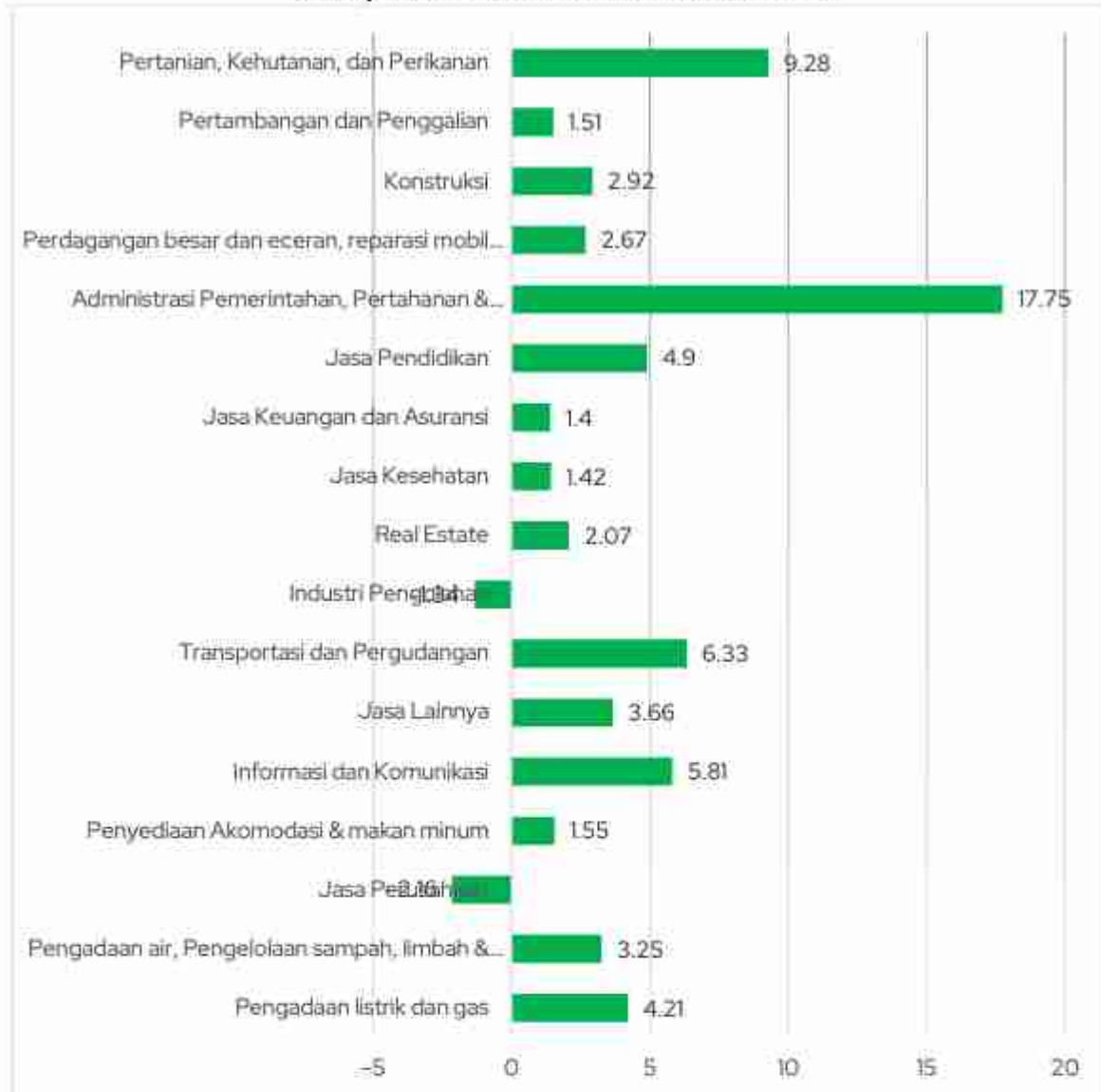
Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,03	3,63	5,92	0,34	9,28
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,98	2,41	3,80	16,28	1,51
C	Industri Pengolahan	-1,26	2,60	0,69	16,67	-1,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,57	5,92	8,20	1,27	4,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,24	4,66	0,03	2,45	3,25

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
F	Konstruksi	-0,03	8,77	4,17	5,29	2,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,08	8,26	7,66	2,94	2,67
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,53	4,48	4,68	2,51	6,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,22	5,01	8,83	7,83	1,55
J	Informasi dan Komunikasi	11,08	2,77	4,41	6,41	5,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,61	4,96	4,02	1,20	1,40
L	Real Estate	0,22	0,24	4,35	1,45	2,07
M.N	Jasa Perusahaan	-1,57	5,53	5,36	4,54	-2,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,50	3,53	- 0,06	9,90	17,95
P	Jasa Pendidikan	6,82	3,95	6,70	4,13	4,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,88	6,43	5,64	2,75	1,42
R.S.T.U	Jasa lainnya	-3,22	2,03	5,47	5,61	3,66
	Pertumbuhan PDRB	-0,72	4,59	5,07	5,03	5,74

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

Bila dilihat dari data kontribusi sektoral, perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada Tahun 2024 didominasi oleh empat sektor ekonomi, yaitu: (1) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,95 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar 9,90 persen; (2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,28 persen meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 0,34 persen, (3) Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,33 persen mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar 2,51 persen; dan (4) Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 5,81 persen menurun dibanding tahun 2023 sebesar 6,41 persen.

Gambar 2.11 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2025

Tabel 2.16
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Konawe Utara

Lapangan Usaha	PDRB 2020		PDRB 2021		PDRB 2022		PDRB 2023*		PDRB 2024**	
	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.577,46	39,77	1.693,98	39,74	1.875,60	39,08	1.944,21	36,96	2.265,73	39,70
B Pertambangan dan Penggalian	839,44	21,16	883,32	20,72	1.071,66	22,33	1.325,99	25,21	1.323,14	23,18
C Industri Pengolahan	44,64	1,13	47,30	1,11	49,50	1,03	42,21	0,80	42,26	0,74
D Pengadaan listrik dan gas	0,11	~0,00	0,21	~0,00	0,13	~0,00	0,14	~0,00	0,15	~0,00
E Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah & Daur ulang	1,39	0,04	1,48	0,03	1,51	0,03	1,58	0,03	1,66	0,03
F Konstruksi	542,42	13,68	602,06	14,12	664,06	13,84	719,71	13,68	747,30	13,09
G Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	469,32	11,83	514,01	12,06	585,55	12,20	633,15	12,04	668,67	11,72

Lapangan Usaha		PDRB 2020		PDRB 2021		PDRB 2022		PDRB 2023*		PDRB 2024**	
		(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)
H	Transportasi dan Pergudangan	11,92	0,30	12,56	0,29	14,06	0,29	14,94	0,28	16,38	0,29
I	Penyediaan Akomodasi & makan minum	7,43	0,19	7,84	0,18	8,74	0,18	9,55	0,18	9,95	0,17
J	Informasi dan Komunikasi	10,94	0,28	11,56	0,27	11,98	0,25	12,57	0,24	12,99	0,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	60,93	1,54	66,72	1,57	74,22	1,55	75,98	1,44	77,66	1,36
L	Real Estate	41,59	1,05	42,19	0,99	45,80	0,95	46,82	0,89	47,88	0,84
M,N	Jasa Perusahaan	1,86	0,05	2,03	0,05	2,25	0,05	2,45	0,05	2,44	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan sosial	194,49	4,90	204,60	4,80	204,81	4,27	226,06	4,30	275,45	4,83
P	Jasa Pendidikan	103,53	2,61	109,59	2,57	121,74	2,54	132,85	2,53	142,28	2,49
Q	Jasa Kesehatan	47,60	1,20	51,56	1,21	55,09	1,15	57,86	1,10	59,03	1,03
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,15	0,28	11,64	0,27	12,55	0,26	13,75	0,26	14,14	0,25
PDRB		3.966,23	100,00	4.262,56	100,00	4.799,25	100,00	5.295,79	100,00	5.707,11	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

Tabel 2.17
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) di Kabupaten Konawe Utara

Lapangan Usaha		PDRB 2020		PDRB 2021		PDRB 2022		PDRB 2023*		PDRB 2024**	
		(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.141,74	- 1,03	1.183,22	3,63	1.253,28	5,92	1.257,60	0,34	1.374,27	9,28
B	Pertambangan dan Penggalan	590,11	- 2,98	604,35	2,41	627,35	3,8	729,48	16,28	740,53	1,51
C	Industri Pengolahan	33,39	- 1,26	34,26	2,60	34,49	0,69	28,75	- 16,67	28,36	-1,34
D	Pengadaan listrik dan gas	0,09	5,57	0,10	5,92	0,10	8,20	0,11	1,27	0,11	4,21
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah & Daur ulang	1,14	4,24	1,19	4,66	1,19	0,03	1,22	2,45	1,26	3,25
F	Konstruksi	372,32	- 0,03	404,99	8,77	421,86	4,17	444,17	5,29	457,13	2,92
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	325,45	- 1,08	352,34	8,26	379,33	7,66	390,50	2,94	400,93	2,67
H	Transportasi dan Pergudangan	9,88	- 1,53	10,33	4,48	10,81	4,64	11,08	2,51	11,78	6,33
I	Penyediaan Akomodasi & makan minum	5,15	- 0,22	5,41	5,01	5,88	8,83	6,34	7,83	6,44	1,55
J	Informasi dan Komunikasi	10,93	11,08	11,23	2,77	11,73	4,41	12,48	6,41	13,20	5,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	40,73	6,61	42,75	4,96	44,47	4,02	45,01	1,20	45,63	1,40
L	Real Estate	34,28	0,22	34,36	0,24	35,86	4,35	36,37	1,45	37,13	2,07

Lapangan Usaha		PDRB 2020		PDRB 2021		PDRB 2022		PDRB 2023*		PDRB 2024**	
		(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)
M,N	Jasa Perusahaan	1,40	- 1,57	1,47	5,53	1,55	5,36	1,62	4,54	1,59	-2,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan sosial	137,94	1,50	142,81	3,53	142,73	- 0,06	156,86	9,90	185,02	17,95
P	Jasa Pendidikan	79,06	6,82	82,18	3,95	87,69	6,70	91,31	4,13	95,78	4,90
Q	Jasa Kesehatan	35,55	9,88	37,84	6,43	39,97	5,64	41,07	2,75	41,75	1,42
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,87	- 3,22	9,05	2,03	9,55	5,47	10,08	5,61	10,45	3,66
PDRB		2.828,03	-72	2.957,88	4,59	3.107,85	5,07	3.264,06	5,03	3.451,27	5,74

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

Dari Tabel 2.11 dapat dilihat bahwa empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha konstruksi; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Oleh sebab itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, maka program kegiatan dapat diarahkan pada sektor tersebut.

Tabel 2.18
Perkembangan Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Konawe Utara

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,77	39,74	39,08	36,96	39,70
B	Pertambangan dan Penggalian	21,16	20,72	22,33	25,21	23,18
C	Industri Pengolahan	1,13	1,11	1,03	0,80	0,74
D	Pengadaan listrik dan gas	~0,00	~0,00	~0,00	~0,00	~0,00
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah, dan Daur ulang	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	13,68	14,12	13,84	13,68	13,09
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	11,83	12,06	12,20	12,04	11,72
H	Transportasi dan Pergudangan	0,30	0,29	0,29	0,28	0,29
I	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17
J	Informasi dan Komunikasi	0,28	0,27	0,25	0,24	0,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,54	1,57	1,55	1,44	1,36
L	Real Estate	1,05	0,99	0,95	0,89	0,84
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan sosial	4,90	4,80	4,27	4,30	4,83
P	Jasa Pendidikan	2,61	2,57	2,54	2,53	2,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,20	1,21	1,15	1,10	1,03
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25
TOTAL PERSENTASE PDRB (%)		100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

Dalam jangka waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian mengalami tren fluktuasi pada tahun 2020-2024 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2024, sebagai penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Konawe Utara menunjukkan trend perlambatan. Namun sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi yang sangat signifikan. Perlambatan yang terjadi pada lapangan usaha pertanian sebagai salah satu sektor primer, menunjukkan bahwa sektor sekunder dan tersier semakin mempengaruhi aktivitas perekonomian Kabupaten Konawe Utara.

2.2.1.3 PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2016-2020 senantiasa mengalami kenaikan. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2021, PDRP perkapita Kabupaten Konawe Utara mampu mengalami peningkatan sebesar 5,81% pada Tahun 2022, meningkat dari Rp. 58.437.732,02 pada tahun 2021 menjadi Rp. 61.833,081,74 pada Tahun 2022. Peningkatan ini tidak lepas dari pemulihan ekonomi serta pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Konawe Utara yang sukses mencapai predikat tertinggi persentase vaksinasi se Sulawesi Tenggara. Jika dilihat dari dua tahun terakhir, PDRB Kabupaten Konawe Utara meningkat dari Rp. 61.522.038,86 pada Tahun 2020 menjadi 61.833,081,74 pada Tahun 2022.

Tabel 2.19
Perkembangan PDRB Perkapita di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan (2010)	
	Nilai (Miliar Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Miliar Rp.)	Pertumbuhan (%)
1 2020	3.966,23	100,00	2.828,03	-0,72
2 2021	4.262,56	100,00	2.957,88	4,59
3 2022	4.799,25	100,00	3.107,85	5,07
4 2023	5.295,79	100,00	3.264,06	5,03
5 2024	5.707,12	100,00	3.451,27	5,74
Rata-rata	4.806,19	100,00	3121,81	3,94

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2025

PDRB perkapita Kabupaten Konawe Utara menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024, baik secara nominal maupun laju pertumbuhannya yang selalu bernilai positif. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Konawe Utara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

2.2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan dari 2,61 persen pada tahun 2023 menjadi 1,05 persen pada tahun 2024.

Gambar 2.12 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024



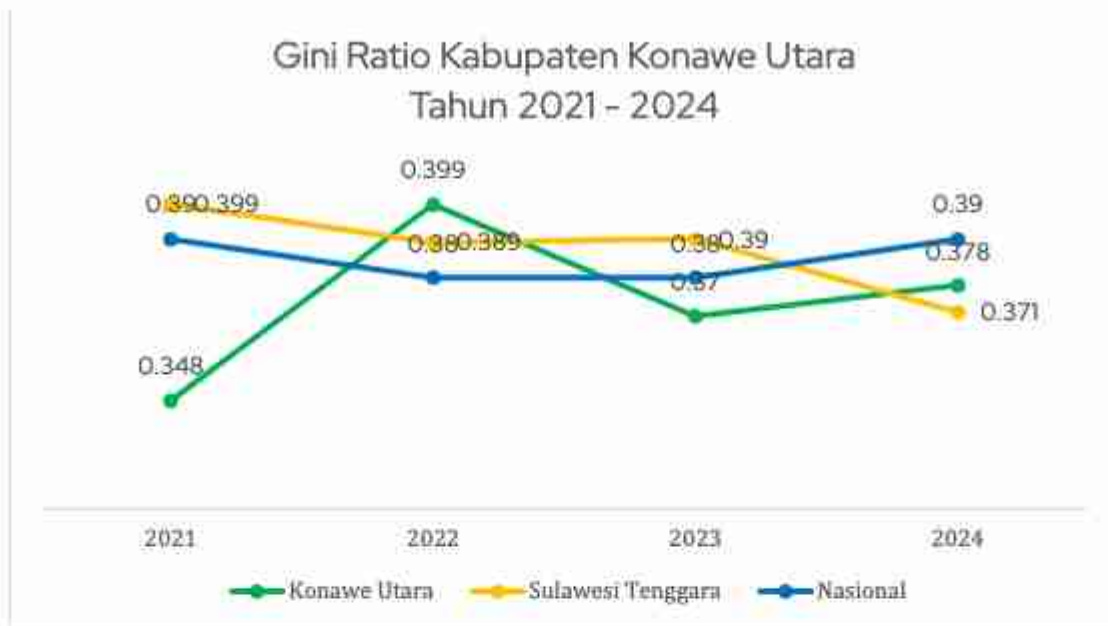
Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara tahun 2025, diolah

Inflasi di bawah 10% per tahun termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan, yang mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik (meningkatkan pendapatan dan investasi). Keberhasilan ini dipengaruhi oleh strategi efektif yang dilakukan oleh Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Konawe Utara melalui; 1). Upaya menjaga keterjangkauan harga; 2). Menjaga ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok, cadangan pangan pemerintah daerah dan kelembagaan; 3). Mendorong kelancaran distribusi melalui kerja sama perdagangan antar daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan; serta 4). Melakukan komunikasi efektif dengan perbaikan kualitas dan validitas data. Program Pengembangan Kebun Pekarangan (PPKP) yang telah berhasil dilaksanakan hingga Tahun 2024 salah satunya adalah penanaman cabai dan sayur-sayuran mampu menjadi penyetabil inflasi di Kabupaten Konawe Utara.

2.2.1.5 Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin timpang. Gambaran Perkembangan Koefisien Gini Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2024 dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional disajikan pada grafik berikut:

Gambar 2.13 Gini Rasio Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2024



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2025

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Konawe Utara, Indeks Gini Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2021-2024 mengalami perubahan yang fluktuatif. Secara keseluruhan, maka ketimpangan di Kabupaten Konawe Utara masih termasuk dalam kriteria rendah. Indeks Gini sejak tahun 2024 masih berada pada posisi 0,378 persen dimana indeks ini lebih tinggi dari indeks gini Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebesar 0,371. Indeks Gini di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 diharapkan bisa diturunkan dengan mendorong empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Konawe Utara, yaitu Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;) Sektor Transportasi dan Pergudangan; dan Sektor Informasi dan Komunikasi.

2.2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Kebutuhan dasar makanan merupakan pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2.100 kkal perkapita perhari (52 jenis komoditi), sedang kebutuhan dasar non makanan merupakan kebutuhan minimum

perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya (51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan).

Tabel 2.20
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin/Po (%)	Garis Kemiskinan/GK (Rp/Kap/Bln)
2020	67.871	8.78	13,53	305.100
2021	68.950	9.26	14,32	321.986
2022	70.314	9.02	13,72	340.061
2023	77.391	9.01	13,48	381.620
2024	81.355	8.94	13,17	407.710

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

Tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan 14,32% dan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 tingkat kemiskinan menunjukan kecenderungan menurun. Apabila dilihat dari garis kemiskinan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pengukuran dengan angka terakhir sebesar Rp. 407.710,- Hal ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin dan kesenjangan antara penduduk miskin belum mengalami perbaikan kualitas.

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan. Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain:

- Membuka peluang pertumbuhan kegiatan - kegiatan ekonomi baru yang berbasis masyarakat seperti pengembangan obyek wisata yang berbasis alam dan pengembangan usaha-usaha kuliner baru;
- Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli

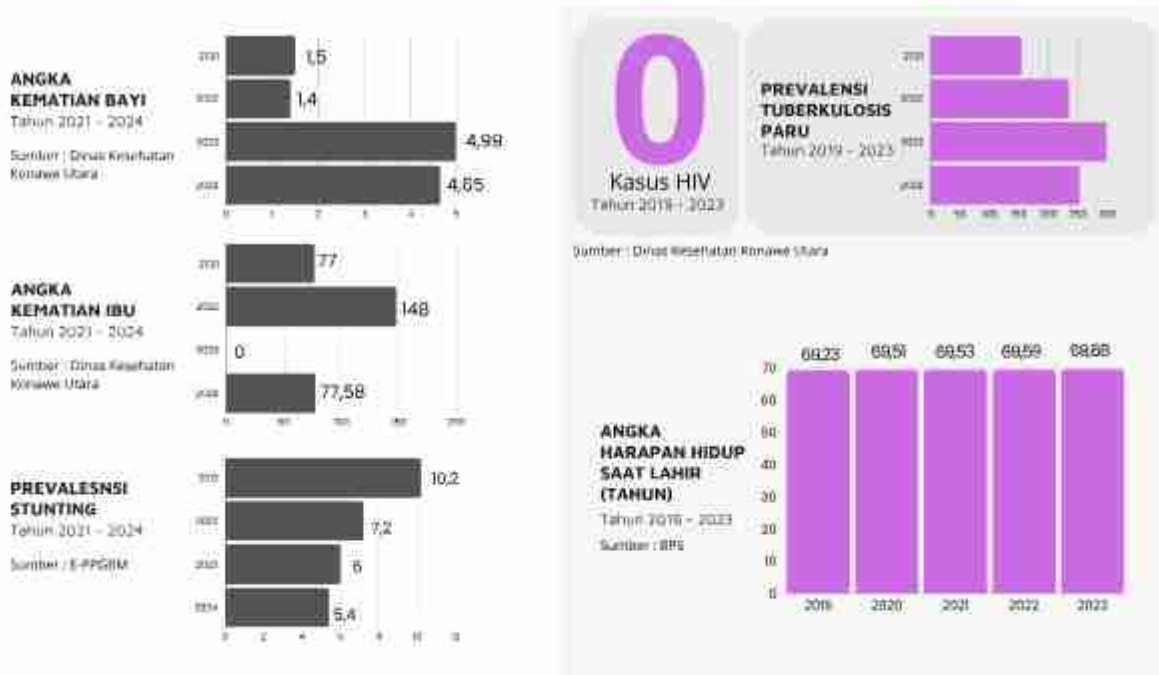
- masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
- c. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan pemberian bantuan untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;
 - d. Memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat serta pendampingan program yang berkelanjutan;
 - e. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
 - f. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, seperti pemberian beras untuk warga miskin lansia.
 - g. Pembentukan Unit Reaksi Cepat Penanggulangan kemiskinan ekstrem (URC-KIS) yang langsung menyasar target masyarakat miskin berdasarkan data P3KE by name by address diharapkan mampu menghapus kemiskinan ekstrem sampai dengan tahun 2025 di Kabupaten Konawe Utara.

Namun demikian program penanggulangan kemiskinan tersebut belum optimal karena keterbatasan jangkauan pelaksanaan program yang belum bisa menyeluruh. Jadi meskipun realisasi kinerja program dan keuangan telah tercapai 100% tetapi belum bisa secara signifikan mencapai target.

2.2.2 Kesehatan untuk semua

Kesehatan merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Paradigma "Kesehatan untuk Semua" bertujuan untuk menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Prinsip ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin ke-3 yaitu "Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan" yang menargetkan peningkatan akses layanan kesehatan dasar, penurunan angka kematian ibu dan bayi, pencegahan penyakit menular, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 2.14 Indikator – Indikator Kesehatan untuk Semua



Pembangunan kesehatan di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kemajuan yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana terlihat dari berbagai indikator kesehatan di atas. Angka Harapan Hidup Saat Lahir meningkat secara konsisten dari 69,23 tahun pada 2019 menjadi 69,68 tahun pada 2023, yang mencerminkan perbaikan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Namun demikian, perhatian besar perlu diberikan pada fluktuasi angka kematian bayi, yang melonjak dari 1,4 per 1.000 kelahiran hidup pada 2022 menjadi 4,99 pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 4,65 pada 2024. Angka ini mengisyaratkan adanya tantangan dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, terutama dalam hal deteksi dini risiko kehamilan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar.

Angka kematian ibu juga menunjukkan dinamika yang mencolok, dari 77 kasus pada 2021 melonjak ke 148 pada 2022, lalu turun drastis ke 0 pada 2023, dan kembali naik menjadi 77,58 pada 2024. Fluktuasi tajam ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa penurunan bukan disebabkan oleh pelaporan yang tidak lengkap, melainkan benar-benar mencerminkan perbaikan lapangan.

Sementara itu, prevalensi stunting mengalami tren penurunan signifikan dari 10,2% pada 2021 menjadi 5,4% pada 2024, yang menunjukkan keberhasilan program intervensi gizi dan perbaikan pola asuh anak. Di sisi lain, prevalensi tuberkulosis paru masih menjadi tantangan dengan tren yang cenderung meningkat, mencapai angka mendekati 300 kasus pada 2024. Namun, kabar baik datang dari data HIV yang menunjukkan nol kasus dari 2019 hingga 2023, menggambarkan efektivitas kampanye pencegahan dan kontrol infeksi.

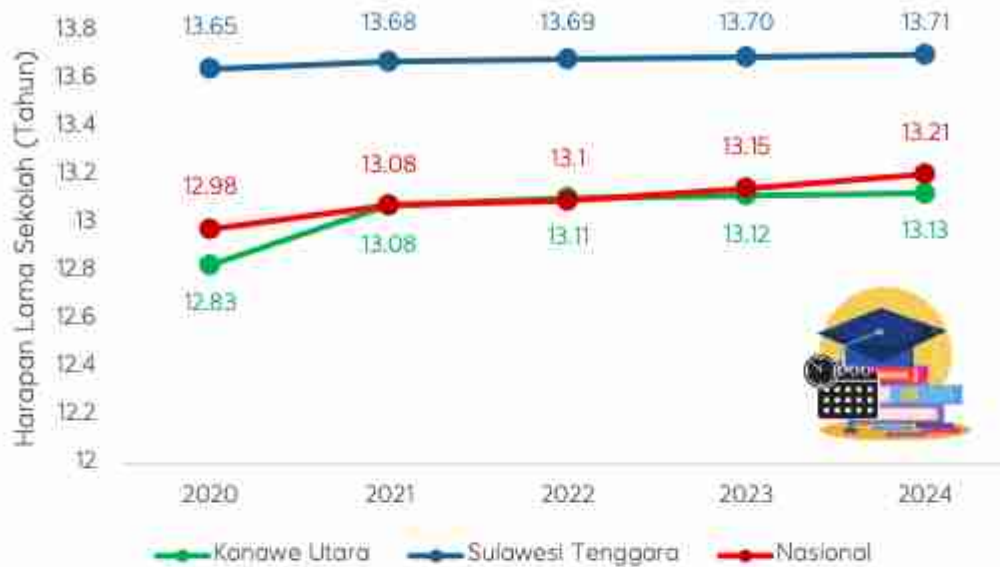
Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe Utara telah membuat kemajuan dalam mewujudkan "Kesehatan untuk Semua", terutama dalam peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka stunting. Namun, fokus dan strategi khusus masih sangat dibutuhkan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mengendalikan penyebaran penyakit menular seperti tuberkulosis. Pendekatan kolaboratif lintas sektor, peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, serta pelibatan aktif masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan kesehatan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh penduduk di Konawe Utara.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang merata

2.2.3.1 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 2.15 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2020-2024



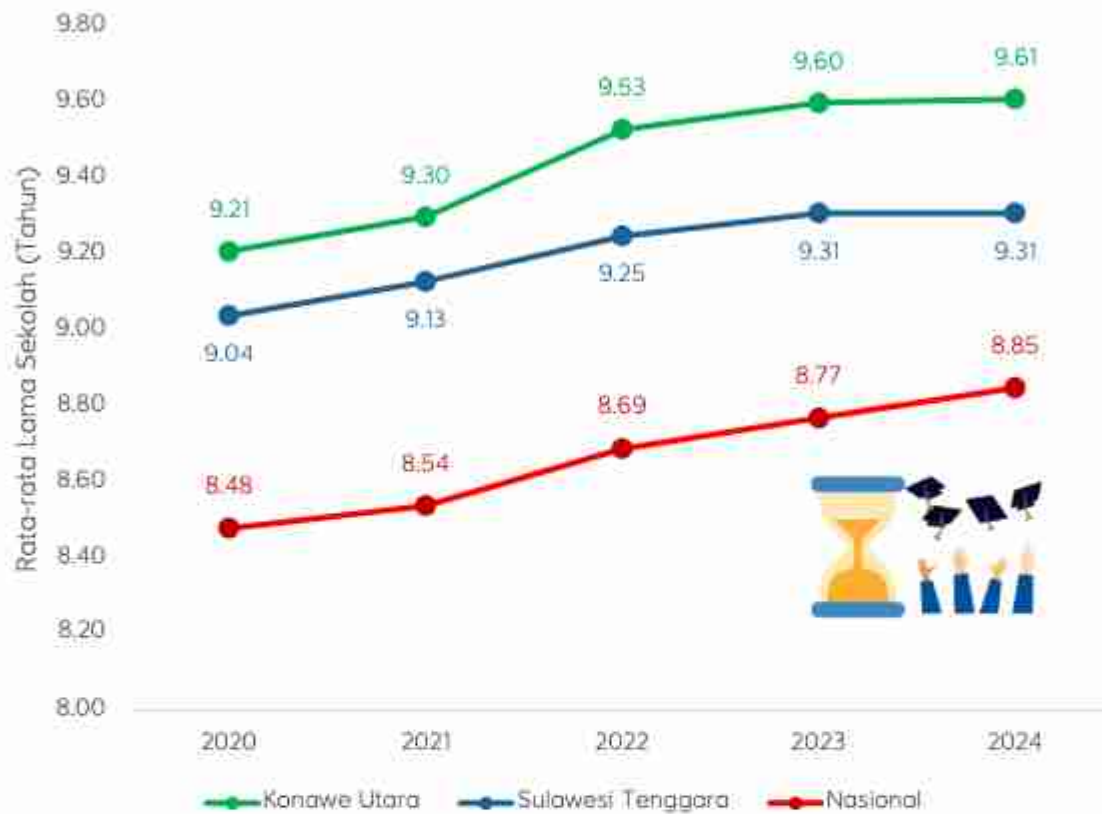
Gambar 2.10 diatas menunjukkan perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2020 sampai dengan 2024 selalu meningkat, meskipun masih dibawah angka Sulawesi Tenggara dan Nasional. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 sebesar 13,13 tahun meningkat dibanding tahun 2023. Hal ini berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,13 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma I. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mengutamakan program pembangunan di bidang pendidikan.

2.2.3.2 Angka Rata - Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara terus mengalami peningkatan, dari 9,21 pada tahun 2020 menjadi 9,61 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi

semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Konawe Utara bersekolah hanya setingkat SLTP.

Gambar 2.16 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2020-2024



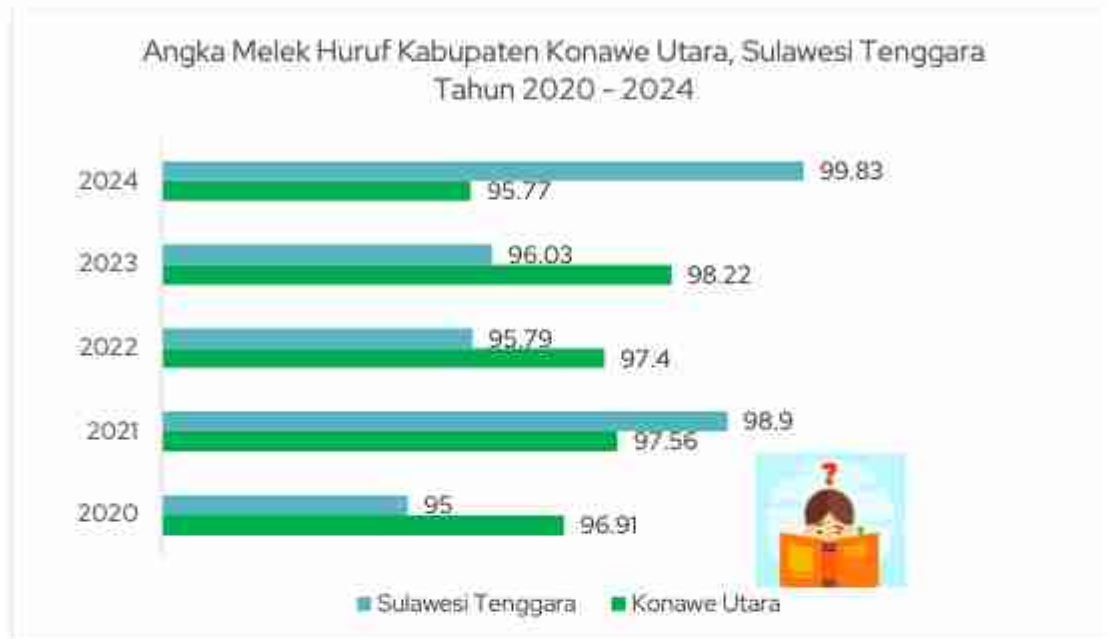
Angka Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 selalu meningkat dan berada di atas angka Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah melalui kebijakan Beasiswa untuk siswa SD – SMP – SMA dan beasiswa Konasara bagi mahasiswa perguruan tinggi.

2.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi/numerasi atau Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya, tanpa harus memahami isi dari apa yang dibaca atau ditulis. Setelah tahun 2010, Angka Melek Huruf (AMH) tidak lagi digunakan sebagai indikator dalam penyusunan Indeks Pendidikan

pada dimensi pengetahuan/tingkat Pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AMH dianggap tidak relevan untuk mengukur Pendidikan secara menyeluruh karena tidak mencerminkan kualitas Pendidikan.

Gambar 2.17 Angka Melek Huruf Tahun 2020 – 2024



Perkembangan AMH di Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2020 – 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka melek huruf tercatat sebesar 96,91%, kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 98,22% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi 95,77%, yang menandai tantangan serius dalam mempertahankan capaian literasi masyarakat. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, tren Konawe Utara pada tahun 2024 justru menunjukkan kesenjangan yang mencolok, di mana angka melek huruf provinsi mencapai 99,83%, tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Penurunan AMH Kabupaten Konawe Utara mengindikasikan perlunya penguatan program keaksaraan, khususnya bagi kelompok usia dewasa dan daerah terpencil, serta revitalisasi budaya literasi melalui kolaborasi antar instansi dan partisipasi masyarakat.

2.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia. Dengan literasi, kemampuan seseorang dalam memahami dan menarik Kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. IPLM mengukur upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kecukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan harian, jumlah perpustakaan ber-SNP, partisipasi masyarakat dalam kegiatan/promosi, dan jumlah anggota perpustakaan. Perpustakaan Nasional mengelompokkan nilai IPLM ke dalam lima kategori : Sangat Rendah (0-29,9), Rendah (30-49,9), Sedang (50-79,9), Tinggi (80-89,9) dan Sangat Tinggi (90-100).

Gambar 2.18 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat



Pada tahun 2024, Kabupaten Konawe Utara memiliki nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 48,03 dengan kategori rendah. Dari tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024, enam diantaranya mendapatkan skor < 1. Sementara itu, UPLM rasio ketercukupan tenaga perpustakaan memiliki nilai sempurna dengan skor 1. Skor 1 menunjukkan bahwa kebutuhan jumlah tenaga perpustakaan sudah terpenuhi secara optimal sesuai dengan standar

pelayanan optimal yang telah ditetapkan, sedangkan skor < 1 mengindikasikan masih perlunya perbaikan dalam meningkatkan beberapa unsur pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Konawe Utara

2.2.4 Perlindungan Sosial yang adaptif

2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Indikator Cakupan Jaminan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan instrumen perencanaan yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sistem perlindungan sosial telah mencakup tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Peningkatan cakupan kepesertaan mencerminkan penguatan daya tahan sosial ekonomi masyarakat terhadap risiko pekerjaan seperti kecelakaan kerja, kematian, maupun kehilangan penghasilan pada masa tua. Dalam kerangka pembangunan inklusif, perluasan perlindungan sosial bagi tenaga kerja menjadi elemen strategis dalam mendorong kesetaraan akses terhadap jaminan sosial, khususnya bagi kelompok rentan dan pekerja sektor informal. Kebijakan Pembangunan yang terarah dan kolaboratif, diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian sosial-ekonomi serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang menyeluruh dan berkeadilan. Berikut data jaminan kepesertaan ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.21 Cakupan Kepesertaan Ketenagakerjaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 – 2024

No	Tahun	Kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2021	7.186	593	7.779
2	2022	7.036	552	7.558
3	2023	6.942	510	7.452
4	2024	6.617	412	7.029

Berdasarkan data kepesertaan jaminan ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Utara tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan jumlah peserta baik laki-laki maupun perempuan. Penurunan jumlah peserta ini terutama terlihat signifikan pada kelompok perempuan, yang berkurang dari 593 orang pada tahun 2021 menjadi hanya 412 orang pada tahun 2024. Penurunan menjadi perhatian dalam perluasan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, khususnya bagi kelompok pekerja perempuan yang umumnya lebih rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah instrument utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian program-program kerukunan. IKUB diukur berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama. Kriteria pencapaian IKUB dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya IKUB Sangat Rendah (0-20), IKUB Rendah (21-40), IKUB Sedang (41-60), IKUB Tinggi (61-80), dan IKUB Sangat Tinggi (80-100). Karena data IKUB untuk Kabupaten Konawe Utara tidak tersedia, analisis dilakukan pada IKUB Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional.

**Gambar 2.19 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Tahun 2020 – 2023**



Berdasarkan data Capaian IKUB Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tren yang konsisten meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks ini berada di angka 67,46, setara dengan rata-rata nasional. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2023, capaian Sulawesi Tenggara terus berada di atas angka nasional, yakni 73,83 di tahun 2021, dan 74,11 pada tahun 2022. Kecenderungan positif ini menunjukkan bahwa upaya penguatan kerukunan, dialog antaragama, dan kolaborasi lintas komunitas di Sulawesi Tenggara telah membuahkan hasil, kondisi sosial yang relatif stabil menjadi modal penting dalam menjaga kohesi sosial serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif, damai, dan berkelanjutan.

2.2.5.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan alat ukur penting dalam menilai kinerja pembangunan di bidang kebudayaan secara komprehensif, meliputi tujuh dimensi utama seperti ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Konawe Utara memiliki posisi strategis dalam memperkuat identitas lokal, memperkaya wawasan kebangsaan, serta mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Meskipun data IPK Kabupaten belum tersedia, dilakukan analisis terhadap IPK Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2020 – 2023.

Gambar 2.20 Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020 – 2023

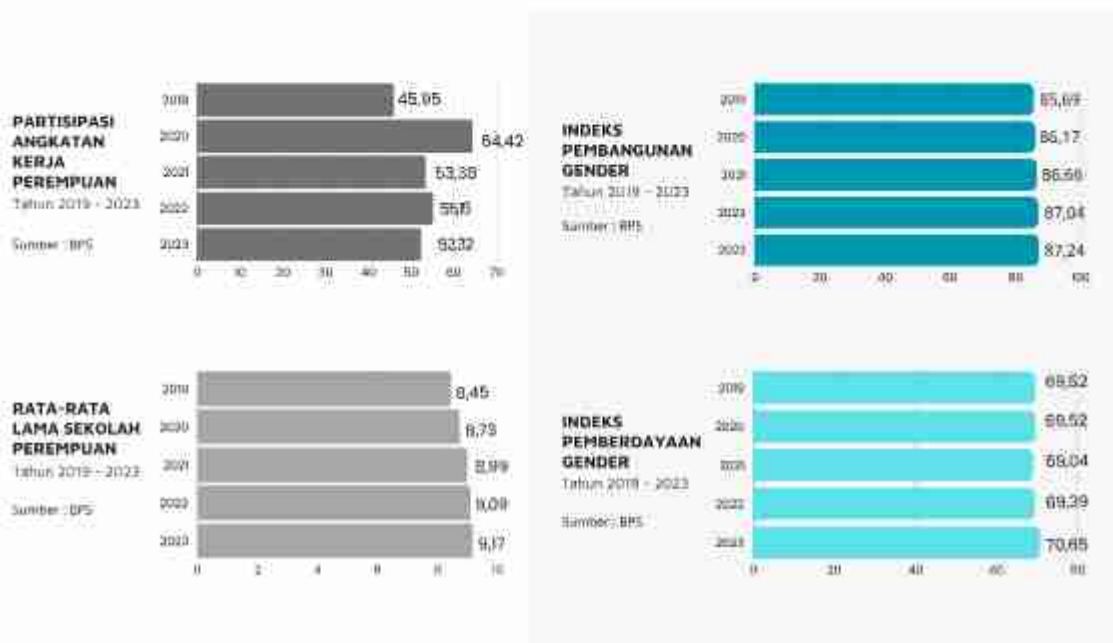


Berdasarkan data capaian IPK Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2020 s.d 2023 menunjukkan bahwa IPK Provinsi Sulawesi Tenggara masih berada dibawah angka nasional tetapi memperlihatkan adanya tren positif tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan sektor kebudayaan di daerah, yang mencakup berbagai dimensi seperti pelestarian warisan budaya, pengembangan kebudayaan lokal, serta peningkatan akses masyarakat terhadap kegiatan dan produk budaya. Potensi budaya lokal yang ada saat ini baik dalam bentuk tradisi, seni pertunjukan, kerajinan tangan, maupun nilai-nilai adat memberikan peluang besar dalam mendorong peningkatan IPK di masa mendatang dan menjadi pilar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya membangun keluarga berkualitas, mewujudkan kesetaraan gender, dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Hal ini tercermin dari meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan dari 8,45 tahun pada 2019 menjadi 9,17 tahun pada 2023. Kenaikan ini menandakan akses pendidikan yang semakin merata bagi perempuan, yang pada gilirannya berkontribusi besar terhadap kualitas keluarga, terutama dalam hal pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, serta pengambilan keputusan yang berbasis pengetahuan.

Gambar 2.21 Indikator Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif



Dari sisi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, meskipun sempat mengalami fluktuasi, terdapat peningkatan dari 45,95 persen pada 2019 menjadi 52,32 persen pada 2023. Ini menandakan semakin besarnya peran perempuan dalam aktivitas ekonomi dan semakin terbukanya ruang kerja yang inklusif bagi gender perempuan. Sejalan dengan itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga mengalami peningkatan dari 85,69 menjadi 87,24, yang mencerminkan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga menunjukkan tren positif, naik dari 69,52 menjadi 70,65 pada periode yang sama. Kenaikan IDG ini menandakan bahwa perempuan di Konawe Utara mulai mengambil peran lebih besar dalam pengambilan keputusan serta memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator-indikator ini menggambarkan bahwa Kabupaten Konawe Utara sedang berada pada jalur yang tepat dalam mendorong terwujudnya keluarga yang kuat dan berkualitas, serta menciptakan masyarakat yang lebih setara dan inklusif. Meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, tren yang positif ini perlu dijaga dan diperkuat melalui kebijakan afirmatif, program pemberdayaan perempuan, dan investasi berkelanjutan di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pembangunan yang adil dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud di tingkat lokal.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1 Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan atau penduduk berdasarkan umur menjadi salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka ketergantungan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk mendukung kehidupan penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase angka ketergantungan yang lebih rendah menunjukkan berkurangnya beban yang ditanggung oleh

penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Di Kabupaten Konawe Utara, tren angka ketergantungan selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan menurun, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, angka ketergantungan tercatat sebesar 50,88%, lalu menurun menjadi 50,45% tahun 2021 dan 50,06% tahun 2022. Namun, terjadi peningkatan kembali ke angka 50,88% di tahun 2023, sebelum akhirnya menurun secara signifikan menjadi 49,88% di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan struktur penduduk, di mana beban tanggungan terhadap kelompok usia produktif semakin berkurang. Kondisi ini dapat menjadi peluang demografis yang positif, jika diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan perluasan kesempatan kerja. Penguatan kebijakan pembangunan yang berpihak pada kelompok usia produktif dan penyediaan layanan dasar bagi kelompok usia non-produktif tetap menjadi strategi penting dalam menjaga keseimbangan demografis yang berkelanjutan.

Gambar 2.22 **Angka Ketergantungan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 - 2024**



2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi strategis dalam struktur perekonomian daerah karena kemampuannya menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. Rasio

Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan terhadap total PDB merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana industrialisasi berkembang di suatu wilayah. Di Kabupaten Konawe Utara, meskipun sektor ini belum menjadi penyumbang utama PDB daerah, tren pertumbuhannya menunjukkan potensi yang cukup menjanjikan, terutama dengan kehadiran kawasan industri berbasis pertambangan dan hilirisasi sumber daya alam.

Gambar 2.23 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024



Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konawe Utara menunjukkan tren penurunan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio PDB industri pengolahan tercatat sebesar 1,13%, kemudian sedikit menurun menjadi 1,11% di tahun 2021 dan 1,03% pada tahun 2022. Penurunan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2023 dengan rasio sebesar 0,80%, dan kembali turun menjadi 0,74% pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan belum berkembang secara optimal dan belum menjadi pendorong utama dalam struktur ekonomi daerah. Menurunnya kontribusi ini dapat disebabkan oleh terbatasnya investasi, infrastruktur pendukung industri, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Upaya strategis untuk memperkuat sektor industri pengolahan melalui pengembangan kawasan industri, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, maupun kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang berkelanjutan. Dukungan lintas sektor dan kemitraan antara pemerintah, swasta, serta

masyarakat menjadi kunci untuk membalikkan tren ini dan menjadikan industri pengolahan sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor penyediaan akomodasi makan dan minum di Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan kontribusi yang relatif kecil namun stabil. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang sebesar 0,19% terhadap total PDRB, lalu sedikit menurun menjadi 0,18% pada tahun 2021 dan bertahan pada angka yang sama hingga tahun 2023. Di tahun 2024, rasio ini mengalami penurunan tipis menjadi 0,17%. Angka tersebut menggambarkan bahwa meskipun sektor ini memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pariwisata dan konsumsi lokal, namun kontribusinya terhadap ekonomi daerah masih tergolong rendah. Hal ini dapat mencerminkan belum optimalnya pengembangan sektor kuliner, perhotelan, serta layanan akomodasi lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.24 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024



2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan Gambaran mengenai penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah penduduk yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif. Perkembangan TPAK di Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi partisipasi masyarakat usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2020, TPAK Kabupaten Konawe Utara tercatat sebesar 74,45%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 70,60% dan ditahun 2022 meskipun terdapat sedikit peningkatan namun di tahun 2023 menjadi penurunan sebesar 70,75%, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024, yaitu mencapai 78,17%, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Gambar 2.25TPAK Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024



Capaian TPAK tahun 2024 menunjukkan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, yang bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pulihnya aktivitas ekonomi pascapandemi, tumbuhnya sektor-sektor padat karya, serta adanya program pemberdayaan dan pelatihan kerja. Angka TPAK yang tinggi mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Hal ini

menjadi sinyal positif bagi pembangunan daerah karena mencerminkan optimalisasi potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Konawe Utara.

2.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator penting untuk mengukur kapasitas dan kinerja pemerintah daerah dalam mengembangkan serta mengimplementasikan inovasi di berbagai sektor pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menghadirkan solusi kreatif, efektif, dan efisien dalam menjawab tantangan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui penilaian terhadap berbagai aspek seperti kelembagaan, kebijakan, program, dan dampak inovasi, indeks diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim kompetitif antar daerah untuk terus berinovasi. Semakin tinggi nilai indeks, maka menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin adaptif dan progresif dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan reformasi birokrasi dan transformasi digital di tingkat Kabupaten. Berikut data tabel capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 -2024.

Tabel 2.22 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupten Konawe Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2024

Tahun	Indeks Inovasi Daerah			
	Konawe Utara		Sulawesi Tenggara	
2020	3	Kurang Inovatif	982	Inovatif
2021	0,4	Kurang Inovatif	25,26	Kurang Inovatif
2022	14,7	Kurang Inovatif	41,6	Inovatif
2023	17,94	Kurang Inovatif	32,85	Kurang Inovatif
2024	18,12	Kurang Inovatif	51,36	Inovatif

Berdasarkan data capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Konawe Utara, meski menunjukkan tren kenaikan namun Kabupaten Konawe Utara masih berada dalam kategori “Kurang Inovatif”. Pemerintah daerah terus berupaya mendorong penguatan ekosistem inovasi daerah, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, penyusunan regulasi daerah yang mendukung inovasi, serta penguatan peran perangkat daerah dalam menghasilkan inovasi yang dapat terukur, berdampak, dan berkelanjutan.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, penerapan ekonomi hijau dan biru menjadi strategi utama untuk memperkuat ketahanan ekosistem, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan rendah karbon. Ekonomi hijau berfokus pada pengelolaan sumber daya daratan dan energi secara berkelanjutan, sementara ekonomi biru mengutamakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir yang lestari. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Komponen utama dalam pembangunan ekonomi hijau meliputi pengembangan energi baru terbarukan (EBT), pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan lestari, efisiensi energi, pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular, dan konservasi keanekaragaman hayati. Sementara itu, ekonomi biru mencakup sektor-sektor seperti perikanan berkelanjutan, akuakultur ramah lingkungan, ekowisata bahari, konservasi ekosistem pesisir (seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang), serta pengelolaan kawasan pesisir berbasis mitigasi perubahan iklim.

Sebagai alat ukur keberhasilan implementasi kedua konsep tersebut, Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru dikembangkan untuk menilai sejauh mana pembangunan daerah memperhatikan prinsip keberlanjutan. Indeks Ekonomi Hijau mengukur kinerja daerah dalam pengelolaan sumber daya darat dan energi secara berkelanjutan, termasuk penggunaan EBT, efisiensi energi, tingkat emisi karbon, pengelolaan lahan, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Sementara itu, Indeks Ekonomi Biru menilai pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, meliputi tingkat keberlanjutan sektor perikanan, konservasi kawasan

pesisir, pengelolaan pariwisata bahari, dan adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir.

Salah satu indikator penting dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau adalah peningkatan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer. Porsi EBT menunjukkan seberapa besar kontribusi energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, dan bioenergi dalam keseluruhan konsumsi energi primer daerah. Peningkatan porsi EBT tidak hanya mendukung pencapaian target pengurangan emisi karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan energi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Di Kabupaten Konawe Utara, saat ini data indikator-indikator tersebut masih belum tersedia secara lengkap, sehingga diperlukan upaya penguatan sistem informasi lingkungan dan energi. Pengembangan basis data yang terintegrasi, pelaksanaan survei, serta kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi langkah strategis untuk membangun kerangka pengukuran yang komprehensif. Penguatan indikator ekonomi hijau dan biru akan menjadi fondasi penting dalam memastikan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

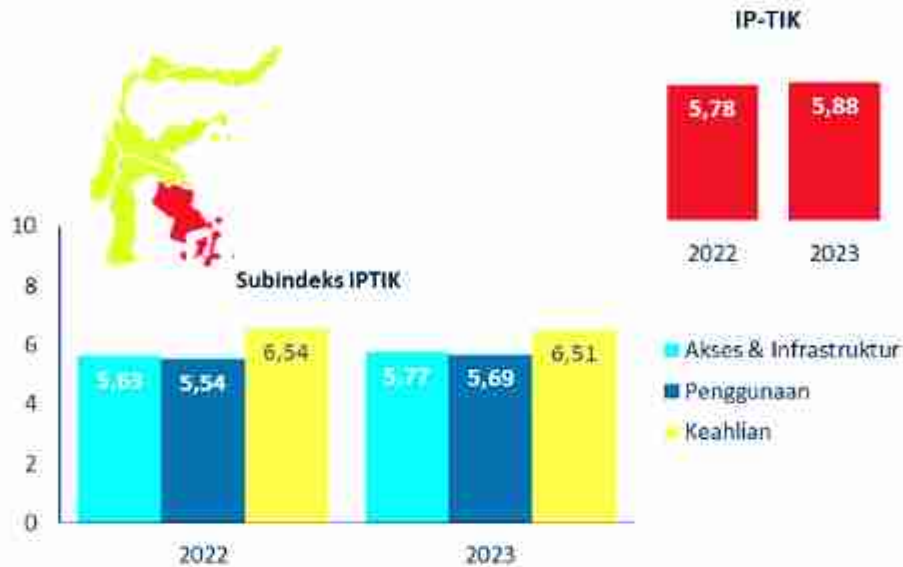
2.3.4 Transformasi Digital

2.3.4.1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesiapan dan kemajuan suatu daerah dalam menyediakan infrastruktur, akses, serta pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan. Terdapat 11 indikator dalam penyusunan IP-TIK yang terbagi menjadi 3 subindeks yaitu subindeks akses dan infrastruktur TIK, subindeks penggunaan TIK, dan subindeks keahlian. Hingga saat ini, Kabupaten Konawe Utara belum memiliki data tersendiri terkait capaian IP-TIK. Oleh karena itu, sebagai acuan awal, digunakan data capaian Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 5,78 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 5,88 pada tahun 2023. Meskipun peningkatannya bersifat gradual, peningkatan IP-TIK dalam subindeks akses dan infrastruktur, dan subindeks penggunaan TIK namun pada subindeks keahlian terjadi penurunan sebesar 0,03.

Gambar 2.26 Capaian IP-TIK Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2023

SULAWESI TENGGARA



Kondisi perkembangan saat ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Konawe Utara untuk mulai membangun sistem informasi sektoral yang terintegrasi, memperkuat infrastruktur jaringan, serta meningkatkan literasi digital masyarakat dan aparatur. Transformasi digital melalui penguatan TIK sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, pengembangan ekonomi digital, serta pemerataan akses informasi. Upaya percepatan pembangunan TIK di daerah menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, inklusif, dan berbasis data.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu indikator utama dalam analisis makro ekonomi daerah yang mencerminkan besaran investasi fisik yang dilakukan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini mencakup pengeluaran untuk memperoleh aset tetap seperti bangunan, mesin, kendaraan, serta infrastruktur lainnya

yang digunakan dalam proses produksi lebih dari satu tahun. PMTB menjadi cerminan dari tingkat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian daerah serta kapasitas penguatan struktur ekonomi jangka panjang.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam penyajian PDRB berdasarkan pengeluaran lebih menjelaskan tentang proporsi pendapatan yang diinvestasikan dalam bentuk investasi fisik. Disisi lain, komponen ini juga dapat diartikan sebagai representasi dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan untuk investasi fisik (Fiskal). Fungsi modal adalah sebagai input tidak langsung dalam proses produksi diberbagai sektor usaha. Modal ini dapat berasal dari produksi dalam negeri maupun dari impor.

Selain adanya peningkatan pada komponen konsumsi akhir baik dari rumah tangga maupun pemerintah, komponen PMTB juga terus mengalami pertumbuhan, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan 2010. Secara keseluruhan, pertumbuhan PMTB dalam periode 2020 – 2024 menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun ditahun 2020 sempat mengalami tren negatif akibat adanya pandemi Covid-19. Berikut data perkembangan dan struktur PMTB Kabupaten Konawe Utara tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.23 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan PMTB					
a. ADHB (Milliar Rp)	3.966,23	4.262,56	4.799,25	5.259,79	5.707,11
b. ADHK (Milliar Rp)	2.828,03	2.957,88	3.107,85	3.264,06	3.451,27
Proporsi PMTB terhadap PDRB (% ADHB)	26,34	26,84	26,34	26,12	25,11
Pertumbuhan PMTB terhadap PDRB (%) ADHK)	-1,21	6,51	3,81	4,47	3,47

2.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, ekspor barang dan jasa menjadi salah satu ukuran strategis yang mencerminkan kinerja dan daya saing suatu wilayah dalam perdagangan domestik maupun internasional. Indikator ini mencakup seluruh aktivitas penjualan barang seperti hasil pertanian, pertambangan, industri

pengolahan, serta jasa yang meliputi pariwisata, transportasi, dan komunikasi kepada konsumen luar negeri atau daerah lain. Peningkatan ekspor barang dan jasa menunjukkan tingginya nilai tambah dari proses produksi lokal, sekaligus memperlihatkan kapasitas daerah dalam menghasilkan produk yang kompetitif di pasar global. Hal ini juga berkontribusi terhadap peningkatan devisa daerah dan perluasan kesempatan kerja. Data Capain nilai Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 masih tergolong rendah sebesar 0,03% terhadap PDRB, hal ini menunjukkan kontribusi yang masih sangat rendah terhadap total nilai ekspor daerah.

Kondisi ini bukan semata-mata karena tidak adanya aktivitas produksi barang dan jasa yang berorientasi ekspor, melainkan lebih disebabkan oleh pola distribusi dan logistik perdagangan yang mengandalkan wilayah lain sebagai pusat pengiriman ekspor. Banyak produk unggulan yang berasal dari Konawe Utara, seperti hasil tambang, komoditas pertanian, maupun hasil laut, dikirim terlebih dahulu ke daerah lain seperti Kota Kendari atau wilayah pelabuhan besar lainnya lalu kemudian diekspor secara resmi. Akibatnya, pencatatan ekspor lebih banyak terakumulasi pada wilayah pengiriman akhir, bukan pada daerah asal komoditas. Fenomena ini menyebabkan rendahnya nilai ekspor yang tercatat secara administratif di Kabupaten Konawe Utara, meskipun secara riil daerah ini berperan dalam memasok komoditas ekspor nasional.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.6.1 Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks infrastruktur adalah salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Kota atau *City Development Index* (CDI), yang digunakan untuk mengukur kinerja Kabupaten/Kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas dasar. Fasilitas dasar yang menjadi komponen Indeks Infrastruktur meliputi air bersih, sanitasi, Listrik, dan telepon. Semakin tinggi nilai indeks infrastruktur, semakin baik tingkat pembangunan di suatu Kabupaten/Kota.

Di sisi lain, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur berfungsi sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan.

Indeks ini berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Indeks ini disusun berdasarkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, yang memberikan informasi dari perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun manfaatnya. Data lengkap mengenai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur untuk Kabupaten Konawe Utara saat ini belum tersedia.

2.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Pemenuhan akses terhadap hunian layak menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Hunian layak mencakup tempat tinggal yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan ruang, serta memiliki akses terhadap air minum bersih dan sanitasi yang layak. Indikator ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menyediakan lingkungan pemukiman yang aman, sehat, dan manusiawi. Dalam perencanaan pembangunan daerah, peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak diupayakan melalui berbagai program strategis seperti penyediaan rumah bersubsidi, bantuan stimulan perumahan swadaya, perbaikan rumah tidak layak huni, serta pembangunan infrastruktur dasar pemukiman. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas fisik perumahan, tetapi juga untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Berikut data rumah di Kabupaten Konawe Utara berdasarkan kelayakan rumah (rumah layak huni dan rumah tidak layak huni).

Tabel 2.24
Jumlah Rumah Berdasarkan Kelayakan di Rinci Per Kecamatan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2024

No.	Kecamatan	Kelayakan Rumah								Total Rumah			
		Layak Huni				Tidak Layak Huni							
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Sawa	920	942	946	962	383	367	366	367	1.303	1.309	1.312	1.329
2	Motui	754	770	782	799	678	664	652	644	1.432	1.434	1.434	1.443
3	Lembo	1344	1353	1368	1383	522	515	506	496	1.866	1.868	1.874	1.879

No.	Kecamatan	Kelayakan Rumah								Total Rumah			
		Layak Huni				Tidak Layak Huni							
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
4	Lasolo	1586	1591	1614	1634	550	553	539	527	2.136	2.144	2.153	2.161
5	Wawolesea	519	545	555	568	495	470	463	453	1.014	1.015	1.018	1.021
6	Lasolo Kepulauan	357	357	366	372	166	166	162	159	523	523	528	531
7	Molawe	1073	1078	1103	1117	351	349	333	321	1.424	1.427	1.436	1.438
8	Asera	1064	1072	1103	1129	1092	1090	1069	1051	2.156	2.162	2.172	2.180
9	Andowia	1678	1687	1709	1730	368	369	358	348	2.046	2.056	2.067	2.078
10	Oheo	387	398	424	444	903	897	876	867	1.290	1.295	1.300	1.311
11	Langgikima	990	1002	1021	1033	395	384	369	362	1.385	1.386	1.390	1.395
12	Wiwirano	1327	1335	1353	1372	466	462	452	442	1.793	1.797	1.805	1.814
13	Landawe	439	442	465	475	411	406	386	382	850	848	851	857
KONAWE UTARA		12.438	12.572	12.809	13.018	6.780	6.692	6.531	6.419	19.218	19.264	19.340	19.437

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Konawe Utara, 2025

2.3.6.3 Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks

ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi dalam memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten Konawe Utara menurut IDM, disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.25
Status Desa di Kabupaten Konawe Utara Menurut
Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI IDM 20224	STATUS IDM 2024
1	ASERA	WANGGUDU RAYA	0,7913	MAJU
		WALALINDU	0,7646	MAJU
		TANGGULURI	0,7297	MAJU
		AMOROME	0,7613	MAJU
		WAWOLIMBUE	0,6644	BERKEMBANG
		WALASOLO	0,8043	MAJU
		WUNDUHAKA	0,7243	MAJU
		TAPUWATU	0,5917	TERTINGGAL
		ASEMINUNULAI	0,6616	BERKEMBANG
		PUUNGGOMOSI	0,8137	MAJU
		PUUWANGGUDU	0,7537	MAJU
		LONGEO UTAMA	0,6702	BERKEMBANG
		KOTA MULYA	0,7592	MAJU
		AMOROME UTAMA	0,6089	BERKEMBANG
		ANEDAO	0,7165	MAJU
		ALAA WANGGUDU	0,6922	BERKEMBANG
		OHEO TRANS	0,631	BERKEMBANG
2	WIWIRANO	PADALERE	0,66	BERKEMBANG
		TETEWATU	0,7705	MAJU
		CULUMBATU	0,7032	BERKEMBANG
		WAWOHEO	0,7127	MAJU
		LAMPARINGA	0,7056	BERKEMBANG
		LAMONAE UTAMA	0,6832	BERKEMBANG
		WACUMELEWE	0,6684	BERKEMBANG

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI IDM 20224	STATUS IDM 2024
3	LANGGIKIMA	MATA OSOLE	0,8079	MAJU
		PONDOA	0,6937	BERKEMBANG
		WAWONSANGI	0,6137	BERKEMBANG
		WAWONTOAHO	0,7056	BERKEMBANG
		LAROMPANA	0,6921	BERKEMBANG
		WACU PINODO	0,7057	BERKEMBANG
		PADALERE UTAMA	0,7002	BERKEMBANG
		MOLORE	0,6571	BERKEMBANG
		LAMERURU	0,631	BERKEMBANG
		SARIMUKTI	0,7038	BERKEMBANG
		MOROMBO PANTAI	0,6416	BERKEMBANG
		POLORA INDAH	0,6875	BERKEMBANG
		PARIAMA	0,7652	MAJU
		TOBIMEITA	0,7035	BERKEMBANG
		ALENGGO	0,706	BERKEMBANG
4	MOLAWA	MEKAR JAYA	0,74	MAJU
		MOLORE PANTAI	0,6376	BERKEMBANG
		NGAPA INIA	0,6037	BERKEMBANG
		BANDAEHA	0,6943	BERKEMBANG
		AWILA	0,7213	MAJU
		MOWUNDO	0,7092	MAJU
		MANDIODO	0,6683	BERKEMBANG
		TAPUNGGAYA	0,6295	BERKEMBANG
5	LASOLO	MATAIWOI	0,739	MAJU
		AWILA PUNCAK	0,7035	BERKEMBANG
		TAPUEMEA	0,661	BERKEMBANG
		ABOLA	0,6735	BERKEMBANG
		BELALO	0,7057	BERKEMBANG
		ANDEO	0,7057	BERKEMBANG
		MATAPILA	0,6297	BERKEMBANG
		ANDUMOWU	0,837	MANDIRI
		BASULE	0,8098	MAJU
		WAWORAHA	0,6681	BERKEMBANG
		OTOLE	0,7337	MAJU
		WATUKILA	0,6921	BERKEMBANG
		LAMETONO	0,6859	BERKEMBANG
		LARODANGGE	0,6643	BERKEMBANG
		TETELUPAI	0,7552	MAJU
		LALOWARU	0,6951	BERKEMBANG
		MUARA TINOBU	0,7152	MAJU

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI IDM 20224	STATUS IDM 2024
6	LEMBO	MAROMBO PANTAI	0,6586	BERKEMBANG
		TOKOWUTA	0,694	BERKEMBANG
		ALO ALO	0,7068	BERKEMBANG
		PUULEMO	0,6048	BERKEMBANG
		PADALEU	0,7025	BERKEMBANG
		BUNGGUOSU	0,7279	MAJU
		PUUSIAMBU	0,6278	BERKEMBANG
		TAIPA	0,7225	MAJU
		TONGALINO	0,7038	BERKEMBANG
		PASIR PUTIH	0,6595	BERKEMBANG
7	SAWA	LARAMO	0,6871	BERKEMBANG
		LAPULU	0,6443	BERKEMBANG
		WATUWULA	0,6587	BERKEMBANG
		LALEMBO	0,7259	MAJU
		LAIMEO	0,6773	BERKEMBANG
		PUDONGGALA	0,7951	MAJU
		MATANGGONAWE	0,7281	MAJU
		KOKAPI	0,807	MAJU
		TONGAUNA	0,7057	BERKEMBANG
		PUUPI	0,6159	BERKEMBANG
8	OHEO	PUDONGGALA UTAMA	0,6886	BERKEMBANG
		ULU SAWA	0,7375	MAJU
		TUDUNGANO	0,7076	MAJU
		TANJUNG LAIMEO	0,6984	BERKEMBANG
		PANGGULAWU	0,7033	BERKEMBANG
		PEKAROA	0,6979	BERKEMBANG
		LARONAH	0,721	MAJU
		BANDAEHA	0,6979	BERKEMBANG
		KOTA MAJU	0,6686	BERKEMBANG
		LANDAWE	0,7421	MAJU
		WIWIRANO	0,6897	BERKEMBANG
		MOPUTE	0,7619	MAJU
		TADOLOIYO	0,7051	BERKEMBANG
		PUUHIALU	0,6783	BERKEMBANG
		SAMBANDETE	0,6917	BERKEMBANG
		PAKA INDAH	0,7029	BERKEMBANG
		LAMEORU	0,7086	MAJU
		WALANDAWE	0,6935	BERKEMBANG
		BENDEWUTA	0,7046	BERKEMBANG
		TINONDO	0,6486	BERKEMBANG

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI IDM 20224	STATUS IDM 2024
9	ANDOWIA	HOROE	0,6643	BERKEMBANG
		TADOLOIYO TRANS	0,6924	BERKEMBANG
		LAHIMBUA	0,7876	MAJU
		LARONANGA	0,6979	BERKEMBANG
		LAMBUDONI	0,6886	BERKEMBANG
		LAMONDOWO	0,6886	BERKEMBANG
		LABUNGA	0,7052	BERKEMBANG
		MATAIWOI	0,707	BERKEMBANG
		LAROBENDE	0,6846	BERKEMBANG
		PUUSULI	0,6406	BERKEMBANG
		BANGGAREMA	0,7051	BERKEMBANG
		AMOLAME	0,7052	BERKEMBANG
		ANGGOLOHIPO	0,6679	BERKEMBANG
		PUUWONUA	0,7065	BERKEMBANG
		AMBAKE	0,7046	BERKEMBANG
10	MOTUI	WAWORATE	0,7068	BERKEMBANG
		TONDOWATU	0,7176	MAJU
		MATANDAH	0,8095	MAJU
		BANGGANA	0,639	BERKEMBANG
		MOTUI	0,733	MAJU
		WAWOLURI	0,8054	MAJU
		LAMBULUO	0,6863	BERKEMBANG
		PONI PONI	0,6757	BERKEMBANG
		PUUWONGGIA	0,6573	BERKEMBANG
		PUNGGULAH	0,694	BERKEMBANG
		SAMA SUBUR	0,6808	BERKEMBANG
		RANOMBUPULU	0,6441	BERKEMBANG
		TOBIMEITA	0,7029	BERKEMBANG
		KAPOLANO	0,6992	BERKEMBANG
		SAMBASULE	0,7143	MAJU
11	WAWOLESEA	TANJUNG BUNGA	0,646	BERKEMBANG
		KAMPOH BUNGA	0,6325	BERKEMBANG
		LEMO BAJU	0,6737	BERKEMBANG
		BARASANGA	0,6832	BERKEMBANG
		WAWOLESEA	0,6605	BERKEMBANG
		TOREO	0,644	BERKEMBANG
		OTIPULU	0,6362	BERKEMBANG
		KAMPOH CINA	0,6383	BERKEMBANG
		BOENAGA	0,6125	BERKEMBANG
		WATURAMBAHA	0,6721	BERKEMBANG
12	LASOLO KEPULAUAN			

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI IDM 20224	STATUS IDM 2024
13	LANDAWE	LABENGKI	0,6183	BERKEMBANG
		MOROMBO	0,6422	BERKEMBANG
		TAPUNOPAKA	0,5848	TERTINGGAL
		BOEDINGI	0,5727	TERTINGGAL
		KURATAO	0,6679	BERKEMBANG
		LANDIWO	0,6883	BERKEMBANG
		KOLOSUA	0,6497	BERKEMBANG
		LAUMOSO	0,6971	BERKEMBANG
		HIALU UTAMA	0,7297	MAJU
		POLO-POLORA	0,666	BERKEMBANG
		TAMBAKUA	0,7054	BERKEMBANG
		MATABAHO	0,674	BERKEMBANG
		LANDAWE UTAMA	0,7068	BERKEMBANG
		MATA BENUA	0,6814	BERKEMBANG
		HIALU	0,707	BERKEMBANG
RATA - RATA IDM KONAWE UTARA 2024			0,6940	BERKEMBANG
RATA - RATA IDM KONAWE UTARA 2023			0,6545	BERKEMBANG
RATA - RATA IDM KONAWE UTARA 2022			0,6254	BERKEMBANG
RATA - RATA IDM KONAWE UTARA 2021			0,5855	TERTINGGAL
RATA - RATA IDM KONAWE UTARA 2020			0,5824	TERTINGGAL

Data ini menunjukkan bahwa IDM Konawe Utara meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,6545. Posisi IDM Kabupaten Konawe Utara dibandingkan dengan Kabupaten se Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.27

Nilai IDM Kabupaten se Sulawesi Tenggara Tahun 2024



Sumber : idm.kemendesa.go.id/idm_data

Sementara Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan analisis Tahun 2024, dari 159 desa di Kabupaten Konawe Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah yang berstatus/klasifikasi Mandiri sebanyak 1 desa;
2. Jumlah desa yang berstatus/klasifikasi Maju sebanyak 41 desa;
3. Jumlah desa yang berstatus/klasifikasi berkembang sebanyak 114 desa;
4. Jumlah desa yang berstatus/klasifikasi tertinggal sebanyak 3 desa;
5. Tidak ada desa yang berstatus/klasifikasi sangat tertinggal;
6. Berdasarkan ranking IDM, tiga desa dengan skor tertinggi adalah Desa Andumowu Kecamatan Lasolo (0,837); Desa Puunggomosi Kecamatan Asera (0,8137); dan Desa Basule Kecamatan Lasolo (0,8098). Adapun desa dengan nilai terendah adalah Desa Boedingi Kecamatan Lasolo Kepulauan (0,5727); Desa Tapunopaka Kecamatan Lasolo Kepulauan (0,5848); dan Desa Tapuwatu Kecamatan Asera (0,5917).

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB, Tingkat Inflasi

Rasio Pajak Daerah menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sumber pajak, seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Di Kabupaten Konawe Utara, Rasio pajak daerah tetap menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas kebijakan fiskal dan kemandirian daerah. Berikut data rasio pendapatan pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara.

Gambar 2.28 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024



Berdasarkan data capaian, menunjukkan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara menunjukkan tren fluktuasi dalam periode 2020 hingga 2024. Data tahun 2020, rasio tercatat sebesar 0,3014%, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 0,1349%. Penurunan ini mencerminkan menurunnya kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total PDRB yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap aktivitas usaha dan penerimaan daerah.

Memasuki tahun 2022, rasio kembali meningkat menjadi 0,1707% seiring dengan mulai pulihnya kegiatan ekonomi, dan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Potensi optimalisasi pajak daerah Kabupaten Konawe Utara masih besar, dan perlu upaya lebih lanjut dalam memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperbaiki tata kelola pemungutan pajak daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

2.4 Aspek Layanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten merupakan instrumen pengukuran kinerja pembangunan hukum daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana upaya perbaikan regulasi, tata kelola, dan pelayanan publik berbasis hukum telah dilaksanakan. Peningkatan capaian Indeks Reformasi Hukum menjadi salah satu fokus pembangunan daerah dalam rangka memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Aspek yang diukur dalam indeks ini mencakup penyusunan regulasi yang berkualitas, penguatan kelembagaan hukum, penyederhanaan birokrasi berbasis peraturan, serta pemberdayaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Melalui penguatan reformasi hukum, Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelayanan, memperbaiki iklim investasi, dan memperkuat perlindungan hak masyarakat, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pencapaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 sebesar 66,4 dengan kategori Cukup Baik, ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan akuntabel di tingkat daerah.

Nilai indeks ini merepresentasikan kinerja pada beberapa dimensi, antara lain: kualitas regulasi daerah, efektivitas implementasi hukum, akses masyarakat terhadap keadilan, serta tata kelola kelembagaan hukum. Meskipun demikian, capaian ini juga menandakan masih terdapat ruang perbaikan dalam memperkuat harmonisasi regulasi, memperluas literasi hukum masyarakat, serta meningkatkan kapasitas aparat hukum daerah.

2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan ukuran tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan instansi pemerintah daerah. Indeks ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penguatan SPBE menjadi instrumen strategis untuk mendorong digitalisasi layanan publik, integrasi sistem pemerintahan, dan penguatan inovasi berbasis teknologi. Pengukuran indeks SPBE meliputi beberapa domain utama, antara lain kebijakan internal, tata kelola, manajemen SPBE, layanan SPBE, dan infrastruktur pendukung. Berikut data capaian SPBE Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 - 2024.

Gambar 2.29 Indeks SPBE Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024



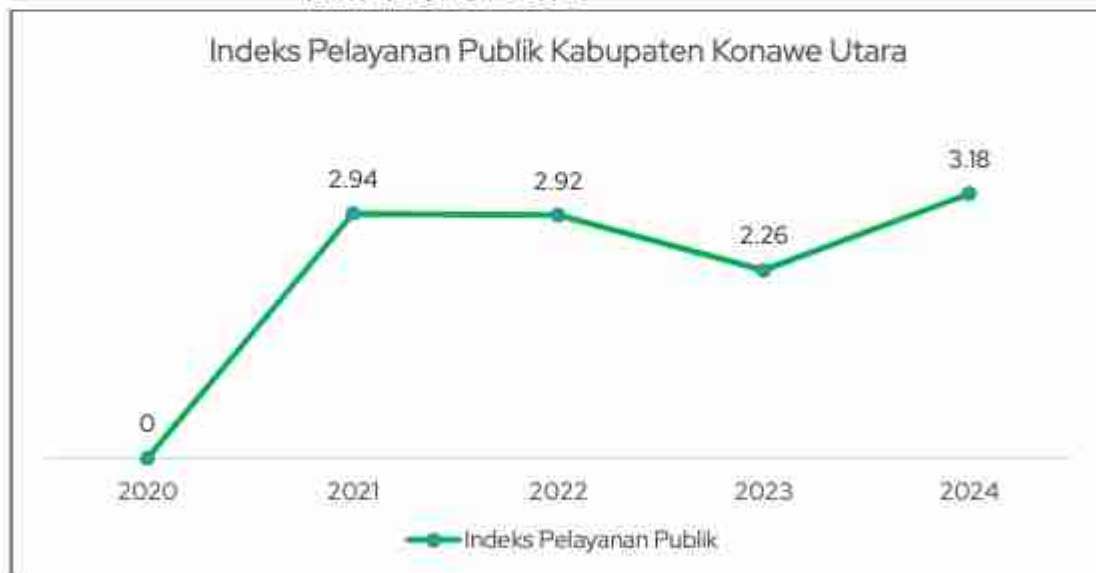
Pencapaian Indeks SPBE Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini karena adanya penguatan penerapan SPBE, termasuk dalam aspek interoperabilitas sistem, ketersediaan aplikasi layanan publik, peningkatan kompetensi SDM TIK, serta penguatan aspek keamanan informasi dan manajemen data. Walaupun hasil capaian Indeks SPBE Kabupaten Konawe Utara menunjukkan tren yang cukup baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan

standar layanan elektronik yang optimal sesuai dengan arah kebijakan nasional dibidang pemerintahan digital.

2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, khususnya unit pelayanan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penilaian IPP dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2017. Hasil IPP diklasifikasikan dalam beberapa kategori: Pelayanan Prima (nilai 4,50–5,00), Sangat Baik (4,00–4,49), Baik (3,50–3,99), Cukup (3,00–3,49), dan Kurang (di bawah 3,00). Nilai IPP tidak hanya mencerminkan kualitas teknis pelayanan, tetapi juga menjadi acuan dalam reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Gambar 2.30 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 - 2024



Berdasarkan data capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 - 2024, menunjukkan tren yang fluktuatif ditahun 2024 capaian IPP Kabupaten Konawe Utara sebesar 3,18 dengan kategori Cukup. Peningkatan capaian IPP di Kabupaten

Konawe Utara, menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung visi penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain itu capaian IPP menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi celah-celah perbaikan dalam merancang strategi peningkatan mutu layanan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan warga.

2.4.2 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen evaluatif yang dikembangkan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam mengelola seluruh sumber daya strategis secara efektif, efisien, dan produktif guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. IDSD disusun berdasarkan kerangka konseptual yang mencakup empat pilar utama, yaitu: ekonomi, sosial, infrastruktur dan sumber daya manusia, serta kelembagaan dan tata kelola. Keempat pilar ini dirinci lebih lanjut ke dalam sub-pilar dan indikator yang mencerminkan kapasitas dan kinerja pembangunan di tingkat daerah.

IDSD tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks penguatan otonomi daerah dan pencapaian target pembangunan nasional. Melalui IDSD, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi keunggulan dan tantangan struktural yang dihadapi dalam upaya meningkatkan daya saing wilayahnya, baik dalam skala nasional maupun regional.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, IDSD menjadi salah satu referensi utama untuk mengarahkan program dan kegiatan strategis yang berbasis pada potensi unggulan dan kebutuhan perbaikan sistemik di berbagai sektor. Peningkatan capaian IDSD tidak hanya memerlukan intervensi sektoral, tetapi juga pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan.

Gambar 2.31 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 - 2024



Pada tahun 2024, capaian IDSD Kabupaten Konawe Utara sebesar 3,16. Nilai IDSD ini mencerminkan mulai berjalannya proses konsolidasi data dan pemutakhiran informasi pembangunan lintas sektor, terutama dalam pilar-pilar utama penilaian seperti kapasitas ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kelembagaan publik, dan pembiayaan pembangunan. Meskipun nilai indeks ini masih berada pada kategori rendah, namun keberadaannya penting sebagai baseline untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang. Peningkatan nilai IDSD membutuhkan intervensi strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, seperti peningkatan kualitas regulasi daerah, penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola keuangan daerah, penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan birokrasi. Selain itu, integrasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita juga menjadi faktor penting dalam mendongkrak daya saing daerah.

2.4.3 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

2.4.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.4.3.1.1 Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Tabel 2.26
Kondisi PAUD di Kabupaten Konawe Utara

No	Nama Lembaga	Jumlah						Jumlah Peserta Didik			Jumlah Guru		
		2022		2023		2024		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta						
1.	TK	12	76	12	77	32	60	2.684	3.775	3.778	233	260	275
2.	KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	TPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Tabel 2.26 menunjukkan bahwa Lembaga PAUD yang dikelola swasta di Kabupaten Konawe Utara tiap tahun bertambah dan cukup banyak sehingga dapat membantu dalam peningkatan Pendidikan PAUD di Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2024 pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah memberikan insentif pada 233 pendidik PAUD non formal untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Wajib belajar sembilan tahun yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten adalah pendidikan dasar jenjang SD dan SMP.

a. Kondisi Pendidikan Dasar

Gambaran kondisi yang mendukung keberhasilan wajib belajar sembilan tahun disajikan pada Tabel 2.27 yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan di Kabupaten Konawe Utara dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun secara kuantitas telah cukup memadai. Jumlah guru SD yang telah bersertifikat pendidik profesional adalah 1.342 orang. Sementara itu, guru SMP yang telah bersertifikat pendidik profesional sejumlah 630 orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan sertifikasi guru guna mewujudkan profesionalitas kinerja pendidik di Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya disaat bersamaan diperlukan pula perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan bagi guru GTT dan PTT.

Tabel 2.27
Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Konawe Utara

No	Lembaga	Sekolah			Guru			Jumlah Siswa			Rasio Guru/ Sekolah			Rasio Guru/ Murid		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	SD	104	104	104	891	967	1.342	8.809	8.809	9.321	8,57	9,30	9,30	0,10	0,11	0,11
2	MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SMP	36	36	36	520	557	630	3.346	3.240	3.301	14,17	14,44	14,44	0,14	0,16	0,16
4	MTs	4	4	4	67	67	79	401	401	392	24,33	16,75	16,75	0,18	0,17	0,17
5	SMA	11	11	11	212	225	228	3.032	2.918	2.779	16,27	19,27	19,27	0,06	0,07	0,07
6	SMK	4	4	4	48	42	41	349	407	277	10,00	12,00	12,00	0,14	0,14	0,14
7	MA	2	2	2	22	22	19	145	145	153	16,50	11,00	11,00	0,17	0,15	0,15
Jumlah		161	161	161	1.760	1.880	2.339	16.082	15.920	15.953	10,78	11,40	11,40	0,11	0,11	0,11

Sumber : Dinas P & K Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

b. Tingkat Kelulusan SD dan SMP

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada lima tahun terakhir hingga tahun 2024 mencapai 100%, sesuai dengan target yang dicanangkan pada tahun 2024. Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah, segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah. Angka putus sekolah pada tahun 2024 untuk jenjang SD/MI sebesar 0,00% dan jenjang SMP/MTs tahun 2023 sebesar 0,01%.

c. Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

BOP Kabupaten Konawe Utara diberikan untuk tiap siswa SD/MI sebesar Rp.350.000,-per siswa per tahun sedangkan untuk tiap siswa SMP Negeri sebesar Rp.500.000,- per siswa per tahun dan siswa SMP Swasta diberikan Rp.450.000,- per siswa per tahun. Selain itu untuk siswa miskin SD/MI

diberikan dana bantuan sebesar Rp.450.000,- per siswa per tahun dan siswa miskin SMP sebesar Rp.750.000,- per siswa per tahun.

d. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pada tabel berikut ini diuraikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dimana pada tabel tersebut digambarkan bahwa ada kecenderungan menurunnya partisipasi sekolah pada jenjang sekolah menengah. Peningkatan APS dapat ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah yang dilengkapi dengan laboratorium dan perpustakaan serta penambahan tenaga pengajar.

Tabel 2.28
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 - 2024

No.	Jenjang Pendidikan	2022	2023	2024
1.	APS Penduduk Usia 7 - 12 th	99,32	99,27	99,74
2.	APS Penduduk Usia 13 - 15 th	93,19	93,00	97,81
3.	APS Penduduk Usia 15 - 18 th	74,94	75,04	73,41

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2023 s.d 2025

e. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Pada Tahun 2024, APM SD/MI Kabupaten Konawe Utara sebesar 95,28 menurun dari tahun 2022 sebesar 96,82. Data ini menunjukkan bahwa 94 dari 100 anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Konawe Utara bersekolah tepat waktu di jenjang SD/ sederajat.

Tabel 2.29
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 - 2024.

No.	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni			Angka Partisipasi Kasar		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	SD/MI	96,82	96,74	95,28	110,16	106,47	105,78
2.	SMP/MTs	81,15	77,33	77,47	89,98	91,07	93,72
3.	SMA/SMK/MA	65,23	66,45	68,39	85,82	83,62	86,07

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2023 s.d 2025

f. Akreditasi sekolah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara eksplisit disebutkan pada pasal 60 Ayat 2, bahwa Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sebagai tindak lanjut amanah konstitusi tersebut pemerintah menetapkan kebijakan mutu yang tertuang dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dijadikan dasar penetapan variabel, indikator, dan butir penilaian dalam instrumen penilaian akreditasi.

Pada Tahun 2024, jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi A sebanyak 3 sekolah dan terakreditasi B sebanyak 35 Sekolah. Untuk Sekolah Menengah Pertama, jumlah sekolah terakreditasi A sebanyak 6 sekolah dan terakreditasi B sebanyak 15 Sekolah. Persentase sekolah terakreditasi minimal B dapat dilihat pada Tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30
Sekolah Terakreditasi di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2024

No.	Tahun Capaian	Jenjang Pendidikan	Akreditasi				Total	Persentase Terakreditasi Minimal B
			A	B	C	Belum Terakreditasi		
1.	2022	SD/MI	3	24	60	17	104	24,03
		SMP/MTs	6	13	17	0	36	52,77
2.	2023	SD/MI	3	29	68	4	104	30,77
		SMP/MTs	6	14	23	0	40	42,50
3.	2024	SD/MI	3	35	64	2	104	33,65
		SMP/MTs	6	15	22	0	40	37,50

<https://banasm.kemdikbud.go.id/akreditasi>

3) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelaksanaan SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam mengukur capaian SPM.

Tabel 2.31
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Kabupaten Konawe Utara

No	Indikator SPM	Perhitungan	Realisasi 2023	
			X/Y	Nilai
1	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	jumlah anak usia 5 - 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini dibagi: jumlah usia 5 - 6 tahun pada kabupaten/kota*	3722/ 4090	91%
2	Jumlah Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah (SMP/MTs)	jumlah anak usia 13 - 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi : jumlah usia 13 - 15 tahun pada kabupaten/kota	3906/ 4132	94,52%
3	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi)	jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi jumlah usia 7 - 12 tahun pada kabupaten/kota	8827/ 9141	96,56%
4	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi jumlah usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah pada kabupaten/kota	3783/ 3783	100%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Dari tabel 2.31, dapat dilihat pelaksanaan capaian SPM bidang Pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik pada seluruh kelompok usia, hal ini tidak terlepas dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.

2.4.3.1.2 Kesehatan

1) Pelayanan Kesehatan

a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Idealnya satu Posyandu melayani 100 Balita. Keberadaan posyandu berperan untuk mendukung penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas), pembudayaan NKKBS, peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB, dan sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera.

Tabel 2.32
Rasio Posyandu per 1000 Balita
Di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Posyandu	158	172	172	172	171
2.	Jumlah Balita	7.482	7.552	7.660	7.682	7.719
3.	Rasio	21,12	22,78	22,45	22,39	22,15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2025

Dari Tabel 2.32 dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 rasio Posyandu per 1000 Balita sebesar 22,15 berarti dalam 1000 Balita terdapat 22 Posyandu.

b. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta, dengan demikian diharapkan lebih banyak kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit RS sebagaimana diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001. Jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 sebanyak 81.355 jiwa, hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Konawe Utara telah mencukupi.

Tabel 2.33
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rumah Sakit	1	1	1	1	1
2.	Puskesmas	22	22	22	22	22
3.	Puskesmas Pembantu	36	16	16	16	16
4.	Poskedes	5	-	-	-	-
5.	Polindes	7	-	-	-	-
6.	Posyandu	158	172	172	172	172
7.	Praktek Dokter	1	1	1	1	1
8.	Praktek Bidan	1	1	1	1	1
9.	Apotek	7	6	6	6	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2025

Akreditasi puskesmas di Kabupaten Konawe Utara mulai dijalankan tahun 2017. Dari 22 puskesmas, saat ini sudah 16 puskesmas telah terakreditasi, 4 puskesmas diantaranya yaitu puskesmas Tetewatu, Lasolo, Matandahi, Motui telah berstatus akreditasi utama. Pada Tahun 2023, sebanyak 2 Puskesmas telah berhasil melaksanakan Re-akreditasi dari target 6 puskesmas yang ada di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.34
Penilaian Akreditasi Puskesmas
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Nama Puskesmas	Jenis Puskesmas	2017	2019	2020	Status
1.	Andeo	Non Rawat Inap	√			Madya
2.	Andowia	Non Rawat Inap	-	-	-	
3.	Asera	Non Rawat Inap		√		Madya
4.	Lamparinga	Non Rawat Inap			√	Madya
5.	Landawe	Non Rawat Inap		√		Madya
6.	Langgikima	Non Rawat Inap		√		Madya
7.	Langgikima Pesisir	Non Rawat Inap				

No.	Nama Puskesmas	Jenis Puskesmas	2017	2019	2020	Status
8.	Laronanga Pantai	Non Rawat Inap				
9.	Lasolo	Rawat Inap	√			Utama
10.	Lasolo Kepulauan	Non Rawat Inap				
11.	Lembo	Non Rawat Inap		√		
12.	Matandahi	Rawat Inap	√			Utama
13.	Molawe	Non Rawat Inap		√		
14.	Motui	Rawat Inap		√		Utama
15.	Oheo	Non Rawat Inap				
16.	Paka Indah	Non Rawat Inap			√	Madya
17.	Sawa	Non Rawat Inap		√		Madya
18.	Tapungaya	Non Rawat Inap		√		Madya
19.	Tetewatu	Non Rawat Inap			√	Utama
20.	Wanggudu Raya	Non Rawat Inap				
21.	Wawolesea	Non Rawat Inap		√		Madya
22.	Hialu	Non Rawat Inap			√	Madya

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2025

Akreditasi puskesmas bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana puskesmas sampai dengan kinerja para tim medis sesuai standar prosedur. Manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang mendapat pelayanan di tempat tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan status akreditasi seluruh puskesmas di Kabupaten Konawe Utara menjadi akreditasi paripurna. Untuk itu peningkatan fasilitas sarana dan parasana, serta tenaga kesehatan akan terus ditingkatkan.

c. Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes

Angka rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) per jumlah penduduk mengalami perubahan seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah dari tahun 2020 - 2024. Angkanya berkisar antara 0,00103 (tahun 2020) sampai 0,00046 (tahun 2024).

Tabel 2.35
Rasio Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes	30	38	38	38	38
2.	Jumlah Penduduk	67.871	68.950	70.314	72.250	81.355
	Rasio	0,00103	0,00055	0,00054	0,00053	0,00046

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara Dalam, 2025

d. Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.36
Jumlah Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dokter Spesialis	-	-	-	-	9
2.	Dokter Umum	9	13	20	22	28
3.	Dokter Gigi	5	6	7	8	9
4.	Bidan	143	136	271	280	378
5.	Perawat	68	87	236	160	372
6.	Apoteker	15	23	56	54	71

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025

Secara khusus, ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Menurut standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk.

Tabel 2.37
Rasio Jumlah Dokter Per Jumlah 1000 Penduduk
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi	14	19	19	27	30
2.	Jumlah Penduduk	67.871	68.950	68.950	70.314	72.250
3.	Rasio	0,21	0,21	0,28	0,38	0,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025

Pada Tahun 2024 rasio dokter per jumlah penduduk mencapai 0,42 per 1000 penduduk atau satu dokter melayani 3.034 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, dokter di Kabupaten Konawe Utara hampir memadai, meskipun masih perlu ditingkatkan lagi. Upaya pemenuhan kebutuhan dokter dengan cara melakukan kontrak tenaga dokter.

Tabel 2.38
Rasio Tenaga Medis Per Jumlah 1000 Penduduk
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Tenaga Medis (Bidan, Perawat, dan Apoteker)	226	246	563	494	821
2.	Jumlah Penduduk	67.871	68.950	70.314	72.250	81.355
3.	Rasio	3,33	3,57	8,01	6,84	10,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025

e. Jaminan Kesehatan

Pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Konawe Utara melalui kepesertaan JKN pada tahun 2023 telah terdaftar sebesar 69.608 jiwa atau 99,00%, Data kepesertaan JKN Kabupaten Konawe Utara disajikan pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39
Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	2020		2021		2022		2023		2024	
		Peserta (Jiwa)	%	Peserta (Jiwa)	%	Peserta (Jiwa)	%	Peserta (Jiwa)	%	Peserta (Jiwa)	%
1.	PBI APBN	27.086	42,45	27.084	41,66	24.459	35,5	29.759	42,32	29.759	42,32
2.	PBI APBD Kab.	24.707	38,72	25.675	39,49	29.395	42,4	23.558	33,50	23.558	33,50
3.	PBI APBD Prov.	2.189	3,43	2.110	3,25	2.110	3,25	2.110	3,00	2.110	3,00
4.	Pekerja Penerima Upah (PPU)	6.677	10,46	7.564	11,63	9.843	14,3	13.608	19,35	13.608	19,35
5.	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	1.239	1,94	1.672	2,57	949	1,4	222	0,32	222	0,32
6.	Bukan Pekerja	193	0,30	348	0,54	384	0,6	351	0,50	351	0,50
Jumlah Penduduk Yang Terdaftar JKN		64.211	98,96	64.453	99,13	62.091	97,30	67.140	97,4	69.608	99,00
Jumlah Penduduk Yang Belum Terdaftar JKN		673	1,04	564	0,87	1.723	2,70	1.810	1,00	706	1,00
Total Penduduk Kab. Konawe Utara		64.884	100	65.017	100	63.814	100	68.950	100	70.314	100

Sumber : BPJS Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025, diolah

Jumlah Penduduk yang belum terdaftar kepesertaan JKN sebesar 706 jiwa atau 1,00%, hal ini dapat tercapai karena pemerintah Kabupaten Konawe Utara adalah telah berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder dan pemutakhiran data setiap bulan. Beberapa penduduk yang belum terdaftar JKN merupakan tugas pemerintah untuk mengupayakan agar semua penduduk terdaftar dalam JKN.

2) Balita Gizi Buruk

Status gizi Balita dapat diketahui dari berat badan menurut umur, yaitu membandingkan antara berat badan menurut umur ataupun panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Tabel 2.40
Jumlah Balita Gizi Buruk
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Balita Yang Diukur	5.058	6.261	5.247	6.682	6.696
2.	Jumlah Balita Gizi Buruk	0	12	7	19	11
3.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,00	0,19	0,13	0,29	0,20

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025

Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

3) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Data kesakitan terdiri dari dua sumber, yaitu bersumber dari masyarakat (community based data) dan bersumber dari sarana pelayanan kesehatan (facility based data) melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Data kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat.

Penyakit tidak menular (PTM) juga mempengaruhi pencapaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Kelompok Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti stroke, Diabetes Mellitus, kanker, hipertensi merupakan kelompok penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas masyarakat. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Untuk itu penanganan penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Tabel 2.41
Angka Kesakitan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Kasus				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Malaria	-	-	-	9	9
2.	Tuberkulosis (TB) BTA	77	118	170	217	63
3.	Pneumonia Balita	-	-	6	-	-
4.	Kusta	-	-	4	7	7
5.	Tetanus	61	18	-	-	-
6.	Campak	105	22	1	-	-
7.	Diare	58	11	302	402	400
8.	DBD	-	7	5	9	60
9.	Hipertensi	39	113	653	246	120
10.	ISPA	154	27	44	36	36
Jumlah		494	316	728	926	695

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025

4) Promosi Kesehatan

Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2024 di Kabupaten Konawe Utara pada semua tatanan disajikan pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42
Persentase PHBS
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Persentase (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rumah Tangga	53,00	57,53	60,46	79,92	56,60
2.	Institusi Pendidikan	61,00	63,56	64,85	87,34	90,38

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025

5) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019

tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur tahapan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mencapai target layanan yang ditetapkan 100 persen.

Tabel 2.43
Pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET (%)	SASARAN	CAPAIAN	REALISASI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	1.513	1.259	83,2%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	1.444	1.348	93,4%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	1.375	1.352	98,3%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	5.376	2.026	37,7%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	1.245	1.651	132,6%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	43.722	1.107	2,6%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	4.185	3.914	93,5%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100	47.051	653	1,4%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	100	47.051	212	0,5%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	86	21	24,4%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100	346	346	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	1	1	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Capaian SPM dalam bidang Kesehatan, menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan Kesehatan telah memberikan manfaat yang maksimal bagi penduduk. Fokus utama dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara meliputi : 1) Akses Pelayanan Kesehatan, hal ini mencakup ketersediaan fasilitas Kesehatan yang memadai, jarak tempuh yang wajar bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan Kesehatan; 2) Kualitas Pelayanan, standar kualitas pelayanan Kesehatan yang diberikan meliputi kualitas dan kompetensi tenaga medis yang kompeten,

standar prosedur tenaga medis yang dipatuhi, penggunaan teknologi medis, serta ketersediaan obat-obat dan alat Kesehatan yang sesuai; 3) Cakupan layanan Kesehatan seperti pelayanan imunisasi, pelayanan ibu dan anak, penanganan penyakit menular, dan layanan gizi; 4) Pencegahan dan Promosi Kesehatan seperti program vaksinasi, penyuluhan Kesehatan, kampanye penyadaran masyarakat tentang pola hidup sehat, dan pengendalian risiko penyakit; 5) Pengukuran dan Evaluasi untuk memastikan tercapainya SPM, ini secara berkala perlu dilakukan terhadap berbagai indikator Kesehatan yang relevan.

Penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, seperti disajikan pada tabel 2.43 dengan total 12 indikator SPM yang dilaksanakan terdapat 2 indikator yang masih rendah yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV.

6) Upaya Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (stunted) dan sangat penting (severely stunted) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) dan tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS tahun 2006.

Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Beberapa penyebab stunting sebagai berikut :

1. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum, pada masa kehamilan dan setelah melahirkan.

2. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC (ante natal care) atau pelayanan kesehatan ibu selama masa kehamilan, post natal care atau pelayanan setelah melahirkan dan pembelajaran dini yang berkualitas.
3. Masih kurangnya akses rumah tangga/ keluarga pada makanan bergizi
4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Prevalensi stunting di Kabupaten Konawe Utara cenderung menurun, dari sebesar 10,4 pada Tahun 2021 menjadi 5,4 pada Tahun 2024. Kondisi ini di atas angka rata-rata prevalensi stunting nasional sebesar 14% dan akan terus terus ditekan dan dicegah secara optimal.

Tabel 2.44
Jumlah Balita Pendek (stunting)
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Balita Yang Diukur Tinggi Badan	6.261	5.573	6.682	6.696
2.	Jumlah Balita Pendek (TB/U)	66	36	71	53
3.	Prevalensi Stunting	10,4	7,2	10,6	5,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah mendorong percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang tertuang dalam Peraturan Bupati Konawe Utara No.17 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Stunting Di Kabupaten Konawe Utara. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dibidang penanggulangan dan pencegahan stunting di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10/M.PPN/HK/02/2022 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024.

Upaya penurunan Prevalensi stunting di Kabupaten Konawe Utara memerlukan rencana intervensi yang komprehensif. Intervensi yang dilakukan pemerintah kelompokan menjadi intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi gizi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Intervensi gizi sensitif dilakukan oleh sektor lain di luar kesehatan yang terkait dengan upaya penanggulangan stunting.

Intervensi spesifik yang diberikan pemerintah Kabupaten Konawe Utara dapat dikelompokan berdasarkan sasaran program, yaitu :

1. Sasaran ibu hamil dilakukan melalui perlindungan ibu hamil terhadap kekurangan zat besi, asam folat, dan kekurangan energi dan protein kronis; perlindungan terhadap kekurangan iodium, dan perlindungan terhadap malaria
2. Sasaran ibu menyusui dan anak usia 0–6 bulan, dilakukan melalui dorongan pemberian IMD/Inisiasi menyusui dini (pemberian kolostrum ASI), memberikan edukasi kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif, pemberian imunisasi dasar, pantau tumbuh kembang bayi/balita setiap bulan, dan penanganan bayi sakit secara tepat
3. Sasaran ibu menyusui dan Anak usia 7– 23 bulan, dilakukan melalui dorongan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping-ASI (MP-ASI), penyediaan dan pemberian obat cacing, pemberian suplementasi zink, fortifikasi zat besi ke dalam makanan, perlindungan terhadap malaria, pemberian imunisasi, pencegahan dan pengobatan diare

Intervensi sensitif dilakukan melalui berbagai program kegiatan, di antaranya penyediaan akses air bersih, penyediaan akses terhadap sanitasi salah satunya melalui program STBM, fortifikasi bahan pangan oleh Kementerian Pertanian, penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyediaan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal), pemberian pendidikan pengasuhan pada orang tua, pemberian pendidikan anak usia dini universal oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, Keluarga Berencana (KB), pemberian edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi remaja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

Upaya intervensi sensitif dan spesifik di Kabupaten Konawe Utara telah memberikan hasil yang cukup optimal, hal ini di dukung pula dengan dibentuknya Unit Reaksi Cepat Kemiskinan, Inflasi dan Stunting Selaras (URC-KISS) yang mampu bergerak cepat dengan menysasar langsung bayi dan balita yang beresiko stunting (by name by addres). Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menggerakkan seluruh Perangkat Daerah dan berkolaborasi dalam upaya penurunan dan intervensi kasus stunting. Berbagai penanganan yang dilakukan antara lain pemberian bantuan tunai, bantuan sembako, serta bantuan makanan bergizi dengan melibatkan aparaturnya desa dan Puskesmas. Upaya penurunan angka stunting ini terus digalakkan dalam upaya mencapai target 0 kasus di tahun 2025.

2.4.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi mantap untuk memperlancar transportasi. Pada Tahun 2023, panjang jalan nasional di Kabupaten Konawe Utara sepanjang, 170,91 km, jalan provinsi 38,10 km, dan jalan kabupaten 699,94 km.

Tabel 2.45
Panjang Jalan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024

No.	Jenis Permukaan	Jalan Kabupaten (km)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Aspal	116,86	127,54	133,59	179,04	206,44
2.	Kerikil	342,58	324,74	472,05	425,13	442,13
3.	Tanah	226,32	242,46	93,91	89,74	89,74
4.	Lainnya	4,16	5,2	0,39	6,03	6,03
Jumlah		684,65	689,92	699,94	699,94	744,34

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2025

Secara keseluruhan persentase kualitas jalan kabupaten dalam kondisi mantap di Kabupaten Konawe Utara sebesar 89,52%, sisanya belum mantap 10,48%.

Tabel 2.46
Kondisi Jalan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Panjang (km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
			Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
2.	2019	699,94	581,72	83,11	118,22	16,89
3.	2020	699,94	588,16	84,03	111,78	15,97
4.	2021	699,94	626,59	89,52	73,35	10,48
5.	2022	699,94	615,67	87,96	84,27	12,04
6.	2023	699,94	626,59	89,52	73,35	10,48

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2023

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik, sedang, pengerasan, dan kerikil sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak, rusak berat dan jalan tanah. Pada Tahun 2023 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 626,59 km (89,52%) naik dari tahun sebelumnya

sepanjang 615,67 km (87,96%) pada Tahun 2022. Sebagian besar pemeliharaan jalan kabupaten tahun 2023 pada ruas dengan kondisi jalan sedang, dan sebagian pada kondisi jalan belum mantap (rusak dan rusak berat). Disamping itu, terdapat perubahan kondisi jalan dari mantap menjadi tidak mantap yang belum termasuk penanganan tahun 2023. Perencanaan kedepan, pemeliharaan jalan akan diprioritaskan untuk jalan dengan kondisi tidak mantap.

2) Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Sampai dengan Tahun 2023, di wilayah Kabupaten Konawe Utara terdapat 22 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas 3.941 Ha. Kondisi jaringan irigasi primer dalam kondisi baik tahun 2023 adalah 75,34% (8.683,10 m), sedangkan irigasi sekunder sebesar 75,22% (1.569,80 m). Data capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.47
Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020-2024

Tahun	Total Irigasi Primer (m)	Kondisi				Total Irigasi Sekunder (m)	Kondisi			
		Baik (m)	%	Rusak (m)	%		Baik (m)	%	Rusak (m)	%
2020	11.406,38	6.946,16	60,90	4.460,21	39,10	2.095,18	1.121,01	53,50	974,16	46,50
2021	11.466,00	7.059,94	61,57	4.406,06	38,43	2.091,00	1.319,64	63,10	771,36	36,89
2022	11.525,63	7.698,26	66,79	3.827,37	33,21	2.086,83	1.453,39	69,65	633,43	30,35
2023	11.525,63	8.683,10	75,34	2.842,52	24,66	2.086,83	1.569,80	75,22	517,03	24,78
2024	11.890,53	6.695,23	56,31	5.195,31	43,69	9.227,86	5.918,49	64,18	3.309,37	35,86

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2025

Tabel 2.48
Daerah Irigasi Yang Teraliri Dengan Baik
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Luas Di Kewenangan Kabupaten Yang Teraliri Dengan Baik (Ha)	%
1.	2020	2.587	59,75
2.	2021	2.852	61,81
3.	2022	3.102	67,23
4.	2023	3.475	75,32
5.	2024	3.556	77,09

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2025

3) Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Konawe Utara adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara. Dokumen yang disusun telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum R.I dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032.

Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Kabupaten Konawe Utara tentang RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Hasil rekomendasi PK RTRW yaitu dilakukan review RTRW. Namun sampai dengan tahun 2022 karena keterbatasan anggaran dan panjangnya proses penyusunan hingga penetapan, untuk itu perlu dilakukan upaya dan langkah percepatan dalam penyelesaian revisi RTRW Kabupaten Kabupaten Konawe Utara 2012-2032 pada tahun 2024.

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan keperuntukannya, seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Tingkat Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023

No.	Fungsi Kawasan	Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)	Keterangan Ketidak sesuaian
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai		
A KAWASAN LINDUNG						
1.	Kawasan Hutan Lindung	213.254,16	-	-	213.254,16	
2.	Kawasan Resapan Air	-	-	-	-	
3.	Sempadan Pantai	-	-	-	-	
4.	Sempadan Sungai	-	-	-	-	
5.	Kawasan Cagar Budaya	-	-	-	-	
	Jumlah (Ha)	213.254,16	-	-	213.254,16	
	% Terhadap Kawasan Lindung	100,00	-	-	100,00	
	% Terhadap Kawasan Kabupaten Konawe Utara	42,62	-	-	42,62	
B KAWASAN BUDIDAYA						
					-	
1.	Kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	85.986,04	34.542,56	9.782,71	130.311,31	Terjadinya penurunan status fungsi kawasan hutan
2.	Kawasan peruntukan Hutan Produksi (HP)	39.701,09	20.242,33	5.354,42	65.297,84	Terjadinya penurunan status fungsi kawasan hutan
3.	Kawasan peruntukan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)	21.553,72	6.975,48	3.526,08	32.055,28	Terjadinya penurunan status fungsi kawasan hutan
4.	Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan	953,72	455,02	248,60	1.657,34	Terjadinya alih fungsi menjadi kawasan permukiman
5.	Kawasan peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	1.500,00	-	-	1.500,00	Menunggu Pentapan RP2
6.	Kawasan peruntukan pertanian basah	2.137,39	240,88	1.019,26	3.397,53	Perubahan kawasan menjadi perkebunan
7.	Kawasan peruntukan Perkebunan Kelapa Sawit	13.336,55	1.161,44	904,01	15.402,00	Menjadi Kawasan Pertambangan
8.	Kawasan peruntukan perkebunan tanaman rakyat	17,65	1,95	4,73	24,33	Alih fungsi menjadi kawasan perkebunan sawit
9.	Kawasan peruntukan pertambangan	14.995,18	7.172,46	5.661,36	27.829,00	Menggunakan kawasan hutan
10.	Kawasan peruntukan permukiman	6.574,89	1.389,31	1.331,98	9.296,18	Kurangnya anggaran dalam program pengembangan permukiman yang sudah diatur dalam indikasi program
11.	Kawasan peruntukan perikanan budidaya	1.172,34	-	23,67	1.196,01	Alih fungsi lahan
12.	Kawasan peruntukan peternakan	98,38	22,42	3,74	124,54	Belum maksimalnya program

No.	Fungsi Kawasan	Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)	Keterangan Ketidak sesuaian
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai		
						pengembangan peternakan
13.	Kawasan peruntukan lainnya	89,55	8,22	4,99	102,76	Belum maksimalnya pengadaan tanah untuk pembangunan lainnya
	Jumlah (Ha)	187.017,05	72.212,07	27.855,73	287.084,85	
	% Terhadap kawasan budidaya	60,32	28,01	11,68	100,01	
	% Terhadap Kawasan Kabupaten Konawe Utara	34,61	16,07	6,70	57,38	
	Total (Ha)	400.271,21	72.212,07	27.855,73	500.339,01	
	% Terhadap Kawasan Kabupaten Konawe Utara	80,00	14,43	5,57	100,00	
	Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah		

Sumber : Bapperida, 2025

Tabel 2.49 menunjukkan sebagian besar ruang yang ada masih sesuai dengan keperuntukkannya yaitu 80,00%, masuk dalam kategori tinggi, namun masih ada ketidaksesuaian sebesar 5,57%, masuk dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemanfaatannya belum mentaati rencana pola ruang. Upaya yang dilakukan pemda antara lain melalui kegiatan sosialisasi dan konsolidasi tanah, konsultasi serta audit pemanfaatan tanah.

4) Penyediaan Air Minum

Penyediaan Air minum dilaksanakan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Konawe Utara (Tirta Lasolo) bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Dalam rangka penanganan di desa rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Adapun lingkungan kawasan perkotaan dibangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di masing - masing.

Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam dan PDAM. Penduduk menggunakan sumur gali baik terlindungi maupun tak terlindungi, mencapai 11,01%, penduduk yang menggunakan mata air baik terlindungi maupun tak terlindungi 43,87%, sisanya menggunakan air dalam kemasan 0,64%, hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 2,47%).

Upaya Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dengan mekanisme sharing APBN di daerah yang rawan air bersih. Instalasi yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara.

Cakupan air bersih pada tahun 2023 menurut data Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan umum sebesar 98,10%. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Konawe Utara sudah dapat mengakses air bersih, walaupun akses air bersih ini masih mengalami kendala dari segi kualitas, kontinuitas dan kuantitas.

Tabel 2.50
Penyediaan Air Minum Menurut Sumbernya
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023

No.	Sumber Air Minum	Persentase (%)
1.	Pompa	2,964
2.	Air Dalam Kemasan	0,832
3.	Sumur Terlindungi	8,148
4.	Sumur Tak Terlindungi	5,064
5.	Mata Air Terlindungi	41,664
6.	Mata Air Tak Terlindungi	10,98
7.	Air Permukaan	0,828
8.	Lainnya	29,52
Total		100,00

Sumber : BPS Kab. Konawe Utara, Tahun 2024

5) Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2019 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, seperti disajikan pada tabel 2.51 dengan total 2 indikator SPM yang

dilaksanakan seluruh capaian indikator masih rendah yaitu Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. Rendahnya capaian SPM bidang Pekerjaan Umum menjadi perhatian serius pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di sektor air minum dan air limbah domestik.

Tabel 2.51
Pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023

NO	Uraian SPM	Indikator SPM	Capaian 2023	Target 2023	Capaian SPM
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	87,90%	97,55%	90,11
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	82,74%	86,03% akses layak (termasuk 13% akses aman)	96,18

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

2.4.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Jumlah Rumah dan Kekurangan Rumah serta RTLH

Rumah atau hunian tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus terpenuhi. Secara umum, kondisi rumah layak huni di Kabupaten Konawe Utara telah mencapai 66,23 %, sedangkan kondisi rumah tidak layak huni sebesar 33,77%, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.52.

Tabel 2.52
Ketersediaan Sarana Perumahan
Kabupaten Konawe Utara

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah 2023 (unit)	RTLH 2023 (unit)	RLH 2023 (unit)	% RTLH	% RLH
1	Sawa	1.312	366	946	27,90%	72,10%
2	Motui	1.434	652	782	45,47%	54,53%
3	Lembo	1.874	506	1.368	27,00%	73,00%
4	Lasolo	2.153	539	1.614	25,03%	74,97%
5	Wawolesea	1.018	463	555	45,48%	54,52%
6	Lasolo Kepulauan	528	162	366	30,68%	69,32%
7	Molawe	1.436	333	1.103	23,19%	76,81%
8	Asera	2.172	1069	1.103	49,22%	50,78%
9	Andowia	2.067	358	1709	17,32%	82,68%
10	Oheo	1.300	876	424	67,38%	32,62%
11	Langgikima	1.390	369	1021	26,55%	73,45%
12	Wiwirano	1.805	452	1.353	25,04%	74,96%

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah 2023 (unit)	RTLH 2023 (unit)	RLH 2023 (unit)	% RTLH	% RLH
13	Landawe	851	386	465	45,36%	54,64%
	Kab. Konawe Utara	19.340	6.531	12.809	33,77%	66,23%

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, Tahun 2024

2) Jumlah Kebutuhan Rumah (Backlog)

Setelah diketahui kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk, maka dapat dihitung kebutuhan rumah total di Kabupaten Konawe Utara pada tahun proyeksi. Kebutuhan rumah total didapat dari penjumlahan backlog eksisting dengan kebutuhan rumah karena pertumbuhan penduduk. Kebutuhan rumah tambahan dari tahun awal rencana. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Proyek Kebutuhan Rumah setiap Kecamatan
di Kabupaten Konawe Utara

No	Kecamatan	Jumlah KK Tahun 2019	Jumlah Rumah 2019 (unit)	Backlog Rumah 2019	Jumlah KK Proyeksi 2040	Kebutuhan Rumah KK	Total Kebutuhan Rumah	Kebutuhan Rumah/ Tahun
A	b	c	d	e = c - d	f	g = f - c	h = (g+e)	i = h/20
1	Sawa	1.294	1.294	-	3.221	1.927	1.927	96
2	Motul	1.246	1.246	-	2.651	1.405	1.405	70
3	Lembo	1.575	1.298	277	3.661	2.086	2.363	118
4	Lasolo	2.272	1.815	457	5.361	3.089	3.546	177
5	Wiwolesea	1.015	1.018	- 3	1.989	974	971	49
6	Lasolo Kepulauan	567	553	14	6.726	6.159	6.173	309
7	Molawe	1.728	1.367	361	4.501	2.773	3.134	157
8	Asera	2.142	2.142	-	4.482	2.340	2.340	117
9	Andowia	1.981	1.320	661	4.358	2.377	3.038	152
10	Oheo	1.311	1.311	-	5.177	3.866	3.866	193
11	Langgikima	1.415	1.415	-	2.747	1.332	1.332	67
12	Wwirano	1.493	1.540	47	3.585	2.092	2.045	102

No	Kecamatan	Jumlah KK Tahun 2019	Jumlah Rumah 2019 (unit)	Backlog Rumah 2019	Jumlah KK Proyeksi 2040	Kebutuhan Rumah KK	Total Kebutuhan Rumah	Kebutuhan Rumah/ Tahun
13	Landawe	828	828	-	1.458	630	630	31
Kab. Konawe Utara		18.867	17.147	1.720	49.917	31.050	32.770	1.638

Sumber : RP3KP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020

3) Sarana Prasarana Kawasan Permukiman

Analisis pelayanan umum bagian perumahan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya rumah tangga pengguna air bersih dan jumlah seluruh rumah tangga dan jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Konawe Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Ketersediaan Prasarana Perumahan
Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rumah Tangga Pengguna Air minum layak	5.069	11.263	12.336	14.844	14.932
	Jumlah Rumah Tangga	13.442	14.867	15.218	16.675	16.987
	Persentase (%)	37,71	75,76	81,06	89,02	87,9
2.	Rumah Tangga Pengguna Listrik	13.169	14.767	15.218	16.675	16.965
	Jumlah Rumah Tangga	13.442	14.867	15.218	16.675	16.987
	Persentase (%)	97,97	99,33	100,00	100,00	99,87
3.	Rumah Tangga Bersanitasi layak	10.350	11.443	11.654	14.434	14.055
	Jumlah Rumah Tangga	13.442	14.867	15.218	16.675	16.987
	Persentase (%)	77,00	76,97	76,58	86,56	82,74

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka, 2023

4) Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan digitasi citra satelit dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara, luas kawasan permukiman di Kabupaten Konawe Utara sebesar 2.450,45 Ha. Permukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara di berdasarkan SK Bupati Konawe Utara No. 397/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab. Konawe

Utara seluas 112.669 Ha dengan Kawasan yang tersebar di 44 titik kawasan kumuh. Selanjutnya, hasil verifikasi luas kawasan pemukiman kumuh pada kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Tahun 2022 diketahui bahwa luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara seluas 528,13 Ha. Dengan demikian, dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara mengacu pada data tersebut. Nama kawasan serta luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Kumuh Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 dan hasil verifikasi luasan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55
Luas Kawasan Pemukiman Kumuh
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan Kumuh	
		Luasan SK Tahun 2019 (Km ²)	Luasan Verifikasi Tahun 2021 (Ha)
1	Wawonsangi	49,73	14,55
2	Tambakua	162,97	5,30
3	Alenggo	16,00	39,10
4	Molore Pantai	11,46	8,68
5	Sarimukti	35,66	29,00
6	Morombo Pantai	5,00	13,00
7	Morombo	10,30	9,00
8	Waturambaha	18,98	6,50
9	Boedingi	1,60	2,00
10	Tapunopaka	1,46	9,30
11	Sambandete	91,69	14,40
12	Tinondo	84,72	9,50
13	Laumoso	25,22	28,00
14	Puusuli	69,12	18,05
15	Tapuemea	1,27	7,00
16	Labungga	24,50	16,00
17	Puuwanggudu	45,00	1,70
18	Wanggudu Raya	24,45	11,00
19	Amorome Utama	33,72	53,16
20	Kelurahan Asera	6,89	16,30
21	Longeo Utama	30,30	9,00
22	Amorome	53,35	15,30

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan Kumuh	
		Luasan SK Tahun 2019 (Km ²)	Luasan Verifikasi Tahun 2021 (Ha)
23	Wawolibue	3,61	9,30
24	Walalindu	5,61	1,60
25	Tapuwatu	25,00	3,30
26	Alaa Wanggudu	7,76	4,70
27	Muara Tinobu	0,87	4,70
28	Otipulu	8,35	5,70
29	Tetelupai	3,60	3,00
30	Tanjung Bunga	1,58	10,50
31	Watuwula	3,96	5,30
32	Puusiambu	4,26	12,60
33	Tudungano	1,70	9,30
34	Punggulahi	3,90	11,00
35	Sambasule	2,00	5,30
36	Poni Poniki	3,50	4,70
37	Tobimeita	5,20	5,70
38	Sama Subur	2,00	15,00
39	Kelurahan Wanggudu	111,78	28,74
40	Wunduhaka	5,88	8,50
41	Banggina	2,00	0,00
42	Tanjung Laimea	2,10	2,60
43	Tapunggaya	7,50	15,00
44	Paka Indah	89,90	25,75
Total Kawasan Kumuh			528,13
Total Kawasan Permukiman			2450,72
Total Kawasan Tidak Kumuh			1.922,59
Persentase Kawasan Tidak Kumuh (%)			78,45%

Sumber : SK Bupati Konawe Utara No. 397/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab. Konawe Utara, Hasil verifikasi kegiatan RP2KPKPK Tahun 2022

5) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pada tahun 2023, RTLH dapat tertangani 80 unit dari dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan RUTILAHU dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 2.56
Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah RTLH (Unit)
1.	2019	200
2.	2020	80
3.	2021	88
4.	2022	40
5.	2023	80

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

6) Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Perumahan Rakyat mengacu pada sejumlah kriteria atau persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat. SPM diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan perumahan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 dengan indikator Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebesar 72%, dimana masih terdapat permasalahan-permasalahan yang masih harus diperbaiki dalam meningkatkan capaian SPM tersebut seperti melakukan pengumpulan data, keterbatasan SDM dalam penerapan SPM, dan belum pahamnya eksekutif dan legislatif daerah terkait SPM.

2.4.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pembinaan politik daerah di Kabupaten Konawe Utara juga dilaksanakan oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya pendidikan politik dan berorganisasi bagi masyarakat agar masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik di Kabupaten Konawe Utara. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan meningkatnya partisipasi politik serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Tabel 2.57
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 - 2024

No.	Jumlah DPT	Pileg 2020	Pilpres 2020	Pilibup 2021	Pemilu 2024
1.	Jumlah Pemilih	43.922	43.922	46.123	54.200
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	39.483	39.770	42.875	50.042
3.	Tingkat Partisipasi (%)	89,89	90,55	92,96	93,37
4.	Jumlah Suara Sah	37.957	38.632	42.864	50.042
5.	Jumlah Tidak Sah/Golput	1.526	1.138	518	4.158
6.	Persentase Suara Sah (%)	96,14	97,14	98,80	

Sumber : KPU Kab. Konawe Utara, 2025

Melihat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada bulan November Tahun 2024, perlu upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama generasi muda sebagai pemilih pemula. Kegiatan pembinaan politik salah satunya adalah sosialisasi politik bagi pemilih pemula dan perempuan.

Standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 2.58
Pelaksanaan SPM bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

NO	Uraian SPM	Capaian 2024	Target 2024	Capaian SPM
1.	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, Serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	8 Dokumen	8 Dokumen	80

NO	Uraian SPM	Capaian 2024	Target 2024	Capaian SPM
2.	Jumlah Satgas Linmas Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/ Walikota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.	Persentase Satgas Linmas tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota	100%	100%	100
4.	Persentase anggota Satlinmas yg telah dikukuhkan melalui SK bupati/wali kota	100%	100%	100
5.	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupatery/kota yang ditangani	100%	100%	100
6.	Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	80%	85%	94,12

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

2.4.3.1.6 Sosial

Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri atas :

1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial (Pemberian bantuan sosial bagi PMKS; Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam panti sosial).
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial (Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial; Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti).
3. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat (Bantuan sosial bagi korban bencana; Evakuasi korban bencana)
4. Pelaksanaan dan Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu
5. Pelaksanaan jaminan sosial

PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi masyarakat dan dunia swasta.

Tabel 2.59
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Lanjut Usia	1.713 Jiwa
2.	Disabilitas	220 Jiwa
3.	Korban tindak kekerasan terhadap anak	19 Jiwa
4.	RUTILAHU	30 Rumah

Sumber : Dinas Sosial Kab. Konawe Utara, Tahun 2024

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas: Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota. Capaian SPM bidang sosial tahun 2023 Kabupaten Konawe Utara disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.60
Pelaksanaan SPM bidang sosial
Kabupaten Konawe Utara tahun 2024

NO	Uraian SPM	Capaian 2024	Target 2024	Capaian SPM
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	100%	100%	100
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	100%	100%	100

NO	Uraian SPM	Capaian 2024	Target 2024	Capaian SPM
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	100%	100%	100
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	100%	100%	100
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

2.4.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.4.3.2.1 Tenaga Kerja

1) Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada Tabel 2.61. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Konawe Utara cenderung meningkat. Pada tahun 2024 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 97,60%.

Tabel 2.61
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023-2024

No.	Jenis	2023		Jumlah	2024		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
1	Angkatan Kerja	23.197	12.795	35.992	23.511	16.948	40.459
	Bekerja	22.581	12.416	34.997	23.224	16.265	39.489
	Pengangguran Terbuka	616	379	995	287	683	970
2	Bukan Angkatan Kerja	3.247	11.636	14.883	3.230	8.068	11.298
	Sekolah	1.231	1.594	2.825	1.300	1.373	2.673
	Mengurus Rumah Tangga	1.047	9.258	10.305	1.310	6.422	7.732
	Lainnya	969	784	1.753	620	273	893
	Jumlah	50.875	24.431	50.875	26.741	25.016	51.575
	TPAK (%)	71,64			97,60		

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2025

2) Tingkat Pengangguran

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (open unemployment) dan setengah pengangguran (disguised unemployment). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tingkat Pengangguran di Kabupaten Konawe Utara cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat dan berfluktuatif. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tabel 2.62. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Kabupaten Konawe Utara mencapai angka 2,76%, mengalami sedikit penurunan menjadi menjadi 2,40 pada tahun 2024. Faktor utama penyebab meningkatnya angka pengangguran terbuka yaitu adanya pemberhentian beberapa kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara sehingga menambah jumlah pengangguran yang ada.

Tabel 2.62
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023-2024

No.	Jenis	2023			2024		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	23.197	12.795	35.992	23.511	16.948	40.459
	Bekerja	22.581	12.416	34.997	23.224	16.265	39.489
	Pengangguran Terbuka	616	379	995	287	683	970
	Jumlah						
	TPT (%)			2,76 %			2,40 %

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2025

Beberapa upaya berupa program kegiatan yang telah dilakukan yaitu: Program Peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan dilaksanakan dalam upaya mengurangi pengangguran serta meningkatkan sektor-sektor ekonomi utamanya sektor industri kecil dan menengah. Pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara salah satunya adalah pelatihan/kursus program asisten pembuat pakaian.

Tabel 2.63
Pelatihan kewirausahaan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024

No.	Tahun Pelatihan	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1.	2020	pelatihan/kursus program asisten pembuat pakaian	16
2.	2021	pelatihan/kursus program asisten pembuat pakaian	33
3.	2022	pelatihan/kursus program asisten pembuat pakaian	35
4.	2023	pelatihan/kursus program asisten pembuat pakaian	32
5.	2024	pelatihan/kursus program asisten pembuat pakaian	34

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

2.4.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk perempuan sendiri untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam melakukan transformasi gender.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. Indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Konawe Utara cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 69,04 meningkat menjadi 73,57 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan di Kabupaten Konawe Utara semakin meningkat.

Tabel 2.64
Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan PA
di Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2024

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,66	87,04	87,24	87,68
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,04	69,39	70,65	73,57

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024
3.	Partisipasi Pekerja Perempuan	34,51	36,40	35,84	55,73
4.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	49,16	49,72	49,96	52,55
5.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	33,82	34,30	36,72	39,87
6.	KDRT	6	13	5	-
7.	Jumlah Tenaga Kerja di bawah umur	28	-	-	-
8.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas PP dan PA Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Tabel 2.65
Jumlah Korban Berdasarkan Jenisnya
Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023	Total
Korban berdasarkan bentuk kekerasan					
1.	a. Fisik	-	5	5	10
	b. Psikis	-	2	2	4
	c. Seksual	4	4	4	12
	d. Eksploitasi	-	-	-	-
	e. Trafficking	-	-	-	-
	f. Penelantaran	1	2	2	5
	g. Lainnya	-	-	-	-
Korban berdasarkan jenis pelayanan					
2.	a. Pengaduan	-	7	7	14
	b. Kesehatan	-	-	-	-
	c. Bantuan Hukum	-	-	-	-
	d. Penegakan Hukum	-	-	-	-
	e. Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-
	f. Reintegrasi Sosial	-	-	-	-
	g. Pemulangan	-	-	-	-
	h. Pendampingan Tokoh Agama	-	-	-	-
Korban berdasarkan usia					
3.	a. 0-6	1	1	1	3
	b. 6-12	1	2	2	5
	c. 13 - 17	2	5	5	12
	d. 18 - 24	-	-	-	-
	e. 25 - 44	1	4	4	9
	f. 45 - 59	-	-	-	-
	g. 60+	-	-	-	-
Korban berdasarkan Pendidikan					
4.	a. Tidak/Belum pernah sekolah	-	-	-	-
	b. SD	1	2	2	5
	c. SLTP	2	4	4	10
	d. SLTA	2	4	4	10

No.	Uraian	2021	2022	2023	Total
e.	Perguruan Tinggi	-	-	-	-
f.	PAUD/TK	-	-	-	-
g.	NA	-	2	-	2
Kasus berdasarkan tempat kejadian					
a.	Rumah Tangga	2	6	6	14
b.	Tempat Kerja	-	-	-	-
c.	Lainnya	3	3	3	9
d.	Sekolah	-	1	1	2
e.	Fasilitas Umum	-	2	2	4
f.	Lembaga Pendidikan Kilat	-	-	-	-
Korban berdasarkan status pekerjaan					
a.	Tidak Bekerja	-	-	-	-
b.	Bekerja	-	-	-	-
c.	Pelajar	4	8	8	20
d.	Mengurus Rumah Tangga	1	4	4	9
e.	NA	-	-	-	-
Korban berdasarkan jenis pekerjaan					
a.	Swasta/Buruh	-	-	-	-
b.	PNS/TNI/POLRI	-	-	-	-
c.	Pedagang/Tani/Nelayan	-	-	-	-
Korban berdasarkan status perkawinan					
a.	Belum kawin	-	-	-	-
b.	Kawin	4	8	8	20
c.	Cerai	-	3	3	6
d.	NA	1	1	1	3

Sumber : Dinas PP dan PA Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Tabel 2.66
Partisipasi Perempuan Dalam Berpolitik Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laki - Laki	17	17	17	17	17
2.	Perempuan	3	3	3	3	3
Total		20	20	20	20	20
Persentase Partisipasi Perempuan dalam berpolitik		15%	15%	15%	15%	15%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2025

Di Kabupaten Konawe Utara, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting Pemerintah Daerah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk

mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan.

Persentase perempuan dalam berpolitik di Kabupaten Konawe Utara dilihat dengan mengukur jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten dibandingkan dengan jumlah total anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2024, sebanyak 3 dari 20 anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara merupakan anggota legislator perempuan. Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, keterwakilan perempuan di legislatif tetap berjumlah 3 orang, atau hanya sebesar 15%. Ke depan diharapkan terjadi peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif sebagai upaya mengawal dan memperjuangkan hak-hak perempuan menuju kesetaraan gender.

2.4.3.2.3 Pangan

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam.

Kinerja pada Urusan Pangan di Kabupaten Konawe Utara secara lengkap terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.67
Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ketersediaan pangan utama kkl/kapita/hari	2.400	2.100	2.100	2.120	2.006
2.	Pola Pangan Harapan	79,60	80,70	82,90	82,90	76,8
3.	Rata-rata jumlah ketersediaan padi dalam setahun (ton)	6.652	7.645	10.123,7	8.273	7.037
4.	Rata-rata jumlah ketersediaan jagung dalam setahun (ton)	70,56	35,39	4.595,2	1.078	4.419
5.	Rata-rata jumlah ketersediaan palawija dalam setahun (ton)	63,50	68,43	432,4	265,8	853

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2025

2.4.3.2.4 Pertanian

Pada urusan pertanian yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui Tim P2T (Panitia Pengadaan Tanah) Kabupaten Konawe Utara, Fasilitasi penyelesaian konflik tanah negara dan upaya tertib administrasi pertanian melalui penyediaan data base pertanian di 11 kelurahan. Data status tanah di Kabupaten Konawe Utara tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Perkembangan Status Hak Tanah
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2023

No.	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Hak Milik	1.211	3.554	2.411	2.791
2.	Hak Guna Bangunan	4	7	-	4
3.	Hak Guna Usaha	9	9	-	-
4.	Hak Pakai	222	69	24	89
Jumlah		3.249	1.356	3.636	2.435

Sumber : BPN Kab. Konawe Utara, 2025

2.4.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup, gambaran kondisi lingkungan hidup yang digambarkan melalui beberapa indikator yang terkait dengan lingkungan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.69
Kinerja Pengelolaan Lingkungan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	90	90	90	90	90
2.	Jumlah Perusahaan Yang Memiliki AMDAL	54	54	54	54	54
3.	Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Tempat pengelolaan Limbah	16	16	16	16	16
4.	Jumlah Sumber Air Yang Dipantau Kualitasnya, Ditetapkan Status Mutu Airnya Dan Diinformasikan Status Mutu Airnya	5	5	5	5	5
5.	Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan	2	1	1	1	1
6.	Indeks Kualitas Air	60	55	50	55	50
7.	Indeks Kualitas Udara	92	94	94	91	94
8.	Indeks Tutupan Lahan	95	95	97	97	100
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,6 2	79,5 5	78,11	82,60	

Sumber : DLH Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2022 cenderung menurun, namun terjadi peningkatan pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh capaian Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2022 dan 2023 belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk masa mendatang, perlu dilakukan perbaikan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, agar tercapai peningkatan nilai IKLH dengan ketiga komponennya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Berdasarkan hasil analisa terhadap peningkatan indikator Indeks Kualitas Air (IKA) dan penurunan 2 (dua) indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) dan indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2023 dapat dijelaskan beberapa faktor penyebabnya, antara lain :

1. Meningkatnya alih fungsi lahan terutama di daerah resapan air yang berubah fungsi menjadi lahan pertanian dan pertambangan dengan tanaman semusim yang menyebabkan berkurangnya jumlah dan debit mata air; serta masyarakat

2. Rendahnya peran dalam upaya pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sumber daya air;
3. Semakin tingginya beban pencemaran limbah domestik yang berasal dari pemukiman yang linier terhadap pertambahan penduduk;
4. Meningkatnya populasi industri UKM di daerah-daerah di perdesaan yang mengolah makanan dan minuman namun tidak dilengkapi dengan infrastruktur lingkungan yang memadai;
5. Pengawasan penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan yang tidak maksimal akibat refokusing anggaran.

2.4.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penduduk Kabupaten Konawe Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan positif. Jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 sebanyak 81.355 Jiwa dengan komposisi Laki-laki sebanyak 41.853 Jiwa dan Perempuan sebanyak 39.502 Jiwa. Kelompok penduduk usia 0-4 Tahun merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 7,63% jiwa pada tahun 2024, diikuti dengan kelompok usia 5-9 tahun serta kelompok umur 15-19 tahun. Kelompok usia inilah yang paling menjadi perhatian sehingga membutuhkan proses administrasi kependudukan yang baik. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk merupakan salah satu indikator SPM yang dilaksanakan Kabupaten Konawe Utara dalam pelayanan dokumen kependudukan dengan penanggungjawab kegiatan berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara. Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Konawe Utara tahun 2022-2024 ditampilkan pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70
Cakupan Penerbitan KTP
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian						
		2022			2023			2024
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah (Jiwa)
1.	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	25.592	24.062	49.654	29.150	27.407	56.557	53.828
2.	Jumlah Penduduk Wajib KTP	25.733	24.223	49.956	29.133	27.424	56.557	55.273
3.	Persentase penduduk yang memiliki KTP ber-NIK	99,45	99,34	99,4	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab, Konawe Utara, Tahun 2025

Selain cakupan penerbitan KTP, indikator SPM yang juga dilaksanakan Kabupaten Konawe Utara dalam pelayanan dokumen kependudukan adalah cakupan penerbitan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan.

Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebaran informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2019 hingga tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran sampai tahun N	4.310	22.558	27.651	24.744	25.413	19.539
2.	Jumlah kelahiran sampai tahun N	4.310	26.894	31.987	25.949	25.949	26.082

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Persentase penerbitan akta kelahiran	100,00	83,88	86,44	95,36	97,93	74,91

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

2.4.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat atau dalam kata lain *community-development* merupakan salah satu metode gerakan yang digunakan dalam menjalankan pembangunan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, atau kombinasi semua aspek tersebut.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan fasilitasi, seperti pelaksanaan program Jumat Berkah berupa pelayanan, penyuluhan, pemberian bantuan dan melihat langsung potensi desa serta kendala yang dihadapi masyarakat untuk diselesaikan bersama masyarakat desa. Pemerintah kabupaten juga melakukan pendampingan dan penguatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di setiap desa. Upaya-upaya lain seperti pengembangan kapasitas masyarakat desa, kaderisasi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa, serta fasilitasi musyawarah pembangunan desa, fasilitasi pengembangan kebun pekarangan di desa. Upaya-upaya tersebut telah memberikan hasil yang cukup memuaskan, hal ini dapat dilihat pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 sebesar 100% dibanding Tahun 20223 sebesar 0,6757. Adapun capaian kinerja pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.72
Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,5429	0,5855	0,6254	0,6545	0,6757	100,00
2.	Persentase BPD Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase LPM Berprestasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase Posyandu Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Jumlah BUMdes yang aktif	159	159	159	159	159	33,96
7.	kelompok usaha di desa yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	16	33	35	32	-	-

Sumber : DPMD dan Pemdes Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

2.4.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah peserta PUS pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2.73
Kebersertaan Keluarga Berencana
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	PUS	16.979		18.279		18.276		18.372		17.820		12.852	
2.	Peserta KB Aktif	13.256		13.482		13.959		15.709		11.786		7.252	
3.	Peserta KB MKJP	17		22		22		26		45		1.683	
4.	Peserta KB Pria	13		29		29		32		36		180	
5.	Peserta KB Baru	1.878		1.945		2.062		2.214		2.018		3.143	
6.	PUS Unmetneed Rasio	19		21		18		15		17		1.421	
7.	Ekseptor KB Per 100 PUS	81,84		82,62		82,73		85,50		77,46			

Sumber : DPPKB Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Tabel 2.74
Jumlah Kasus Pernikahan dan Perceraian yang tercatat
Tahun 2019 - 2024

No.	Uraian	Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pernikahan yang tercatat	397	418	378	293	357	249
2.	Perceraian yang tercatat	-	-	6	6	19	-
3.	Pasangan Usia Dini	127	98	64	-	-	-

Sumber : BPS, Konaawe Utara Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.75
Jumlah Kampung KB di Kabupaten Konaawe Utara
Tahun 2024

No.	Uraian	Lokasi	Kedudukan
1.	Kec. Wiwirano	- Kelurahan Lamona - Desa Wacumelewe - Desa Larompana - Desa Mataosole - Desa Culambatu - Desa Wawontoaha - Desa Tetewatu - Desa Pondo - Desa Padalere Utama - Desa Wacupinodo - Desa Padalere - Desa Wawosangi - Desa Lamona Utama	Kampung Keluarga Berkualitas
2.	Kec. Landawe	- Desa Landawe Utama - Desa Kuratao - Desa Landiwo - Desa Kolosua - Desa Lahumoso - Desa Polopolora - Desa Hialu Utama - Desa Hialu - Desa Tambakua	Kampung Keluarga Berkualitas
3.	Kec. Langgikima	- Kelurahan Langgikima - Desa Alenggo - Desa Sarimukti - Desa Tobimeita - Desa Morombo Pantai	Kampung Keluarga Berkualitas

No.	Uraian	Lokasi	Kedudukan
		- Desa Molore - Desa Molore Pantai - Desa Ngapainia - Desa Lameruru - Desa Polorah Indah	
4.	Kec. Oheo	- Desa Badaeha - Desa Horoe - Desa Landawe - Desa Lameoru - Desa Kota Maju - Desa Wiwirano - Desa Walandawe - Desa Puuhialu - Desa Tadolojiyo - Desa Linomoyo - Desa Tadolojiyo Trans - Desa Sambandete - Desa Paka Indah - Desa Tinondo - Desa Laronaha	Kampung Keluarga Berkualitas
5.	Kec. Asera	- Kelurahan Wanggudu - Desa Puunggomosi - Desa Walasolo - Desa Longeo Utama - Desa Tangguluri - Desa Amorome Utama - Desa Kota Mulya - Desa Amorome - Desa Walalindu - Kelurahan Asera - Desa Asemi Nunulai - Desa Oheo Trans - Desa Andedao - Desa Wunduhaka - Desa Wawolimbue - Desa Wanggudu Raya - Desa Alaa Wanggudu	Kampung Keluarga Berkualitas
6.	Kec. Andowia	- Kelurahan Andowia - Desa Ambake - Desa Anggolohipo - Desa Lamondowo - Desa Laronanga - Desa Lambudoni - Desa Larobende - Desa Lahimbua	Kampung Keluarga Berkualitas

No.	Uraian	Lokasi	Kedudukan
		- Desa Mataiwoi - Desa Banggarema - Desa Puuwonua - Desa Waworate - Desa Labungga	
7.	Kec. Molawe	- Kelurahan Molawe - Desa Bandaeha - Desa Mataiwoi - Desa Awila - Desa Awila Puncak - Desa Tapungaya - Desa Mowundo	Kampung Keluarga Berkualitas
8.	Kec. Lasolo	- Desa Otolé - Desa Watukila - Desa Larodangge - Desa Waworaha - Desa Andumowu - Desa Lametono - Desa Belalo - Desa Abola - Desa Matapila - Desa Andeo - Desa Tetelupai - Desa Basule - Kelurahan Tinobu - Desa Tokowuta - Desa Morombo Pantai	Kampung Keluarga Berkualitas
9.	Kec. Lembo	- Desa Alo-Alo - Desa Puulemo - Desa Laramo - Desa Padaleu - Kelurahan Lembo - Desa Bungguosu - Desa Lapulu - Desa Puusiambu - Desa Taipa - Desa Tongalino	Kampung Keluarga Berkualitas
10.	Kec. Sawa	- Desa Puudonggala Utama - Desa Puupi - Desa Lalembo - Desa Tundungano - Desa Pekaroa - Desa Laimeo	Kampung Keluarga Berkualitas

No.	Uraian	Lokasi	Kedudukan
11.	Kec. Motui	- Desa Tongauna - Desa Matanggonawe - Desa Kokapi - Kelurahan Sawa - Desa Pudonggala	Kampung Keluarga Berkualitas
		- Kelurahan Bende - Desa Puungulahi - Desa Matandahi - Desa Kapulano - Desa Puuwongia - Desa Banggina - Desa Motui - Desa Ranombupulu - Desa Wawoluri - Desa Tondowatu - Desa Sama Subur - Desa Tobi Meita - Desa Samba Sule	
		- Desa Waturambaha - Desa Boedingi - Desa Morombo - Desa Tapunopaka - Desa Labengki	
12.	Kec. Lasolo Kepulauan	- Desa Otipulu - Desa Toreo - Desa Wawolesea - Desa Lemobajo - Desa Barasanga - Desa Kampoh Cina - Desa Kampoh Bunga	Kampung Keluarga Berkualitas
13.	Kec. Wawolesea		Kampung Keluarga Berkualitas

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

2.4.3.2.9 Perhubungan

Kabupaten Konawe Utara sebagai pintu gerbang dari wilayah utara Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki beberapa fasilitas prasarana perhubungan yang mendukung arus transportasi baik barang maupun penumpang. Tabel 2.76 memperlihatkan prasarana perhubungan yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.76
Sarana dan Prasarana Perhubungan
di Kabupaten Konawe Utara tahun 2024

No	Jenis Prasarana Moda	Jumlah (Unit)	Lokasi
1.	Transportasi Udara	1	
	- Heliport	1	Kel. Wanggudu
2.	Transportasi Perairan	20	-
	- Pelabuhan Laut	1	Ds. Lameruru,
		1	Kel. Molawe
		1	Ds. Molore
		1	Ds. Boenaga
		1	Ds. Waturambaha
		1	Ds. Tapungggaya
	- Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Kel. Molawe
		1	Ds. Pasir Putih
		1	Ds. Tokowuta
		2	Ds. Taipa
		1	Kel. Tinobu
		1	Ds. Kampo Cina
		1	Ds. Ulu Sawa
		1	Kel. Lamonae
		2	Andowia
	- Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Ds. Bandaeha-Oheo
		1	Ds. Lambuluo
		1	Ds. Banggina
3.	Transportasi Darat	1	
	- Terminal Angkutan Darat Type B	1	Ds. Lahimbua

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Konawe Utara, 2025

Tabel 2.77
Prasarana Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

No	Jenis Prasarana	Lokasi		Status Operasional
		Koordinat	Tempat	
1.	Tersus PT. Cinta Djaya	3°33'54.00"S // 122°12'11.89"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
2.	Tersus PT. Stargate Resource Pasific	3°18'27.73"S // 122°17'09.45"T	Ds. Molore	Beroperasi
3.	Tersus PT. Stargate Resource Pasific	3°18'40.57"S // 122°17'25.90"T	Ds. Molore	Beroperasi
4.	Tersus PT. Konawe Nikel Nusantara	3°23'32.65"S // 122°15'06.23"T	Ds. Morombo	Beroperasi
5.	Tersus PT. Sriwijaya Raya	3°33'51.80"S // 122°12'37.76"T	Ds. Tapungaya	Beroperasi
6.	Tersus PT. Pertambangan Bumi Indonesia	3°23'46.24"S // 122°14'31.47"T	Ds. Morombo Pantai	Beroperasi
7.	Tersus PT. Makmur Lestari Primatama	3°19'30.10"S // 122°17'39.70"T	Ds. Molore	Belum Beroperasi
8.	Tersus PT. Cipta Djaya Surya	3°19'50.20"S // 122°17'27.49"T	Ds. Molore	Beroperasi
9.	Tersus PT. Bumi Konawe Abadi	3°47'45.08"S // 122°27'51.66"T	Ds. Pudonggala	Beroperasi
10.	Tersus PT. Bumi Konawe Minerina	3°34'50.79"S // 122°11'56.03"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
11.	Tersus PT. Bumi Konawe Minerina	3°34'36.40"S // 122°14'07.66"T	Ds. Tapungaya	Beroperasi
12.	Tersus PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera	3°39'59.50"S // 122°15'34.20"T	Ds. Tapunopaka	Beroperasi
14.	Tersus PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera	3°21'25.30"S // 122°17'34.23"T	Ds. Molore	Beroperasi
15.	Tersus PT. Pernick Sultra	3°21'44.94"S // 122°19'30.58"T	Ds. Waturambaha	Beroperasi
16.	Tersus PT. Sultra Jembatan Mas	3°24'9.02"S // 122°23'13.89"T	Ds. Waturambaha	Belum Beroperasi
17.	Tersus PT. Adhi Kartiko Pratama	3°16'39.99"S // 122°18'36.18"T	Ds. Lameruru	Beroperasi
18.	Tersus PT. Kembar Emas Sultra	3°17'19.68"S // 122°18'09.51"T	Ds. Lameruru	Beroperasi
19.	Tersus PT. Sinar Jaya Utama Sultra	3°22'12.92"S // 122°20'25.17"T	Ds. Waturambaha	Beroperasi
20.	Tersus PT. Wanagon Anoa Indonesia	3°34'38.96"S // 122°11'53.96"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
21.	Tersus PT. Bosowa Minning	3°16'48.48"S // 122°18'27.63"T	Ds. Lameruru	Beroperasi
22.	Tersus PT. Daka Group	3°26'59.32"S // 122°23'02.25"T	Ds. Boedinge	Beroperasi
23.	Tersus PT. Mallibu	3°24'08.25"S // 122°14'34.16"T	Ds. Morombo Pantai	Tidak Beroperasi
24.	Tersus PT. Cipta Djaya Surya	3°23'31.07"S // 122°14'37.98"T	Ds. Morombo Pantai	Beroperasi
25.	Tersus PT. Manunggal Sarana Surya Pratama	3°24'14.63"S // 122°23'19.76"T	Ds. Waturambaha	Beroperasi
26.	Tersus PT. Paramitha Persadatama	3°26'22.62"S // 122°23'01.79"T	Ds. Boedinge	Beroperasi

No	Jenis Prasarana	Lokasi		Status Operasional
		Koordinat	Tempat	
27.	Tersus PT. Bhumi Karya Utama	3°22'52.37"S // 122°16'27.79"E	Ds. Morombo	Beroperasi
28.	Tersus PT. Tristaco Mineral Makmur	3°22'22.22"S // 122°16'41.20"E	Ds. Morombo	Beroperasi
29.	Tersus PT. Karyatama Konawe Utara	3°16'45.18"S // 122°18'30.49"E	Ds. Lameruru	Belum Beroperasi
30.	Tersus PT. Duta Tambang Gunung Perkasa	3°23'29.88"S // 122°16'17.12"E	Ds. Morombo	Beroperasi
31.	Tersus PT. Binanga Hartama Raya	3°22'54.51"S // 122°18'17.83"E	Ds. Morombo	Beroperasi
32.	Tersus PT. Bhumi Swadaya Mineral	3°16'26.78"S // 122°18'39.91"E	Ds. Lameruru	Beroperasi
33.	Tersus PT. Bososi Pratama	3°23'57.87"S // 122°14'27.84"E	Ds. Morombo Pantai	Beroperasi
34.	Tersus PT. Indra Bakti Mustika	3°17'14.85"S // 122°18'14.35"E	Ds. Lameruru	Belum Beroperasi
35.	Tersus PT. Roshini Indonesia	3°23'00.78"S // 122°21'12.71"E	Ds. Waturambaha	Beroperasi
36.	Tersus PT. Tiran Indonesia	3°16'24.50"S // 122°18'48.90"E	Ds. Lameruru	Beroperasi
37.	Tersus PT. Primastian Metal Pratama	3°27'41.76"S // 122°21'56.14"E	Ds. Boedinge	Beroperasi
38.	Tersus PT. Global Citra Konawe Utara	3°47'43.60"S // 122°27'37.67"E	Ds. Pudonggala	Beroperasi
39.	Tersus PT. Antam	3°27'58.48"S // 122°18'4.22"E	Ds. Tapunopaka	Beroperasi
40.	Tersus PT. Alam Raya Indah	3°22'09.00"S // 122°17'05.84"E	Ds. Morombo	Beroperasi
41.	Tersus PT. Titan Agro Abadi	3°24'27.64"S // 122°14'35.10"E	Ds. Morombo	Belum Beroperasi
42.	Tersus PT. Jety Baraya Sulawesi	3°34'3.46"S // 122°12'28.86"E	Ds. Mandiodo	Beroperasi
43.	Tersus PT. Kabaena Kromit Pratama	3°34'24.46"S // 122°11'51.83"E	Ds. Mandiodo	Beroperasi
44.	Tersus PT. Cinta Djaya	3°33'55.17"S // 122°12'0.51"E	Ds. Mandiodo	Beroperasi
45.	Tersus PT. Rizki Sinar Biokas	3°27'48.37"S // 122°22'3.46"E	Ds. Boedinge	Belum Beroperasi
46.	Tersus PT. Apollo Nikel Indonesia	3°22'52.62"S // 122°22'0.15"E	Ds. Waturambaha	Belum Beroperasi
47.	Galangan PT. Buana Karya Shipyard	3°23'45.28"S // 122°15'19.08"E	Ds. Morombo	Beroperasi

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, 2023

Tabel 2.78
Kondisi Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

No.	Lokasi Dermaga Rakyat/ Pelabuhan Rakyat	Jenis Dermaga/Pelabuhan	Jumlah	Kondisi
1	Ds.Lameruru	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
2	Ds. Ngapainia	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
3	Ds.Molore	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
4	Ds. Boenaga	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
5	Ds.Boedingi	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
6	Ds.Mataiwoi	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
7	Ds.Watukila	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
8	Ds.Toreo	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
9	Ds.Labengki	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
10	Ds. Waturambaha	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
11	Ds. Tapungggaya	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
12	Kel. Molawe	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
13	Ds. Pasir Putih	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
14	Ds. Tokowuta	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
15	Ds. Taipa	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	2	Berfungsi sebagian
16	Kel. Tinobu	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
17	Ds. Kampo Cina	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
18	Ds. Ulu Sawa	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
19	Kel. Lamonae	Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Berfungsi baik
20	Andowia	Pelabuhan Sungai dan Danau	2	Berfungsi sebagian
21	Ds. Bandaeha-Oheo	Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Berfungsi baik
22	Ds. Lambuluo	Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Berfungsi baik
23	Ds. Banggina	Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Berfungsi baik

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, 2025

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Konawe Utara berupa armada bis angkutan penumpang sedangkan armada lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.79
Jumlah Sarana Transportasi Darat, Laut, Sungai dan Danau
Di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

No	Jenis Sarana Angkutan	Jumlah Sarana					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bus Besar	4	4	4	4	4	4
2.	Bus Sedang	10	10	56	40	40	43
3.	Bus Kecil	42	42	1.723	1.101	1.101	1.113
4.	Truck Besar	56	56	70	70	230	232
5.	Truck Sedang	39	39	212	214	300	303
6.	Truck Kecil/Pick UP	44	65	622	624	700	702
7.	Perahu Jukung	405	405	428	579	579	581
8.	Perahu Ketek	196	196	190	224	224	226
9.	Speed Boat	28	28	35	36	36	36

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, 2025

Kedepan perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, antara lain melakukan kajian tentang pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, memperbaiki sistem serta sarana dan prasarana fisik angkutan umum melalui Program peningkatan pelayanan angkutan, kegiatan pengumpulan database pelayanan angkutan, survei angkutan umum dan tradisional, dan survei angkutan barang.

Kecelakaan Kecelakaan adalah kejadian yang diterima dan merupakan hasil dari sekumpulan yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan yang dapat menimbulkan segala bentuk kerugian baik itu dari segi materi maupun dari segi non materi yang menimpa setiap manusia, benda fisik seperti kekayaan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya yang menyangkut dari itu semua. Kecelakaan dibedakan dengan insiden, perbedaan dari keduanya itu terdapat pada ada atau tidaknya kerugian. Kecelakaan selalu disertai dengan timbulnya kerugian, dan sedangkan insiden tidak adanya kerugian yang didapat oleh manusia. Korban kecelakaan dapat berupa luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia.

Kecelakaan di Kabupaten Konawe Utara cenderung mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2024 jumlah kecelakaan sebanyak 58 kasus meningkat dari tahun 2023 yang

sebesar 48 kasus. Jumlah kasus kecelakaan dan korban kecelakaan di Kabupaten Konawe Utara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Jumlah Kecelakaan dan Korban Kecelakaan di
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kecelakaan	29	29	41	62	48	58
2.	Jumlah Korban Kecelakaan	50	58	69	88	81	86
	- Meninggal Dunia	10	9	12	16	14	21
	- Luka Berat	1	14	1	-	-	2
	- Luka Ringan	39	35	56	72	67	65

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2025

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam menekan angka kecelakaan antara lain dengan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana serta peningkatan perlengkapan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten. Perlengkapan jalan yang berfungsi baik di Kabupaten Konawe Utara setiap tahun mengalami peningkatan. Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik serta target perlengkapan jalan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.81
Jumlah Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik (Unit)	112	126	140	152	280
2.	Target perlengkapan jalan (Unit)	344	372	397	407	418
3.	Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	32,56	33,90	35,24	37,35	66,94

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

2.4.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan media komunikasi dan informasi di Kabupaten Konawe Utara memperlihatkan pertumbuhan yang cukup

pesat, hal ini tentunya sangat didukung dengan kebutuhan masyarakat akan media komunikasi dan informatika yang terus meningkat. Gambaran tentang perkembangan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.82
Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase wilayah yang terlayani jaringan mobile broadband	72,92	76,02	78,70	80,00	84,28	84,52
2.	Jumlah Kecamatan Yang Terlayani	7 Kec.	7 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.
3.	Jumlah penduduk yang menggunakan handphone.	29.651	29.712	30.454	52.274	64.808	66.721
4.	Jumlah BTS	19	21	32	63	63	63
5.	Jumlah Penerapan sistem informasi/aplikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	13	20	21	86	86	86

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memiliki satu website utama dengan alamat <http://www.konaweutarakab.go.id/>, dengan 9 subdomain. Subdomain untuk OPD sebagaimana disajikan pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83
Alamat Subdomain Website
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Penerapan Sistem Informasi/Aplikasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

NO	NAMA SUBDOMAIN	INSTANSI	STATUS	KETERANGAN
1	bagor.konaweutarakab.go.id	BAGIAN ORGANISASI	Aktif	Terkelola
2	bkad.konaweutarakab.go.id	BKAD	Aktif	Terkelola
3	bkpsdm.konaweutarakab.go.id	BPKPSDM	Aktif	Terkelola
4	bloglpse.konaweutarakab.go.id	BAGIAN PENYEDIA BARANG DAN JASA	Aktif	Terkelola
5	dinkes.konaweutarakab.go.id	DINAS KESEHATAN	Non Aktif	Kontrak Hosting Habis
6	dishub.konaweutarakab.go.id	DINAS PERHUBUNGAN	Aktif	Terkelola

NO	NAMA SUBDOMAIN	INSTANSI	STATUS	KETERANGAN
7	diskominfo.konaweutarakab.go.id	DINAS KOMINFO	Aktif	Terkelola
8	dispenda.konaweutarakab.go.id	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Aktif	Terkelola
9	distanak.konaweutarakab.go.id	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Non Aktif	Belum Terkelola/Server
10	dpkp.konaweutarakab.go.id	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Aktif	Terkelola
11	dpmd.konaweutarakab.go.id	DPMD	Non Aktif	Kontrak Hosting Habis
12	dpmpmsp.konaweutarakab.go.id	DINAS PERISINAN DAN PTSP	Aktif	Terkelola
13	dukcapil.konaweutarakab.go.id	DINAS CAPIL	Aktif	Terkelola
14	e-kinerja.konaweutarakab.go.id	BKPSDM	Aktif	Terkelola
15	e-lapkin.konaweutarakab.go.id	BKPSDM	Aktif	Terkelola
16	e-planning.konaweutarakab.go.id	BAPPERIDA	Aktif	Terkelola
17	e-presensi.konaweutarakab.go.id	BKPSDM	Aktif	Terkelola
18	e-tukin.konaweutarakab.go.id	BKPSDM	Aktif	Tidak Terkelola
19	humas.konaweutarakab.go.id	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Non Aktif	Integrasi SKPD
20	info.konaweutarakab.go.id	DINAS KOMINFO	Non Aktif	Tidak Terkelola
21	infocovid19.konaweutarakab.go.id	DINAS KESEHATAN	Non Aktif	Aktifasi Posko
22	jidh.konaweutarakab.go.id	BAGIAN HUKUM	Aktif	Terkelola
23	lpse.konaweutarakab.go.id	BAGIAN PENYEDIA BARANG DAN JASA	Aktif	Terkelola
24	nakertrans.konaweutarakab.go.id	DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI	Aktif	Terkelola
25	pembangunan.konaweutarakab.go.id	BAGIAN PEMBANGUNAN	Aktif	Terkelola
26	perpus.konaweutarakab.go.id	DINAS PERPUSTAKAAN	Aktif	Terkelola
27	ppid.konaweutarakab.go.id	DINAS KOMINFO	Non Aktif	Hosting Belum Ada
28	sianawai.konaweutarakab.go.id	BAGIAN ORTALA	Aktif	Terkelola
29	siap.konaweutarakab.go.id	BAGIAN PEMBANGUNAN	Aktif	Terkelola
30	simda.konaweutarakab.go.id	BKAD	Aktif	Terkelola
31	ssh.konaweutarakab.go.id	BKAD	Aktif	Terkelola
32	disperindag.konaweutarakab.go.id	DISPERINDAG	Aktif	Terkelola
33	jdih-dprd.konaweutarakab.go.id	SEKRETARIAT DPRD	Aktif	Terkelola

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Utara, Tahun 2024

2.4.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Layanan umum bidang urusan koperasi dan UMKM diarahkan pada pengembangan koperasi dan UMKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi dan UMKM. Perkembangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Persentase Koperasi Aktif
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	287	296	304	347	351	348
2	Jumlah Koperasi Aktif	224	227	113	192	196	194
3	Persentase Koperasi Aktif	78,05	76,69	37,17	55,33	55,84	56

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2025

Tabel 2.85
Perkembangan Modal dan Aset Koperasi
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Modal Sendiri (Rp.Juta)	3.961	3.968	2.1201	5.250	4.762
2	Modal Luar (Rp.Juta)	3.763	3.763	9.448	465.100	944.800
3	Aset (Rp.Ribu)	675.582	675.582	7.906.053	2.353.317	8.027.983
4	Omzet (Rp.Ribu)	712.500	705.375	14.425.452	816.192	877.800

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2025

Sasaran pembangunan dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Konawe Utara antara lain meningkatnya kinerja, produktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM, serta terwujudnya masyarakat yang berjiwa wirausaha (entrepreneur) tinggi dan mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada.

Upaya yang telah dilakukan antara lain fasilitasi UMKM, pelatihan manajemen ekspor, impor, dan pelatihan penggunaan teknologi. Perkembangan UKM di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2023 jumlah UMKM di Kabupaten Konawe Utara mencapai sebanyak 4.449 unit, meningkat dibanding tahun 2022.

Tabel 2.86
Pertumbuhan Jumlah UMKM
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Usaha Mikro	1.021	1.079	1.086	2.698	3.411
2.	Usaha Kecil	1.323	1.364	1.374	939	939
3.	Usaha Menengah	133	132	132	99	99
Jumlah UMKM		2.477	2.575	2.592	3.736	4.449

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2025

Tabel 2.87
Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Usaha Mikro	1.506	1.392	1.468	4.996	6.822
2.	Usaha Kecil	2.559	912	963	1.168	1.757
3.	Usaha Menengah	457	270	282	615	1.037
Jumlah Tenaga Kerja		4.522	2.574	2.713	6.779	9.616
Angkatan Kerja		31.104	29.535	32.552	33.811	35.992
Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM		14,54	8,72	8,33	20,05	26,72

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2025

2.4.3.2.12 Penanaman Modal

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Kabupaten Konawe Utara yang kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam, menjadi perhatian khusus bagi para penanam modal dalam negeri (I) maupun penanam modal asing (PMA) untuk berinvestasi. Kondisi ini diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.88
Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Investor			Nilai Investasi (Rp.Milyar)	Peningkatan nilai realisasi (Rp. Milyar)	Persentase Peningkatan (%)
	PMDN	PMA	Total			
2019	2	6	8	52.964.678.436	52.964.678.436	-
2020	2	6	8	79.822.558.294	79.822.558.294	50,71
2021	2	6	8	756.647.610.089	756.647.610.089	847,91
2022	2	6	8	1.195.694.966.121	1.195.694.966.121	58,03
2023	2	6	8	1.895.410.871.545	1.895.410.871.545	58,52
2024	2	6	8	1.163.726.533.205	1.163.726.533.205	-38,60

Sumber : Dinas PM dan Pelayanan Terpadu Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

2.4.3.2.14 Kepemudaan dan Olahraga

Kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan khususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi dan komunitas melalui pengembangan potensi pemuda dan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan diantaranya melalui pelatihan bela negara, karang taruna, pemuda dan sosial, serta kader anti narkoba.

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan. Peningkatan organisasi olahraga di Kabupaten Konawe Utara tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam memasyarakatkan olahraga.

Tabel 2.89
Perkembangan Olahraga
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Organisasi	14	16	16	17	17	34
2.	Jumlah Atlit yang dibina	1	4	11	15	15	34
3.	Jumlah klub olahraga	20	21	21	23	23	56
4.	Jumlah sarana olahraga	294	295	300	314	326	345

Sumber : Dispora Konawe Utara, Tahun 2025

Pada Pekan olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014, Kabupaten Konawe utara memperoleh peringkat 11, dan pada tahun 2018 peringkat 6 dari 17 kabupaten/kota. Pada Tahun 2022, Kabupaten Konawe Utara berhasil menempati peringkat 2 dari 17 Kabupaten/Kota. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam membangun olahraga, yang didukung oleh sarana dan prasarana olahraga serta kesejahteraan atlet. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memberikan insentif kepada atlet yang meraih medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 hingga Rp.50.000.000,- per atlet.

2.4.3.2.14 Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Konawe Utara masih ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertempat di Wanggudu. Namun demikian, karena melihat bahwa di segenap kegiatan statistik perlu diadakan keseragaman dan koordinasi, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bekerjasama dengan BPS melaksanakan beberapa program yang hasilnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, yaitu terdiri dari 4 (empat) publikasi; Buku Daerah Dalam Angka, Buku PDRB, Statistik Daerah, dan Statistik Kesejahteraan.

Urusan statistik sektoral di Kabupaten Konawe Utara dikoordinasi oleh Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan Bapperida Kabupaten Konawe Utara, salah satunya dengan menerbitkan kompilasi produk administrasi. Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, telah diterbitkan kompilasi statistik infrastruktur wilayah Tahun 2023 dan 2024 yang telah mendapat rekomendasi dari BPS serta telah didesiminasi dan dipublikasi.

2.4.3.2.15 Persandian

Bagi pemerintah daerah, masalah persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengendalian sistem keamanan informasi merupakan pelaksanaan dari urusan persandian. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain, meliputi: Sosialisasi Keamanan Informasi ; Pemeliharaan Jaringan telekomunikasi; Kegiatan Forum Komunikasi Sandi Daerah; Koordinasi persandian pusat dan daerah.

2.4.3.2.16 Kebudayaan

Salah satu potensi sebagai penyangga utama wisata di Kabupaten Konawe Utara adalah potensi budaya baik yang berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda. Upaya pelestarian budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai tradisi budaya dan warisan budaya melalui festival.

Tabel 2.90
Kinerja Urusan Kebudayaan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	-	-	2	4	4
2.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	1	1	1	1	1
3.	Situs Cagar Budaya Yang Dilindungi	4	4	4	4	4
4.	Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi	-	-	-	-	-
5.	Bagunan Cagar Budaya Yang Dilindungi	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Utara, Tahun 2025

2.4.3.2.17 Perpustakaan

Urusan perpustakaan selama tahun 2019 hingga 2023 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan semakin meningkat. Capaian kinerja yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.91
Kinerja Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan	769	825	219	308	574
2.	Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	2.286	2.291	2.291	2.291	12.127

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
3.	Jumlah eksamplar koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	7.573	7.624	7.624	7.642	97.015
4.	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan buku	5	6	-	-	-

Sumber : Dinas Perpustakaan Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

2.4.3.2.18 Kearsipan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebuktian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Pada urusan Kearsipan yaitu Pengelolaan arsip secara baku dengan indikator kinerja yaitu persentase arsip statis dan dinamis yang diarsipkan dan Peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Konawe Utara, pada tahun 2022 sebesar 9,88% meningkat di Tahun 2023 menjadi sebesar 10,48% persen.

2.4.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Kondisi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.92
Kondisi Pengelolaan Sub Sektor Perikanan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)	39,93	39,77	39,74	39,23	37,15	39,70
2.	Produksi Perikanan (Ton)						
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	15.165	15.059	15.300,49	15.265,8	15.678,28	15.463,3
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	9.397	8.819	9.439,78	10.055,04	9.529,10	9.860
	Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	1.503	1.378	1.404,91	1.378,35	1.559,04	1.604.125
3.	Nilai Hasil Perikanan (Juta Rp.)						
4.	Konsumsi Ikan (Kg/kap/thn)	49,27	49,32	46,39	50,35	48,91	48,91
5.	Jumlah Unit Pengolahan Ikan						
	- Pengasapan Ikan	85	88	88	103	103	103
	- Penggaraman/Pengeringan	255	258	258	270	270	270
6.	Jumlah Unit Armada & Alat Tangkap Ikan						
	- Perahu Tanpa Motor	341	330	441	455	414	414
	- Motor Tempel	2.128	1.832	1.684	1.723	1.916	1.943
	- Kapal Motor	73	76	328	328	229	229
	- Alat tangkap pukat	360	455	837	552	699	25
	- Alat tangkap jaring	894	1030	1.099	1.523	2.573	1.121
	- Alat tangkap pancing	490	630	2.198	2.223	2.223	450
	- Alat tangkap lainnya	354	504	4.115	4.560	3.142	33
7.	Nilai Tukar Nelayan	106,09	106,12	104,93	102,45	104,92	96,98

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2025

2.4.3.3.2 Pariwisata

Pengembangan Potensi Kepariwisata yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 – 2026 yang telah membagi Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) menjadi 6 (enam) wilayah KPP yaitu : KPP Taipa, KPP Pulau Labengki, KPP Wawolesea, KPP Wiwirano, KPP Oheo, dan KPP Asera.

Perkembangan Kepariwisata Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas dan sarana penunjang. Capaian kinerja Kebudayaan dan Pariwisata dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.93
Kondisi Pengelolaan Pariwisata
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

No.	Indikator Kinerja	Capain					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah wisatawan Mancanegara	1.790	44	88	103	148	167
2.	Jumlah wisatawan domestik	61.446	8.143	14.673	28.693	33.735	39.699
	Jumlah Kunjungan (orang)	63.236	8.187	14.761	28.796	33.883	39.866
3.	Jumlah akomodasi	15	23	89	91	103	97.200
4.	Rata - rata lama tinggal (hari)	3	3	3	3	3	3
5.	Jumlah objek wisata	6	6	6	6	6	6
6.	Jumlah desa wisata	1	1	1	12	12	12

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Prioritas Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Konawe Utara yaitu di Kawasan “Segitiga Berlian” (Taipa-Pulau Labengki-Air Panas Wawolesea). Namun demikian, Pemerintah Daerah tetap mengembangkan objek wisata lainnya di Kabupaten Konawe Utara.

2.4.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Konawe Utara. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Konawe Utara, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, selalu berada diatas 39 persen dengan total yang bekerja di sector pertanian sebesar 34,36 dari angkatan kerja

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu

pemanfaatan teknologi pertanian, kelembagaan, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Konawe Utara sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Tabel 2.94
Perkembangan Kinerja Sektor Pertanian
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

No	Kinerja	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian Tanaman Pangan						
1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan (%)	1,73	2,51	2,52	3,29	4,21	
2	Produksi Tanaman Padi (Ton)	7.339,05	6.560,70	7.588,82	8.952,07	8.272,57	7,037
	Luas Panen (Ha)	1.999,45	1.963,44	2.155,96	2.234,94	2.344,20	2,059
	Produktivitas (Ton/Ha)	3,67	3,34	3,52	4,01	3,53	34,18
3	Produksi Jagung (Ton)	14.033	3.539	2.687	4.595,20	1.078,00	4,419
	Luas Panen (Ha)	2.344		43,33	73,70	217,3	838
	Produktivitas (Ton/Ha)	5,99		6,0	6,24	4,96	52,73
B	Hortikultura						
1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Hortikultura (%)	6,65	0,12	0,14	0,48	0,64	
2	Produksi Bawang Merah (Ton)	52,7	152	164,5	97,5	60	1.735,00
	Luas Panen (Ha)			22	13	8	
	Produktivitas (Ton/Ha)			7,47	7,5	7,5	108,43
3	Produksi Cabai (Ton)	421,9	760	1.040	677,5	713,5	7.040
	Luas Panen (Ha)			44	66	38	
	Produktivitas (Ton/Ha)			23,63	10,27	18,78	385,92
C	Peternakan						
1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan (%)	8,18	2,32	2,30	2,36	3,04	
2	Produksi Daging Sapi (Kg)	89.540	91.675	50.365	84.300	169.984	94,103
	Produksi Daging Kambing (Kg)	2.343	2.743	2.530	2.960	1.075	-
	Produksi Daging Ayam (Kg)	76.670	78.871	178.123	102.329	163.727	103,166
	Produksi Daging Itik (Kg)	-	-	1.221	-	7.300	-

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

2.4.3.3.4 Perkebunan

Sub Sektor perkebunan adalah sub sektor andalan Kabupaten Konawe Utara. Laju pertumbuhan sub sektor perkebunan pada PDRB tahun 2023 sebesar 8,14 persen atau meningkat dari tahun 2020 sebesar 8,19 persen. Komoditas utama yang diusahakan antara lain yaitu kakao, kelapa sawit, kelapa, lada dan cengkeh. Tabel berikut menggambarkan luas tanaman menghasilkan dan produksi hasil beberapa komoditas perkebunan di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.95
Perkembangan Produktivitas Sub Sektor Perkebunan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024

No.	Komoditas	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa Dalam	Luas Panen (Ha)	2,426.5	2,426.5	2,654	2,623,50	2,623,5	3032,575
		Produksi (Ton)	1,589.13	961.35	1,698,8	1,836,15		754
		Produktivitas (Ton/Ha)	65.49	39.62	0,62	0,70		
2	Kelapa Sawit	Luas Panen (Ha)	18,006,1	18,006,1	23,293,3	23,243,70		24311,153
		Produksi (Ton)	593.75	60,230	125,153,8	188,985,67		198,424
		Produktivitas (Ton/Ha)	3,30	0,33	5,37	8,13		
3	Kopi	Luas Panen (Ha)	511.5	511,5	547	495		373
		Produksi (Ton)	341.46	251.54	351,05	289,1		215,404
		Produktivitas (Ton/Ha)	66.76	49,18	0,64	0,58		
4	Kakao	Luas Panen (Ha)	3,988.5	3,988.5	3,352	3,101,50		1641
		Produksi (Ton)	1,418.32	585.70	671,1	424,4		283,919
		Produktivitas (Ton/Ha)	35.56	14,68	0,20	0,14		

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2019 s.d 2024

2.4.3.3.5 Kehutanan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi.

Sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah menyiapkan rencanaa peningkatan pengelolaan perhutanan sosial. Kewenangan kab/kota dalam urusan kehutanan berupa pelaksanaan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat oleh kab/kota sesuai dengan PP 23 Tahun 2022 Pasal 26 ayat 7. Hutan Tanaman Rakyat di Konawe Utara seluas ±950 Ha yang berlokasi di Desa Awila, Molawe, Molawe Puncak Kec. Molawe dan Desa Banggarema Kec. Andowia.

2.4.3.3.6 Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini sangat terbatas, khususnya terkait Sumber Daya Energi dan kebutuhan energi secara umum. Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energy adalah dengan melakukan kajian. Kajian Geothermal di Air Panas Wawolesea menunjukkan bahwa energy panas bumi di Wawolesea belum dapat dijadikan alternative energy dikarenakan standar panas minimal energy panas bumi seharusnya 90°C sedangkan panas bumi di Wawolesea adalah 75°C. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan beberapa kajian sebagai langkah awal ketercukupan energy di Kabupaten Konawe Utara.

2.4.3.3.7 Perdagangan

Urusan perdagangan di Kabupaten Konawe Utara diprioritaskan pada pengembangan pasar tradisional. Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pasar tradisional telah berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat, dengan tetap memperhatikan kekhususan pasar rakyat terkait aspek lokasi yang bersifat tetap berupa toko/kios/los dan bentuk lainnya serta menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar.

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian daerah, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain: memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD. Sampai dengan akhir tahun 2025 di Kabupaten Konawe Utara terdapat 13 pasar yang kondisinya sudah baik dan 5 pasar kondisi sedang, data tersebut disajikan pada Tabel 2.96.

Tabel 2.96
Data Kondisi Pasar Tradisional/Rakyat
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

No.	Nama Pasar	Luas Tanah (Ha)	Status	Kondisi	Jumlah Kios	Jumlah Los Kering (Unit)	Jumlah Bos Basah (Unit)	Tahun Rehab
1	Pasar Sawa	3,241	Aktif	Sedang	20	4	1	2017
2	Pasar Motui	1,341	Aktif	Baik	10	6	3	2022
3	Pasar Wawoluri	2.729	Aktif	Sedang	-	5	0	2007
4	Pasar Lembo	9,944	Aktif	Baik	12	4	0	
5	Pasar Tinobu	5,7	Aktif	Baik	32	6	2	2016
6	Pasar Wawolesea	-	Aktif	Baik	36	0	0	2019
7	Pasar Morombo	-	Aktif	Baik	-	2	0	
8	Pasar Molawe	5,61	Aktif	Baik	9	25	0	2019
9	Pasar Tapunggaeya	4.810	Aktif	Sedang	-	3	0	1997
10	Pasar Asera	5	Aktif	Baik	20	8	2	2022
11	Pasar Lahimbua	75,663	Aktif	Baik	96	12	2	2013

No.	Nama Pasar	Luas Tanah (Ha)	Status	Kondisi	Jumlah Kios	Jumlah Los Kering (Unit)	Jumlah Bos Basah (Unit)	Tahun Rehab
12	Pasar Kuliner	8	Aktif	Baik	16	0	0	2019
13	Pasar Laronanga	2.700	Aktif	Baik	-	4	1	
14	Pasar Todoloiyo	5	Aktif	Sedang	36	3	0	2019
15	Pasar Langgikima	18.720	Aktif	Baik	30	15	1	2021
16	Pasar Molore	2.400	Aktif	Baik	-	2	0	2009
17	Pasar Lamonae	10	Aktif	Baik	40	2	0	2016
18	Pasar Landawe	-	Tidak Aktif	Baik	12	3	0	2019
Jumlah					369	104	12	

Sumber : Dinas Perindag Kab. Konawe Utara, 2025

2.4.3.3.8 Perindustrian

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih relatif kecil, hanya 1,03 persen tahun 2023. Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Konawe Utara diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing industri kecil menengah. Perkembangan sektor industri di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.97
Jumlah Industri Kecil Menengah
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 - 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Besar	3	3	3	3	3	
2	Industri Menengah	11	15	15	15	37	-
3	Industri Kecil	257	276	382	247	258	341
4	Jumlah IKM	271	294	400	262	273	
5	Jumlah IKM yang difasilitasi	38	42	48	52	85	

Sumber : Dinas Perindag Kab. Konawe Utara 2025

Tabel 2.98
Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerja
di Kabupaten Konawe Utara tahun 2023

No	Jenis Usaha Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Produksi (unit)	Nilai (Rp.000)
1.	Makanan dan Minuman	216	280	70.704.050	921.800
2.	Kayu dan hasil hutan	194	277	632.905	883.022
3.	Kertas dan barang dari kertas	1	3	400	80.000
4.	Kimia dan barang dari karet	-	-	-	-
5.	Galian bukan logam	48	147	134.504.834	1.824.150
6.	Logam dasar besi dan baja	3	5	110	103.300
7.	Furnitur	60	107	1.604.050.000	480.281
8.	Pengolahan lainnya	1	3	-	26.400
9.	Lainnya	54	72	17.052.150	828.600
Jumlah		577	894	2.459.216.992	5.147.554

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2024

2.4.3.3.9 Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar.

Tabel 2.99
Penempatan Transmigrasi
di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Jumlah KK	Jawa		Jumlah	Asal Daerah
		Laki-Laki	Perempuan		
2016	75	158	125	287	Jawa, Lampung, Banten
2017	25	54	59	113	Jawa, NTB
2019	15	15	17	32	Jawa
2020	14	16	18	34	Jawa
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 4 (empat) wilayah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), yaitu UPT Padalere, UPT Puuhialu, UPT Puupi, dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Hialu. Dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) pada areal kawasan transmigrasi dan permukiman penduduk di Kabupaten Konawe Utara diarahkan untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian para transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.

2.4.3.4 Unsur Pendukung

2.4.3.4.1 Sekretariat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Setda Kabupaten Konawe Utara terdiri atas 12 Bagian.

Tabel 2.100
Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai/ Predikat	B	B	B	B	B
2.	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD)	Nilai/ Predikat	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik
3.	Jumlah produk hukum : - Peraturan Daerah - Peraturan Bupati - Keputusan Bupati	Jumlah	7 35 445	6 81 436	4 52 852	12 50 504	8 99 596

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
4.	Jumlah kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara pemda konawe utara dengan pemerintah daerah lainnya	Kegiatan	143	274	192	188	196
5.	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani dan terselesaikan	%	100	100	100	100	100
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ Predikat	-	CC (50,04)	CC (50,08)	CC (51,04)	CC

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, 2023

Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 dengan nilai B meningkat dari tahun 2017 dengan predikat C. Hal ini dapat diartikan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil, peningkatan keterkaitan antara program,/kegiatan dan sasaran, selanjutnya mengurutkan/cascading semua indikator kinerja dimulai dari dokumen perencanaan jangka menengah sampai dengan perencanaan tahunan masing-masing Perangkat Daerah telah membuahkan hasil yang cukup memuaskan, selanjutnya akan terus ditingkatkan di tahun – tahun mendatang.

2.4.3.4.2 Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan yang telah diberi mandat oleh rakyat dalam urusan pemerintahan. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD di bantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak, tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.4.3.5 Unsur Penunjang

2.4.3.5.1 Perencanaan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Konawe Utara didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam hal perencanaan, ketersediaan dan akurasi data tetap menjadi perhatian, di samping itu sejumlah studi dilakukan untuk menjadi pedoman arah pembangunan ke depan. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pusat juga dilaksanakan.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh stakeholder pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan money dan evaluasi kinerja dalam penerapan e-planning terintegrasi menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Utara, mempunyai kewenangan :

1. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan Rencana Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai usulan program masing-masing yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyusunan rencana kerja pengalokasian dana yang bersumber dari APBN sebagai masukan Bappenas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
4. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menciptakan sinkronisasi program kegiatan OPD serta menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan se-Kabupaten Konawe Utara;
5. melaksanakan tugas koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon

- Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) serta perubahannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, OPD Kabupaten serta membina hubungan kerja dengan Lembaga Non Departemen dan Swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada setiap OPD lingkup Pemerintah Kabupaten sebagai bahan penyusunan program kerja pembangunan tahun berikutnya;
 8. Melaksanakan pengkajian dan penelitian pembangunan Daerah untuk perencanaan pembangunan Daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan petunjuk Bupati.

Selain itu, tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan didukung penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring /network dengan stakeholder lain yang terkait (akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.

Tabel 2.101
Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan dan Kelitbangan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan perkara tepat waktu	2	2	3	3	3
2	Kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD	62,48	60,74	100	100	100
3	Jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh bidang litbang Bapperida	3	3	1	8	7
4	Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	14,11	18,12

Sumber : Bapperida Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

2.4.3.5.2 Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang - undangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD Provinsi Sultra) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan.

Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Namun demikian, berbagai permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi yaitu, belum optimalnya upaya peningkatan potensi pendapatan daerah terutama dari pajak daerah; masih sering terlambatnya pelaporan keuangan daerah; belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan keuangan secara online; dan masih banyaknya permintaan pembayaran yang bertumpu di akhir tahun adalah permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara. Selain itu pengelolaan aset daerah belum optimal terkait dengan masih rendahnya koordinasi antar OPD dalam penghapusan aset daerah dan masih kurangnya tenaga teknis pengukuran aset menggunakan teknologi informasi.

Tabel 2.102
Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Predikat Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Tingkat kemandirian keuangan daerah (persentase realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah)	2,00%	1,49%	1,79%	2,85%	3,01%	3,01%

Sumber : BPKAD Kab. Konawe Utara, 2025

Tabel diatas memperlihatkan masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Konawe Utara. Kondisi tersebut, perlu didukung dengan kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Mengupayakan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD-RI) Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Mengikuti Diklat teknis dan workshop mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
4. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis;
5. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi;
6. Meningkatkan koordinasi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing OPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja Pendapatan Asli Daerah;
7. Meningkatkan koordinasi antar OPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;
8. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui media masa, media online, leaflet, dan lain-lain;
9. Menambah dan merevisi Standard Operating Procedure (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
10. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas melalui pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);

11. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

2.4.3.5.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 berjumlah 4.130 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.103
Kondisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Golongan	2021	2022	2023	2024
1	Golongan I	6	5	4	3
2	Golongan II	345	276	251	202
2	Golongan III	1.937	1.915	2.134	1.799
4	Golongan IV	440	483	543	617
5	Golongan V - PPPK	-	-	-	15
6	Golongan VII - PPPK	-	-	-	481
7	Golongan IX - PPPK	-	-	-	901
8	Golongan X - PPPK	-	-	-	112
Jumlah		2.621	2.728	2.679	4.130

Sumber : BKPSDM Kab. Konawe Utara, 2025

Tabel 2.104
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Golongan	2021	2022	2023	2024
1	Fungsional Tertentu	1.055	1.029	1.177	1.426
2	Fungsional Umum	1.034	986	1.179	648
3	Fungsional PPPK	-	-	-	901
4	Struktural				
	Eselon IV	417	448	354	
	Eselon III	189	174	185	
	Eselon II	33	31	37	
Jumlah		2.496	2.621	2.679	

Sumber : BKPSDM Kab. Konawe Utara, 2025

Permasalahan yang dihadapi pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Konawe Utara diantaranya adalah belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional yang dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan anggaran untuk pejabat fungsional untuk mengikuti diklat teknis.

Tabel 2.105
Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya	154	162	165	165	173
2.	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	371	388	389	389	389

Sumber : BKPSDM Kab. Konawe Utara, 2025

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Konawe Utara belum memiliki sertifikasi/akreditasi, sehingga tidak dapat menyelenggarakan diklat secara mandiri dan belum adanya pasal di dalam PP Nomor 100 tahun 2001 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS yang menyebutkan sanksi bagi Pejabat struktural yang tidak mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjangnya sehingga tersirat bahwa Diklatpim bukan merupakan diklat wajib bagi pejabat struktural. Yang menjadi perhatian kedepannya yaitu perlu pengoptimalan sistem manajemen SDM aparatur dengan menggunakan teknologi informasi sehingga program kegiatan dalam rangka peningkatan aparatur PNS dapat terkontrol dan terencana secara sistematis.

2.4.3.6 Unsur Pengawasan

2.4.3.6.1 Pengawasan (Inspektorat Daerah)

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten Konawe Utara sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Auditor adalah pelaksana pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh auditor. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai, yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan tersebut di atas, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.106
Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Konawe Utara

No.	Tahun	TLHP Internal dan Eksternal	
		Target (%)	Realisasi (%)
1.	2020	100,00	81,02
2.	2021	100,00	80,38
3.	2022	100,00	86,00
4.	2023	100,00	86,49
5.	2024	100,00	81,13

Sumber : Inspektorat Kab. Konawe Utara, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP) baik internal maupun eksternal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Utara selama tahun 2019 - 2023 dengan realisasi melebihi target yang telah direncanakan. Rata rata capaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (THLP) baik internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Utara selama tahun 2019 - 2023 adalah sebesar 86,00%.

Untuk memaksimalkan kinerja APIP maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur Inspektorat Kabupaten Konawe Utara. Berdasarkan formasi dan hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, pada tahun 2022 masih terdapat kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan sejumlah 35 personil. Kondisi jumlah tenaga Aparatur Pengawasan dan rincian kebutuhannya terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.107
Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan dan Status Leveling APIP di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	Kebutuhan	Kekurangan
1	Struktural			
	Inspektur	1	1	-
	Sekretaris	1	1	-
	Inspektur Pembantu	4	4	-
	Kasubag	2	2	-
	Staf	10	20	10
2	Fungsional Tertentu			
	Auditor	14	65	51
	P2UPD	3	50	47
	Auditor Kepegawaian	-	-	-
3	Fungsional Umum	9	12	3
	Jumlah	39	155	38
Status Leveling APIP		3		

Sumber : Inspektorat Kab. Konawe Utara, 2024

2.4.3.7 Unsur Kewilayahan

Fungsi penunjang pemerintahan umum merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 13 (tiga belas) wilayah kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat adalah pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diangkat oleh Bupati.

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat

dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

2.5.1 KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terutama penyesuaian akibat kondisi perekonomian nasional.

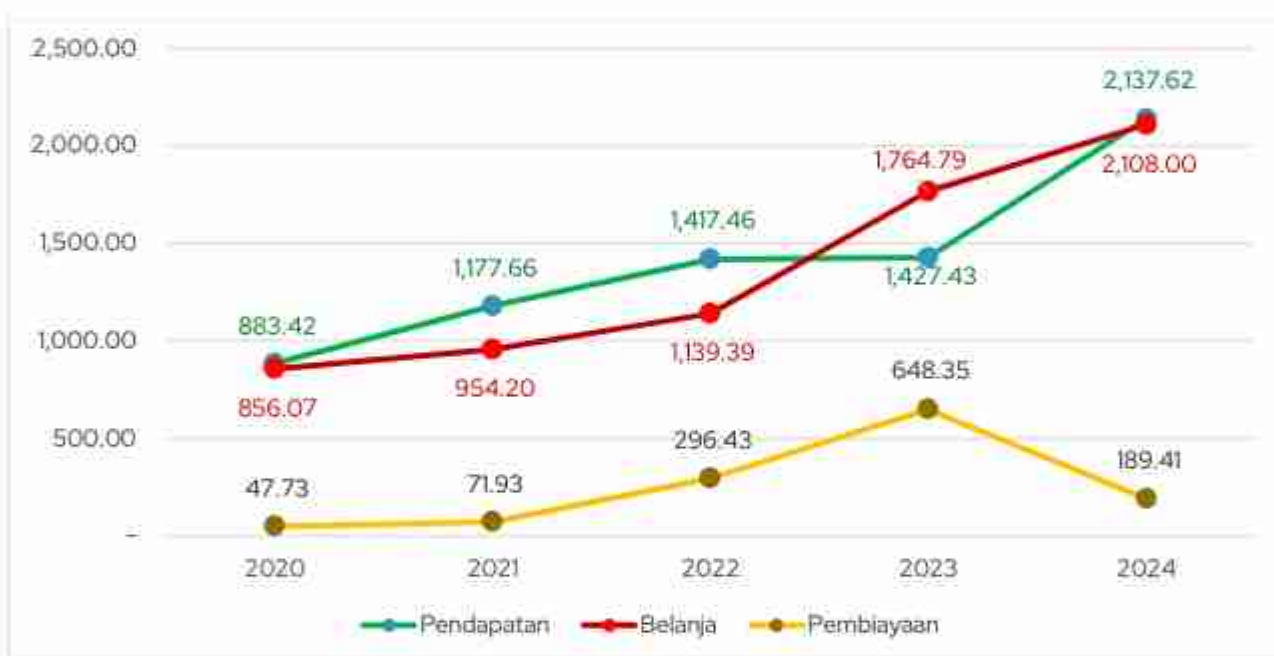
Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

2.5.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan

realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama 5 tahun ke depan (dari tahun 2026 s.d tahun 2030) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri. Gambaran umum realisasi APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 disajikan dalam gambar 2.32 berikut.

Gambar 2.32 Gambaran Umum Realisasi APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan daerah Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan dari sebesar 883,42 Milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi 2.137,62 Milyar rupiah pada tahun 2024. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai sebesar 20,36%. Pertumbuhan

pendapatan daerah berfluktuasi, tertinggi pada tahun 2024 sebesar 49,75% dan terendah pada tahun 2020 sebesar minus 2,34%. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah fluktuatif dengan rata-rata sebesar 33,85%. Pertumbuhan pendapatan transfer fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 20,81%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,26%.

Pertumbuhan APBD Kabupaten Konawe Utara tahun 2020-2024 secara rinci tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.108
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	Peningkatan (%)					Rata-rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
4	PENDAPATAN	(2.34)	33.31	20.36	0.70	49.75	20.36
4.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	63.48	18.70	19.79	14.67	52.60	33.85
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	278.24	(51.90)	42.49	30.55	8.25	61.53
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	10.17	(41.06)	(37.87)	37.64	1.69	(5.89)
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.66	15.95	12.02	17.04	72.79	28.89
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.16	102.39	18.65	8.92	65.25	42.47
4.02	PENDAPATAN TRANSFER	(2.14)	34.79	17.42	4.31	49.68	20.81
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	(7.15)	43.43	20.84	4.32	56.31	23.55
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	48.55	226.98	52.07	5.30	87.98	84.17
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	(8.93)	(1.76)	(0.12)	4.32	13.44	1.39
4.2.01.03	Dana Alokasi khusus	(30.30)	17.84	(6.07)	(0.47)	46.02	5.41
04.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	23.35	(1.97)	(9.74)	(1.01)	8.52	3.83
4.2.02.01	Dana Otonomi Khusus						
4.2.02.02	Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD)	23.35	(1.97)	(9.74)	(1.01)	8.52	3.83
04.02.03	Transfer Pemerintah Provinsi	23.00	31.19	50.81	22.97	(1.04)	25.39
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.00	31.19	50.81	22.97	(1.04)	25.39
4.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	(43.38)	(8.63)	212.01	(98.32)	(0.36)	12.26
04.03.01	Pendapatan Hibah	(43.18)	(91.69)	3,421.29	(98.32)	(0.36)	637.55
04.03.02	Pendapatan Dana Darurat						
04.03.03	Pendapatan Lainnya	(50.00)	3,061.58	(100.00)			970.53
5	BELANJA	(1.75)	11.46	19.41	35.22	36.82	20.23
5.01	BELANJA OPERASI	(3.92)	24.00	11.05	32.58	22.35	17.21
05.01.01	Belanja Pegawai	3.29	30.00	3.77	4.88	26.39	13.67
05.01.02	Belanja Barang dan jasa	(25.30)	52.99	15.73	42.73	16.08	20.45
05.01.03	Belanja Bunga				45.14	2.18	23.66
05.01.04	Belanja Subsidi						
05.01.05	Belanja Hibah	342.06	(80.17)	1.25	347.56	65.57	135.25
05.01.06	Bantuan Sosial	28.23	(100.00)		(100.00)		(57.26)
05.01.07	Belanja Bantuan keuangan						

Kode	Uraian	Peningkatan (%)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
5.02	BELANJA MODAL	(28.15)	25.99	80.58	117.33	18.97	42.94
	Belanja Modal	(28.15)	25.99	80.58	117.33	18.97	42.94
05.02.01	Belanja Modal Tanah			370.85	189.74	(42.62)	172.65
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			(39.67)	115.76	98.38	58.15
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			37.17	123.86	88.44	83.16
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			217.71	115.78	(14.19)	106.44
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			264.66	58.09	(83.75)	79.67
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya					2,245.55	2,245.55
5.03	BELANJA TAK TERDUGA	2,551.02	(99.56)	(93.91)	(100.00)		564.39
05.03.01	Belanja Tak Terduga	2,551.02	(99.56)	(93.91)	(100.00)		564.39
5.04	BELANJA TRANSFER	1.03	1.90	(8.26)	32.38	0.26	5.46
05.04.01	TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA					31.09	31.09
5.4.01.01	Bagi Hasil Pajak					20.58	20.58
5.4.01.02	Bagi Hasil Retribusi						
5.4.01.03	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya						
05.04.02	TRANSFER / BANTUAN KEUANGAN	1.03	1.90	(8.26)	31.85	0.14	5.33
5.4.02.01	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya						
5.4.02.02	Bantuan Keuangan ke Desa	1.03	1.90	(8.26)	31.85	0.14	5.33
5.4.02.03	Bantuan Keuangan Lainnya	2,551.02	(99.56)	(93.91)	(100.00)		564.39
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	147.91	48.18	302.96	129.50	(55.27)	114.66
6.1.01	Penggunaan SILPA	147.91	48.18	292.93	85.28	(43.18)	106.23
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan						
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah				1,861.76	(100.00)	880.88
6.1.05	Penerimaan Kembali Pinjaman daerah						
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah						
6.1.07	Penerimaan Kembali Dana Bergulir						
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	8.33	100.00	621.23	159.35	177.78
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan						
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	8.33	100.00	-	-	21.67
6.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keu Bank					185.00	185.00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah						
6.2.05	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga						
6.2.06	Dana Talangan						
6.2.07	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir						
6	PEMBIAYAAN NETTO	173.32	50.69	312.13	118.72	(70.78)	116.82
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	48.01	253.40	94.49	(6.86)	(59.07)	73.99

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara, diolah

Pendapatan daerah Kabupaten Konawe Utara didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari

sebesar 97,94% pada tahun 2016 menjadi 94,47% pada tahun 2020. Derajat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari sebesar 2,02% pada tahun 2020 menjadi 3,48% pada tahun 2024. Dari data tersebut terlihat ada kecenderungan peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah. Lain-lain pendapatan yang sah proporsinya terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari sebesar 3,71% pada tahun 2020 menjadi 0,04% pada tahun 2024. Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

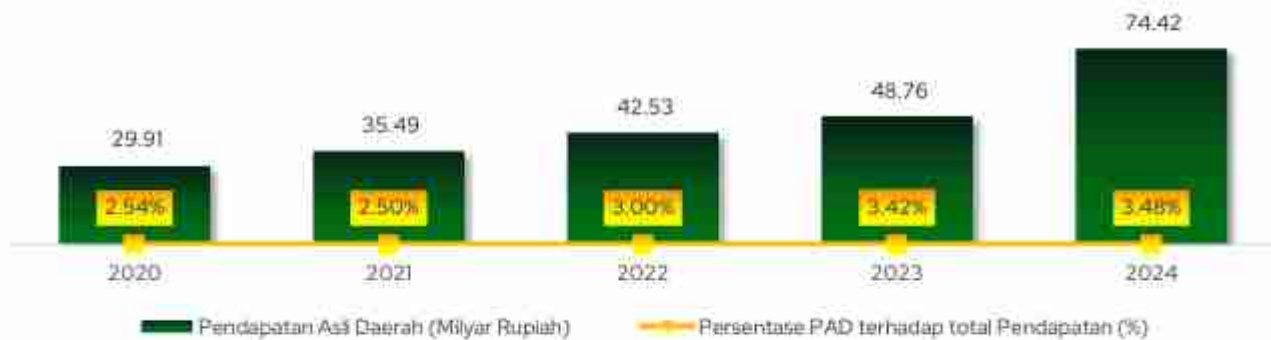
Gambar 2.33 Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025, diolah

Pendapatan asli daerah mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Utara cukup fluktuatif serta menunjukkan peningkatan dari sebesar 29,91 milyar pada tahun 2020 menjadi 74,42 milyar rupiah pada tahun 2024. Secara rinci perkembangan pendapatan asli daerah terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.34 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)



Dana transfer meliputi dana transfer dari pemerintah pusat dan perimbangan (Dana hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)), transfer pemerintah pusat lainnya (dana otonomi khusus dan dana penyesuaian), dan dana transfer pemerintah provinsi. Pencapaian dana tranfer dari pemerintah pusat dan provinsi sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 perkembangan dana transfer cenderung meningkat dari sebesar 852,78 milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi 2.062,29 milyar rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh berbagai upaya pemerintah daerah dalam mengawal proses dan transparansi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan berdampak langsung dalam peningkatan pendapatan transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Gambar 2.35 Perkembangan Pendapatan Dana Transfer Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)



Lain-lain pendapatan daerah mencakup: pendapatan hibah; pendapatan dana desa; pendapatan dana darurat; dan pendapatan lainnya. Pencapaian target lain-lain pendapatan daerah sangat ditentukan oleh pihak lain kepada daerah, yaitu kebijakan lembaga pemerintah/swasta dalam hal pendapatan yang bersumber dari hibah, sehingga sulit dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 realisasi lain-lain pendapatan daerah menunjukkan fluktuasi dan penurunan pada dua tahun terakhir. Secara rinci perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah tercantum pada gambar 2.36 berikut.

Gambar 2.36 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)



Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah tercantum pada tabel 2.109 berikut ini.

Tabel 2.109
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN	883,421,957,166	1,177,670,978,856	1,417,460,205,476	1,427,437,001,260	2,137,621,596,131
4.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29,907,922,318	35,501,844,525	42,527,307,706	48,767,492,067	74,420,246,465
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	11,953,787,565	5,749,698,315	8,192,725,540	10,695,704,107	11,578,106,644
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	1,849,981,933	1,090,383,027	677,444,846	932,429,900	948,181,120
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,548,358,303	5,273,876,765	5,907,800,450	6,914,292,822	11,947,282,906
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	11,555,794,517	23,387,886,418	27,749,336,870	30,225,065,238	49,946,675,795
4.02	PENDAPATAN TRANSFER	834,530,366,675	1,124,824,353,454	1,320,815,504,720	1,377,759,665,944	2,062,294,741,359
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	661,548,666,999	948,841,247,658	1,146,619,788,874	1,196,150,957,398	1,869,705,331,847
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	121,145,641,351	396,118,246,229	602,369,530,161	634,300,423,234	1,192,326,711,000
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	428,934,559,000	421,367,680,000	420,867,930,000	439,043,488,000	498,052,424,077
4.2.01.03	Dana Alokasi khusus	111,468,466,648	131,355,321,429	123,382,328,713	122,807,046,164	179,326,196,770
04.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	153,651,180,000	150,623,782,000	135,951,542,100	134,581,242,000	146,051,748,464
4.2.02.01	Dana Otonomi Khusus					
4.2.02.02	Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD)	153,651,180,000	150,623,782,000	135,951,542,100	134,581,242,000	146,051,748,464
04.02.03	Transfer Pemerintah Provinsi	19,330,519,676	25,359,323,796	38,244,173,746	47,027,466,546	46,537,661,048
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19,330,519,676	25,359,323,796	38,244,173,746	47,027,466,546	46,537,661,048
4.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	18,983,668,173	17,344,780,877	54,117,393,050	909,843,249	906,608,307
04.03.01	Pendapatan Hibah	18,483,668,173	1,536,864,513	54,117,393,050	909,843,249	906,608,307
04.03.02	Pendapatan Dana Darurat					
04.03.03	Pendapatan Lainnya	500,000,000	15,807,916,364			
	Jumlah	883,421,957,166	1,177,670,978,856	1,417,460,205,476	1,427,437,001,260	2,137,621,596,131

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara, 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya, disamping dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah pusat dan rendahnya peranan PAD dalam penerimaan daerah, membawa konsekuensi terhadap rendahnya kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran daerah, Kondisi demikian tentu saja akan sangat menyulitkan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 sehingga dibutuhkan langkah - langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Konawe Utara, antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan Ruang Kemudahan Berusaha dan Investasi Swasta (Menghidupkan Swasta)
2. Mempermudah melalui Regulasi yang diterbitkan oleh Pemda
3. Pemberdayaan dan Peningkatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) & Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
4. Situasi Politik dan Keamanan yang terjamin

Strategi yang ditempuh dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan publik yang baik, terpercaya dan transparan dalam hal pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan dan juga perbaikan manajemen pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Peningkatan investasi daerah yang tetap mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan ekosistem lingkungan melalui perbaikan iklim investasi yang sesuai mekanisme peraturan, efektif dan transparan.
3. Peningkatan pencapaian Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah melalui peningkatan operasional pelaksanaan program kegiatan yang dapat digunakan sebagai input atau sumber daya dalam meningkatkan PAD.

2.5.1.2 Ruang dan Kapasitas Fiskal Daerah

Ruang fiskal merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (bersifat wajib) dan belanja yang mengikat (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Hibah, Dana Darurat, 25 persen DBH dan DAU Belanja Pegawai dan Belanja Bunga) dibagi dengan total pendapatannya. Saat ini, ruang fiskal

daerah sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin dan belanja yang sudah ditentukan penggunaannya. Semakin besar Ruang Fiskal daerah maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah secara mandiri.

Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya Ruang Fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Stephen S. Heller (*IMF Policy Discussion Paper, 2005*) mengemukakan bahwa Ruang Fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah.

Data Peta Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 menunjukkan bahwa Pendapatan daerah sebesar Rp. 2,137,621,596,131 dimana proporsi pajak daerah sebesar 0,54%, retribusi daerah 0,04% dan proporsi terbesar bersumber dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 94,30%. Data selengkapnya tersaji dalam tabel 2.110 berikut.

Tabel 2.110
Pendapatan dan proporsi unsur Pendapatan
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023

Catatan	Uraian	Anggaran	% dari Total Pendapatan
PENDAPATAN DAERAH			
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	11,578,106,644	0.54%
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	948,181,120	0.04%
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,947,282,906	0.56%
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	49,946,675,795	2.34%
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	1,192,326,711,000	55.78%
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	498,052,424,077	23.30%
4.2.01.03	Dana Alokasi khusus	179,326,196,770	8.39%
4.2.02.02	Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD)	146,051,748,464	6.83%
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46,537,661,048	2.18%
04.03.01	Pendapatan Hibah	906,608,307	0.04%
Jumlah Pendapatan		2,137,621,596,131	100%

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara, 2025

Belanja dari pendapatan transfer yang penggunaannya telah ditentukan sebesar Rp. 751,105,618,642.10 dengan proporsi terbesar Dana Alokasi Umum yang Penggunaannya telah ditentukan sebesar Rp. 147.001.282.000, Dana Desa sebesar Rp. 333,468,505,077.10 serta Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 105,726,114,949.00. Adapun belanja tertentu secara total sebesar Rp. 812.653.581.139 dengan penggunaan diantaranya untuk anggaran pendidikan sebesar 20% serta Belanja Gaji dan Tunjangan ASN & PPPK. Secara rinci data belanja disajikan dalam tabel 2.111 berikut.

Tabel 2.111
Uraian Pendapatan Yang Penggunaannya Telah Ditentukan
dan Belanja Tertentu Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran
	JUMLAH PENDAPATAN	2,137,621,596,131.00
	PENDAPATAN YANG PENGGUNAANNYA SUDAH DITENTUKAN	751,105,618,642.10
1	BLUD dan Kapitasi JKN	18,426,570,747.00
2	Dana Alokasi Umum yang Penggunaannya telah ditentukan	147,001,282,000.00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	105,726,114,949.00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	73,600,081,821.00
5	Dana Insentif Daerah (DID)	26,345,403,000.00
6	Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	333,468,505,077.10
7	10 % DBH Pajak Provinsi - PKB	46,537,661,048.00
	BELANJA TERTENTU	832,410,384,577.86
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan PPPK, TPG, TKG dan Tamsil ASN dan PPPK	355,140,363,407.00
2	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13,239,521,518.00
3	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	261,149,699.00
4	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2,682,912,800.00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi untuk ASN dan PPPK	7,713,894,847.00
6	Belanja Bidang Pendidikan (20%)	427,524,319,226.20
7	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi BPJS Kesehatan	13,181,804,000.00
8	0,5% Belanja Kegiatan Pengawasan	10,688,107,980.66
9	Belanja Kegiatan Diklat	1,596,375,000.00
10	Bantuan Hibah partai Politik	381,936,100.00
	Jumlah Belanja	1,583,516,003,219.96
	Kapasitas Fiskal	554,105,592,911.05

Sumber : Bapperida Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.119 dapat diketahui bahwa Ruang fiskal Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 sebesar Rp. 554,105,592,911.05. besaran nilai yang dapat secara leluasa dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara.

Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten dan kota. Pada pasal 1 butir 1 Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:

- pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri; dan/atau pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, dalam hal pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal (*pre-financing*);
- penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan;
- pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah;
- pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; dan/ atau
- penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal (6) Butir (1) PMK Nomor 84 Tahun 2023, Formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

$$KFD_{Kabupaten/Kota-i} = [\text{pendapatan} + \text{penerimaan pembiayaan tertentu}] - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu}]$$

$$RKFD_{Kabupaten/Kota-i} = \frac{KFD_{Kabupaten/Kota-i}}{\text{Belanja Pegawai}_{Kabupaten/Kota-i}}$$

Keterangan :

- $KFD_{Kabupaten/Kota-i}$: Kapasitas Fiskal suatu Kabupaten/Kota
- $RKFD_{Kabupaten/Kota-i}$: Rasio Kapasitas Fiskal suatu Kabupaten/Kota

- Pendapatan : Jumlah pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Penerimaan pembiayaan tertentu : berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan : berupa dana otonomi khusus.
- Belanja tertentu terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja bunga; c. belanja bagi hasil; dan d. alokasi dana desa.
- Pengeluaran pembiayaan tertentu berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

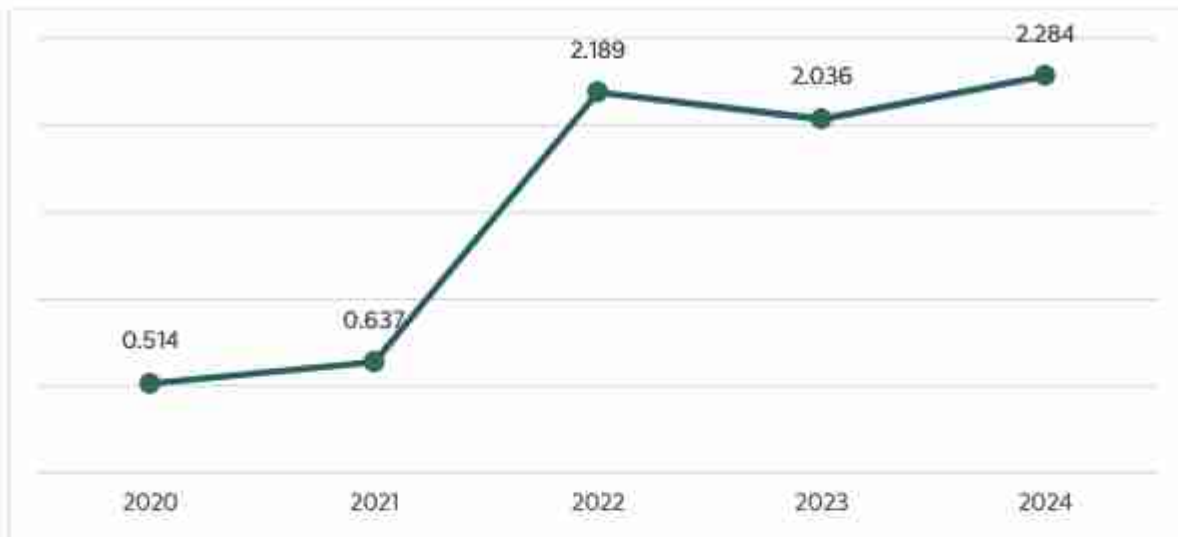
Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota hasil formulasi di atas, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasaitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$RKFD < 0,947$	Sangat Rendah
$0,947 \leq RKFD < 1,203$	Rendah
$1,203 \leq RKFD < 1,459$	Sedang
$1,459 \leq RKFD < 1,715$	Tinggi
$1,715 \leq RKFD$	Sangat Tinggi

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementerian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah maka dapat dikemukakan, Nilai Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten Konawe Utara dalam empat tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dan cenderung meningkat.

Pada tahun 2020, nilai RKDF Kabupaten Konawe Utara termasuk sangat rendah sebesar 0,637. Pada Tahun 2021 hingga 2022 terjadi lonjakan hingga mencapai nilai 2,189 dengan kategori sangat tinggi. Pada Tahun 2023, nilai RKFD Kabupaten Konawe Utara sedikit menurun menjadi 2,036 namun masih dalam kategori Sangat Tinggi namun kembali meningkat menjadi 2.284 pada tahun 2024. Adapun gambaran Kapasitas Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2029 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.37
Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Kab. Konawe Utara
Tahun 2020-2024



2.5.1.3 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu jangka waktu tertentu. Analisis terhadap Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan kemampuan aset daerah dalam penyediaan dana untuk membiayai pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan Neraca Daerah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif.

Adapun gambaran mengenai posisi Neraca Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.112
Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	75.340.946,728	284.467.118,628	635.832.936,288.00	322.10,387,288.00	23.282.022,290.00
Kas di Bendahara Penerimaan	0	8.877,178	3.121.300.00	10.753.100.00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.541.350	61.532,48	10.496.000.00	-	103.435.840.00
Kas di BLUD	1.443.697,185	85.944.729,745	8.263.760,00.00	8.874.434,288.00	6.214.804,785.00
Kas di Bendahara FKTP	37.883,163	23.447,571	75.907,344.00	75.095.468.00	50.694.338.00
Kas di Bendahara BOK	-	-	-	295.569,678.00	1.209.630,763.00
Kas di Bendahara Dana BOS	877.455,10	94.054,944	261.823.00	47.565.844.00	52.242,048.00
Kas di Bendahara PAUD	-	-	-	6.000.000.00	-
Kas Lainnya	16.258,311	652,958	10.254.585.00	20,220.00	4,484.421,27
Investasi Jangka Pendek	0	-	-	-	-
Piutang Pendapatan	27.568.700,304	22.016.368,483	-	-	-
Piutang Pendapatan Pajak	10.370.340,343	33.380.600,00	1.596.762,152.00	12.010,56,002.00	13.542,557,347.00
Piutang Pendapatan Pajak Netto	-	-	7.326,705,476.10	3.149,681,246.55	6.318,437,007.70
Piutang Pendapatan Retribusi	5.423,624,000	5.480,357,200	5.707,653,800.00	5.701,51,800.00	5.785,754,600.00
Piutang Retribusi Netto	-	-	47.937,590.00	36.600,000.00	-
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.273,878,765	3.758,352,128	-	-	-
Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	0	-	-	-	-
Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) Netto	-	-	-	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0	-	-	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya Netto	-	-	-	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	6.488,058,996	-	-	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	-	-	-	-	-
Piutang Pendapatan Lainnya	0	-	-	-	-
Piutang Pendapatan Lainnya Netto	-	-	-	-	-
Piutang Lainnya	5,242,351,08.72	4,637,411,358.72	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Netto	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	0	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya Netto	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Perputihan Angsuran	0	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Perputihan Angsuran Netto	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5,242,351,08.72	4,637,413,558.72	5,263,291,061.82	5,071,757,021.72	6,011,757,021.00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto	-	-	631,983,402.00	378,378,159.79	12,405,693.10
Uang Muka	0	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Pendapatan	-7,530,772,221.93	-8,996,308,526	-	-	-
Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak	-2,107,348,221.61	-3,555,36,326.23	-4,346,006,575.30	-3,863,534,840.45	-7,404,120,235.30
Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi	-5,423,624,000	-5,480,357,200	-5,702,660,050.00	-5,668,311,800.00	-5,785,754,600.00
Penyisihan Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	0	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Lainnya	-3,994,82,638.31	-4,062,218,125.46	-	-	-
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0	-	-	-	-
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	-	-	-	-
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Perputihan Angsuran	0	-	-	-	-
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-3,994,82,638.31	-4,062,218,125.46	-5,731,307,633.89	-4,893,378,861.93	-5,946,218,328.82
Penyisihan Uang Muka	0	-	-	-	-
Penyelesaian	2,281,246,033.96	10,344,188,833.81	22,889,757,303.45	628,629,710,258.00	7,406,034,016.25
Jumlah Aset Lancar	101,285,434,727.44	319,500,458,647.62	678,447,047,112.88	226,416,019,875.92	232,533,378,162.32
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Nonpermanen					
Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-	-	-	-
Investasi Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	17,298,797,402	20,436,260,234	24,698,976,504.00	29,127,500,000.00	35,734,890,220.00
Investasi Permanen Lainnya	0	-	-	-	-
Jumlah Investasi Permanen	17,298,797,402	20,436,260,234	24,698,976,504.00	29,127,500,000.00	35,734,890,220.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	17,298,797,402	20,436,260,234	24,698,976,504.00	29,127,500,000.00	35,734,890,220.00
ASET TETAP					
Tanah	63,857,984,798	68,265,709,748	82,566,142,588.00	81,155,872,420.00	85,952,830,354.00

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Peralatan dan Mesin	434.939.097.523,52	473.669.246.712	496.367.165.356,27	573.026.912.921,67	731.999.275.130,98
Gedung dan Bangunan	779.826.508.334,94	829.665.738.950	801.134.238.845,52	965.861.631.054,30	1.090.703.566.033,60
Jalan, Irigasi dan Jaringan	879.612.227.251,89	940.722.068.467	1.095.938.407.060,89	1.529.345.783.113,89	1.876.800.848.813,89
Aset Tetap Lainnya	46.488.353,224	46.888.328.903	54.434.082.533,05	56.364.477.759,33	58.941.067.358,33
Kontrolasi Dalam Pengerjaan	1.684.496.000	366.096.000	13.026.807.800,00	47.584.931.586,10	47.649.931.565,10
Akumulasi Penyusutan	940.262.488.888,94	-1.035.212.087,672	-1.365.386.838.604,74	-1.326.376.941.094,46	-1.538.839.811.814,20
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-332.341.805.721,71	-343.888.723.934	-380.606.855.347,03	-438.341.19.088,10	-498.251.931.699,48
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-98.666.379.135,67	-108.743.210.846	-126.735.711.801,72	-151.378.753.484,40	-179.342.862.226,30
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-421.254.302.725,36	-462.577.117,692	-549.854.254.456,00	-641.657.003.521,80	-761.236.020.108,61
Jumlah Aset Tetap	1.264.247.141.395,41	1.223.555.621.699	1.481.272.085.890,94	1.925.600.650.509,69	2.481.895.506.022,71
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	0	-	-	-	-
Jumlah Cadangan	0	-	-	-	-
Aset Properti Investasi					
Aset Properti Investasi Peralatan Mesin			6.082.553.333,34	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi			-6.082.553.333,34	-	-
Jumlah Aset Properti Investasi			-	-	-
ASET LABAYYA					
Tagihan Jangka Panjang	0	10.736.875	10.698.644,00	7.989.475,00	-
Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	1.846.626,400	3.063.426,400	4.609.943.400,00	21.606.350.060,00	46.121.406.146,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-723.601.946,68	-12.831.943,893	-1.246.126.382,86	-5.732.885.033,72	-13.292.057.914,58
Aset Lain-Lain	73.390.144.959,42	86.416.572.656,60	92.451.747.757,09	767.848.194.443,09	81.054.259.800,52
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-24.177.900.723,09	-69.136.403	-17.060.812.482,36	-17.044.423.804,41	-21.685.170.956,32
Dana Transfer Treasury Deposit Facility				688.416.585.000,00	70.653.494.000,00
Jumlah Aset Lainnya	50.336.268.689,67	47.546.955.637,20	77.876.460.925,87	766.725.314.127,68	143.596.931.377,63
Jumlah Aset	1.433.166.542.424,52	1.710.088.891.417,33	2.162.295.527.043.369,00	3.057.869.484.511,58	2.893.764.705.782,65
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	2.633.065.006	6.057.355	17.797.636,00	333.711.369,00	41.884.812,27
Utang Bunga	0	-	-	90.422.762,00	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	-	-	14.395.163.644,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	0	-	-	-	-
Utang Beban	23.760.000	209.399.303	23.760.000,00	689.749.096,00	92.635.91,00
Utang Jangka-Pendek Lainnya	1.722.077.511	1.375.947.511	1.375.947.551,00	37.609.296.181,10	37.609.296.181,10
Jumlah Kewajiban Jangka-Pendek Lainnya	4.378.390.557	1.591.344.1109	1.417.205.187,00	53.932.183.687,10	37.743.816.179,37
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri	0	-	7.540.299.250,00	100.656.144.10,00	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	-	7.540.299.250,00	100.656.144.10,00	-
Jumlah Kewajiban	4.378.390.557	1.591.344.809,00	8.957.424.437,00	154.628.337.797,10	37.743.816.179,37
EKUITAS	1.428.787.711.867,52	1.709.447.591.608,33	2.153.337.845.996,69	2.903.241.146.716,48	2.856.020.889.603,28
EKUITAS	1.428.787.711.867,52	1.709.447.591.608,33	2.153.337.845.996,69	2.903.241.146.716,48	2.856.020.889.603,28
Jumlah KEWAJIBAN DAN EKUITAS SAMA	1.433.166.542.424,52	1.710.088.891.417,33	2.162.295.527.043,69	3.057.869.484.511,58	2.893.764.705.782,65

Sumber: LKPD Kab. Konawe Utara Tahun 2020 – 2024 (dianalisis)

* : Angka Target

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah dan masyarakat dimasa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari; (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Pada tahun 2024, Kabupaten Konawe Utara memiliki aset senilai Rp. 2,893,764,705,782.65 dengan nilai aset terbesar berasal dari aset tetap yakni Rp. 2,481,899,506,022.71 Sedangkan nilai pertumbuhan aset selama 2020-2024 mencapai 18,88 persen pertahun.

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Pertumbuhan rata-rata Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2029 memiliki perubahan yang cukup fluktuatif yaitu sebesar 56,04 persen per tahun. Pertumbuhan rata-rata tertinggi ada pada komponen Kas Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.321,73 persen, diikuti oleh komponen Kas di Bendahara Dana BOS sebesar 4.472,38 persen dan Persediaan sebesar 775,21 persen.

Investasi Jangka Panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, memberikan sumbangan dalam Neraca Aset Daerah dengan rata-rata pertumbuhan 19,90 persen pertahun. Pada tahun 2020, infestasi jangka panjang baru sebesar Rp. 17,298,797,402 dan tahun 2024 mencapai Rp. 35,734,890,220.00. Investasi jangka panjang ini didominasi oleh komponen investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah.

Pertumbuhan rata-rata Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020-2024 memiliki kenaikan yang cukup besar setiap tahun yaitu sebesar 18,80 persen. Pertumbuhan rata-rata tertinggi ada pada komponen Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan pertumbuhan sebesar 21,40 persen. Kemudian diikuti dengan komponen Tanah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,54 persen dan komponen Peralatan dan Mesin sebesar 14,22 persen.

Pencatatan untuk Aset Lainnya pada kurun waktu 2020-2024 juga mengalami peningkatan seperti Aset Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 215,38 persen yang berasal dari komponen Aset Lainnya, lalu diikuti oleh komponen Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 900,23 persen.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jumlah

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 37,743,816,179.37 lebih rendah dari tahun 2023 yang sebesar 154,628,337,797.10 yang berasal dari Kewajiban Jangka Pendek. Kewajiban jangka pendek yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan tumbuh rata-rata 58,58 persen per tahun. Peningkatan Utang Jangka Pendek ini didorong adanya peningkatan utang jangka pendek lainnya yang sebesar Rp 607,114,085.00, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 291,877,216.73 dan Utang Beban sebesar Rp. 607,114,085.00.

Pertumbuhan Kewajiban hanya terjadi pada Kewajiban Jangka Pendek, sedangkan untuk Kewajiban Jangka Panjang tidak ada karena Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tidak memiliki utang kepada Pemerintah Pusat ataupun Utang Jangka Panjang lainnya.

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi; (i) ekuitas dana lancar, (ii) ekuitas dana investasi, dan (iii) ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinfestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu dimasa datang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Konawe Utara tahun 2020-2024 menunjukkan angka yang positif dengan dengan rata-rata peningkatan sebesar 19,70 persen per tahun.

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan *Quick Ratio*. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio lancar digunakan untuk melihat Kabupaten Konawe Utara dalam menyelesaikan hutang jangka pendeknya, dimana semakin besar rasio yang diperoleh, maka semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Sedangkan *Quick Ratio* adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar neraca keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020-2024 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 8,70 persen setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuangan Kabupaten Konawe Utara sangat liquid dengan kemampuan pengembalian terhadap utang lancar yang sangat tinggi pada tahun 2020-2024. Jika dicermati terlihat aktiva lancar selama empat tahun berturut-turut naik dan rasio lancar juga menunjukkan kenaikan. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan pada aktiva lancar diikuti pula dengan kenaikan kewajiban jangka pendek yang lebih besar persentasenya yaitu kewajiban utang

kepada pihak ketiga. Keterangan lebih jelas dapat lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.113
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	2,67	5,41	8,79	17,93	17,46	8,70
2.	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	2,54	4,77	7,86	16,98	16,73	8,04

Sumber: LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (dianalisis)

Quick ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar, karena quick ratio telah mempertimbangkan persediaan didalam hitungannya. Berdasarkan tabel diatas nilai quick ratio neraca keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kawajiban jangka pendeknya.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Tabel 2.114
Rasio Solvabilitas Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020-2024

No.	Rasio Solvabilitas	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Rasio Kewajiban terhadap Aset	0.0031	0.0009	0.0000	0.0506	0.0130	0.014
2.	Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	0.0031	0.0009	0.0042	0.0533	0.0132	0.015

Sumber: LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (dianalisis)

Berdasar hasil perhitungan pada tabel rasio solvabilitas diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset pada tahun 2020 sebesar 0,0031 dan pada tahun 2024 sebesar 0,0130. Semakin besar nilai rasio

kewajiban terhadap aset, maka semakin buruk rasio kewajiban terhadap aset. Jika dilihat dari nilai tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara selama 4 (empat) tahun cukup kuat untuk membayar jika pemerintah melakukan pinjaman ke kreditor dan tingkat kemampuan membayar tersebut cenderung stabil dengan laju pertumbuhan 0,006 persen per tahun.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Nilai rasio kewajiban terhadap ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 sebesar 0,0031 dan pada tahun 2024 sebesar 0,0132. Semakin kecil nilai tersebut, maka semakin baik pula rasio kewajiban terhadap ekuitas karena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya.

2.5.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

2.5.2.1 Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Akan tetapi mulai Tahun 2022, kalsifikasi belanja daerah diubah menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

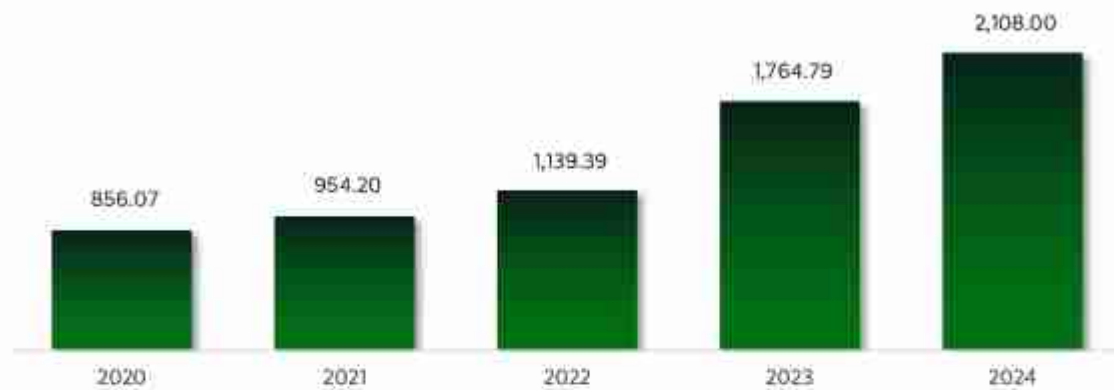
1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama untuk dikeluarkan, antara lain Belanja Operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek dan wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Adapun rinciannya adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa termasuk barang yang akan diserahkan ke masyarakat, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Operasi mencakup Belanja Pegawai (termasuk Gaji dan Tunjangan), Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 66,16% pada Tahun 2022 sejak

- diberlakukannya kebijakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) oleh ASN Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan akan berlanjut hingga Tahun 2023 dan Tahun 2024;
3. Belanja Operasi berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 4. Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya;
 5. Efisiensi Belanja Belanja Barang dan Jasa untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi, dan mengefisiensikan belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 6. Belanja yang bersumber dari dana transfer disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, prioritas penggunaan dana perimbangan adalah sebagai berikut:
 - Dana bagi hasil pajak; untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan.
 - Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum. Dana Alokasi Umum diatur penggunaannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan setiap tahunnya.
 - Dana alokasi khusus; untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik, yaitu sarana/ prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, meningkatkan dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
 - Dana Alokasi Khusus Non Fisik digunakan untuk Kesehatan dalam bentuk Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas, dan dana BOS untuk Sekolah.
 7. Belanja bantuan sosial difokuskan dalam upaya mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Konawe Utara dengan melakukan intervensi terpadu lintas sektor dalam berbagai aspek, seperti bantuan langsung tunai, bantuan sembako, pembangunan rumah, serta sanitasi dan air bersih.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Konawe Utara menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 856,07 milyar pada tahun 2020 menjadi sebesar 2.108,00 milyar pada tahun 2024. Belanja daerah Kabupaten

Konawe Utara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara rinci tercantum pada gambar 2.38 berikut.

Gambar 2.38 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)



Belanja daerah Kabupaten Konawe Utara memiliki komposisi terbesar pada belanja operasi dengan proporsi sebesar 56,82% pada tahun 2020 dengan kecenderungan menurun menjadi 51,54% pada tahun 2024. Selanjutnya adalah belanja modal dengan proporsi cenderung meningkat dari sebesar 15,42% pada tahun 2020 menjadi 36,84% pada tahun 2024. Kemudian belanja transfer dengan kecenderungan menurun dari sebesar 21,15% pada tahun 2020 menjadi 10,56% pada tahun 2024. Peningkatan belanja modal setiap tahunnya menunjukkan bahwa arah pembangunan dan pendanaan telah mengalami perbaikan dan lebih berkualitas dengan meningkatkan belanja sektor infrastruktur pelayanan publik. Disisi lain menunjukkan bahwa efesiensi sektor belanja operasi telah dilakukan dengan mengurangi belanja-belanja penunjang, belanja Barang dan Jasa untuk kegiatan pemerintahan. Perkembangan proporsi unsur belanja daerah Kabupaten Konawe Utara tercantum pada gambar 2.39 berikut.

Gambar 2.39 Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (persen)



Gambar 2.40 Realisasi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)



Beberapa permasalahan yang terkait dengan belanja daerah antara lain Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memahami perencanaan belanja, terutama pada penyesuaian belanja dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga terkendala pada saat pencairan dana. Selain itu, Kegiatan pengadaan barang jasa dan modal yang dilakukan melalui mekanisme lelang dilaksanakan pada pertengahan tahun berjalan sehingga penyerapan belanja daerah menumpuk di akhir tahun, serta adanya peraturan-peraturan baru dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan kegiatan dan penyerapan belanja, sehingga muncul kendala pada saat pencairan dana.

Perincian belanja daerah Kabupaten Konawe Utara selama kurun waktu tahun 2020-2024 tercantum pada tabel 2.115 berikut ini.

Tabel 2.115
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	PENDAPATAN	883,421,957,166	1,177,670,978,856	1,417,460,205,476	1,427,437,001,260	2,137,621,596,131
5.01	BELANJA OPERASI	486,384,357,129	603,124,803,083	669,787,208,708	888,018,640,239	1,086,467,642,565
05.01.01	Belanja Pegawai	198,598,939,688	258,171,508,987	267,915,581,871	280,984,263,807	355,140,363,407
05.01.02	Belanja Barang dan jasa	217,925,323,491	333,404,307,996	385,852,612,472	550,742,323,100	639,319,257,295
05.01.03	Belanja Bunga			2,728,228,515	3,959,618,032	4,046,032,653
05.01.04	Belanja Subsidi					
05.01.05	Belanja Hibah	58,249,225,950	11,548,986,100	11,692,935,850	52,332,435,300	86,645,103,210
05.01.06	Bantuan Sosial	11,610,868,000		1,597,850,000		1,316,886,000
05.01.07	Belanja Bantuan keuangan					
5.02	BELANJA MODAL	132,001,111,279	166,302,614,638	300,310,749,645	652,675,409,964	776,507,589,224
	Belanja Modal	132,001,111,279	166,302,614,638	300,310,749,645	652,675,409,964	776,507,589,224
05.02.01	Belanja Modal Tanah		1,890,266,950	8,900,258,850	25,787,194,522	14,796,757,934
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		62,667,311,493	37,806,351,477	81,570,412,199	161,816,475,516
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		39,472,575,550	54,144,425,217	121,207,413,068	228,405,672,385
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		58,833,465,410	186,918,919,500	403,341,075,025	346,123,000,447
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		3,438,995,235	12,540,794,601	19,825,210,150	3,221,269,500
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya				944,105,000	22,144,413,442
5.03	BELANJA TAK TERDUGA	56,599,230,000	250,483,203	15,242,500		20,352,802,942

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
05.03.01	Belanja Tak Terduga	56,599,230,000	250,483,203	15,242,500		20,352,802,942
5.04	BELANJA TRANSFER	181,081,033,324	184,525,337,200	169,280,702,700	224,091,504,538	224,673,422,364
05.04.01	TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA				887,017,038	1,162,813,400
5.4.01.01	Bagi Hasil Pajak				887,017,038	1,069,555,771
5.4.01.02	Bagi Hasil Retribusi					93,257,629
5.4.01.03	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					
05.04.02	TRANSFER / BANTUAN KEUANGAN	181,081,033,324	184,525,337,200	169,280,702,700	223,204,487,500	223,510,608,964
5.4.02.01	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya					
5.4.02.02	Bantuan Keuangan ke Desa	181,081,033,324	184,525,337,200	169,280,702,700	223,204,487,500	223,510,608,964
5.4.02.03	Bantuan Keuangan Lainnya	56,599,230,000	250,483,203	15,242,500		
	BELANJA	856,065,731,732	954,203,238,124	1,139,393,903,553	1,540,694,050,203	2,108,001,457,095
	SURPLUS/DEFISIT	27,356,225,434	223,467,740,732	278,066,301,923	(113,257,048,943)	29,620,139,036

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

2.5.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran untuk belanja pegawai dalam kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar 23,12 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 15,93 persen pada tahun 2024. Proporsi penggunaan anggaran untuk belanja pegawai dalam kurun waktu tahun 2020-2024 Kabupaten Konawe Utara tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.116
Analisis Proporsi Belanja Pegawai

No.	Tahun Anggaran	Total Belanja Untuk Kebutuhan Pemenuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100
1.	2020	198,598,939,688	859,065,731,732	23.12
2.	2021	258,171,508,987	957,453,238,124	26.96
3.	2022	267,915,581,871	1,145,893,903,553	23.38
4.	2023	280,984,263,807	1,587,573,682,374	17.70
5.	2024	355,140,363,407	2,229,582,764,649	15.93
Rata-rata				21.42

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025, dianalisis

Pada tahun 2020 proporsi belanja aparatur mencapai 23,12%, sedangkan pada tahun 2021 proporsi belanja aparatur naik menjadi 26,96%. Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terus menurun dan mencapai titik terendah pada tahun 2024 sebesar 15,93%. Proporsi belanja pegawai mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 masih dibawah 30 persen dengan rata-rata sebesar 21,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan belanja daerah sangat baik, karena proporsi belanja aparatur masih lebih sedikit dibandingkan dengan proporsi belanja daerah yang bersifat pelayanan masyarakat yaitu masih diatas 70 persen. Namun demikian pengelolaan belanja daerah perlu dikelola dengan baik agar proporsi belanja daerah yang digunakan untuk kebutuhan rutin birokrasi tidak lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja untuk memberikan pelayanan publik.

2.5.2.3 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024, masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah. Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

- a. sebesar 4,65% (empat koma enam lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 untuk kategori sangat tinggi;
- b. sebesar 4,55% (empat koma lima lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 untuk kategori tinggi;
- c. sebesar 4,45% (empat koma empat lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 untuk kategori sedang;
- d. sebesar 4,35% (empat koma tiga lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 untuk kategori rendah; dan
- e. sebesar 4,25% (empat koma dua lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 untuk kategori sangat rendah.

Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama, yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar **0,24% (nol koma dua empat persen) dari proyeksi PDB tahun anggaran 2024**. Selanjutnya Kategori Kapasitas Fiskal Daerah mengacu pada kategori Kapasitas Fiskal Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari proyeksi PDB tahun anggaran 2024. Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD. Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, berdasarkan pertimbangan :

Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari proyeksi PDB tidak terlampaui;

- a. Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari proyeksi PDB tidak terlampaui;
- b. Pembiayaan Utang Daerah yang dilaksanakan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah telah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. rencana Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri Keuangan telah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. rencana Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang dilakukan melalui penugasan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank telah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri Keuangan telah disetujui oleh Menteri Keuangan;
- f. rencana penerbitan obligasi Daerah dan sukuk Daerah, telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan telah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri;
- g. rasio kemampuan keuangan Daerah dalam mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan
- h. jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah dan jumlah Pembiayaan Utang Daerah yang akan ditarik tidak melampaui 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD. Persetujuan atau penolakan diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dari Kepala Daerah secara lengkap. Persetujuan atau penolakan atas pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD menjadi dasar dalam proses evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah mengenai APBD.

Dalam rangka pemantauan Defisit APBD tahun anggaran 2024, Pemerintah Daerah melaporkan rencana Defisit APBD tahun anggaran 2024 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD ditetapkan. Rencana Defisit APBD merupakan rencana defisit dalam rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/ gubernur untuk dievaluasi.

Dalam rangka pemantauan Pembiayaan Utang Daerah, Pemerintah Daerah melaporkan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya semester berkenaan. Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah sesuai batas waktu dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran DAU dan/ atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi anggaran dalam APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020-2024 selain pada tahun 2023, perbandingan antara pendapatan dan belanja masih lebih besar pendapatan. Sedangkan pada tahun 2023, kondisi belanja lebih besar dari pendapatan sehingga dalam pembiayaan digunakan untuk menutup defisit dari selisih tersebut. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang paling besar masih tetap dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Kondisi pembiayaan daerah dipengaruhi oleh sisi penerimaan dan pengeluaran. Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, APBD Kabupaten Konawe Utara hanya sekali mengalami defisit anggaran yakni pada tahun 2023 akibat adanya kebijakan pinjaman daerah untuk mendanai pembangunan infrastruktur, serta mengalami empat (4) kali surplus anggaran yakni pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2024. Kondisi APBD yang mengalami surplus dan defisit tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan dan tentu berpengaruh total terhadap penerimaan pembiayaan pada tahun selanjutnya. Selain itu penerimaan pembiayaan juga didapat dari pencairan dana cadangan dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan lebih banyak digunakan untuk infestasi pemerintah dalam rangka pembiayaan BUMD, baik Perusahaan Daerah (PD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun PDAM. Selain itu pengeluaran pembiayaan juga dialokasikan untuk pemenuhan dana cadangan.

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.117 berikut:

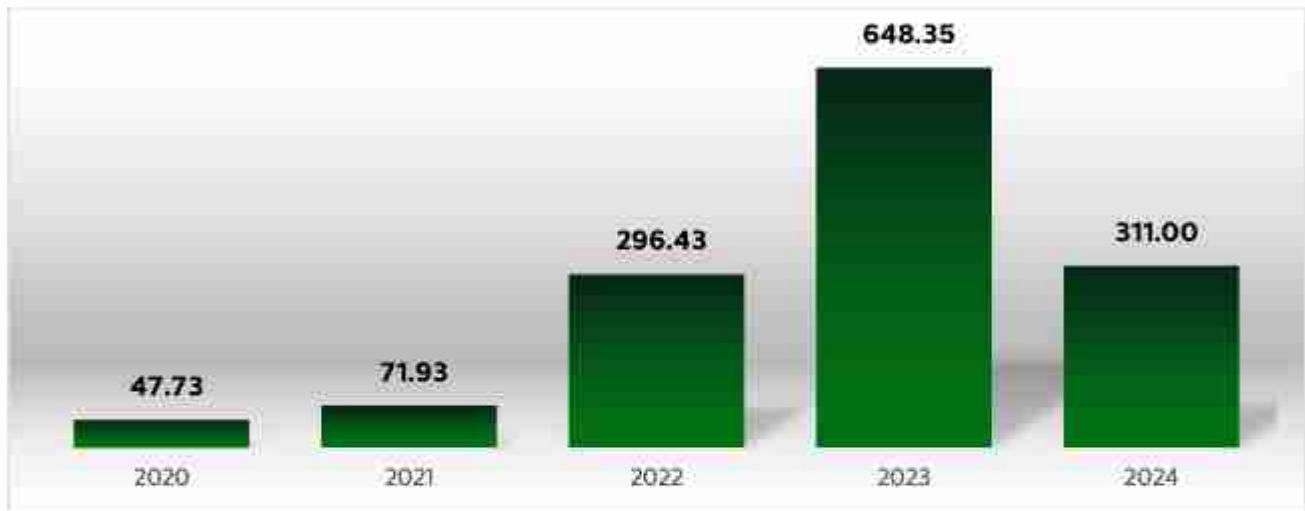
Tabel 2.117
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50,731,973,809	75,176,575,746	302,934,535,728	695,226,463,150	310,998,277,498
6.1.01	Penggunaan SILPA	50,731,973,809	75,176,575,746	295,394,316,478	547,305,742,675	310,998,277,498
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan					
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah			7,540,219,250	147,920,720,475	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pinjaman daerah					
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah					
6.1.07	Penerimaan Kembali Dana Bergulir					
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,000,000,000	3,250,000,000	6,500,000,000	46,879,632,171	121,581,307,554
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan					
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3,000,000,000	3,250,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000
6.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keu Bank				40,379,632,171	115,081,307,554
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah					
6.2.05	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga					
6.2.06	Dana Talangan					
6.2.07	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir					
	PEMBIAYAAN NETTO	47,731,973,809	71,926,575,746	296,434,535,728	648,346,830,979	189,416,969,944
	SISA LEBIH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) PEMBIAYAAN ANGGARAN	75,088,199,243	295,394,316,478	574,500,837,651	535,089,782,036	219,037,108,980

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Konawe Utara menunjukkan peningkatan dari sebesar 47,73 milyar pada tahun 2020 menjadi 648,35 milyar pada tahun 2023 karena adanya kebijakan pinjaman daerah yang diambil oleh pemerintah. Penerimaan pembiayaan sedikit terkoreksi menjadi 311 Milyar pada tahun 2024, seperti terlihat pada gambar 2.41 berikut.

Gambar 2.41 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)



Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan/Bank. Pengeluaran pembiayaan daerah pada 2023 dan 2024 cukup meningkat akibat pembayaran pokok pinjaman sebesar 200 Milyar di Bank Sultra yang dilunasi selama dua tahun, seperti terlihat pada gambar 2.42 berikut.

Gambar 2.42 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)



Defisit riil anggaran Kabupaten Konawe Utara selama kurun waktu tahun 2020-2024 hanya terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp 9.786.786.917 sedangkan tahun 2016, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 terjadi surplus anggaran seperti tercantum pada tabel 2.118 berikut ini.

Tabel 2.118
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	883,421,957,166	1,177,670,978,856	1,417,460,205,476	1,427,437,001,260	2,137,621,596,131
Dikurangi realisasi:						
2	Belanja Daerah	856,065,731,732	954,203,238,124	1,139,393,903,553	1,540,694,050,203	2,108,001,457,095
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,000,000,000	3,250,000,000	6,500,000,000	46,879,632,171	121,581,307,554
Defisit Riil		24,356,225,434	220,217,740,732	271,566,301,923	(160,136,681,114)	(91,961,168,518)

Sumber : Dinas BKAD Kabupaten Konawe Utara, dianalisis

Sumber penutup defisit riil anggaran terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dengan rincian yang dalam tabel 2.119 berikut.

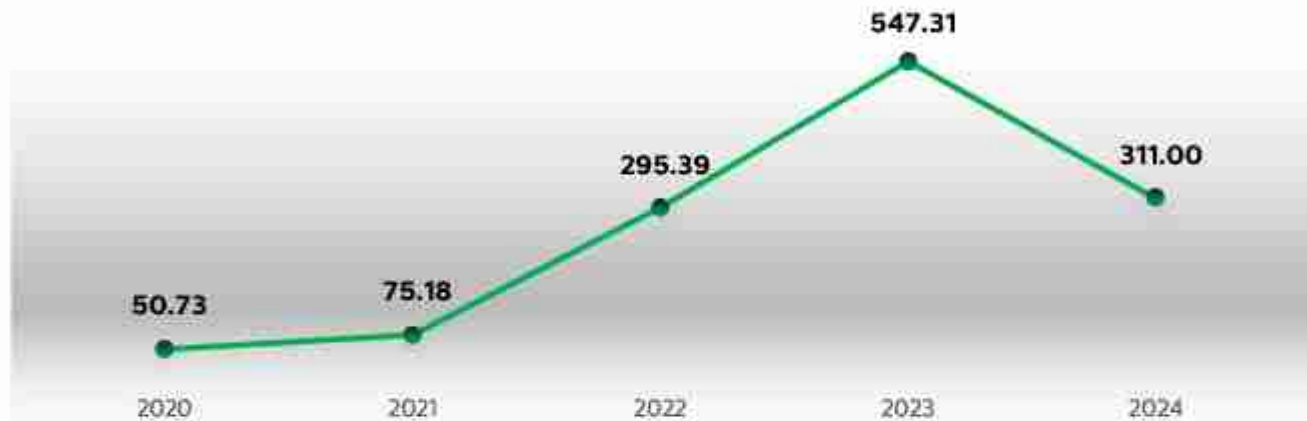
Tabel 2.119
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024

NO.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penggunaan SiLPA	208.29	34.14	108.77	341.77	338.18
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	2.78	92.37	-
5	Penerimaan Kembali Pinjaman daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas BKAD Kabupaten Konawe Utara, dianalisis

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun berjalan di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kecenderungan peningkatan dari sebesar 50,73 milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi sebesar 311 milyar rupiah pada tahun 2024 yang tercantum pada gambar 2.43 berikut.

Gambar 2.43 Perkembangan SiLPA tahun Berjalan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)



Adapun komponen realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran antara lain pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, pelampauan penerimaan pembiayaan, dan sisa pengeluaran pembiayaan.

2.5.3. KERANGKA PENDANAAN

2.5.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah

Asumsi penyusunan Proyeksi keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2026–2030 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan daerah yang telah pulih beberapa tahun terakhir serta mengalami tren positif. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah Kabupaten Konawe Utara tahun 2026–2030 kemungkinan besar mengalami tren positif dan akan terus meningkat dengan pertumbuhan diatas 5%.

Penjelasan asumsi proyeksi keuangan daerah tahun 2021– 2026 sebagai berikut:

1. Untuk tahun 2026–2030 diproyeksikan pendapatan asli daerah mengalami sedikit peningkatan dengan asumsi adanya kebijakan nasional yang mendorong hilirisasi SDA sehingga Kabupaten Konawe Utara yang menjadi salah satu lokus Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi pusat investasi dan akan berdampak pada pendapatan daerah.
2. Pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat diasumsikan masih sama dengan APBD tahun 2025. Namun diharapkan kedepan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam kurun waktu tahun 2026–2030 dapat meningkat sehingga dapat disesuaikan dalam RKPD, tentunya kepastiannya mendasarkan pada postur APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Lain-lain pendapatan yang sah diasumsikan sama selama kurun waktu tahun 2026–2030.
4. Wacana pengajuan pinjaman daerah tahun 2025 sebesar 500 milyar rupiah diasumsikan dapat terealisasi pada tahun 2025 sehingga meningkatkan penerimaan pembiayaan yang berdampak pada peningkatan belanja daerah utamanya dalam prioritas percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan publik dan proyek strategis daerah.
5. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo dimulai pada tahun 2026 dilakukan selama empat tahun sampai dengan tahun 2029.

Dengan mendasarkan pada asumsi dan kebijakan di atas, maka dilakukan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2026–2030 sebagaimana tercantum pada tabel 2.120 berikut

Tabel 2.120
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030

Kode	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN	1,236,377,955,980	1,502,945,652,034	1,769,899,436,270	2,037,413,048,370	2,305,738,410,873	2,575,240,811,460
4.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30,861,292,906	43,985,987,042	57,110,681,179	70,235,375,315	83,360,069,451	96,484,763,588
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	4,113,010,000	7,197,767,500	10,282,525,000	13,367,282,500	16,452,040,000	19,536,797,500
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	2,251,000,000	2,757,475,000	3,263,950,000	3,770,425,000	4,276,900,000	4,783,375,000
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,947,282,906	13,009,494,542	14,071,706,179	15,133,917,815	16,196,129,451	17,258,341,088
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	12,550,000,000	21,021,250,000	29,492,500,000	37,963,750,000	46,435,000,000	54,906,250,000
4.02	PENDAPATAN TRANSFER	1,203,610,054,767	1,456,195,082,946	1,708,780,111,126	1,961,365,139,305	2,213,950,167,484	2,466,535,195,663
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1,085,930,320,000	1,321,856,625,549	1,557,782,931,097	1,793,709,236,646	2,029,635,542,194	2,265,561,847,743
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	416,340,063,000	576,422,817,224	736,505,571,447	896,588,325,671	1,056,671,079,894	1,216,753,834,118
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	512,485,641,000	576,546,346,125	640,607,051,250	704,667,756,375	768,728,461,500	832,789,166,625
4.2.01.03	Dana Alokasi khusus	157,104,616,000	168,887,462,200	180,670,308,400	192,453,154,600	204,236,000,800	216,018,847,000
04.02.02	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	114,361,497,000	130,177,880,996	145,994,264,991	161,810,648,987	177,627,032,982	193,443,416,978
4.2.02.01	Dana Otonomi Khusus						
4.2.02.02	Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD)	114,361,497,000	130,177,880,996	145,994,264,991	161,810,648,987	177,627,032,982	193,443,416,978
04.02.03	Transfer Pemerintah Provinsi	3,318,237,767	4,160,576,402	5,002,915,037	5,845,253,672	6,687,592,308	7,529,930,943
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	3,318,237,767	4,160,576,402	5,002,915,037	5,845,253,672	6,687,592,308	7,529,930,943
4.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1,906,608,307	2,764,582,045	4,008,643,965	5,812,533,750	8,428,173,937	12,220,852,209
04.03.01	Pendapatan Hibah	1,906,608,307	2,764,582,045	4,008,643,965	5,812,533,750	8,428,173,937	12,220,852,209
04.03.02	Pendapatan Dana Darurat						
04.03.03	Pendapatan Lainnya						

Kode	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	BELANJA	1,861,285,549,207	1,738,781,818,448	1,847,751,161,028	1,981,298,366,784	2,306,912,664,112	2,825,787,534,937
5.01	BELANJA OPERASI	998,397,014,315	1,091,483,501,481	1,137,070,021,569	1,182,656,574,743	1,228,243,161,170	1,273,829,781,015
05.01.01	Belanja Pegawai	537,804,859,519	573,837,785,107	609,870,710,695	645,903,636,282	681,936,561,870	717,969,487,458
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	434,467,893,874	440,984,912,282	447,501,930,690	454,018,949,098	460,535,967,506	467,052,985,915
05.01.03	Belanja Bunga		47,500,000,000	47,500,000,000	47,500,000,000	47,500,000,000	47,500,000,000
05.01.04	Belanja Subsidi	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
05.01.05	Belanja Hibah	23,307,374,922	26,337,333,662	29,367,292,402	32,397,251,142	35,427,209,881	38,457,168,621
05.01.06	Bantuan Sosial	1,316,886,000	1,323,470,430	1,330,087,782	1,336,738,221	1,343,421,912	1,350,139,022
05.01.07	Belanja Bantuan keuangan		-	-	-	-	-
5.02	BELANJA MODAL	634,213,176,992	294,398,423,495	340,161,604,681	409,570,773,944	670,056,891,129	1,122,749,872,456
	Belanja Modal	634,213,176,992	294,398,423,495	340,161,604,681	409,570,773,944	670,056,891,129	1,122,749,872,456
05.02.01	Belanja Modal Tanah	51,201,500,000	29,275,938,809	34,311,400,284	40,212,961,133	47,129,590,448	155,235,880,005
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76,140,312,378	41,342,087,827	48,990,374,075	58,053,593,279	168,793,508,036	250,020,307,022
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	226,788,323,892	103,969,882,291	112,599,382,521	181,945,131,271	282,066,577,166	343,028,103,071
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	261,670,723,322	97,310,255,037	107,625,142,071	69,033,407,130	71,650,948,286	205,605,948,804
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10,872,317,400	11,567,259,531	20,782,455,730	37,339,048,630	67,085,650,068	120,530,238,722
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7,540,000,000	10,933,000,000	15,852,850,000	22,986,632,500	33,330,617,125	48,329,394,831
5.03	BELANJA TAK TERDUGA	20,000,000,000	132,877,279,641	140,318,407,301	148,176,238,110	156,474,107,444	165,236,657,461
05.03.01	Belanja Tak Terduga	20,000,000,000	132,877,279,641	140,318,407,301	148,176,238,110	156,474,107,444	165,236,657,461
5.04	BELANJA TRANSFER	208,675,357,900	220,022,613,830	230,201,127,477	240,894,779,987	252,138,504,369	263,971,224,005
05.04.01	TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA	1,431,290,500	1,725,834,960	2,080,993,557	2,509,240,041	3,025,615,125	3,648,254,745
5.4.01.01	Bagi Hasil Pajak	1,431,290,500	1,725,834,960	2,080,993,557	2,509,240,041	3,025,615,125	3,648,254,745
5.4.01.02	Bagi Hasil Retribusi						
5.4.01.03	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya						

Kode	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
05.04.02	TRANSFER / BANTUAN KEUANGAN	207,244,067,400	218,296,778,871	228,120,133,920	238,385,539,946	249,112,889,244	260,322,969,260
5.4.02.01	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya						
5.4.02.02	Bantuan Keuangan ke Desa	207,244,067,400	218,296,778,871	228,120,133,920	238,385,539,946	249,112,889,244	260,322,969,260
5.4.02.03	Bantuan Keuangan Lainnya						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	631,407,593,227	367,336,166,414	209,351,724,758	75,385,318,414	132,674,253,239	257,046,723,476
6.1.01	Penggunaan SILPA	131,407,593,227	367,336,166,414	209,351,724,758	75,385,318,414	132,674,253,239	257,046,723,476
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan						
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	500,000,000,000					
6.1.05	Penerimaan Kembali Pinjaman daerah						
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah						
6.1.07	Penerimaan Kembali Dana Bergulir						
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6,500,000,000	131,500,000,000	131,500,000,000	131,500,000,000	131,500,000,000	6,500,000,000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan						
6.2.02	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000
6.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keu Bank		125,000,000,000	125,000,000,000	125,000,000,000	125,000,000,000	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah						
6.2.05	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga						
6.2.06	Dana Talangan						
6.2.07	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir						
	PEMBIAYAAN NETTO	624,907,593,227	235,836,166,414	77,851,724,758	(56,114,681,586)	1,174,253,239	250,546,723,476
	SISA LEBIH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH APBD	1,861,285,549,207	1,738,781,818,448	1,847,751,161,028	1,981,298,366,784	2,306,912,664,112	2,825,787,534,937

Sumber : Bapperida Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

2.5.4. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah, kemudian menentukan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Dari total pendapatan dan penerimaan yang dikurangi total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos belanja pegawai dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tabel berikut.

Berdasarkan dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran wajib mengikat serta untuk program - program pelayanan wajib dasar terutama pemenuhan SPM;
- b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Pembagian anggaran untuk masing-masing prioritas I, II dan III dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2025-2030

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	1,236,377,955,980	1,502,945,652,034	1,769,899,436,270	2,037,413,048,370	2,305,738,410,873	2,575,240,811,460
2	Pencaliran dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	131,407,593,227	367,336,166,414	209,351,724,758	75,385,318,414	132,674,253,239	257,046,723,476
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	500,000,000,000	-	-	-	-	-
Total penerimaan		1,018,531,912,900	1,319,229,787,331	1,044,252,874,555	1,071,498,181,177	1,101,343,609,521	1,134,242,401,453
Dikurangi:							
5	Belanja Pegawai	537,804,859,519	573,837,785,107	609,870,710,695	645,903,636,282	681,936,561,870	717,969,487,458
6	Pengeluaran Pembiayaan	6,500,000,000	131,500,000,000	131,500,000,000	131,500,000,000	131,500,000,000	6,500,000,000
Kapasitas riil kemampuan keuangan		1,323,480,689,688	1,164,944,033,341	1,237,880,450,333	1,335,394,730,501	1,624,976,102,242	2,107,818,047,479

Sumber : Bapperida Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Tabel 2.122
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1,323,480,689,688	1,164,944,033,341	1,237,880,450,333	1,335,394,730,501	1,624,976,102,242	2,107,818,047,479
digunakan untuk mendanai prioritas :							
Prioritas I							
2.	Pengeluaran wajib mengikat serta untuk program-program pelayanan wajib dasar terutama pemenuhan SPM	628,653,327,602	553,348,415,837	587,993,213,908	634,312,496,988	771,863,648,565	1,001,213,572,552
Prioritas II							
3.	Program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar	496,305,258,633	436,854,012,503	464,205,168,875	500,773,023,938	609,366,038,341	790,431,767,805
Prioritas III							
4.	Program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD	198,522,103,453	174,741,605,001	185,682,067,550	200,309,209,575	243,746,415,336	316,172,707,122
Jumlah prioritas I, II, dan III		1,323,480,689,688	1,164,944,033,341	1,237,880,450,333	1,335,394,730,501	1,624,976,102,242	2,107,818,047,479

Sumber : Bapperida Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Tabel 2.121 dan 2.122 di atas menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun, namun hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara relatif terbatas. Perlu adanya akselerasi dalam mendukung peningkatan PAD dengan mendorong upaya percepatan proyek Strategis Nasional (PSN). Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan terjaga sejalan dengan hilirisasi SDA yang membuka lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan UMKM, dan sektor tersier lainnya sebagai objek penerimaan PAD Kabupaten Konawe Utara.

2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian apada bagian ini akan menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu- isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk kurung waktu 5 tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan pada bagian ini adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

- Belum optimalnya akses pendidikan
- Derajat kesehatan masyarakat dan capaian keluarga sehat masih perlu ditingkatkan
- Masih tingginya angka pengangguran terbuka
- Belum optimalnya penanganan kemiskinan
- Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak
- Belum optimalnya pengendalian penduduk
- Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga
- Rendahnya pertumbuhan ekonomi
- Masih rendahnya kapasitas dan kontribusi sektor KUMKM terhadap perekonomian daerah
- Masih rendahnya kontribusi sektor -sektor unggulan daerah terhadap perekonomian daerah

- Belum optimalnya sarana prasarana perdagangan
- Belum optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat
- Masih terbatasnya infrastruktur wilayah dan sarana prasarana dasar
- Akuntabilitas keuangan daerah masih perlu ditingkatkan
- Belum optimalnya penerapan zona integritas
- Penyusunan, implementasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan masih perlu ditingkatkan
- Belum optimalnya implementasi manajemen ASN
- Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan
- Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Belum optimalnya kualitas layanan publik
- Belum optimalnya kualitas layanan publik kewilayahan
- Belum optimalnya Penegaka hukum daerah dan pemenuhan Hak Asasi Manusia
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dalam rangka mendukung pembangunan dan investasi daerah
- Belum optimalnya Pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan
- Terbatasnya event budaya yang dilaksanakan
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan

2.6.2 Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan yang dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah.

2.6.2.1. Isu Global/Internasional

Isu strategis internasional yang relevan dan wajib diperhatikan bagi pembangunan 5 (lima) tahun mendatang antara lain: Komitmen Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs). (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pembangunan internasional di masa mendatang. SDG's menjadi salah satu acuan dalam kebijakan pembangunan Nasional saat ini yang telah dituangkan dalam

peraturan perundangundangan antara lain: Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pengarusutamaan SDGs dalam rencana pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah. Konsep SDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak. Adapun 17 (ketujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana saja.
2. Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
4. Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.
5. Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
7. Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
8. Pekerjaan yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.

10. Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan diantara negara negara.
11. Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman wargayang inklusif, aman dan kukuh.
12. Pemakaian yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan polaproduksi yang berkelanjutan.
13. Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklimdan dampaknya.
14. Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantasperubahan iklim dan dampaknya.
15. Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaanekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan,memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkandegradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.
16. Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusifuntuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilanbagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif,bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.
17. Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembalikemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.SDG/s/TPB mencakup 17 (tujuh belas) item tujuan, 169 target dan 319indikator pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, baik PemerintahPusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diIndonesia.

Perincian jumlah cakupan indikator TPB berdasarkan kewenanganpemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebanyak 308 indikator;
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebanyak 235indikator;
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupatensebanyak 220 indikator;
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah kota sebanyak 222 indikator.

2.6.2.2 Isu Strategis Wilayah Sulawesi pada Rancangan RPJPD 2025 – 2045

Isu strategis yang mencakup pembangunan wilayah Sulawesi dalam RPJPD 2025 – 2045.

1. Adapun komoditas dan sektor potensial bernilai tambah untuk mendukung arah pembangunan wilayah Sulawesi dimasa mendatang adalah komoditas pertanian, perkebunan (kako, kelapa sawit, cengkeh, pala, rempah), perikanan tangkap (tuna, cakalang, kerapu, selar, teri), industri logam dasar (nikel, tembaga dan emas-perak), mineral aspal serta pariwisata.
2. Pembangunan yang belum dirasakan secara merata di wilayah Sulawesi.
3. Kontribusi ekonomi wilayah Sulawesi terhadap PDRB nasional masih rendah
4. Masih adanya hambatan pada aspek daya saing diseluruh wilayah provinsi di wilayah Sulawesi.
5. Aspek pembiayaan masih menjadi hambatan pembangunan di Sulawesi.
6. Masih dihadapkan pada isu pembangunan sosial khususnya terkait dengan SDM.
7. Secara umum teridentifikasi faktor penghambat pembangunan sosial di wilayah Sulawesi yaitu SDM Pendidikan, SDM Kesehatan dan SDM Ketenagakerjaan terutama di Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.
8. Kondisi infrastruktur di wilayah Sulawesi baik infrastruktur dasar, maupun konektivitas masih belum optimal.
9. Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil, walaupun bauran pembangkit listrik terbarukan di Sulawesi menjadi salah satu terbesar secara nasional.
10. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sudah cukup merata, tetapi masih digunakan secara terbatas untuk penggunaan telekomunikasi.
11. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah Sulawesi saat ini masih belum optimal.
12. Penegakan stabilitas pertahanan dan keamanan di Wilayah Sulawesi, khususnya pada kawasan perbatasan laut masih kurang optimal
13. Ketimpangan gender, perkawinan anak dan pembangunan kebudayaan masih menjadi isu dalam pembangunan ketahanan sosial budaya di wilayah Sulawesi.
14. Deforestasi, ketersediaan air, kerentanan pesisir dan bencana masih menjadi isu dalam pembangunan ketahanan ekologi di wilayah Sulawesi.

15. Wilayah Sulawesi memiliki ancaman bencana hidrometeorologi dan geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir, longsor dan likuefaksi

2.6.2.3 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara

Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 memiliki isu strategis sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam;
5. Tata Kelola Pemerintahan;
6. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Wilayah.

2.6.2.4 Isu Strategis Kab. Konawe Utara

Berdasarkan data pada Bab II, trend demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, arahan RPJPD bagi pembangunan daerah dan permasalahan pembangunan dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kab. Konawe Utara sebagai berikut :

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Konawe Utara

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) berhubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Konawe Utara berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Rendahnya daya saing SDM Kabupaten Konawe Utara memiliki masalah inti yakni rendahnya kualitas SDM. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan terkait kualitas SDM yang akan berdampak pada peningkatan daya saing masyarakat Kabupaten Konawe Utara.

Indikasi untuk mengukur kualitas SDM antara lain dengan mengukur sejauh mana SDM Kabupaten Konawe Utara dapat bersaing dengan SDM wilayah lain, sekurang- kurangnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, masih dominannya produk primer yang menjadi andalan ekspor menunjukkan bahwa kemandirian lokal SDM masih menjadi kendala utama pembangunan karena belum mampu memberi nilai tambah terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dihasilkan.

Rendahnya kualitas SDM Kabupaten Konawe Utara berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain rendahnya akses dan mutu pendidikan, rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan rendahnya serta belum meratanya pendapatan per kapita masyarakat. Permasalahan rendahnya akses dan mutu pendidikan dapat dilihat dari angka melek huruf di Kabupaten Konawe Utara sebesar 98,22 persen pada tahun 2023 dan angka rata-rata lama sekolah 9,60 tahun 2023. Oleh karena itu, untuk memperbaiki daya saing SDM di Kabupaten Konawe Utara pada masa datang, perlu perhatian khusus dari pemerintah terkait pendidikan, terutama dari segi kualitas maupun sarana dan prasarana penunjangnya. Permasalahan berikutnya yang memengaruhi rendahnya daya saing SDM Kabupaten Konawe Utara adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Angka harapan hidup di Kabupaten Konawe Utara cenderung naik perlahan dimana pada tahun 2021 sebesar 69,53 dan meningkat menjadi 69,68 tahun 2023. Selain itu angka kematian ibu berhasil mencapai 0 kasus pada tahun 2023, capaian ini sangat baik jika dibandingkan ditahun sebelumnya yang selalu ada kasus kematian ibu. Demikian pula Angka Kematian Bayi tahun 2021 sebanyak 14 jiwa signifikan menurun di tahun 2023 sebanyak 7 jiwa. Mutu pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan sampai ke wilayah perdesaan terpencil dan perbatasan mengingat penduduk tersebar di seluruh sudut wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Permasalahan turunan yang juga dapat memengaruhi rendahnya daya saing SDM Kabupaten Konawe Utara adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan tiap tahunnya dimana pada tahun 2021 sebesar 58,43 juta rupiah meningkat menjadi 68,25 juta rupiah di tahun 2023. Angka pendapatan perkapita hanya membagi total produksi barang dan jasa dengan jumlah penduduk, namun belum mampu menggambarkan pemerataan pendapatan.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan masyarakat Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2023 sebesar Rp 1.403.664,-. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, proporsi pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan pada tahun 2023 yang sebesar Rp 746.834 dan bukan makanan Rp. 656.830. Angka tersebut bermakna bahwa pengeluaran per bulan masyarakat Kabupaten Konawe Utara menunjukkan masih didominasi untuk konsumsi makanan. Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- Peningkatan kesehatan ibu dan anak.
- Mempromosikan budaya hidup sehat bagi semua segala usia.
- Mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
- Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat rentan.

2. Daya saing ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi menjelaskan berbagai dampak dari kebijakan dan aktivitas ekonomi oleh masyarakat dan pelaku usaha. Di lain pihak, pertumbuhan ekonomi juga memberi dampak lanjutan terutama pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Tercatat pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Konawe berada pada 5,03%, pertumbuhan ini terus mengalami peningkatan jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -0,72 %. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang melanda dunia, sehingga menyebabkan perekonomian nasional berkontraksi menjadi -2,07% dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar -0,65%.

Jika ditilik menurut lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang merupakan sektor dengan peranan terbesar dalam PDRB Kabupaten Konawe Utara sebesar 37,15 persen sekaligus menjadi sektor unggulan daerah tetapi pertumbuhannya mengalami penurunan, tahun 2022 sebesar 6,03 persen dan 0,25 persen pada tahun 2023. Sektor – sektor yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2023 yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,31, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 10,12 persen, Penyediaan akomodasi dan makan minum 7,83 persen, jasa lainnya 5,61 persen, informasi dan komunikasi 5,36 persen, konstruksi 5,03 persen, jasa perusahaan 4,54 persen, jasa pendidikan 4,19 persen, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,37 persen.

Dari dilihat aspek ketenagakerjaan, dimana jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara tahun 2023 sebanyak 77.391 jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif 46.857 (60,54 persen), dari

penduduk usia produktif tersebut sebanyak 76,81 % merupakan Angkatan Kerja, selanjutnya dari angkatan kerja sebanyak 2,12 persen adalah Pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan 0,75 persen dari tahun 2022 sebesar 2,01 persen dan tahun 2023 sebesar 2,76 persen.

Sebanyak 40,89 persen penduduk yang bekerja di Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan berdasarkan tingkat pendidikan, para pekerja di Kabupaten Konawe Utara masih banyak yang memiliki pendidikan SD ke bawah yaitu sekitar 33,17 persen. Berbagai lapangan kerja juga masih banyak dipenuhi oleh SDM dari luar Kabupaten Konawe Utara karena tidak mampu dipenuhi oleh SDM lokal. Kondisi ini mencerminkan kualitas tenaga kerja di wilayah Kabupaten Konawe Utara relatif masih rendah. Dengan demikian, dalam 5 tahun kedepan harus dilakukan upaya peningkatan produktivitas sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja relatif lebih tinggi dan sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Konawe Utara.

Pertumbuhan ekonomi yang lambat dan penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Konawe Utara, belum mampu menurunkan kemiskinan dengan signifikan yang cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Tercatat angka kemiskinan di tahun 2023 sebesar 13,48 persen atau menurun dari 13,72 persen di tahun 2022.

Adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di daerah perdesaan menyebabkan penurunan kemiskinan tergolong lambat. Tersedianya lapangan kerja seharusnya mengurangi kemiskinan. Namun, kalau sekarang ini, ada lapangan kerja, tetapi masyarakat tetap miskin. Hal ini menjadi permasalahan pokok di Kabupaten Konawe Utara yang harus dituntaskan dalam 5 tahun mendatang.

Tingginya kemiskinan di Konawe Utara menyebabkan orientasi untuk bekerja berubah. Penduduk rela bekerja tanpa dibayar asalkan tempat tinggal dan makan minum setiap hari terjamin. Mereka juga rela dibayar murah karena jenis lapangan kerja terbatas. Dengan demikian, berarti kemiskinan harus ditekan dulu dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Agar lapangan kerja berkualitas di Konawe Utara dibutuhkan investasi, sedikitnya investasi menjadi salah satu akar masalah kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara. Investasi penting untuk menambah lapangan kerja berkualitas, yang akhirnya bisa menekan kemiskinan. Untuk itu kedepan harus bisa meningkatkan investasi di daerah. Investasi yang ditarik mesti berbasis keunggulan daerah. Konawe Utara memiliki potensi pertanian dan perikanan melalui pengembangan agroindustri. Investasi untuk memaksimalkan potensi itu dan menciptakan nilai tambah akan menjadikan perekonomian daerah unggul. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Peningkatan iklim investasi daerah
- Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang pertanian perkebunan dan perikanan.
- Mengembangkan nilai tambah (value added) melalui agroindustri komoditas unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
- Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal berbasis online yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
- Penguatan ketahanan pangan melalui manajemen stok yang baik dan diversifikasi produk olahan sub sector pertanian antara lain perikanan.
- Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.
- Pengembangan pariwisata yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuhkembangnya ekonomi lokal dan UMKM.

3. Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah.

Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Belum terpenuhinya infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, kelistrikan, telekomunikasi) secara merata. Selain itu, sebab utama lainnya adalah

kualitas infrastruktur yang belum memadai dimana terlihat minimnya kemantapan jalan kabupaten sebesar 89,52 persen pada tahun 2023.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi sebagai infrastruktur pengembangan pertanian, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik. Sampai dengan Tahun 2023, di wilayah Kabupaten Konawe Utara terdapat 22 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas 3.941 Ha. Kondisi jaringan irigasi primer dalam kondisi baik tahun 2023 adalah 75,34% (8.683,10 m), sedangkan irigasi sekunder sebesar 75,22% (1.569,80).

Dari sisi transportasi, bahwa rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kabupaten Konawe Utara masih kecil dan masih jauh di bawah rasio rata-rata provinsi dan nasional. Selain itu, akses jalan di wilayah pedalaman belum berkondisi mantap, bahkan banyak jalan yang terputus oleh alur sungai maupun karena rusak parah sehingga sulit untuk dilalui. Sarana transportasi umum juga belum berkembang baik dari jumlah armada angkutan darat maupun pemanfaatan terminal angkutan darat yang belum optimal. Jumlah angkutan darat yang ada di Kabupaten konawe utara hanya berjumlah 216 unit. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses ke pusat- pusat produksi dan belum optimalnya pemasaran ke pusat- pusat distribusi. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Percepatan pengembangan jaringan jalan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara dan RDTR Kawasan Perkotaan Wanggudu.
- Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan Jasa.
- Pengembangan sarana transportasi orang dan transportasi barang.
- Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan dan aktivitas sosial ekonomi.
- Pengembangan sistem sanitasi yang terintegrasi untuk mewujudkan 100% terlayani sistem sanitasi.
- Penyediaan sarana prasarana umum (RTH, Landmark, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, Pemakaman, dll) yang berkualitas dan merata.
- Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik.

4. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: accountability, transparency, predictability, dan participation. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja "tata kelola pemerintahan yang baik" di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan dimana capaian pada tahun 2023 indeks Reformasi Birokrasi baru mencapai nilai CC, belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; pelayanan publik yang belum prima; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Reformasi birokrasi masih menjadi isu startegis nasional dan didaerah. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal adalah profesional aparatur belum mencapai standar yang ditentukan, kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan, untuk itu hal - hal yang perlu dilaksanakan antara lain :

- Pengelolaan Pemerintahan yang Transparan, Bersih, dan Efektif.
- Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Pengembangan kualitas ASN secara merit sistem.
- Pemantapan sistem informasi pemerintahan daerah yang transparan.

5. Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam

Mengingat Kabupaten Konawe Utara adalah daerah dengan Indeks Resiko Bencana tinggi yaitu 159,14 (tinggi/zona merah), maka penyelesaian isu lingkungan berkaitan dengan masalah bencana banjir, pencemaran lingkungan serta menjalankan keterpaduan kegiatan pasca tambang dengan konservasi lingkungan harus menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun ke depan. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
- Pengurangan kerentanan bencana alam.
- Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana.
- Melatih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.

6. Pembangunan kebudayaan dan kehidupan keagamaan masyarakat

Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah majemuk yang memiliki khazanah budaya yang kaya dan melimpah bersumber dari nilai, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, seni, dan bahasa yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kekayaan budaya tersebut tidak cukup hanya untuk dilestarikan, tapi juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Namun demikian belum optimalnya pengembangan kebudayaan sehingga menyebabkan masyarakat dan pelaku budaya belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Konawe Utara. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya event budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman.

Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun kapasitas kelembagaan masyarakat adat yang berkelanjutan (Lembaga Adat Tolaki, Lembaga Adat Bajo, Lembaga Adat Landawe, Lembaga Adat Culambatu, Lembaga Adat Muna Buton, Lembaga Adat Bugis - Makassar, Lembaga Adat Toraja, Lembaga Adat Jawa dan Sunda, Lembaga Adat Bali dan Lembaga Adat Flobamora) agar siap dipromosikan melalui pengembangan event budaya. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kekayaan budaya dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara.

Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Konawe Utara dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kabupaten Konawe Utara, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam kerangka pembangunan daerah, agama dapat menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat Sesuai Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, para pendiri bangsa menempatkan nilai agama sebagai landasan moralitas. Nilai-nilai agama dapat ditransformasikan untuk membentuk insan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Isu-isu strategis ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan Visi dan Misi Kab. Konawe Utara yang akan memandu arah pembangunan selama periode RPJPD 2025- 2045. Visi dan Misi Kab. Konawe Utara dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan secara menyeluruh semua isu-isu tersebut.



BAB III

VISI, MISI, DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI

Visi Kabupaten Konawe Utara harus menemukan relevansi dalam upaya meningkatkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Konawe Utara. Visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada Serentak Tahun 2024). Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi pembangunan jangka menengah yang akan diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 adalah:



H. Ikbar, S.H., M.H.
Bupati Konawe Utara

H. Abuhaera, S.Sos, M.Si
Wakil Bupati Konawe Utara

VISI : “KONASARA BERKIBAR”

(KONAWE UTARA BERSAMA IKBAR DAN ABUHAERA)

“KONAwe Utara sebagai rumah berSama yang semakin maju dan sejahteRA”

Visi RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 terdiri dari 3 (tiga) frase yaitu:

1. Rumah Bersama

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Namun selain itu, rumah memiliki makna dan filosofi tersendiri. Rumah adalah tempat semua anggota keluarga berkumpul, tinggal dalam satu atap yang sama, berbagai kehangatan, keceriaan, kenyamanan, bahkan kesedihan bersama. Rumah bukan hanya sebagai tempat yang paling aman tetapi juga yang paling nyaman bagi semua penghuninya.

Maka wilayah Kabupaten Konawe Utara dengan kekayaan sumber daya alamnya serta keragaman masyarakatnya adalah tempat kembali yang paling kita rindukan kemanapun kita berada. Oleh karena itu, daerah Kabupaten Konawe utara harus diwujudkan menjadi daerah yang nyaman bagi seluruh masyarakat di dalamnya, baik dari aspek kenyamanan fisik, kenyamanan spiritual, kenyamanan lingkungan dan kenyamanan sosiokultural.

2. Maju

Kata Maju, mengandung arti mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdayasaing, sehingga masyarakat Kabupaten Konawe Utara dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupi segala kebutuhan kehidupan masyarakatnya.

3. Sejahtera

Masyarakat Kabupaten Konawe Utara Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kemiskinan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Untuk mengukur ketercapaian visi tersebut, ditetapkan indikator-indikator makro yang mencerminkan dampak pembangunan terhadap kualitas hidup masyarakat, daya saing daerah, keberlanjutan lingkungan, dan transformasi sosial yang inklusif. Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa visi “Konawe Utara sebagai Rumah Bersama yang Semakin Maju dan Sejahtera” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen terukur untuk: Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; Menghapus kesenjangan dan kerentanan sosial; Membangun ketangguhan daerah menghadapi bencana dan perubahan iklim; Menumbuhkan ekonomi daerah yang produktif, inklusif, dan berdaya saing tinggi; serta Menciptakan Kabupaten Konawe Utara sebagai rumah bersama yang aman, nyaman, dan membanggakan bagi seluruh warganya. Adapun indikator makro untuk mengukur ketercapaian Visi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2.
Indikator Makro Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030

No.	Indikator Makro	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.74	6.25	6.60	6.62	6.7	6.75	6.79
2	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	72.795	73.125	74.865	76.157	77.536	78.439	79.187
3	Kontribusi PDRB Kabupaten / Kota	Persen	3.01	3.45	3.81	4.61	5.4	6.37	7.00
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	13.17	13.72	12.50	12.17	11.91	11.85	10.68
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.76	2.21	2.10	2.19	2.14	2.1	2.06
6	Rasio Gini	Indeks	0.376	0.368	0.354	0.352	0.35	0.346	0.34
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72.71	72.65	73	73.16	73.25	73.96	74.27
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	30.45	32.88	32.91	33.56	34.79	35.65	36.57
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	79.97	62.72	79.99	80.35	80.53	80.72	81.35

3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan permasalahan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029. Berdasarkan visi di atas, maka dirumuskan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Maksud pelaksanaan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan produktif.

Perluasan akses pendidikan bagi masyarakat melalui beasiswa dan bantuan pendidikan, Peningkatan kualitas pendidikan dengan mengimplementasikan program pembelajaran inovatif yang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia unggul, kreatif, dan berdaya saing tinggi serta akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan meraih potensinya sepenuhnya. Selanjutnya pembangunan pusat layanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan fasilitas kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Membangun fondasi

akses terhadap sumberdaya untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran dan mengembangkan program-program unggulan yang mendukung kelompok rentan.

2. Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas.

Upaya mewujudkan konektivitas wilayah, maka langkah utama yaitu pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan efisien, bertujuan untuk meningkatkan konektivitas lokal dan regional. Ini mencakup peningkatan jaringan jalan, jembatan, dan transportasi umum untuk mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang. Selanjutnya penyediaan sarana prasarana kawasan permukiman yang berkualitas mencakup upaya peningkatan lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman yang nyaman dan layak huni untuk seluruh masyarakat. Pemastian akses terhadap listrik, telekomunikasi, sumber daya air, pelayanan sarana air bersih, persampahan, air limbah dan drainase seluruh wilayah kabupaten.

3. Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing.

Kolaborasi peningkatan investasi menjadi prioritas, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Investasi yang strategis diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah. Selanjutnya menyediakan dukungan yang kuat untuk inovasi dan riset. Arah pembangunan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up), dan meningkatkan daya saing daerah dalam skala regional dan nasional. Penciptaan perekonomian berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sektor- sektor yang memiliki potensi besar meliputi, pertambangan hulu, sektor pariwisata berkelanjutan, pertanian modern, perkebunan dan perikanan, serta industri hilir berbasis teknologi.

4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif;

Langkah - langkah mencakup penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan teknologi informasi untuk mempercepat proses, meningkatkan kecepatan, dan memberikan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan publik.

5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana;

Menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan serta penentuan strategi mitigasi bencana perlu diperkuat dengan infrastruktur dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana alam.

6. Pengembangan kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan masyarakat.

Kabupaten Konawe Utara harus mempertahankan dan memperkaya keberagaman budaya lokal sebagai kekayaan dan identitas yang membedakan daerah ini. Masyarakat Konawe Utara harus melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya sebagai bagian integral dari pembangunan. Kemudian untuk meningkatkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan beragama.

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029
Misi RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2045,
Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029,
dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

Misi RPJPD Konawe Utara 2025-2045	Misi RPJMN 2025-2029	Misi RPJMD Prov. Sultra Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2025-2029
1. Transformasi Sosial dan Sumber Daya Manusia Unggul	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Mewujudkan Masyarakat yang terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya	1. Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif;
2. Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi 6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan 8. Kesiambungan Pembangunan antar Periode	3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas; Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	2. Menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas dan penguatan potensi pertanian dalam arti luas; Mritim serta Dunia Usaha	2. Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas;
4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas dan penguatan potensi pertanian dalam arti luas; Mritim serta Dunia Usaha	3. Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing;

Misi RPJPD Konawe Utara 2025–2045	Misi RPJMN 2025–2029	Misi RPJMD Prov. Sultra Tahun 2025–2029	Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2025–2029
3. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Responsif	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	3. Memperkuat Birokrasi yang Akuntabel, Inovatif dan berintegritas yang berpegangan teguh pada Nilai-nilai budaya kearifan lokal dan religius	4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif;
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas dan penguatan potensi pertanian dalam arti luas, Mritim serta Dunia Usaha	5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana;
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 8. Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	3. Memperkuat Birokrasi yang Akuntabel, Inovatif dan berintegritas yang berpegangan teguh pada Nilai-nilai budaya kearifan lokal dan religius	6. Pengembangan kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan masyarakat.

Sumber : Bapperida Konawe Utara Tahun 2025

3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 yang akan dicapai pada masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029

“KONAwe Utara sebagai Rumah BerSama yang semakin Maju dan Sejahtera”

No.	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif	Mewujudkan Transformasi Sosial dan Sumber Daya Manusia Unggul		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,16	3,23	3,39	3,45	3,65	3,78	3,85	
			Penguatan Daya Saing SDM yang Sehat dan Produktif	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,6	70,80	71,09	71,21	71,47	71,43	71,95	
				Kesehatan Ibu dan Anak: Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Rasio	77,58	0	0	0	0	0	0	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen	5,40	5	4,80	4,52	4,27	3,91	3,67	
				Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	Persen	72,72	97	98,50	99,87	100	100	100	
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persen	99,67	99,86	99,93	100	100	100	100	
			Penguatan daya saing SDM yang cerdas dan inovatif	Hasil pembelajaran									
				a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*									
				i) Literasi Membaca	Persen	0	9,09	9,51	10,36	11,98	12,98	14,39	

No.	Misi RP-JMD	Tujuan RP-JMD	Sasaran RP-JMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				i) Numerasi	Persen	0	0,35	1,65	3,67	5,67	7,45	9,10	
				b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*									
				i) Literasi Membaca	Persen	0	21,32	23,67	25,68	27,98	29,31	30,50	
				ii) Numerasi	Persen	0	14,38	15,79	17,15	19,01	20,51	21,93	
				c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	9,60	9,73	9,85	9,92	9,99	10,04	10,17	
				d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	Persen	13,13	13,30	13,33	13,33	13,34	13,34	13,34	
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkecakupan Pendidikan Tinggi (%)*	Persen	12,39	60,35	60,41	60,43	60,46	60,49	60,51	
				Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Persen	50,57	60,35	60,36	60,38	60,39	60,41	60,43	
		Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif		Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	13,17	13,72	12,93	12,17	11,91	11,85	10,68	
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	Persen	65,01	60	63,47	66,57	69,37	70,52	72,59	
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	Persen	0	15	17,27	18,17	20,05	21,97	22,53	
		Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	57,68	61,75	61,90	62,35	63,12	63,98	64,31	
				Indeks Kefempangan Gender (IKG)	Indeks	0,49	0,51	0,49	0,45	0,42	0,39	0,37	

No.	Misi RP-JMD	Tujuan RP-JMD	Sasaran RP-JMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas	Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan, serta Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan		Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	0	0,12	0,36	0,66	0,81	1,07	1,25	
			Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	15,48	15,96	16,94	18,34	21,07	24,59	27,91	
			Terpenuhinya sarana prasarana kawasan permukiman	Persentase Kawasan Perumahan yang tidak kumuh	Persen	41,87	47,49	51,07	59,11	65,23	71,22	76,09	
			Terpenuhinya sarana prasarana Perhubungan	Indeks Kecelakaan Lalu lintas (per 1000 kasus)	Indeks	5,00	0,48	0,45	0,41	0,41	0,33	0,31	
3.	Menoptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing	Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi		Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	5,74	6,25	6,59	6,62	6,7	6,75	6,79	
			Meningkatnya daya saing iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRE Industri Pengolahan (%)	Persen	0,74	0,75	0,79	0,82	0,83	0,85	0,87	
				Pengembangan Pariwisata									
				a) Rasio PDRE Penyediaan Akomodasi makan dan minum (%)*	Persen	9,95	10,35	10,52	10,78	10,92	11,29	11,89	
				b) Tamu Wisatawan Mancanegara (hotel berbintang (orang)	Orang	161	120	180	220	350	450	600	

No.	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun						Ket.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		1,24	1,27	1,31	1,33	1,37	1,4	1,45	
				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD									
				a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level provinsi (%)	Persen	0	8,55	8,63	8,97	12,10	12,29	12,35	
				b) Proporsi Jumlah Industri kecil dan menengah pada level Kabupaten		0,38	1,08	1,77	1,21	1,25	1,30	1,32	
				c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persen	0	0,32	3,45	3,51	3,69	3,88	4,13	
				d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	Persen	0,04	1,04	1,07	1,08	1,10	1,19	1,25	
				e) Return on Asset (ROA) BUMD (%)*	Persen	0	2,83	2,85	2,86	2,88	2,89	2,93	
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	2,76	2,21	2,14	2,19	2,14	2,10	2,06	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persen	41,88	55,15	56,37	56,95	57,29	57,74	58,10	
				Indeks Inovasi Daerah	Indeks	18,12	18,32	18,50	18,97	19,30	19,50	20,50	
			Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau									
				a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	0	80,80	80,95	81,03	81,35	81,59	81,75	
				b) Poni EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Persen	0	0,50	1,25	1,89	2,00	2,56	2,80	
			Terwujudnya Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,88	5,92	5,99	6,03	6,05	6,09	6,19	

No.	Misi RP-JMD	Tujuan RP-JMD	Sasaran RP-JMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif	Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Nilai SAKIP	Nilai	66,52	66,80	67,51	68,07	68,88	69,90	70,79		
			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	2,33	2,41	2,67	2,83	2,89	2,97	3,00		
			Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Tingkat Maturlita SPIP	Indeks	3	3	3	3	3	3	3	
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,85	2,50	2,93	3,07	3,11	3,19	3,25	
				Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,18	2,99	3,01	3,17	3,25	3,32	3,47	
				Indeks Integritas Daerah (Nilai SPI – Survey Perilaku Integritas)	Indeks	70,52	68,00	69,73	71,89	72,99	74,01	75,36	
	Terwujudnya Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah Tangguh		Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	Indeks	70,52	84,00	84,95	85,23	85,69	86,02	86,91		
			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Temporal Tinggalnya (%)	Persen	70,08	70,06	70,97	71,56	72,19	72,23	73,98		
			Indeks Demokrasi Nasional	Indeks	sedang	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	Tinggi	
1													
	Terwujudnya Demokrasi Substansial	Pemerintah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	38,46	90,00	90,29	90,45	91,29	92,30	93,70			

No.	Misi RP-JMD	Tujuan RP-JMD	Sasaran RP-JMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,97	82,72	78,99	80,35	80,53	80,72	81,35	
				Indeks Risiko Bencana (IRB)*	Indeks	159,14	156,10	155,47	154,97	153,67	152,39	151,27	
				Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	Persen	30,45	32,88	32,91	33,56	34,79	35,65	36,57	
				a. Kumulatif	Persen	9,73	9,73	10,34	12,45	13,78	14,81	15,37	
		Terwujudnya Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan energi, air, dan pangan	a) Ketahanan Energi									
				- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	kWh	0	1605	1654	1751	1799	1878	2105	
				- Intensitas Energi Primer (S&M/Ro milyar)*	Ro Milyar	0	189	189	189	189	189	189	
				b) Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	75,04	77,00	77,21	77,43	77,65	77,81	77,99	
				c) Ketahanan Air									
				- Kapasitas Air Batu (m3/detik)*	m3/detik	0	0,47	0,51	0,72	0,89	1,01	1,22	
				- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen	0	31,77	33,45	35,79	38,91	42,67	45,97	
				Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks	0	0,531	0,532	0,532	0,534	0,534	0,535	

No.	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Kualitas Lingkungan Hidup									
				a) Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks	79,97	82,72	79,99	80,35	80,53	80,72	81,35	
				b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Persen	2,75	4,50	4,80	5,20	5,40	5,90	6,30	
				c) Pengelolaan Sampah	Persen	0,00	1,50	1,80	2,30	2,50	2,95	3,50	
				- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	0	4,74	4,92	5,21	5,69	5,87	6,30	
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Perish Pengumpulan Sampah (% RT)*	Persen	5,50	31,28	31,56	32,23	33,41	34,45	35,07	
6.	Pengembangan kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan masyarakat	Mewujudkan Ketahanan Budaya dan Ketahanan Umat Beragama		Indeks Ketahanan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	79,90	79,90	79,96	80,91	81,45	81,92	82,73	
		Tenwujudnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	55,1	53,4	53,49	53,53	54,92	55,02	55,45	

Sumber : Bappeda Kab. Konaue Utara, 2025

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah, sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi tetapi secara langsung menjadi prioritas perangkat daerah. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja 'impact' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara pada tahun 2030. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 3.3 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Rerortra	OPD
Misi 1: Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif					
Mewujudkan Transformasi Sosial dan Sumber Daya Manusia Unggul	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Penguatan Daya Saing SDM yang Sehat dan Produktif	Usia Harapan Hidup (UHH)		Dinas Kesehatan
			Kesehatan Ibu dan Anak:		
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		
			Penanganan Tuberkulosis		
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*		
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*		
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)		
		Penguatan daya saing SDM yang cerdas dan inovatif	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		
			Hasil pembelajaran		
			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*		
			i) Literasi Membaca		
			ii) Numerasi		
			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*		
			i) Literasi Membaca		
			ii) Numerasi		
			c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)		
			d) Harapan Lama Sekolah (tahun)		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KU Rencana	OPD
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*		
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		
		Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)		
			Cakupan Kapesertaan Jaminan Sosial Ketagakerjaan Provinsi (%)		
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)		
		Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
			Indeks Ketimpangan Gender (KGI)		
Misi 2 : Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas					
Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkesedilann, serta Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Indeks Konektivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap		
		Terpenuhinya sarana prasarana kawasan permukiman	Persentase Kawasan Perumahan yang tidak kumuh		
		Terpenuhinya sarana prasarana Perhubungan	Indeks Kecelakaan Lalu lintas (per 1000 kasus)		
Misi 3 : Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing					
Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Meningkatnya daya saing lokal, inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
			Pengembangan Pariwisata		
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan minum (%)*		
			b) Tamu Wisatawan Mancanegara (hotel berbintang (ribu orang)		
			Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
			a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level provinsi (%)		
			b) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level Kabupaten		
			c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		
			d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)		
			e) Return on Asset (ROA) BUMD (%)*		
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KU Rencana	OPD
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		
			Indeks Inovasi Daerah		
		Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:		
			a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah		
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		
		Terwujudnya Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
		Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten*		
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		
		Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Perkotaan terhadap Nasional		
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
		Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD (%)		
			Tingkat inflasi (%)		
			Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan		
			a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		
			b) Aset Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		
			c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*		
			d) Total Kredit/PDRB (%)		
			Inklusi Keuangan (%)		
			Jumlah Kerjasama Daerah		
		Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Persentase Realisasi Investasi terhadap PDRB		
Misi 4 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif:					
Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Nilai SAKIP	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Tingkat Maturnitas SPIP		
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
			Indeks Pelayanan Publik		
			Indeks Integritas Daerah (Nilai SPI – Survey Penilaian Integritas)		
			Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi		
		Terwujudnya Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah Tangguh			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KU Rencana	OPD
			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)		
			Indeks Demokrasi Nasional		
		Terwujudnya Demokrasi Substansial	Persentase Perda dan Perkata yang ditegakkan		
Misi 5: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana					
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)*		
			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
			a. Kumulatif		
		Terwujudnya Berketahanan Energi, Air, dan Ketahanan Pangan	Ketahanan energi, air, dan pangan		
			a) Ketahanan Energi		
			- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*		
			- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp mlyar)*		
			b) Indeks Ketahanan Pangan		
			c) Ketahanan Air		
			- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)*		
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)		
		Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
			Kualitas Lingkungan Hidup		
			a) Indeks kualitas lingkungan hidup daerah		
			b) Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)		
			c) Pengelolaan Sampah		
			- Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Perish Pengumpulan Sampah (% RT)*		
Misi 6: Pengembangan kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan masyarakat					
Mewujudkan Ketahanan Budaya dan Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Terwujudnya Beragama Sehat dan Berkabudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2025

3.4. STRATEGI

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif		
Mewujudkan Transformasi Sosial dan Sumber Daya Manusia Unggul	Penguatan Daya Saing SDM yang Sehat dan Produktif	meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan secara merata, memperkuat program promotif dan preventif untuk mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta mendorong pembangunan kesehatan yang mendukung produktivitas tenaga kerja dan peningkatan kualitas hidup penduduk guna menciptakan SDM yang sehat, tangguh, dan berdaya saing tinggi
	Penguatan daya saing SDM yang cerdas dan inovatif	Meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, memperkuat mutu pembelajaran dengan mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi, meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta memastikan ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang layak dan merata untuk mendukung setiap individu dalam mencapai potensi terbaiknya.
	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	memperluas cakupan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, meningkatkan efektivitas bantuan sosial agar tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi darurat atau bencana, mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial untuk memperkuat ketepatan intervensi, serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang mendukung kemandirian kelompok rentan dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.
	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	memperkuat ketahanan dan kualitas keluarga, mengarusutamakan gender dalam pembangunan, memberdayakan kelompok rentan dan disabilitas dengan memastikan akses setara pada layanan publik, serta menumbuhkan nilai kesetaraan dan inklusi di masyarakat.

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 2 : Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas		
Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan, serta Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah	Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur transportasi darat, laut, dan perhubungan yang terintegrasi dan berkualitas, memperkuat konektivitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan cakupan jalan kabupaten, jembatan, serta sarana transportasi umum untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang secara efisien, serta memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing wilayah.
	Terpenuhinya sarana prasarana kawasan permukiman	Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana dasar permukiman seperti air bersih, sanitasi, drainase, dan pengelolaan persampahan; melakukan penataan kawasan permukiman agar layak huni, aman, dan sehat; serta memperkuat pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten KonaWE Utara.
	Terpenuhinya sarana prasarana Perhubungan	meningkatkan penyediaan, pembangunan, dan pengembangan sarana prasarana perhubungan darat, laut, dan penyeberangan yang berkualitas dan terintegrasi; memperkuat konektivitas antar wilayah melalui pembangunan pelabuhan, dermaga, dan tambatan perahu; serta mengoptimalkan pelayanan transportasi umum yang aman, terjangkau, dan mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat secara efisien untuk memperkuat daya saing wilayah.
Misi 3 : Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing;		
Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	Meningkatnya daya saing Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Menyediakan dukungan yang kuat untuk inovasi dan riset, mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up), dan meningkatkan daya saing daerah dalam skala regional dan nasional.
	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan dengan penerapan prinsip ekonomi hijau dan biru, mendorong pengelolaan lingkungan yang ramah dan produktif melalui pemanfaatan potensi laut, perikanan, dan pesisir secara lestari, memperkuat pertanian ramah lingkungan dan rendah emisi, serta mendorong investasi pada industri hijau untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah tanpa merusak lingkungan.
	Terwujudnya Transformasi Digital	mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui penguatan infrastruktur TIK, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi, peningkatan literasi digital dan kompetensi SDM aparatur serta masyarakat, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung produktivitas ekonomi dan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Memperkuat integrasi ekonomi daerah dengan nasional dan global melalui pengembangan sistem logistik yang efisien, peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah, penguatan jejaring pasar dan kerja sama antar wilayah, fasilitasi ekspor produk lokal, serta mendorong harmonisasi kebijakan

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		untuk mendukung keterhubungan ekonomi domestik dan partisipasi aktif dalam rantai nilai global.
	Terwujudnya Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Mengembangkan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan infrastruktur, kelembagaan ekonomi desa, desa inovasi dan wisata, serta pemberdayaan masyarakat desa berbasis potensi lokal
	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, pengendalian inflasi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, efisiensi belanja daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang stabil untuk menjaga keseimbangan dan ketahanan ekonomi daerah menghadapi dinamika nasional dan global.
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	meningkatkan realisasi investasi daerah melalui penyusunan peta potensi investasi yang jelas dan prospektif, memperkuat promosi dan kemudahan berusaha, penyederhanaan perizinan, penguatan ekosistem investasi yang kondusif, pengembangan kawasan industri dan sentra ekonomi strategis, serta membangun kemitraan dengan investor swasta dan BUMN untuk mendorong masuknya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara.
Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	memperkuat penyusunan regulasi daerah yang berkualitas, responsif, dan selaras dengan kebijakan nasional; mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi; meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur pemerintah, serta mendorong inovasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
	Terwujudnya Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah Tangguh	memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan melalui peningkatan pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah, penguatan kapasitas aparat penegak perda, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat sistem dan infrastruktur keamanan daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
	Terwujudnya Demokrasi Substansial	meningkatkan kualitas demokrasi daerah melalui penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, penyediaan ruang dialog dan aspirasi yang inklusif, penguatan kapasitas kelembagaan demokrasi di tingkat lokal, serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan demokrasi yang bermakna dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatkan kapasitas individu, komunitas, dan pemerintah daerah dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana serta perubahan iklim, memperkuat sistem peringatan dini dan respons tanggap darurat, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, serta mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat dan wilayah yang tangguh menghadapi risiko bencana dan dampak perubahan iklim.

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
	Terwujudnya ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi, air, dan pangan secara berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas produksi pangan lokal, pengembangan energi baru terbarukan, pengelolaan sumber daya air yang terpadu, serta memperkuat kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan swasembada pangan, kemandirian energi, dan ketersediaan air yang cukup bagi masyarakat
	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim	meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber daya alam, penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta integrasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan dalam seluruh sektor pembangunan untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat, aman, dan tangguh menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.
Misi 6 : Pengembangan kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan masyarakat.		
Mewujudkan Ketahanan Budaya dan Kerukunan Umat Beragama	Terwujudnya kemashabatan Beragama dan Berkebudayaan Maju	memperkuat kehidupan beragama yang harmonis dan moderat melalui pembinaan umat beragama, peningkatan kualitas sarana prasarana ibadah, serta penguatan kerukunan antar umat beragama; mengembangkan kebudayaan daerah melalui pelestarian, revitalisasi, dan promosi nilai budaya lokal, serta mendorong inovasi seni dan budaya untuk memperkaya identitas daerah dan mendukung perekonomian kreatif berbasis budaya.

3.5. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah berupa rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya (tematik) namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan guna pelaksanaan misi pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029

			Arah Kebijakan					
Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1: Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif								
Mewujudkan Transformasi Sosial dan Sumber Daya Manusia Unggul	Penguatan Daya Saing SDM yang Sehat dan Produktif	meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan secara merata, memperkuat program promotif dan preventif untuk mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta mendorong pembangunan kesehatan yang mendukung produktivitas tenaga kerja dari peningkatan kualitas hidup penduduk guna menciptakan SDM yang sehat, tangguh, dan berdaya saing tinggi	Memperkuat layanan kesehatan dasar melalui peningkatan sarana prasarana puskesmas, pemenuhan tenaga kesehatan, dan penyusunan kebijakan promotif preventif kesehatan masyarakat	Pembangunan RS Kabupaten type C, Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan derajat kesehatan keluarga	Mengoptimalkan cakupan dan mutu pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular untuk mendukung produktivitas masyarakat	Meningkatkan cakupan dan mutu layanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan berbasis digital untuk memperluas akses layanan berkualitas	Memperkuat program kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan untuk mendukung tenaga kerja yang sehat, tangguh, dan produktif	Melakukan evaluasi dan pemantapan sistem layanan kesehatan daerah yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan guna mewujudkan SDM Konawe Utara yang sehat dan berdaya saing tinggi
		Meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, memperkuat mutu pembelajaran dengan mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi, meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta memastikan ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang layak dan merata untuk mendukung setiap individu dalam mencapai potensi terbaiknya	Memperluas kebijakan Beasiswa Konasara mencakup seluruh biaya kuliah penunjang, serta memastikan kebutuhan smart classroom dan pelatihan guru di sekolah prioritas	Mengimplementasikan smart classroom pada sekolah dasar dan menengah secara bertahap, mulai mengembangkan kurikulum inovatif berbasis teknologi dan kearifan lokal	Meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan intensif metode pembelajaran inovatif dan digital, serta memperkuat laboratorium sekolah untuk mendukung pembelajaran praktis	Memperluas smart classroom ke seluruh sekolah menengah, mengintegrasikan kurikulum inovatif dengan pembelajaran berbasis proyek dan kewirausahaan	Meningkatkan kesejahteraan guru melalui penyaluran tunjangan kinerja, penyediaan laptop dan sarana pendukung pembelajaran untuk semua guru di sekolah prioritas	Melakukan evaluasi menyeluruh implementasi Beasiswa Konasara, smart classroom, kurikulum inovatif, dan kesejahteraan guru untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pendidikan yang melahirkan generasi unggul dan berdaya saing
	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	memperluas cakupan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, meningkatkan efektivitas bantuan sosial agar tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi darurat atau bencana, mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial untuk memperkuat ketepatan intervensi, serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang mendukung kemandirian kelompok rentan dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan	pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak	Peningkatan cakupan dan kualitas program bantuan sosial serta memastikan penyaluran tepat sasaran berbasis DTKS terbaru dan sistem digital terintegrasi	Penguatan kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan sosial serta pengembangan skema perlindungan sosial darurat menghadapi bencana atau krisis ekonomi	Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui pelatihan keterampilan, akses modal, dan pendampingan usaha produktif	Integrasi program perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi daerah secara lintas sektor untuk mendukung penurunan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kemandirian keluarga miskin	Evaluasi menyeluruh dan pemantapan keberlanjutan sistem perlindungan sosial adaptif yang responsif terhadap risiko sosial, ekonomi, dan bencana sebagai fondasi pengurangan kemiskinan berkelanjutan

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	memperkuat ketahanan dan kualitas keluarga, mengarusutamakan gender dalam pembangunan, memberdayakan kelompok rentan dan disabilitas dengan memastikan akses setara pada layanan publik, serta menumbuhkan nilai kesetaraan dan inklusi di masyarakat.	Memperkuat landasan kebijakan dan kelembagaan pengarusutamaan gender serta pembangunan keluarga dengan menyusun regulasi daerah, pedoman teknis, dan penguatan kapasitas aparaturnya pelaksana.	Mengoptimalkan program ketahanan keluarga melalui edukasi, pengasuhan anak, peningkatan gizi keluarga, kesehatan reproduksi, serta mulai mengimplementasikan program desa ramah perempuan dan peduli anak.	Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan politik, serta memperluas perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas melalui integrasi program lintas sektor.	Memperluas cakupan program pemberdayaan ekonomi keluarga dan perempuan berbasis potensi lokal serta meningkatkan akses kelompok rentan pada pendidikan dan pekerjaan inklusif.	Mengatkan kampanye nilai kesetaraan gender, anti diskriminasi, dan inklusi sosial secara massif di masyarakat melalui kolaborasi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, adat, dan organisasi masyarakat.	Memantapkan keberlanjutan program dengan penguatan sistem data terpadu dan evaluasi capaian pembangunan keluarga, kesetaraan gender, dan inklusi sosial untuk memastikan target RPJMD dan kontribusi pada SDGs tercapai secara berkelanjutan.
Misi 2 : Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas								
Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan, serta Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah	Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur transportasi darat, laut, dan perhubungan yang terintegrasi dan berkualitas, memperkuat konektivitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan cakupan jalan kabupaten, jembatan, serta sarana transportasi umum untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang secara efisien, serta memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing wilayah.	Melakukan pemetaan kondisi dan kebutuhan infrastruktur wilayah, serta menyusun perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, dan sarana transportasi yang terintegrasi.	Memulai pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten, strategis, rehabilitasi jembatan prioritas, serta pembangunan sarana transportasi umum pada kawasan padat penduduk.	Memperluas pembangunan dan pemeliharaan jalan penghubung antar kecamatan dan desa, serta meningkatkan konektivitas menuju pusat pertumbuhan ekonomi lokal.	Mengembangkan infrastruktur pendukung transportasi laut dan perhubungan, termasuk pembangunan pelabuhan rakyat dan tambatan perahu di wilayah pesisir dan pulau kecil.	Melanjutkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi secara menyeluruh untuk mendukung distribusi logistik, pariwisata, dan aktivitas ekonomi masyarakat.	Melakukan evaluasi capaian pembangunan infrastruktur wilayah dan memantapkan kualitas serta keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur untuk mendukung daya saing daerah.
	Terpenuhinya sarana prasarana kawasan permukiman	Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana dasar permukiman seperti air bersih, sanitasi, drainase, dan pengelolaan persampahan; melakukan penataan kawasan permukiman agar layak huni, aman, dan sehat, serta memperkuat pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten KonaWE Utara.	Melakukan pemetaan kebutuhan sarana prasarana dasar permukiman dan menyusun rencana penataan kawasan permukiman prioritas, termasuk kawasan dengan akses air bersih dan sanitasi rendah.	Memulai pembangunan dan peningkatan akses air minum layak dan sanitasi sehat di kawasan permukiman padat dan desa terpencil.	Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan untuk pengendalian banjir dan penataan kawasan permukiman.	Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan terpadu berbasis reduce, reuse, recycle (3R) di kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan.	Melanjutkan peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman untuk mendukung kawasan permukiman layak huni, aman, sehat, dan ramah lingkungan.	Melakukan evaluasi capaian pembangunan sarana prasarana kawasan permukiman dan memantapkan kebijakan pengelolaan permukiman berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten KonaWE Utara.

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terpenuhiya sarana prasarana Perhubungan	meningkatkan penyediaan, pembangunan, dan pengembangan sarana prasarana perhubungan darat, laut, dan penyeberangan yang berkualitas dan terintegrasi; memperkuat konektivitas antar wilayah melalui pembangunan pelabuhan, dermaga, dan tambatan perahu, serta mengoptimalkan pelayanan transportasi umum yang aman, terjangkau, dan mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat secara efisien untuk memperkuat daya saing wilayah.	Melakukan pemetaan kebutuhan sarana prasarana perhubungan darat dan laut, serta menyusun rencana pembangunan pelabuhan, dermaga, tambatan perahu, dan sarana transportasi umum prioritas.	Memulai pembangunan atau peningkatan terminal darat, dermaga penyeberangan, dan tambatan perahu pada kawasan strategis untuk mendukung konektivitas antar wilayah.	Mengembangkan sarana prasarana transportasi umum yang aman, terjangkau, dan nyaman di wilayah perkotaan dan kawasan pertumbuhan ekonomi.	Melanjutkan pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan rakyat, termasuk fasilitas pendukung bongkar muat untuk mendukung distribusi barang dan aktivitas perikanan.	Memperluas penyediaan sarana perhubungan di wilayah pesisir dan pulau kecil untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat terpencil.	Melakukan evaluasi dan pemantapan pengelolan sarana prasarana perhubungan secara berkelanjutan untuk memperkuat konektivitas dan daya saing wilayah Kabupaten Konawe Utara.
Misi 3 : Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing;								
Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	Meningkatnya daya saing iptek, inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Menyediakan dukungan yang kuat untuk inovasi dan riset, mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up), dan meningkatkan daya saing daerah dalam skala regional dan nasional	Pengembangan inovasi dan riset, mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up)	Pengembangan inovasi dan riset, mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up)	Pengembangan inovasi dan riset, mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up)	Pengembangan inovasi dan riset, mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up)	Pengembangan inovasi dan riset, mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up)	Pengembangan inovasi dan riset, mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up)
	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan dengan penerapan prinsip ekonomi hijau dan biru, mendorong pengelolaan lingkungan yang ramah dan produktif melalui pemanfaatan potensi laut, perikanan, dan pesisir secara lestari, memperkuat pertanian ramah lingkungan dan rendah emisi, serta mendorong investasi pada industri hijau untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah tanpa merusak lingkungan.	Menyusun kebijakan dan roadmap penerapan ekonomi hijau dan biru daerah serta memetakan potensi sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan industri hijau yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.	Mengembangkan program pertanian ramah lingkungan dan praktik perikanan berkelanjutan di wilayah pesisir dan sentra produksi utama.	Mendorong penguatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha dalam penerapan teknologi hijau di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan hasil.	Menarik investasi pada sektor industri hijau dan ekonomi biru untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.	Memperluas penerapan ekonomi hijau dan biru melalui integrasi program lintas sektor dan kemitraan dengan dunia usaha serta lembaga penelitian.	Melakukan evaluasi dan pemantapan pelaksanaan ekonomi hijau dan biru untuk memastikan peningkatan perekonomian daerah selaras dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
	Terwujudnya Transformasi Digital	mempercepat digitalisasi tata kerja pemerintahan dan pelayanan publik melalui penguatan infrastruktur TIK, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi, peningkatan literasi digital dan kompetensi SDM aparatur serta masyarakat, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung produktivitas ekonomi dan	Menyusun roadmap transformasi digital daerah dan memetakan kebutuhan infrastruktur TIK serta pengembangan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur TIK di pusat layanan publik, sekolah, dan kawasan prioritas untuk mendukung pemerataan akses digital.	Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi untuk mendukung pelayanan publik	Meningkatkan literasi digital dan kompetensi SDM aparatur pemerintah daerah serta pelaku ekonomi melalui pelatihan dan pendampingan digital.	Mengintegrasikan layanan digital lintas sektor, termasuk UMKM dan layanan publik, untuk mempercepat transformasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Melakukan evaluasi dan pemantapan pelaksanaan transformasi digital daerah secara menyeluruh untuk mendukung pemerintahan dan perekonomian daerah

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	memperkuat penyusunan regulasi daerah yang berkualitas, responsif, dan selaras dengan kebijakan nasional; mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi; meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur pemerintah; serta mendorong inovasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Melakukan pemetaan dan penyusunan regulasi daerah untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional serta menyusun perencanaan reformasi tata kelola pemerintahan.	Meningkatkan kualitas penyusunan regulasi daerah yang responsif, implementatif, dan mendukung pelayanan publik yang efektif.	Mengoptimalkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.	Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan, pembinaan, dan penguatan etika birokrasi.	Mendorong inovasi birokrasi dan pengembangan kebijakan adaptif yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi.	Melakukan evaluasi dan pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, adaptif, dan inovatif untuk mendukung pelayanan publik yang prima dan kepercayaan masyarakat.
	Terwujudnya Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah Tangguh	memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan melalui peningkatan pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah, penguatan kapasitas aparat penegak perda, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat sistem dan infrastruktur keamanan daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.	Melakukan pemetaan permasalahan penegakan hukum dan keamanan daerah serta menyusun kebijakan penguatan penegakan perda dan sistem keamanan daerah.	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak perda melalui pelatihan, pembinaan, dan penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.	Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kesadaran hukum kepada masyarakat untuk menciptakan budaya taat hukum dan tertib sosial.	Memperkuat sistem dan infrastruktur keamanan daerah, termasuk sarana prasarana penunjang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Mengembangkan kebijakan kolaborasi penegakan hukum dengan lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik dan penegakan norma sosial.	Melakukan evaluasi dan pemantapan sistem penegakan hukum yang berkeadilan serta keamanan daerah yang tangguh untuk mendukung stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.
	Terwujudnya Demokrasi Substansial	meningkatkan kualitas demokrasi daerah melalui penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, penyediaan ruang dialog dan aspirasi yang inklusif, penguatan kapasitas kelembagaan demokrasi di tingkat lokal, serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan demokrasi yang bermakna dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.	Melakukan pemetaan kondisi demokrasi daerah dan menyusun kebijakan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan demokrasi lokal melalui pelatihan, pembinaan, dan penguatan peran lembaga musyawarah di desa dan kecamatan.	Memfasilitasi ruang dialog publik dan forum aspirasi masyarakat secara inklusif untuk mendukung pengambilan keputusan yang partisipatif.	Mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui penguatan akses informasi publik dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan.	Mengoptimalkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab warga dalam kehidupan demokrasi.	Melakukan evaluasi dan pemantapan pelaksanaan demokrasi substansial yang inklusif, berkeadilan, dan berintegritas untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan.
Misi 5 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana								
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan kapasitas individu, komunitas, dan pemerintah daerah dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana serta perubahan iklim, memperkuat sistem peringatan dini dan respons tanggap darurat, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, serta mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat dan wilayah yang tangguh menghadapi risiko bencana dan dampak perubahan iklim.	Melakukan pemetaan risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim serta menyusun kebijakan dan rencana aksi pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, aparatur, dan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana melalui pelatihan dan simulasi kebencanaan.	Mengembangkan dan memperkuat sistem peringatan dini bencana di wilayah rawan bencana.	Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang.	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk mendukung resiliensi ekosistem dan masyarakat terhadap perubahan iklim.	Melakukan evaluasi dan pemantapan pelaksanaan kebijakan ketangguhan bencana dan perubahan iklim untuk mewujudkan daerah yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

			Arah Kebijakan					
Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terwujudnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi, air, dan pangan secara berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas produksi pangan lokal, pengembangan energi baru terbarukan, pengelolaan sumber daya air yang terpadu, serta memperkuat kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan swasembada pangan, kemandirian energi, dan ketersediaan air yang cukup bagi masyarakat	Melakukan pemetaan potensi dan kebutuhan energi, air, dan pangan daerah serta menyusun kebijakan dan rencana aksi ketahanan energi, air, dan pangan	Meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian serta penguatan kelembagaan petani dan penyuluh	Mengembangkan dan memanfaatkan energi baru terbarukan di wilayah potensial untuk mendukung kemandirian energi daerah	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air baku dan irigasi	Mengoptimalkan program diversifikasi pangan lokal dan penguatan cadangan pangan daerah untuk mendukung swasembada pangan	Melakukan evaluasi dan pemantapan kebijakan ketahanan energi, air, dan pangan untuk memastikan ketersediaan yang cukup, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat
			Melakukan pemetaan kondisi kualitas lingkungan hidup, lahan kritis, dan risiko perubahan iklim serta menyusun kebijakan pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan	Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengawasan dan penegakan hukum lingkungan	Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta program konservasi sumber daya alam untuk mendukung kualitas lingkungan dan ketahanan ekosistem	Mengurangi kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di semua sektor melalui pembangunan infrastruktur hijau dan ramah lingkungan	Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang	Melakukan evaluasi dan pemantapan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup berkualitas dan tangguh untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan
Misi 6 : Pengembangan kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan masyarakat.								
Mewujudkan Ketahanan Budaya dan Kerukunan Umat Beragama	Terwujudnya kemaslahatan Beragama dan Berkebudayaan Maju	memperkuat kehidupan beragama yang harmonis dan moderat melalui pembinaan umat beragama, peningkatan kualitas sarana prasarana ibadah, serta penguatan kerukunan antar umat beragama; mengembangkan kebudayaan daerah melalui pelestarian, revitalisasi, dan promosi nilai budaya lokal; serta mendorong inovasi seni dan budaya untuk memperkaya identitas daerah dan mendukung perekonomian kreatif berbasis budaya	Melakukan pemetaan kondisi kehidupan beragama dan kebudayaan daerah serta menyusun kebijakan penguatan moderasi beragama dan pelestarian budaya lokal	Meningkatkan pembinaan umat beragama melalui program edukasi moderasi beragama dan penguatan forum kerukunan umat beragama	Mengembangkan sarana prasarana ibadah dan fasilitas kebudayaan untuk mendukung aktivitas keagamaan dan kebudayaan masyarakat	Melaksanakan revitalisasi pelestarian, dan promosi nilai-nilai budaya lokal melalui festival budaya dan penguatan lembaga adat	Mendorong inovasi seni dan budaya serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Melakukan evaluasi dan pemantapan kebijakan kemaslahatan beragama dan kebudayaan maju untuk memperkuat identitas daerah yang harmonis, religius, dan berbudaya

3.6. PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 terdiri dari 11 Program Unggulan, dimulai dari aspek pembangunan sumberdaya manusia, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hingga pada pemerataan partisipasi pembangunan hingga ke dusun. Program ini merupakan keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya, janji kampanye, hingga upaya peningkatan keberhasilan program sebelumnya melalui inovasi pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun program unggulan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 antara lain disajikan dalam Gambar berikut.

PROGRAM UNGGULAN 2025-2029

- 1



Melanjutkan program Beasiswa Konasara dengan memperluas cakupan beasiswa pendidikan tinggi bagi seluruh Mahasiswa Konawe Utara, bukan hanya pemberian uang SPP/UKT, namun juga biaya lainnya selama kuliah
- 2



- Perluasan penerapan smart class room pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Pengembangan kurikulum inovatif;
 - Pelatihan tenaga pendidik;
 - Peningkatan kualitas pembelajaran;
 - Peningkatan kualitas lingkungan sekolah;
 - Peningkatan laboratorium sekolah;
 - Peningkatan kesejahteraan guru dengan pemberian tunjangan, pemberian laptop, dan sarana lainnya
- 3



- Peningkatan fasilitas kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang modern serta peningkatan fasilitas kesehatan paripurna di seluruh kecamatan;
 - Memaksimalkan pelayanan kesehatan; dan
 - Peningkatan Jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat.
- 4



- Melanjutkan pengembangan dan penataan Ibukota Wanggudu menjadi Kawasan perkotaan yang nyaman dan modern;
 - Perluasan jaringan transportasi;
 - Peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak

PROGRAM UNGGULAN 2025-2029

- | | |
|--|--|
| 
5 | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan daya saing daerah berbasis inovasi dan potensi lokal; • Pengembangan sektor unggulan Konawe Utara; • Peningkatan Investasi Daerah. |
| 
6 | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kawasan industri pertambangan pada Proyek Strategis Nasional di Konawe Utara; • Pengembangan pertanian modern melalui pembangunan technopark; • Pengembangan perkebunan sawit, perikanan dan industri pengelohannya berbasis teknologi. |
| 
7 | <ul style="list-style-type: none"> • Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi. |
| 
8 | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan desa wisata dan desa inovasi |
| 
9 | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan infrastruktur mitigasi bencana melalui pembangunan bendungan dan kolam regulasi berbasis pariwisata |
| 
10 | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran lembaga kebudayaan dan rumah ibadah; • Apresiasi untuk Pembina kebudayaan dan keagamaan |
| 
11 | <ul style="list-style-type: none"> • Program Bantuan Dana Dusun 100 Juta/Dusun/Tahun |

Selain program unggulan diatas yang langsung menyasar ke arah permasalahan daerah, juga dirumuskan program prioritas daerah yang dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi, misi sampai outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Perumusan program prioritas Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
VISI : KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA						
MISI 1 : Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif	Mewujudkan Transformasi Sosial dan Sumber Daya Manusia Unggul			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)		
		Penguatan Daya Saing SDM yang Sehat dan Produktif		Usia Harapan Hidup (UHH)		
				Kesehatan Ibu dan Anak:		
				Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		
				Penanganan Tuberkulosis:		
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*		
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*		
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)		
			Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (rasio)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil (%)		
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)		
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan (%)		
				Cakupan layanan kesehatan balita sesuai standar (%)		
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)		
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)		
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)		
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				Persentase penderita Diabeter Militus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		
				Persentase Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)		
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)		
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk (rasio)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				rasio bidan / 100.0000 penduduk (rasio)		
				Rasio perawat / 100.000 penduduk (rasio)		
			Tersedianya Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kabupaten/Kota Sehat (Kategori)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat yang Diberdayakan (%)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Meningkatnya Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	
		Penguatan daya saing SDM yang cerdas dan inovatif		Hasil pembelajaran		
				a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
				i) Literasi Membaca		
				ii) Numerasi		
				b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
				i) Literasi Membaca		
				ii) Numerasi		
				c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)		
				d) Harapan Lama Sekolah (tahun)		
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*		
				Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (%) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%) Kemampuan Literasi SD SMP (%) Kemampuan Numerasi SD SMP (%) Iklim Keamanan SD SMP (%) Iklim Kebhinekaan SD SMP (%) Iklim inklusivitas SD SMP (%)	Program Pengelolaan Pendidikan	
			Terselenggaranya Pengembangan Kurikulum	Persentase pengembangan kurikulum muatan lokal penunjang proses pendidikan (%)	Program Pengembangan Kurikulum	
			Meningkatnya kapasitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi SI / D IV (%)	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
			Terkendalinya Perizinan Pendidikan	Persentase pengendalian perizinan PAUD (%)	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
			Berkembangnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%) Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga (%)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pengembang organisasi kepramukaan daerah (%)	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
			Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	Program Pembinaan Perpustakaan	
		Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif		Tingkat Kemiskinan (%)		
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)		
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)		
			Meningkatnya cakupan Pemberdayaan Sosial	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Program Pemberdayaan Sosial	
			Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase WNI migran korban kekerasan yang memperoleh layanan sesuai prosedur (Pesen)	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
			Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	Program Rehabilitasi Sosial	
			Meningkatnya cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Meningkatnya cakupan penanganan korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	Program Penanganan Bencana	
		Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	Program Pengarusutamaan Gender Dan	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Pemberdayaan Perempuan		Pemberdayaan Perempuan	
			Tercapainya upaya Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	Program Perlindungan Perempuan	
			Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kualitas keluarga (%)	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pengelolaan data gender dan anak (%)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	
			Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Nilai Kab/Kota Layak Anak (Nilai)	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	
			Meningkatnya cakupan Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)	Program Perlindungan Khusus Anak	
			Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) (%)	Program Pengendalian Penduduk	
			Meningkatnya cakupan dan kualitas Keluarga Berencana (KB)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (%) Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (%)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
			Meningkatnya Administrasi Pendaftaran Penduduk dan KIA	Perekaman KTP Elektronik (%) Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang dari 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	Program Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya cakupan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran (%)	Program Pencatatan Sipil	
			Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan (PD)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Terselenggaranya Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Database kependudukan (Database)	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
MISI 2 : Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas	Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan, serta Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			Indeks Konektivitas Wilayah		
		Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah		Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap		
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun (%)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Meningkatnya Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses terhadap prasarana dasar permukiman (%)	Program Pengembangan Permukiman	
			Terselenggaranya Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota (Rasio)	Program Penataan Bangunan Gedung	
			Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kawasan prioritas yang telah ditata melalui penataan bangunan, ruang terbuka, dan elemen pendukung kawasan sesuai fungsi ruang dan karakter wilayah (%)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
			Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota (%)	Program Penyelenggaraan Jalan	
			Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknik/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Rasio)	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (Rasio)		
			Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (%)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum (%)	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Tersefenggaranya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan (%)	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
			Meningkatnya Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Meningkatnya Tanah Kelebihan dan Tanah Absentee	Jumlah bidang tanah yang didistribusi (bidang tanah)	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan dan Tanah Absentee	
			Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria (kepala keluarga)		
				Persentase penatagunaan tanah untuk wilayah Kabupaten (%)	Program Penatagunaan Tanah	
		Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman		Persentase Kawasan Perumahan yang tidak kumuh		
			Meningkatnya Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	Program Pengembangan Perumahan	
			Meningkatnya Kawasan Permukiman yang layak huni	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	Program Kawasan Permukiman	
				Berkurangnya jumlah unit RTLH (%)		
			Menurunnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani (%)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Meningkatnya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
			Meningkatnya Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam proses sertifikasi dan registrasi (%)	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Terpenuhinya sarana parasarana Perhubungan		Indeks Kecelakaan Lalu lintas (per 1000 kasus)		
				Rasio konektivitas simpul transportasi Kabupaten/Kota (Rasio)		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Menurunnya kecelakaan lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
			Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Pelayaran yang berfungsi Baik	Persentase Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat Yang Berfungsi Baik (%)	Program Pengelolaan Pelayaran	
			Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Penerbangan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional penerbangan yang dibangun, diperbaiki, atau ditingkatkan (unit/tahun)	Program Pengelolaan Penerbangan	
MISI 3 : Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing;	Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi					
				Pertumbuhan Ekonomi (%)		
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
				Pengembangan Pariwisata		
				a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan minum (%)*		
				b) Tamu Wisatawan Mancanegara (hotel berbintang (orang)		
				Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		
				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
				a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level provinsi(%)		
				b)Proporsi jumlah industry kecil dan menengah pada level Kabupaten		
				c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		
				d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)		
				e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)*		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		
				Indeks inovasi Daerah		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Meningkatnya Industri Pengolahan dan ekspor Industri	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Juta) Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar) (Rp.)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
			Meningkatnya Cakupan Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IUI dan IUKI efektif (%)	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah aplikasi atau fitur pendukung sistem informasi industri yang dikembangkan atau dioptimalkan (aplikasi)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama menginap (Hari)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (Orang)	Program Pemasaran Pariwisata	
			Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rasio PDB Pariwisata (%)	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan (%)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase permohonan izin usaha simpan pinjam yang diproses sesuai standar waktu dan prosedur (%)	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	
			Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa secara berkala sesuai standar pengawasan koperasi (%)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
			Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase koperasi sehat (%)	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase peningkatan koperasi yang mengikuti pelatihan (%)	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
			Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi (%)	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Proporsi jumlah UKM (%)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Meningkatnya Pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirausaha	Pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	Program Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya Koperasi yang beradan Hukum	Persentase koperasi yang memperoleh status badan hukum dan aktif secara operasional (%)	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya Kuantitas serta Kualitas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi (%) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)	Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	Program Hubungan Industrial	
			Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan. (%)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (%)	Program Riset dan Inovasi Daerah	
		Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
				a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah		
				b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		
			Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (Ton)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (Ton)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase POKMASWAS yang dibina (%)	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
			Meningkatnya Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina (%)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Terwujudnya Transformasi Digital		Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi		
			Meningkatnya Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan informasi dan komunikasi publik (Indeks)	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	
				Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)		
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas (%)		
			Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Meningkatnya Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (nilai)	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
			Meningkatnya Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan (izin)	Program Perizinan Penggunaan Arsip	
			Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Persentase Penyelamatan Arsip Yang Telah Direservasi (%)	Program Pengelolaan Arsip	
		Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten*		
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		
			Meningkatnya Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pengajuan SKA yang diproses dan ditindaklanjuti (%)	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Meningkatnya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan kapasitas dan kualitas sarana distribusi perdagangan yang berfungsi baik (%)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Meningkatnya Pengembangan Ekspor	Persentase pengembangan ekspor kabupaten (%)	Program Pengembangan Ekspor	
			Meningkatnya Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
			Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi (%)	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Perkotaan terhadap Nasional		
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
			Meningkatnya Penataan Desa	Persentase BPD, LPM, dan PKK aktif (%)	Program Penataan Desa	
			Meningkatnya Kerjasama Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital (Desa)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase 1(satu) BUMDes dalam 1(satu) Desa Yang Aktif (%)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
			Meningkatnya Pembangunan Kampung dan Perkampungan	Persentase pemberdayaan masyarakat perkampungan (%)	Program Pembangunan Kampung dan Perkampungan	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase ketersediaan dperencanaan daerah kawasan transmigrasi (%)	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi (%)	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
			Berkembangnya Kawasan Transmigrasi Mandiri	Persentase warga transmigrasi yang mandiri (%)	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat (%)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui mekanisme koordinasi lintas sektor (%)	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum melalui koordinasi dan pembinaan lintas sektor (%)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		Rasio Pajak Daerah terhadap PAD (%)		
				Tingkat Inflasi (%)		
				Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan		
				a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *		
				b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)		
				c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan *		
				d) Total Kredit/PDRB (%)		
				Inklusi Keuangan (%)		
				Jumlah Kerjasama Daerah		
			Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan pendapatan daerah (%)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD dan APBDP Tepat Waktu (Tepat waktu/tidak tepat waktu)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Pemda Yang Terinventarisir (%)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah		Persentase Realisasi Investasi terhadap PDRB		
			Meningkatnya Iklim yang mendukung Penanaman Modal	Jumlah Perbup yang mendukung Iklim Investasi (Perbup)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Nilai realisasi penanaman modal (Rp. Milyar)	Program Promosi Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Lama proses perizinan (hari)	Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengawasan investasi (%)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data penanaman modal yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (%)	Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
MISI 4 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif	Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif			Nilai SAKIP		
				Indeks Reformasi Birokrasi		
				Tingkat Maturitas SPIP		
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
		Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif		Indeks Pelayanan Publik		
				Indeks Integritas Daerah (Nilai SPI - Survey Penilaian Integritas)		
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK (%)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
			Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah Yang Dihasilkan (%)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
			Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya (%)	Program Perekonomian dan Pembangunan	
			Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan (%) Persentase Tingkat Partisipatif Perencanaan (%)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan (%) Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan (%)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Kesesuaian Penempatan Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi (%) Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi (%)	Program Kepegawaian Daerah	
			Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional (%)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Terwujudnya Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah Tangguh		Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) Indeks Demokrasi Nasional		
			Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif (Kecamatan)	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Kecamatan)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Meningkatnya Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan ketahanan bidang politik, sosial dan budaya (%)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
			Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan kabupaten (%)	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Terwujudnya Demokrasi Substansial		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		
			Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan (%)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Umum (%)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
MISI 5 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Risiko Bencana (IRB)* Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a. Kumulatif		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Meningkatnya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Terakui (%)	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
			Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase ASN bersertifikat AMDAL yang profesional (%)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Meluasnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat penghargaan LH (%)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Meningkatnya intensitas Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase aduan LH yang diselesaikan (%)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya upaya Pencegahan, Penanggulangan, Waktu tanggap Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%) Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran (%)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Persentase penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%) Jumlah desa tanggap bencana (Desa)	Program Penanggulangan Bencana	
		Terwujudnya Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Ketahanan energi, air, dan pangan		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				a) Ketahanan Energi		
				- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*		
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*		
				b) Indeks Ketahanan Pangan		
				c) Ketahanan Air		
				- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*		
				- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)		
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Mandiri Pangan (%)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	
			Meningkatnya Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase ketersediaan pangan (%)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Kg/Ha)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah (Kg/Ha)		
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa (Ton)		
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao (Ton)		
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan akses dan pemanfaatan prasarana perkebunan yang dapat meningkatkan produktivitas perkebunan di daerah (%)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan kerugian hasil produksi perkebunan akibat bencana dan gangguan OPT/OPH (%)	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani (%)	Program Penyuluhan Pertanian	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Jumlah Produksi Padi (Ton)		
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan akses dan pemanfaatan prasarana pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian di daerah (%)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Kg)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Jumlah Produksi Telur (Kg)		
			Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian bencana pertanian dan penanggulangannya (%)	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Meningkatnya Cakupan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian yang memperoleh perizinan berusaha secara legal dan sesuai ketentuan (%)	Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Meningkatnya SDM Kelompok Tani	Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani (%)	Program Penyuluhan Pertanian	
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Rasio)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (Rasio)		
				Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi. Erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan (Rasio)		
			Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas, tangguh terhadap		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
		bencana dan perubahan iklim				
				Kualitas Lingkungan Hidup		
				a) Indeks kualitas lingkungan hidup daerah		
				b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)		
				c) Pengelolaan Sampah		
				- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*		
			Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas (%)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Darat/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan (titik)	Program Pengendalian Pencemaran Darat/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan taman kehati kabupaten (%)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
			Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memilah B3 dan limbah B3 (%)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks)	Program Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan persampahan yang berfungsi baik (Unit)	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
MISI 6 : Pengembangan kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan masyarakat.	Mewujudkan Ketahanan Budaya dan Kerukunan Umat Beragama			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
		Terwujudnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		
			Meningkatnya Cakupan Pengembangan Kebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan (%)	Program Pengembangan Kebudayaan	
			Meningkatnya Kesenian Tradisional	Persentase lembaga adat daerah yang dibina (%)	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya Pembinaan Sejarah	Persentase peningkatan kegiatan pelestarian dan diseminasi sejarah lokal yang diakses atau diikuti oleh masyarakat (%)	Program Pembinaan Sejarah	
			Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase kondisi fisik TMP yang terpelihara dengan baik sesuai standar (%)	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			Meningkatnya Pelestarian dan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi naskah kuno dan artefak yang dipelihara dan didokumentasikan dengan baik (%)	Program Pelestarian dan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
			Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan Yang Dibangun/Rehabilitasi (Unit)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

3.7. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 didorong oleh visi besar untuk mewujudkan wilayah yang maju, mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Seluruh perencanaan diarahkan untuk mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana pembangunan daerah secara sinergis, holistik, dan harmonis, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menata ruang secara efektif untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan amanat RPJMN 2025–2029 yang menekankan transformasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara berpedoman pada RTRW untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan wilayah benar-benar mendukung upaya transformasi ekonomi daerah yang inklusif, percepatan pengurangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan antar wilayah, serta pembangunan berkeadilan yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim. Penelaahan mendalam terhadap RTRW dilakukan agar setiap arah kebijakan, program prioritas, dan strategi pembangunan wilayah selaras dengan kebijakan penataan ruang nasional maupun provinsi, sehingga mampu mewujudkan konektivitas wilayah yang efektif, tata kelola ruang yang efisien, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Utara sebagai rumah bersama yang aman, nyaman, produktif, dan berdaya saing tinggi, maka ditetapkan kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan sebagai berikut:

1. **Penguatan pusat-pusat pelayanan wilayah** untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, melalui strategi:
 - a. Mempertahankan dan meningkatkan fungsi pusat pelayanan eksisting;
 - b. Mengembangkan pusat pelayanan baru yang mendukung transformasi ekonomi lokal;
 - c. Menetapkan pusat pelayanan sebagai kawasan fungsional berbasis potensi unggulan wilayah; dan
 - d. Meningkatkan keterpaduan dan konektivitas antar pusat pelayanan.
2. **Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur wilayah** untuk mendukung konektivitas dan daya saing daerah, melalui strategi:
 - a. Mengembangkan sistem transportasi internal dan regional untuk pergerakan barang dan orang;
 - b. Mengembangkan simpul transportasi intermoda dan antarmoda;

- c. Meningkatkan jaringan energi, termasuk energi terbarukan, mendukung sektor unggulan dan ketahanan energi daerah;
 - d. Memperluas jaringan telekomunikasi untuk transformasi digital wilayah;
 - e. Mengelola jaringan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan; serta
 - f. Meningkatkan layanan sarana air minum, sanitasi, persampahan, dan drainase guna mendukung kualitas hidup dan lingkungan sehat.
3. **Pengembangan industri pertambangan yang ramah lingkungan dan bernilai tambah**, melalui strategi:
- a. Mengembangkan kegiatan pendukung dan hilirisasi sektor pertambangan;
 - b. Mendorong pengembangan industri pertambangan yang inovatif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan;
 - c. Mengembangkan UMKM pendukung sektor pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - d. Meningkatkan sarana prasarana penunjang industri pertambangan.
4. **Pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara bijak dan berkelanjutan**, melalui strategi:
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan;
 - b. Meningkatkan produktivitas pertanian mendukung swasembada pangan daerah;
 - c. Mengembangkan perkebunan dan perikanan untuk kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelestarian lingkungan;
 - d. Mengembangkan kegiatan turunan sektor perkebunan dan perikanan untuk nilai tambah ekonomi;
 - e. Mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan dengan kawasan sekitarnya;
 - f. Meningkatkan kualitas SDM sektor-sektor unggulan melalui pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. Mengembangkan sarana prasarana penunjang sektor unggulan guna mendukung aksesibilitas pusat pertumbuhan ekonomi.
5. **Pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga daya dukung wilayah**, melalui strategi:
- a. Mempertahankan kawasan lindung darat dan laut untuk ketahanan ekosistem;
 - b. Mempertahankan luas kawasan hutan minimal 70% wilayah untuk keseimbangan lingkungan;
 - c. Melakukan konservasi kawasan tangkapan air, sempadan sungai, pantai, dan mata air;

- d. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara bijak dan memastikan keberlanjutan sumber daya terbarukan; serta
 - e. Melakukan rehabilitasi lingkungan yang rusak untuk memulihkan fungsi ekologis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6. **Peningkatan fungsi kawasan strategis pertahanan dan keamanan**, melalui strategi:
- a. Menetapkan aset militer dan kepolisian sesuai fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam aset pertahanan untuk menjaga fungsinya; dan
 - c. Mengembangkan kawasan lindung atau kawasan budidaya tidak terbangun sebagai zona penyangga kawasan pertahanan.



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 SUB BAB PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Program Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

4.1.1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

4.1.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Pendidikan,
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
5. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
6. Program Pendidikan Dayah

4.1.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan

4.1.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Permukiman
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan Lainnya
9. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4.1.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

4.1.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

4.1.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan

4.1.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

4.1.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

4.1.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak

4.1.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

4.1.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
4. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
5. Program Penetapan Tanah Ulayat
6. Program Pengelolaan Tanah Kosong
7. Program Penatagunaan Tanah
8. Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah
9. Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan
10. Program Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanahan
11. Program Pengaturan Pertanahan Di Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau
12. Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan
13. Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan

4.1.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan

4.1.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

4.1.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

4.1.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

4.1.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2. Program Pengelolaan Pelayaran
3. Program Pengelolaan Penerbangan

4.1.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

4.1.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM

8. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

4.1.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Kerja Sama Penanaman Modal

4.1.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

4.1.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4.1.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pembinaan Sejarah
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
5. Program Pengelolaan Permuseuman
6. Program Perfilman Nasional

4.1.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pembinaan Perpustakaan
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
3. Program Akreditasi Perpustakaan Dan Sertifikasi Pustakawan

4.1.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Arsip
2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
3. Program Perizinan Penggunaan Arsip
4. Program Akreditasi Dan Sertifikasi

4.1.3 URUSAN PILIHAN

4.1.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

4.1.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4.1.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

4.1.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

4.1.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

4.1.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

3. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

4.1.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.1.4.1 Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penataan Organisasi
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3. Program Kesejahteraan Rakyat
4. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
5. Program Perekonomian dan Pembangunan
6. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

4.1.4.2 Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

4.1.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

4.1.5.1 Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

4.1.5.2 Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.1.5.3 Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Kepegawaian Daerah

4.1.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.1.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Program Riset Dan Inovasi Daerah

4.1.6 PENGAWASAN

4.1.6.1 Inspektorat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

4.1.7 UNSUR KEWILAYAHAN

4.1.7.1 Kecamatan Administrasi

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.1.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

4.1.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Tabel 4.1.
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten KonaWE Utara Tahun 2025 - 2030

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Kurang Pendanaan												Perangkat Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
																1	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TOTAL PAGU INDIKATIF					1.496.543.073.446		1.572.326.331.116		1.675.400.677.708		1.805.214.902.336		1.905.287.090.154		2.381.467.799.575		2.992.022.600.628	
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				655.032.010.009		688.983.621.010		764.616.715.266		927.055.921.021		1.238.963.295.399		1.566.174.925.298		1.939.374.393.796	
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				270.505.940.931		284.831.237.977		348.751.760.743		498.715.017.862		797.944.028.579		1.131.904.517.553		1.471.475.872.819	
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				270.505.940.931		284.831.237.977		348.751.760.743		498.715.017.862		797.944.028.579		1.131.904.517.553		1.471.475.872.819	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	220.006.735.557	100	231.006.172.135	100	264.141.281.572	100	406.322.033.220	100	650.115.253.562	100	990.861.354.412	100	1.393.209.750.738	Dinas P & K
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	87,23		90,00		92,97		95,37		98,06		100,00		100,00		Dinas P & K
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen	89,14	50.487.205.374	53.022.066.642		63.626.428.771		90.989.864.642		148.377.383.427		238.396.075.341		293.875.897.683		

NO.	Urutan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan														Perangkat Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	56,39		62,88		69,37		75,86		76,62		77,38		78,15				
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	53,78		60,07		71,49		86,72		100		100		100,00				
		Kemampuan Literasi SD SMP	Persen	48,18 64,17		51,68 66,27		54,18 68,37		56,68 67,47		58,18 68,57		60,68 69,67		64,18 70,77				
		Kemampuan Numerasi SD SMP	Persen	45,46 59,74		48,36 60,24		51,26 62,74		54,16 64,24		57,06 66,24		59,96 67,24		62,86 68,74				
		Ilm. Keamanan SD SMP	Persen	74,54 72,08		75,44 73,68		76,34 73,08		77,24 76,58		78,14 78,08		79,04 78,58		79,94 81,08				
		Ilm. Kesehatan SD SMP	Persen	65,55 73,06		70,55 74,06		71,55 75,06		72,55 76,06		73,55 77,06		74,55 78,06		75,55 79,06				

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan														Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Isim inklusivitas SD SMP	Persen	66,80 60,5		69,3 62,51		61,8 64,91		64,3 67,31		66,8 69,71		69,3 72,1		71,80 75				
3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pengembangan kurikulum muatan lokal penunjang proses pendidikan	Persen	25	-	30	200.000.000	35	246.000.000	40	351.790.000	45	582.848.000	48	644.272.000	50	1.097.553.500	Dinas P & K		
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi SI / D : IV	Persen	58,51		62,82	500.000.000	63,57	605.000.000	64,32	879.450.000	65,07	1.407.120.000	65,82	2.010.680.000	67,00	2.743.664.000	Dinas P & K		
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase pengendalian perizinan PAUD	Persen	72		75	100.000.000	78	123.000.000	80	175.890.000	82	261.424.000	85	422.136.000	88	546.776.800	Dinas P & K		
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				189.802.827.206		167.792.966.566		172.826.757.623		178.018.560.392		183.290.007.729		188.606.007.961		194.356.888.199			
1.02.01	Dinas Kesehatan				189.802.827.206		167.792.966.566		172.826.757.623		178.018.560.392		183.290.007.729		188.606.007.961		194.356.888.199			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	17.559.643.888	100	60.437.825.768	100	62.290.794.541	100	64.381.277.177	100	66.048.825.492	100	68.023.080.257	100	70.063.772.665	Dinas Kesehatan, RSUD		
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Days Tampung Rumah Sakit Rujukan	rasio	0.738	96.071.446.251	0.760	100.875.098.574	0.773	103.901.268.132	0.890	107.018.307.206	0.936	110.228.856.422	0.956	113.535.722.14	0.967	116.940.793.778	Dinas Kesehatan, RSUD		

NO.	Urutan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan														Perangkat Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100		100		100		100		100		100		100				
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100		100		100		100		100		100		100				
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100		100		100		100		100		100		100				
		Cakupan layanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100		100		100		100		100		100		100				
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan kesehatan sesuai standar	Persen	93,58		94,56		95,67		96,08		97,23		97,75		98,01				
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100		100		100		100		100		100		100				
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	85,98		96,23		96,59		96,81		97,22		97,53		97,81				

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendukung												Perangkat Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase orang terduga TBIC mendapatkan pelayanan TBIC sesuai standar	Persen	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	80,88		81,00		81,49		81,78		81,92		82,35		82,96		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	rasio	64,05	4.048.407,228	67,92	4.251.877.586	68,23	4.379.433.994	69,17	4.510.886.901	69,30	4.646.141.429	69,43	4.785.525.682	69,78	4.923.091.463	Dinas Kesehatan, RSUD
		rasio bidan / 100.000 penduduk	rasio	241,23		247,24		247,24		249,23		249,67		249,99		250,46		

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rancangan Pendanaan														Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Rasio perawat / 100.000 penduduk	rasio	177,17		188,83		188,91		188,96		189,24		189,30		190,22				
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kabupaten/Kota Sehat	Kategori	Padaapa	52.390.000	Padaapa	59.009.500	Padaapa	143.079.385	Padaapa	142.475.179	Padaapa		Wiwanda	-	Wiwanda	-	Dinas Kesehatan, RSUD		
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat yang Diberdayakan	Persen	100	1.739.940.132	100	1.826.937.038	100	1.881.745.262	100	1.938.867.610	100	1.996.343.538	100	2.066.233.848	100	2.137.920.860	Dinas Kesehatan, RSUD		
6	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Persen	100	250.000.000	100	262.500.000	100	275.375.000	100	278.486.250	100	286.540.538	100	298.446.063	100	304.308.445	Dinas Kesehatan, RSUD		
1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				167.802.625.469		176.182.756.742		181.478.539.444		186.922.895.628		192.530.582.487		198.305.499.971		204.255.694.971			
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				167.802.625.469		176.182.756.742		181.478.539.444		186.922.895.628		192.530.582.487		198.305.499.971		204.255.694.971			
1	Program Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program perwujudan SKPD	Persen	100	5.594.467.099	100	5.979.190.464	100	6.158.556.167	100	6.343.223.52	100	6.533.622.847	100	6.729.820.532	100	6.931.520.479	Dinas PUPR		
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	28,02	15.800.291.000	31,85	16.590.305.550	33,74	17.088.014.717	35,10	17.600.555.558	38,24	18.128.678.803	39,40	18.672.535.057	40,40	19.232.781.109	Dinas PUPR		

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pelaksanaan Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan												Perangkat Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio	69,63		71,64		73,21		75,78		77,9		79,58		80,00		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, Erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan	Rasio	55,56		57,00		59,36		61,36		63,05		65,43		67,7		
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	89,81	30.418.000.000	74,32	31.936.800.000	79,68	32.894.904.000	84,27	33.881.751.120	88,77	34.898.203.654	92,38	35.945.149.763	95,88	37.023.504.256	Dinas PUPH
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan persampahan yang berfungsi baik	Unit	6	650.000.000	6	577.500.000	8	594.825.000	10	612.663.750	10	631.049.843	13	649.981.338	15	669.480.776	Dinas PUPH

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan														Pangikut Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	64	12.886.691.002	65	13.531.026.600	67	13.938.957.398	70	14.353.066.000	71	14.785.778.104	74	15.229.288.642	76	15.685.668.338	Dinas PUPH		
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun	Persen	46,77	4.209.520.000	47,2	4.409.998.000	48,3	4.552.995.880	49,78	4.888.173.756	50,10	4.829.848.968	52,3	4.974.744.438	53,89	5.123.986.777	Dinas PUPH		
7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses terhadap prasarana dasar permukiman	Persen	0	2.500.000.000	15	2.625.000.000	3,45	2.703.750.000	7,89	2.784.882.800	12,92	2.868.408.375	20,54	2.954.480.525	25,48	3.043.094.445	Dinas PUPH		
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Rasio	100	37.033.890.850	100	38.886.501.393	100	40.062.066.404	100	41.251.638.427	100	42.481.217.280	100	43.765.974.399	100	45.079.953.630	Dinas PUPH		
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kawasan prioritas yang telah ditata melalui penataan bangunan, ruang terbuka, dan elemen pendukung kawasan sesuai fungsi ruang dan karakter wilayah	Persen	0	50.000.000	0,5	52.500.000	0,98	54.075.000	1,5	55.697.250	1,81	57.358.168	2,1	59.069.210	2,5	60.860.889	Dinas PUPH		
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemandapan jalan Kabupaten/Kota	Persen	15,48	17.725.544.520	15,96	18.618.121.746	16,34	19.492.176.398	16,84	20.302.081.690	17,37	21.132.174.141	17,99	21.979.139.365	18,67	22.855.713.546	Dinas PUPH		
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/taktik/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	7,89	50.000.000	13,36	57.500.000	24,09	62.225.000	29,34	67.091.750	32,67	72.104.503	34,31	77.267.638	35,00	82.588.667	Dinas PUPH		

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pelaksanaan Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan														Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa keceklasan konstruksi	Rasio	0		2,37		5,13		8,00		0,69		12,99		14,00				
12	Program Penyelenggaraan Perataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	Persen	82,86	796.300,000	82,86	825.675,000	83,35	830.383,450	83,46	875.894,954	83,66	902,171,802	83,7	929.236,956	84	957,94,063	Dinas PUPH		
1.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				10,231,297,692		10,742,862,576		11,065,148,454		11,397,102,907		11,739,015,995		12,091,186,474		12,453,922,069			
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				10,231,297,692		10,742,862,576		11,065,148,454		11,397,102,907		11,739,015,995		12,091,186,474		12,453,922,069			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2,376,660,800	100	2,493,453,640	100	2,570,258,655	100	2,647,469,465	100	2,725,653,487	100	2,805,700,302	100	2,892,961,318	Dinas Perumahan		
2	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0	14,102,000	2	14,607,100	2,67	15,251,330	2,98	16,708,652	2,98	18,180,196	3,34	19,655,522	4	17,65,487	Dinas Perumahan		
3	Program Kawasan Permukiman	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0	170,182,100	0	125,631,205	0,50	215,461,949	1,23	346,525,799	2,00	355,891,573	2,68	398,568,537	3,00	377,565,370	Dinas Perumahan		
		Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persen	0,39		6,34		21,19		47,45		63,79		70,65		82,96				

NO.	Uraian/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan														Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	Persen	48,87	1.545.000.000	47,48	140.290.000	53,07	1.454.667.500	53,3	1.408.256.025	65,23	1.543.203.706	75,22	1.589.498.807	76,09	1.637.804,88	Diras Perumahan		
5	Program Peningkatani Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	0	5.930.352.750	34,07	6.212.320.431	35,65	5.495.064.044	39,59	6.811.656.556	42,87	6.800.006.253	45,02	7.014.306.451	48,75	7.224.735.944	Diras Perumahan		
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam proses sertifikasi dan registrasi	Persen	0	250.000.000	0,00	262.500.000	0,50	270.375.000	0,75	278.486.250	0,90	286.540.838	1,00	295.446.053	1,50	304.309.445	Diras Perumahan		
1.5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				38.571.731.425		41.550.317.996		42.796.827.536		44.060.732.382		45.403.154.333		46.765.248.363		48.168.206.432			
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja				2.999.765.757		3.149.754.045		3.244.246.566		3.341.574.066		3.441.821.288		3.545.075.927		3.651.428.205			
1	Program Perungjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program perungjang SKPD	Persen	100	2.348.392.757	100	2.469.775.545	100	2.539.748.994	100	2.615.941.382	100	2.694.491.623	100	2.775.252.312	100	2.858.509.778	Sesuai PP		

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pokok Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan												Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Program Peningkatani Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase perda dan perkara yang ditagalkan	Persen	38,46	651.408.000	38,95	683.978.400	39,56	704.497.752	40,31	725.632.688	41,98	747.401.660	43,81	769.823.776	43,98	791.398.427	Sesuai PP
1.05.02	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				3.961.227.918		3.529.288.314		3.635.867.993		3.744.223.033		3.856.549.734		3.972.246.216		4.091.412.602	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2.565.774.688	100	2.604.062.875	100	2.774.884.763	100	2.858.121.306	100	2.943.875.245	100	3.032.09.502	100	3.123.57.247	Durwal
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,0		100		100		100		100		100		100		Durwal
		Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Persen	58,2	795.453.750	58,12	830.224.438	59,54	880.283.231	59,89	888.091.728	60,12	912.674.479	60,31	940.054.714	60,56	968.250.350	
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				33.210.737.750		34.871.274.838		35.917.410.877		36.994.935.263		38.104.783.321		39.247.926.820		40.425.364.825	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2.398.01.260	100	2.475.911.819	100	2.550.189.967	100	2.626.694.842	100	2.705.495.687	100	2.786.660.596	100	2.870.260.374	BPBD
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	30.852.726.500	100	31.395.382.825	100	33.367.223.770	100	34.368.240.421	100	35.399.282.634	100	36.461.266.263	100	37.555.104.251	BPBD

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pelaksanaan Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangkai Pendanaan														Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Jumlah desa tanggap bencana	Desa	4		4		4		4		4		4		4				
16	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				7,117,597,287		7,473,477,151		7,597,581,466		7,528,811,910		8,166,470,267		8,416,464,375		8,663,806,306			
1.06.01	Dinas Sosial				7,117,597,287		7,473,477,151		7,597,581,466		7,528,811,910		8,166,470,267		8,416,464,375		8,663,806,306			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2,721,539,137	100	2,859,737,094	100	2,945,529,207	100	3,033,895,083	100	3,124,911,019	100	3,218,659,293	100	3,315,319,072	Dinas Sosial		
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persen	63.63	2,943,850,850	64.31	3,085,043,383	64.89	3,183,774,694	65.21	3,278,287,935	65.59	3,377,666,573	65.98	3,478,399,570	66.23	3,583,366,467	Dinas Sosial		
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase WNI migran korban kekerasan yang memperoleh layanan sesuai prosedur	Persen	100	50,000,000	100	52,500,000	100	54,075,000	100	55,897,250	100	57,368,568	100	58,889,213	100	60,361,889			
4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar parti	Persen	100	278,562,250	100	292,480,263	100	301,355,072	100.00	310,303,026	100	319,612,76	100	329,200,480	100.00	339,076,494	Dinas Sosial		

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangkai Pendanaan												Pemerintah Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergradasi dari kemiskinan	Persen	0,55	21.068.400	0,76	22.016.820	0,85	22.788.475	1,21	23.489.039	1,51	24.073.30	1,89	24.898.303	2,21	25.640.252	Dinas Sosial
6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	98,18	1.079.555.550	98,5	1.129.334.483	98,67	1.183.294.517	98,87	1.188.90.952	98,93	1.234.054.289	98,99	1.271.075.909	99,02	1.309.208.887	Dinas Sosial
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase kondisi fisik TMP yang terpelihora dengan baik sesuai standar	Persen	100	25.000.000	10	26.280.000	100	27.037.500	100	27.848.525	100	28.684.084	100	29.544.608	100	30.430.944	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				104.218.073.708		109.583.977.383		115.481.406.375		116.895.046.836		120.390.692.883		123.871.513.691		126.187.417.716	
2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				6.881.381.676		7.156.450.760		7.370.835.283		7.591.960.340		7.819.779.351		8.054.310.726		8.295.940.048	
2.1.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja				6.881.381.676		7.156.450.760		7.370.835.283		7.591.960.340		7.819.779.351		8.054.310.726		8.295.940.048	
1	Program Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program perwujudan SKPD	Persen	100	4.825.096.076	100	4.856.350.880	100	5.002.041.406	100	5.152.102.648	100	5.306.665.728	100	5.465.865.700	100	5.629.841.671	Transmigrasi UPT

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan												Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	63.63	300.000.000	65.37	310.000.000	67.91	326.300.000	68.96	332.788.000	69.39	339.472.670	69.59	336.356.850	69.89	343.447.556	Transaksi LPT
3	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	0.55	59.472.000	0.6	62.445.600	0.65	64.318.966	0.72	68.348.537	0.75	68.235.993	1	70.281.073	1.23	72.318.585	Transaksi LPT
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	73.36		74.5	75.9	77.3	78.1	79.5		80.21	Transaksi LPT					
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	60.48	48.079.000	61.12	505.132.990	61.6	520.386.338	62.21	535.890.547	62.79	551.572.411	63.21	568.521.585	63.29	585.587.532	Transaksi LPT
5	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	68.33	1.449.734.600	68.79	1.522.221.330	69.31	1.567.887.970	69.87	1.614.924.609	69.23	1.663.272.347	69.6	1.710.273.518	69	1.764.671.723	Transaksi LPT
2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				5.638.779.066		5.920.718.018		6.098.339.560		6.281.289.747		6.469.728.439		6.661.820.292		6.863.734.901	
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				5.638.779.066		5.920.718.018		6.098.339.560		6.281.289.747		6.469.728.439		6.661.820.292		6.863.734.901	

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangkai Pendanaan												Pemerintah Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program perunjang SKPD	Persen	100	3356,09,566	100	3,778,046,544	100	3,881,387,541	100	4,008,129,579	100	4,038,373,466	100	4,252,224,670	100	4,379,791,480	DPPPA
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	6.58	376,583,300	7.50	386,832,293	8.20	407,707,233	8.60	418,938,429	9.23	432,536,583	9.50	446,512,690	9.92	466,878,031	DPPPA
3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPD yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	762,961,900	100	799,009,985	100	822,380,295	100	847,869,704	100	873,096,799	100	898,292,799	100	926,271,572	DPPPA
4	Program Peningkatari Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kualitas keluarga	%	100	25,030,500	100	88,282,025	100	81,960,486	100	94,776,300	100	97,560,879	100	102,487,706	100	103,502,337	DPPPA
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pengelolaan data gender dan anak	%	100	92,000,000	100	32,500,000	100	84,075,000	100	59,697,250	100	57,368,168	100	53,089,213	100	40,561,889	DPPPA
6	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Nilai Kab/Kota Layak Anak	Nilai	540.00	288,504,000	700	303,370,200	750	312,471,306	780	321,640,445	800	331,500,809	830	341,445,833	860	351,689,208	DPPPA
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persen	100	476,740,000	100	502,677,000	100	517,757,330	100	533,290,009	100	549,286,730	100	565,767,332	100	582,740,494	DPPPA
2.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				5,694,880,363		5,948,103,381		6,106,546,483		6,310,342,877		6,409,893,163		6,694,642,758		6,896,482,041	

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pokok Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangkai Pendanaan														Pemerintah Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan				5,664,860,263		5,948,103,381		6,126,546,483		6,310,342,877		6,489,653,163		6,694,642,758		6,896,482,041			
1	Program Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program perwujudan SKPD	Persen	100	1,696,754,649	100	1,836,592,381	100	1,964,780,163	100	2,073,423,557	100	2,195,626,364	100	2,321,496,552	100	2,461,126,904	Katapang		
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kemandirian Pangan	Persentase Desa Mandiri Pangan	Persen	12.58	868,041,314	12.78	911,443,590	12.89	936,766,897	13.01	966,950,504	13.15	996,999,019	13.23	1,026,837,760	13.46	1,056,612,924	Katapang		
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	81.40	515,508,700	82.30	540,777,635	83.35	558,030,964	84.67	574,771,893	85.88	592,016,090	86.75	606,775,501	87.58	618,088,766	Katapang		
4	Program Peranganan Kerawanan Pangan	Persentase ketersediaan pangan	Persen	40.94	594,641,100	43.25	624,373,165	47.5	643,104,360	49.56	662,397,460	51.46	682,269,403	53.23	702,737,482	60	723,895,61	Katapang		
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	42.00	29,444,400	42.35	30,896,620	42.68	31,844,39	43.10	32,799,442	43.36	33,283,425	44.50	34,796,928	45.10	35,640,836	Katapang		
2.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				1,201,500,000		1,261,575,000		1,679,422,250		1,729,804,998		1,781,699,065		1,835,150,037		1,890,204,538			
4.01.01	Sekretariat Daerah				1,201,500,000		1,261,575,000		1,679,422,250		1,729,804,998		1,781,699,065		1,835,150,037		1,890,204,538			

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pelaksanaan Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rancangan Pendanaan														Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persen	100	-	100	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	212.180.000	100	212.545.400	100	225.101.762	Serta		
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	Persen	100	1.205.500.000	100	1.261.675.000	100	1.299.422.150	100	1.338.464.398	100	1.378.557.065	100	1.419.803.777	100	1.462.337.090	Serta		
3	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan dan Tanah Absentee	Jumlah bidang tanah yang didistribusikan	bidang tanah	1500	-	1500	-	1500	350.000.000	1500	360.500.000	1500	371.375.000	1500	382.454.450	1500	393.928.084	Serta		
		Jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria	kepala keluarga	300.00	-	300	-	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	Serta		
4	Program Penatagunaan Tanah	Persentase periatagunaan tanah untuk wilayah Kabupaten	Persen	100	-	100	-	100	30.000.000	100	30.900.000	100	31.827.000	100	32.780.800	100	33.765.264	Serta		
2.5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				13.133.408.596		13.790.080.075		14.203.782.478		14.629.895.952		15.068.792.831		15.520.856.615		15.986.482.314			
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup				13.133.408.596		13.790.080.075		14.203.782.478		14.629.895.952		15.068.792.831		15.520.856.615		15.986.482.314			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.643.961.997	100	3.626.599.357	100	3.340.944.035	100	4.059.122.356	100	4.380.947.526	100	4.306.375.957	100	4.438.567.325	DLH		

NO.	Usuan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rancangan Pendanaan												Pangant Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas	Persen	100	24.843.700	100	28.092.185	100	26.374.951	100	27.591.199	100	38.511.635	100	25.365.964	100	30.247.994	DLH
3	Program Pengendalian Pencemaran Dary/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan	titik	1	957.290.900	1,00	1.005.591.445	1,00	1.035.330.108	1,00	1.066.369.402	1,00	1.099.340.494	1,00	1.131.391.306	1,00	1.165.250.548	DLH
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan taman kehati kabupaten	Persen	100	8.068.254.889	100,00	8.472.717.329	100,00	8.726.898.648	100,00	8.988.705.894	100,00	9.258.366.988	100,00	9.538.112.996	100,00	9.822.201.538	DLH
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memilah B3 dan limbah B3	%	56	39.198.500	65	41.788.425	75	41.041.078	78	44.333.341	81	45.863.340	84	47.033.240	85	48.444.238	DLH
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	60,00	27.460.700	61,5	28.833.725	62,7	29.698.747	63,7	30.589.709	64,5	31.507.401	65,9	32.452.623	66,78	33.426.201	DLH
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Terakui	%	100	10.368.700	100	10.887.135	100	11.213.749	100	11.550.962	100	11.896.666	100	12.251.966	100	12.621.173	

NO.	Usuan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan														Pemerintah Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	Persentase ASN bersertifikat AMDAL yang profesional	%	99	13.362.400	100	13.620.520	100	14.238.136	100	14.663.190	100	15.302.055	100	15.551.807	100	16.021.771	DLH		
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat penghargaan LH	%	25	30.000.000	35	31.500.000	40	32.445.000	45	33.418.350	50	34.420.901	55	35.453.528	60	36.517.133	DLH		
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase aduan LH yang diselesaikan	%	100	40.854.800	100	42.883.540	100	43.966.806	100	45.267.371	100	46.845.828	100	48.045.202	100	49.486.568	DLH		
11	Program Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	0,00	279.608,100	150	290.438,305	180	299.101.660	210	306.026,281	250	317.369.956	295	326.891.096	350	336.697.829	DLH		
2.6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.882.127.095		4.076.233.408		4.88.520.410		4.324.476.022		4.454.210.303		4.587.836.602		4.725.471.710			
2.06.01	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil				3.882.127.095		4.076.233.408		4.88.520.410		4.324.476.022		4.454.210.303		4.587.836.602		4.725.471.710			
1	Program Perurung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program perurung SKPD	Persen	100	1.444.635,355	100	1.666.867,023	100	1.725.373,036	100	1.837,04,330	100	1.951.248,360	100	4.070.885,881	100	4.102.940,356	Dukcapil		
2	Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik	Persen	95,00	102.497,200	95,75	170.622,060	98,1	175.740,722	99,45	181.012,543	100	186.443,332	100	192.036,632	100	197.797,730	Dukcapil		

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendukung												Perangkat Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang dari 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	98,00		98,25		98,65		99,1		99,56		100		100		
3	Program Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	98,00	79.130.000	98,95	83.086.500	98,98	83.579.005	99,5	88.146.468	100	90.790.662	100	93.594.528	100	96.370.025	Dukcapil
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan	PD	48	134.231.900	48	140.943.409	48	145.171.803	48	149.525.954	48	154.012.762	48	158.633.945	48	163.381.140	Dukcapil
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Database kependudukan	Database	1	81.632.600	1	84.714.230	1	86.655.687	1	88.655.327	1	90.714.986	1	92.836.436	1	95.031.529	Dukcapil
2.7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				6.262.805.459		6.625.945.732		6.824.724.304		7.039.465.827		7.240.348.902		7.457.560.296		7.681.387.105	
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				6.262.805.459		6.625.945.732		6.824.724.304		7.039.465.827		7.240.348.902		7.457.560.296		7.681.387.105	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.763.896.178	100	3.992.091.092	100	4.070.653.825	100	4.192.773.439	100	4.318.556.843	100	4.448.113.342	100	4.581.556.742	OPMD
2	Program Penataan Desa	Persentase BPD, LPM, dan PKK aktif	persen	100	552.285.660	100	628.203.94	100	647.049.207	100	666.460.684	100	686.454.504	100	707.048.129	100	728.289.563	OPMD

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pelaksanaan Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendukung												Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persari	0,03	-	128	50.000.000	188	51.500.000	288	53.045.000	314	54.636.350	377	56.275.440	506	57.963.704	DPMD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	100,00	750.562.701	100,00	788.040.836	100,00	825.733.569	100,00	863.064.558	100,00	900.664.131	100,00	938.003.179	100,00	975.601.234	DPMD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase 1(satu) BUMDes dalam 1(satu) Desa Yang Aktif	%	100	1.256.057.800	100	1.297.560.890	100	1.343.787.58	100	1.385.801.069	100	1.438.534.170	100	1.493.120.185	100	1.549.893.901	DPMD
6	Program Pembangunan Kampung dan Perkampungan	Persentase pemberdayaan masyarakat perkampungan	%	0	-	100	50.000.000	100	51.500.000	100	53.045.000	100	54.636.350	100	56.275.440	100	57.963.704	DPMD
2.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				11.824.347.350		12.205.495.718		12.571.623.509		12.948.772.214		13.337.235.381		13.737.352.442		14.149.473.08	
2.08.01	Divas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				11.824.347.350		12.205.495.718		12.571.623.509		12.948.772.214		13.337.235.381		13.737.352.442		14.149.473.08	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	4.738.664.830	100	5.017.687.572	100	5.166.161.999	100	5.323.768.685	100	5.482.953.464	100	5.647.339.017	100	5.818.759.987	DPKKB

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan												Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Program Pengendalian Penduduk	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	81,80	790.322.450	63,40	787.838.573	64,30	801.473.730	65,37	833.807.942	66,23	860.893.460	67,12	888.719.254	68,98	903.320.832	
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Persen	III		12		15		16		18		19		21		DPPKB
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Persen	2,10	3.688.907.070	2,00	3.670.202.424	2,00	3.868.308.486	1,90	4.109.897.751	1,90	4.229.074.584	1,90	4.355.948.928	1,90	4.488.625.332	
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	60	2.409.383.000	60,00	2.529.831.150	62,00	2.608.726.088	62,50	2.683.897.867	63,50	2.764.414.803	64,34	2.847.347.247	66,21	2.932.767.668	DPPKB
2.9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				6.580.506.999		6.906.532.349		7.316.818.319		7.536.322.869		7.762.412.555		7.995.294.932		8.235.143.480	
2.09.01	Dinas Perhubungan				6.580.506.999		6.906.532.349		7.316.818.319		7.536.322.869		7.762.412.555		7.995.294.932		8.235.143.480	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.339.287.989	80	3.282.052.399	100	3.390.813.971	100	3.482.538.380	100	3.597.314.542	100	3.705.233.976	100	3.816.390.997	Dishub
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas simpul transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	1,00	137.302.700	3,00	144.178.336	3,00	148.503.681	3,00	152.958.796	3,00	157.547.519	3,00	162.273.986	3,00	167.142.206	Dishub

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendukung												Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Persen	12,7%		5,79		23,99		27,30		28,56		32,21		35,80		
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelabuhari Rakyat/Dermaga Rakyat Yang Bertunggal Baik	%	100,00	1.307.604.300	100,00	1.473.301,65	100,00	1.577.500,563	100	1.884.825,663	100	1.795.370,454	100	1.909.231,567	100	4.024.508,514	Dialui
4	Program Pengelolaan Penerbangan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional penerbangan yang dibangun, diperbaiki, atau ditingkatkan	unit/tahun	0,00		0,00	-	0,00	300.000,000	1	308.000,000	1	212.180,000	1	216.545,400	1	223.101,762	Ditahu
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				5.260.736.882		5.523.773.726		5.685.486.938		5.860.171.546		6.035.976.692		6.217.055.993		6.403.567.673	
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				5.260.736.882		5.523.773.726		5.685.486.938		5.860.171.546		6.035.976.692		6.217.055.993		6.403.567.673	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.216.280.082	100	3.379.894.089	100	3.480.589.909	100	3.584.567.006	100	3.692.536,636	100	3.802.312,775	100	3.917.402,085	Dikuminfo
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks	75,00		75,63		75,85		76,39		76,81		77,97		78,58		Dikuminfo
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	95,00	1.799.054.400	96,5	1.887.957,00	97,12	1.944.595,634	97,89	2.002.933,708	98,11	2.063.021,770	98,43	2.124.912,371	98,60	2.188.659,743	

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pelaksanaan Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan														Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	Persen	100,00		100,3		100,56		100,93		101,39		101,73		102				
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	90,00	244.402.400	913	256.622.520	91,75	264.321.306	92,12	272.250.831	92,54	280.418.396	92,76	288.830.507	93	297.495.834	Dasmanita		
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				5.717.995.334		6.083.895.101		6.268.411.954		6.454.404.313		6.648.036.442		6.847.477.535		7.052.501.861			
2.11.01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				5.717.995.334		6.083.895.101		6.268.411.954		6.454.404.313		6.648.036.442		6.847.477.535		7.052.501.861			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.702.381.234	100	3.882.500.294	100	4.004.125.305	100	4.124.248.064	100	4.247.976.536	100	4.325.415.833	100	4.506.676.307	Dikop & UMKM		
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase permohonan izin usaha simpan pinjam yang diproses sesuai standar waktu dan prosedur	Persen	100	25.000.000	100	26.250.000	100	27.037.500	100	27.848.625	100	28.684.064	100	29.544.608	100	30.430.344	Dikop & UMKM		

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rancangan Pendanaan												Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa secara berkala sesuai standar pengawasan koperasi	Persen	100	22.889.000	100	23.298.450	100	23.997.404	100	24.717.326	100	25.459.845	100	26.222.681	100,00	27.009.288	Dikop & UMKM
4	Program Penilaian Kesehatan Kapi/Ukup Koperasi	Persentase koperasi sehat	Persen	15	127.895.000	17,00	134.284.500	18,16	138.313.035	20,29	142.482.405	24,56	146.736.288	26,51	151.138.388	28,01	155.672.538	Dikop & UMKM
5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan koperasi yang mengikuti pelatihan	Persen	100	1.744.202.500	100	1.831.417.675	100	1.886.380.411	100	1.942.591.224	100	2.001.239.760	100	2.061.276.953	100,00	2.123.16.262	Dikop & UMKM
6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	0,85	50.235.800	1,05	52.347.590	13	54.330.018	18,0	55.958.918	2,5	57.636.715	2,98	59.367.877	3,23	61.148.914	Dikop & UMKM
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Proporsi jumlah UKM	Persen	80,05	46.091.800	81,67	48.295.390	82,5	49.848.292	82,7	50.343.730	82,95	52.884.042	83,23	54.475.563	83,54	56.104.680	Dikop & UMKM
8	Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirasaha	Persen	188	-	188	150.000.000	2,05	157.500.000	2,1	161.045.000	2,15	164.636.350	2,21	168.275.441	2,25	171.963.704	Dikop & UMKM
9	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Persentase koperasi yang memperoleh status badan hukum dan aktif secara operasional	Persen	100	-	100%	30.000.000	100	30.800.000	100	31.627.000	100	32.781.810	100	33.765.264	100	34.778.222	Dikop & UMKM
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				2.776.608.796		2.915.438.236		3.002.902.413		3.092.989.485		3.185.779.170		3.281.352.545		3.379.793.121	
2.12.01	Diras Penanaman Modal dan PTSP				2.776.608.796		2.915.438.236		3.002.902.413		3.092.989.485		3.185.779.170		3.281.352.545		3.379.793.121	

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangkai Pendanaan												Perangkat Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program perunjang SKPD	Persen	100	3.294.340.036	100	2.408.057.108	100	2.481.338.894	100	2.555.768.676	100	2.632.441.735	100	2.704.404.391	100	2.793.757.440	OPMPTSP
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Perbup yang mendukung iklim Investasi	Perbup	2	22.883.500	2	23.986.175	3	24.716.060	2	25.457.542	4	26.221.268	5	27.007.306	5	27.838.144	OPMPTSP
3	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai realisasi penanaman modal	Rp. Miliar	364	77.633.600	1260	81.021.790	1376	83.452.433	1607	88.956.006	1460	88.534.687	1504	81.690.727	8448.00	93.826.443	OPMPTSP
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Lama proses perizinan	hari	2	222.399.000	1	233.308.860	1	240.308.218	1	247.517.465	1	254.943.589	1	262.591.279	1	270.469.017	OPMPTSP
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengawasan investasi	Persen	100	43.413.400	100	46.584.070	100	48.581.332	100	50.629.040	100	52.758.21	100	54.940.957	100	57.195.186	OPMPTSP
6	Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data penanaman modal yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan	Persen	100	36.639.300	100	104.471.160	100	104.515.295	100	107.650.754	100	110.880.276	100	114.206.588	100	117.632.888	OPMPTSP
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				22.773.304.827		23.911.968.858		24.629.328.954		25.368.208.822		26.129.255.087		26.913.132.740		27.720.526.723	
2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				22.773.304.827		23.911.968.858		24.629.328.954		25.368.208.822		26.129.255.087		26.913.132.740		27.720.526.723	

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan												Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program perwujudan SKPD	Persen	100	2.954.834.038	100	3.102.575.740	100	3.195.653.002	100	3.291.512.602	100	3.390.268.288	100	3.481.976.329	100	3.596.735.69	Dikpora
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	23,34	1.695.105.525	23,64	1.690.915.302	23,94	1.741.842.767	24,24	1.793.892.044	24,54	1.847.708.605	24,84	1.901.460.089	25,14	1.960.234.277	Dikpora
		Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	2,50		3,72		4,96		6,19		7,42		8,65		9,88		
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	66,67	18.308.075.063	67,76	18.118.478.836	68,85	18.892.033.381	69,94	20.282.794.176	71,03	20.891.278.001	72,12	21.518.048.348	73,21	22.163.568.832	Dikpora
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Persentase pengembangan organisasi kepemudaan daerah	Persen	100	-	100	100.000.000	100	103.000.000	100	106.000.000	100	109.272.700	100	112.350.881	100	115.627.407	Dikpora
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				541.519.800		570.695.790		587.816.664		605.491.164		623.614.699		642.323.139		661.592.834	
5.012	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				541.519.800		570.695.790		587.816.664		605.491.164		623.614.699		642.323.139		661.592.834	
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,61	541.519.800	2,6	570.695.790	2,65	587.816.664	2,7	605.491.164	2,72	623.614.699	2,76	642.323.139	2,78	661.592.834	Bappenas
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				3.340.062.900		3.507.065.621		3.612.277.554		3.720.645.922		3.832.165.295		3.947.233.258		4.066.850.298	

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pelaksanaan Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan														Pemangku Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				3.340.062,500		3.507.065,625		3.618.272,584		3.770.645,922		3.832.165,299		3.947.233,258		4.065.850,298			
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	Persen	0	3.000.062,500	15	3.150.065,625	25	3.244.557,584	3	3.341.804,822	22,3	3.442.951,760	2,68	3.545.425,570	4	3.651.790,40	Dinas P & K		
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase lembaga adat daerah yang dibina	Persen	100	100.000.000	100	105.000.000	100	108.350.000	100	111.354.500	100	114.726.335	100	118.178.425	100	121.723.778	Dinas P & K		
3	Program Pembinaan Sejarah	Persentase peningkatan kegiatan pelestarian dan diseminasi sejarah lokal yang diakses atau diikuti oleh masyarakat	Persen	0	40.000.000	10,70	43.000.000	10,30	43.260.000	19,25	44.557.800	25,10	45.854.534	29,52	47.271.370	33,45	48.689.50	Dinas P & K		
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	67,50	200.000.000	68,5	210.000.000	68,25	216.300.000	68,5	222.768.000	68,82	229.472.670	68,77	236.395.350	69,30	243.447.556	Dinas P & K		
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				2.794.971.089		2.934.718.643		3.022.761.233		3.113.444.070		3.205.847.392		3.303.052.814		3.402.144.398			
2.17.01	Dinas Perpustakaan				2.794.971.089		2.934.718.643		3.022.761.233		3.113.444.070		3.205.847.392		3.303.052.814		3.402.144.398			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2.389.843.689	100	2.509.338.873	100	2.584.615.950	100	2.662.354.428	100	2.742.071.061	100	2.824.271.633	100	2.909.008.027	Dinas Perpustakaan		

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pokok Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangkai Pendanaan												Pangkat Daerah	
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	87,58	405,127,400	88,23	425,382,770	88,34	438,340,263	88,96	451,289,642	89,20	464,828,330	89,42	479,773,381	89,66	493,136,370	Diras Perpustakaan	
3.	Program Pelestarian dan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi naskah kuno dan artefak yang dipelihara dan didokumentasikan dengan baik	Persen	5,00	92,500,000	5,25	92,500,000	7,58	54,075,000	10,45	65,697,280	12,38	57,358,168	15,19	65,089,213	17,99	60,461,889	Diras Perpustakaan	
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				207,257,116		242,609,972		249,898,571		257,399,528		265,17,354		273,070,916		281,263,043		
2.17.01	Dinas Perpustakaan				207,257,116		242,609,972		249,898,571		257,399,528		265,17,354		273,070,916		281,263,043		
1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Penyelamatan Arsip Yang Telah Direservasi	Persen	10,36	172,267,116	13,85	180,663,972	15,78	186,296,071	16,99	191,884,953	18,2	197,641,302	19,25	203,570,747	20,05	209,677,869	Diras Perpustakaan	
2.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	nilai	75,00	35,000,000	75,3	36,750,000	75,9	37,862,500	76,21	38,988,075	76,89	40,167,717	77,6	41,362,449	78,03	42,603,322	Diras Perpustakaan	
3.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan	izin	0	-	1	25,000,000	1	25,750,000	1	26,522,500	1	27,316,175	1	28,127,720	1	28,961,852	Diras Perpustakaan	
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					79,503,794,004		81,478,563,705		83,982,920,816		86,562,408,234		89,219,289,481		91,965,858,896		94,774,534,662	
3.1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					11,123,958,690		11,680,156,625		12,030,563,323		12,391,478,163		12,763,222,508		13,146,119,183		13,540,502,759	
3.01.01	Dinas Perikanan					11,123,958,690		11,680,156,625		12,030,563,323		12,391,478,163		12,763,222,508		13,146,119,183		13,540,502,759	

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pelaksanaan Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan														Pemangku Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Program Perunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program perunjangan SKPD	Persen	100	3.733.059.990	100	3.999.761.290	100	4.037.354.109	100	4.158.474.732	100	4.283.226.996	100	4.417.725.864	100	4.544.077.640	Dinas Perikanan		
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	15467	2.014.802.100	15509	2.305.042.225	15599	2.168.921.471	15649	2.233.238.275	15695	2.300.235.454	15749	2.369.243.547	15799	2.440.330.854	Dinas Perikanan		
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	10023	5.811.848.000	9.121.00	5.419.941.450	9.382.00	5.582.539.694	9.232.00	5.750.076.884	9.282.00	5.902.581.361	9.332.00	6.100.181.852	9.382.00	6.283.897.507	Dinas Perikanan		
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase POKMASWAS yang dibina	persen	50	48.190.000	55	52.279.500	59	53.847.885	63	55.463.322	66	57.127.221	69	58.841.038	72	60.905.269	Dinas Perikanan		
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina	persen	55	174.411.600	62	183.132.860	66	188.525.845	69	194.284.930	72	200.119.478	75	206.181.882	77	212.300.388	Dinas Perikanan		
3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				5.694.094.274		5.936.798.988		6.04.902.957		6.298.350.046		6.487.300.547		6.681.819.564		6.882.377.751			
3.02.01	Dinas Pariwisata				5.694.094.274		5.936.798.988		6.04.902.957		6.298.350.046		6.487.300.547		6.681.819.564		6.882.377.751			
1	Program Perunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program perunjangan SKPD	Persen	100	3.074.010.474	100	3.227.770.998	100	3.324.542.328	100	3.434.278.597	100	3.527.006.395	100	3.632.817.164	100	3.741.601.679	Dinas		

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pelaksanaan Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan												Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama menginap	Hari	2	55,804,200	3	58,534,400	3	80,352,242	3	62,802,800	4	64,027,694	4	88,348,325	4	87,926,980	Dapur
3.	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	Orang	678,870	2,533,468,600	688,000	2,261,162,240	725,000	2,328,976,507	750,000	2,398,846,802	763,000	2,470,811,076	770,000	2,544,938,512	772,000	2,621,283,577	Dapur
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rasio PDB Pariwisata	Persen	4	194,857,500	4,04	204,620,375	4,15	210,738,386	4,3	217,060,538	4,31	223,572,354	4,45	230,279,525	4,60	237,187,890	Dapur
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan	persen	100	175,963,300	100	184,750,965	100	190,293,494	100	196,002,291	100	201,882,368	100	207,838,939	100	214,177,004	Dapur
3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				50,478,829,892		53,002,771,387		54,592,854,528		56,230,640,164		57,917,539,369		59,655,088,150		61,444,738,735	
3.03.01	Dinas Perkebunan dan Hortikultura				16,901,248,89		20,886,39,252		21,523,200,989		22,168,896,607		22,833,963,505		23,518,982,419		24,224,951,882	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3,202,338,029	100	3,362,727,330	100	3,463,628,768	100	3,567,518,040	100	3,674,543,823	100	3,784,779,391	100	3,898,323,309	Dinas Perkebunan Hortikultura
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tahapan Hortikultura Jenis Cabe	Kg/Ha	7,135	10,631,221,046	8,500	14,302,282,088	11,700	14,731,390,581	9,500	15,173,281,078	10,500	15,628,488,890	11,700	16,092,344,505	12,900	16,580,254,840	Dinas Perkebunan Hortikultura

NO.	Urutan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan														Pangkat Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Kg/Ha	600		1.500		2.000		2.500		3.000		3.500		4.000				
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	1.835		1.300		1.935		1.850		1.965		1.380		1.950				
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	204		386		386		390		552		552		500				
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan akses dan pemanfaatan prasarana perkebunan yang dapat meningkatkan produktivitas perkebunan di daerah	Persen	55	620.000.000	58	525.000.000	62	540.750.000	68	555.372.500	74	573.681.575	79	590.853.125	82	604.508.889	Dinas Perkebunan Hortikultura		
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan kerugian hasil produksi perkebunan akibat bencana dan gangguan OPT/CPH	persen	10	2.259.216.701	25	2.223.176.924	30	2.443.342.237	35	2.536.642.489	42	2.592.340.774	45	2.669.904.027	49	2.750.003.208	Dinas Perkebunan Hortikultura		
5	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani	Persen	100	38.213.638	80	334.124.299	100	344.148.028	100	354.472.468	100	365.104.543	100	376.059.342	100	387.341.537	Dinas Perkebunan Hortikultura		
3.03.02	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan				30.577.581.081		32.105.460.125		33.069.653.939		34.061.743.557		35.083.595.864		36.126.103.740		37.220.196.852			

NO.	Uraian/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan												Pemerintah Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Perungjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program perungjang SKPD	persen	100	7.072.056.937	100	7.423.659.793	100	7.648.429.577	100	7.877.982.464	100	8.04.218.938	100	8.357.645.506	100	8.608.374.871	Desa Tanaman Pangan & Peternakan
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Jagung	Ton	1.033	5.339.230.107	8.500	5.606.191.607	8.700	5.774.377.356	9.500	5.947.608.676	10.500	6.126.036.937	11.700	6.309.888.046	12.900	6.499.102.586	Desa Tanaman Pangan & Peternakan
		Jumlah Produksi Padi	Ton	8.103		1.500		2.000		2.500		3.000		3.500		4.000		
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan akses dan pemanfaatan prasarana pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian di daerah	Persen	85,00	17.673.940.000	75,00	18.567.637.000	79,00	19.04.356,30	82,00	19.587.797.000	83,50	20.279.431.006	85,50	20.886.781.336	86,70	21.503.327.464	Desa Tanaman Pangan & Peternakan
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Kg	105.527	62.500.000	86.800	65.125.000	87.800	66.778.790	88.900	68.482.312	90.000	69.226.576	91.500	70.040.679	91.500	71.904.283	Desa Tanaman Pangan & Peternakan
		Jumlah Produksi Telur	Kg	119.309		83.291		85.201		86.900		87.200		87.500		87.850		
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian bencana pertanian dan penanggulangannya	Persen	100	103.160.000	100	108.318.000	100	111.567.540	100	114.914.566	100	118.362.003	100	121.802.963	100	125.570.349	Desa Tanaman Pangan & Peternakan

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pelaksanaan Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendukung														Pemerintah Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian yang memperoleh perizinan berusaha secara legal dan sesuai ketentuan	Persen	100	100,000,000	100	105,000,000	100	108,500,000	100	113,994,500	100	116,735,335	100	118,128,425	100	121,723,778	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan		
7.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani	Persen	100	236,594,042	100	248,528,744	100	255,984,607	100	263,664,345	100	271,574,069	100	279,721,291	100	288,102,330	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan		
3.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				3,819,637,648		4,010,618,531		4,130,938,117		4,254,866,360		4,382,512,348		4,513,987,615		4,649,407,244			
3.04.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				3,819,637,648		4,010,618,531		4,130,938,117		4,254,866,360		4,382,512,348		4,513,987,615		4,649,407,244			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2,838,682,102	100	3,085,618,228	100	3,179,854,715	100	3,273,530,356	100	3,371,796,164	100	3,472,888,249	100	3,577,074,896	Diperindag		
2.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perizinan SKA yang diproses dan dibuktikan	persen	0	25,500,000	2.1	21,500,000	2.9	21,531,000	3.8	22,276,900	4.5	22,947,367	5.1	23,635,685	6	24,344,756	Diperindag		
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan kapasitas dan kualitas sarana distribusi perdagangan yang berfungsi baik	Persen	100.00	241,288,826	100.00	253,332,098	100.00	260,932,018	100.00	268,759,880	100.00	276,822,779	100.00	285,127,463	100	293,681,387	Diperindag		

No.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendukung												Pemerintah Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	76,94	363.380.800	95,79	381.559.290	90,30	393.006.069	93,45	404.756.291	95,68	416.540.198	98,94	429.448.340	100	442.331.793	Diperindag
5	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pengembangan ekspor kabupaten	Persen	0	60.000.000	150	65.000.000	2,70	66.500.000	3,90	67.994.500	4,50	69.238.335	5,00	69.728.425	6,50	72.723.778	Diperindag
6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	20	72.500.000	45	76.175.000	60	78.408.898	85	80.761.004	68	83.883.958	72	85.679.476	75,00	88.249.880	Diperindag
7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi	Persen	0	83.797.000	0	87.986.950	10	90.624.456	12,35	93.345.248	14,51	96.145.807	17,89	99.029.979	21	102.000.874	Diperindag
3.5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				126.755.200		133.092.960		137.085.749		141.896.331		145.434.271		149.797.299		154.291.218	
3.04.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				126.755.200		133.092.960		137.085.749		141.896.331		145.434.271		149.797.299		154.291.218	
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Rp. Juta	42.095	116.375.200	48367	122.193.960	55681	125.859.779	62334	129.635.572	70699	133.524.639	79839	137.530.379	825.906	141.656.290	Diperindag
		Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Rp.	0,00		300000		600000		829000		896000		929000		950.000		
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IUI dan IUIK efektif	%	48	10.380.000	55	10.896.000	58	11.275.970	62,1	11.562.749	64,5	11.909.632	66,72	12.266.921	69	12.624.928	Diperindag

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pokok Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangkai Pendanaan														Pemerintah Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah aplikasi atau fitur pendukung sistem informasi industri yang dikembangkan atau dioptimalkan	aplikasi	0	-	0	25.000.000	1	25.750.000	1	26.532.500	1	27.318.075	1	28.107.720	1	28.981.852	Dispenda		
3.5	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi				8.300.118.300		8.715.124.215		8.975.577.941		9.245.875.280		9.523.251.538		9.806.549.084		10.103.217.557			
2.1.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja				8.300.118.300		8.715.124.215		8.975.577.941		9.245.875.280		9.523.251.538		9.806.549.084		10.103.217.557			
1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase ketersediaan perencanaan daerah kawasan transmigrasi	persen	100	1.593.962.300	100	1.784.360.415	100	1.836.509.227	100	1.893.664.504	100	1.950.474.439	100	2.006.888.673	100	2.069.258.333	Transmigrasi		
2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persen	80-90	350.000.000	80-81	367.500.000	80-89	378.335.000	80-72	389.880.750	80-89	401.577.173	80-99	413.624.488	81	426.033.222	Transmigrasi		
3	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase warga transmigrasi yang mandiri	persen	100	6.250.66.000	100	6.562.663.800	100	6.759.542.714	100	6.962.330.025	100	7.171.95.926	100	7.386.335.924	100	7.607.926.002	Transmigrasi		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				193.852.241.848		167.644.853.941		172.880.193.560		178.066.695.546		183.408.603.710		188.390.861.824		194.578.167.679			

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pokok Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangkai Pendanaan														Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4.1	Sekretariat Daerah				124,062,388,036		120,265,507,438		134,172,472,661		138,198,676,841		142,344,637,146		146,514,976,250		151,013,425,548			
4.01.01	Sekretariat Daerah				124,062,388,036		120,265,507,438		134,172,472,661		138,198,676,841		142,344,637,146		146,514,976,250		151,013,425,548			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	101,079,237,048	100	106,133,198,901	100	108,317,894,868	100	112,596,710,715	100	116,974,632,036	100	119,453,850,397	100	123,037,465,909	Sesuai		
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan Yang Dibangun/Rehabilitasi	Unit	28	21,926,864,507	28	23,023,227,732	28	23,715,603,964	28	24,429,321,183	28	25,106,580,716	28	25,832,827,037	28	26,560,207,831	Sesuai		
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya	Persen	99.51	1,056,286,480	99.61	1,109,100,804	99.62	1,142,373,828	99.64	1,176,645,043	99.66	1,211,944,314	99.67	1,248,302,725	100	1,285,711,808	Sesuai		
4.2	Sekretariat DPRD				35,789,853,813		37,579,346,504		38,706,726,899		39,867,926,706		41,063,986,567		42,295,885,564		43,564,762,131			
4.02.01	Sekretariat DPRD				35,789,853,813		37,579,346,504		38,706,726,899		39,867,926,706		41,063,986,567		42,295,885,564		43,564,762,131			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	27,062,810,719	100	28,415,205,748	100	28,267,461,927	100	30,149,681,778	100	31,050,062,532	100	31,391,554,468	100	32,941,011,340	Sesuai		
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah Yang Dihasilkan	Persen	38.41	8,727,713,100	39.13	8,814,140,755	39.69	9,439,064,978	40.42	9,722,236,927	40.89	10,013,304,035	41.52	10,314,131,156	42.88	10,623,750,791	Sesuai		

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pokok Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangkai Pendanaan												Perangkat Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				454.403.402.344		477.218.082.960		491.534.625.450		506.280.864.214		521.469.094.340		537.023.996.664		553.226.550.364	
5.1	Perencanaan				9.346.746.327		9.814.086.793		10.108.509.397		10.401.764.679		10.724.017.619		11.045.541.148		11.377.216.382	
5.01.01	Badan Perencanaan Pembanguan, Riset dan Inovasi Daerah				9.346.746.327		9.814.086.793		10.108.509.397		10.401.764.679		10.724.017.619		11.045.541.148		11.377.216.382	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	4.830.531.327	100	5.072.655.573	100	5.224.221.360	100	5.380.948.009	100	5.542.376.440	100	5.708.647.735	100	5.879.907.637	Bappenda
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan	Persen	88.04		88.35		88.68		88.79		88.86		88.92		88.99		Bappenda
		Persentase Tingkat Partisipatif Perencanaan	Persen	24.15	2.027.340.300	24.45	2.109.602.315	24.67	2.192.460.384	24.71	2.258.234.096	25.09	2.325.981.223	25.39	2.395.760.609	25.52	2.467.623.478	
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan	Persen	100		100		100		100		100		100		100.00		Bappenda
		Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan	Persen	100	2.488.976.100	100	2.603.404.905	100	2.690.827.652	100	2.772.582.482	100	2.855.759.956	100	2.940.402.755	100.00	3.028.676.737	
5.2	Keuangan				435.937.555.405		457.734.433.125		471.486.486.171		485.610.460.558		500.078.773.980		515.084.137.079		530.629.681.294	
5.02.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah				431.675.886.868		453.255.786.211		466.867.379.798		480.863.307.192		495.285.206.407		510.147.882.600		525.452.310.078	

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pokok Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendukung												Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	184.670.864.868	100	193.904.407.271	100	199.721.539.480	100	205.793.185.674	100	211.884.581.344	100	218.341.181.681	100	224.788.352.342	BKAD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	58,5%		59,2%		59,9%		60,7%		61,3%		62,57		63,9%		BKAD
		Penetapan APBD dan APBDP Tepat Waktu	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat Waktu	242.146.922.900	Tepat waktu	254.294.268.625	Tepat waktu	260.881.896.684	Tepat waktu	268.738.353.584	Tepat waktu	277.830.504.192	Tepat waktu	286.165.418.338	Tepat waktu	294.750.381.890	BKAD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Pemda Yang Terinventarisasi	Persen	100	4.868.200.300	100	5.101.162.315	100	5.264.143.634	100	5.411.767.811	100	5.574.120.971	100	5.741.344.600	100	5.913.584.938	BKAD
5.02.02	Badan Pendapatan Daerah				4.261.568.537		4.474.646.064		4.606.886.373		4.747.182.964		4.889.567.583		5.036.254.579		5.187.342.217	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	persen	100	3.864.768.537	100	4.163.006.964	100	4.287.887.173	100	4.416.534.088	100	4.545.030.111	100	4.685.501.014	100	4.826.066.044	Bapenda
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	58,5%	600.000.000	59,2%	635.000.000	59,9%	666.500.000	60,7%	691.284.500	61,3%	714.736.335	62,57	741.178.425	63,9%	771.723.778	Bapenda
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan pendapatan daerah	persen	5,0%	58.800.000	5,2%	206.640.000	5,7%	212.835.200	6,0%	219.124.176	6,4%	225.801.307	6,8%	232.575.140	7%	239.552.366	Bapenda

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kota Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangkai Pendanaan														Perangkat Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
5.3	Kepegawaian				7.310.236.612		7.677.648.443		7.906.183.896		8.145.429.413		8.389.793.295		8.641.486.064		8.900.730.646			
5.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				7.310.236.612		7.677.648.443		7.906.183.896		8.145.429.413		8.389.793.295		8.641.486.064		8.900.730.646			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2.997.620.127	100	3.147.505.133	100	3.241.926.957	100	3.339.183.963	100	3.439.399.471	100	3.540.540.255	100	3.648.816.463	BKPSDM		
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi	Persen	87,23		87,32		88,07		88,12		88,94		89,75		90,52		BKPSDM		
		Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	Persen	93,51	4.314.616.488	94,07	4.530.347.309	94,59	4.668.257.729	95,34	4.806.243.460	96,03	4.950.432.824	96,69	5.098.349.809	97,51	5.251.914.183			
5.4	Pendidikan dan Pelatihan				1.000.000.000		1.050.000.000		1.081.500.000		1.113.945.000		1.147.363.350		1.181.784.251		1.217.237.778			
5.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				1.000.000.000		1.050.000.000		1.081.500.000		1.113.945.000		1.147.363.350		1.181.784.251		1.217.237.778			
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional	Persen	100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	1.081.500.000	100	1.113.945.000	100	1.147.363.350	100	1.181.784.251	100	1.217.237.778	BKPSDM		

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan														Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
5.5	Penelitian dan Pengembangan				896.871.000		941.714.550		969.966.987		999.064.966		1.029.036.915		1.059.908.023		1.091.705.263			
5.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				896.871.000		941.714.550		969.966.987		999.064.966		1.029.036.915		1.059.908.023		1.091.705.263			
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kemitraan	Persen	40	896.871.000	50	941.714.550	60	969.966.987	65	999.064.966	80	1.029.036.915	74	1.059.908.023	79	1.091.705.263	Batasnya		
2	Program Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	18,12	250.000.000	18,49	262.500.000	18,86	270.175.000	19,3	278.486.250	19,79	286.840.838	20,16	295.446.053	21,05	304.309.448	Batasnya		
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					7.430.109.958		7.801.615.456		8.035.683.920		8.276.733.837		8.525.035.853		8.780.796.928		9.044.210.538		
6.01	Pengawasan				7.430.109.958		7.801.615.456		8.035.683.920		8.276.733.837		8.525.035.853		8.780.796.928		9.044.210.538			
6.01.01	Inspektorat				7.430.109.958		7.801.615.456		8.035.683.920		8.276.733.837		8.525.035.853		8.780.796.928		9.044.210.538			
1	Program Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program perwujudan SKPD	Persen	100	3.847.221.578	100	3.826.581.457	100	3.944.470.137	100	4.062.804.241	100	4.184.688.368	100	4.310.229.019	100	4.439.535.890	Inspektorat		
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	Persen	100	2.690.174.100	100	2.834.682.805	100	2.909.423.289	100	2.995.705.988	100	3.086.607.367	100	3.179.205.382	100,00	3.274.581.544	Inspektorat		

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pelaksanaan Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangkai Pendanaan														Pangkat Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	1.092.714.180	3	1.047.348.954	3	1.861.770.484	3	1.217.233.809	3	1.253.740.317	3	1.281.352.536	3	1.330.003.302	Inspektora		
7	URUSAN KEWILAYAHAN				36.033.921.574		37.814.617.652		38.948.056.182		40.117.527.867		41.321.053.703		42.560.685.315		43.837.505.874			
7.01	Kecamatan dan Kelurahan				36.033.921.574		37.814.617.652		38.948.056.182		40.117.527.867		41.321.053.703		42.560.685.315		43.837.505.874			
7.01.01	Kecamatan dan Kelurahan				36.033.921.574		37.814.617.652		38.948.056.182		40.117.527.867		41.321.053.703		42.560.685.315		43.837.505.874			
1	Program Pelunjaran Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program pelunjaran SKPD	Persen	100	33.348.448.542	100	35.015.872.030	100	36.065.348.180	100	37.148.338.636	100	38.262.788.784	100	39.410.872.448	100	40.582.392.621	Kecamatan dan Kelurahan		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat	Persen	100	89.353.400	100	104.321.070	100	107.450.702	100	110.674.222	100	113.964.450	100	117.414.283	100.00	120.936.712	Kecamatan dan Kelurahan		
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	2.210.318.631	100	2.320.634.563	100	2.390.243.300	100	2.451.950.599	100	2.535.809.117	100	2.611.883.390	100.00	2.690.225.950	Kecamatan dan Kelurahan		
4	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertarikan dan ketertiban umum melalui mekanisme koordinasi lintas sektor	Persen	100	130.000.000	100	136.500.000	100	140.395.000	100	144.810.850	100	149.102.236	100	153.631.953	100	158.240.591	Kecamatan dan Kelurahan		

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pelaksanaan Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendanaan														Pemangku Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum melalui koordinasi dan pembinaan lintas sektor	Persen	100	38.000.000	100	100.800.000	100	103.824.000	100	106.938.770	100	10.148.882	100	10.451.388	100	10.854.827	Kecamatan dan Kelurahan		
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	persen	100	10.000.000	100	106.500.000	100	140.095.000	100	144.812.850	100	149.107.236	100	153.631.953	100	158.240.911	Kecamatan dan Kelurahan		
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				5.199.214.355		5.459.175.073		5.622.950.325		5.791.638.835		5.965.388.000		6.144.348.540		6.328.680.129			
8.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				5.199.214.355		5.459.175.073		5.622.950.325		5.791.638.835		5.965.388.000		6.144.348.540		6.328.680.129			
1.	Program Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program perwujudan SKPD	Persen	100	2.237.508.633	100	2.349.384.065	100	2.418.665.587	100	2.482.481.954	100	2.567.225.401	100	2.644.252.463	100	2.723.580.037	Kecamatan		
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kecamatan	11	1.127.687.700	13	1.084.051.085	11	1.218.572.838	11	1.258.528.796	11	1.293.644.550	11	1.332.859.928	11.00	1.372.639.725	Kecamatan		

NO.	Urutan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pokok Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2024)		Capaian Kinerja Program dan Rangka Pendukung														Pencapaian Daerah
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Umum	persen	93,18	707.091.922	93,18	742.446.581	93,18	764.781.914	93,18	787.881.571	93,18	811.291.356	93,45	835.630.097	93,45	860.659.000	Kabupaten		
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan kabupaten	persen	100	52.500.000	100	52.500.000	100	54.075.000	100	55.657.250	100	57.358.168	100	59.089.213	100	60.861.889	Kabupaten		
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan ketahanan bidang politik, sosial dan budaya	persen	100	250.852.000	100	253.394.600	100	271.296.438	100	279.435.331	100	287.888.391	100	296.462.943	100	305.346.531	Kabupaten		
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif	Kecamatan	13	826.094.100	13	867.998.805	13	893.420.769	13	920.223.393	13	947.830.094	13	976.264.997	13	1.005.532.947	Kabupaten		

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel 4.2, sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2030

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,6	70,80	71,09	71,21	71,47	71,73	71,95
2	Kesehatan Ibu dan Anak :								
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Rasio	77,58	0	0	0	0	0	0
	Prevalensi Stunting	Persen	5,40	5	4,80	4,52	4,27	3,91	3,67
3	Penanganan Tuberkulosis :								
	a. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	72,72	97	98,50	99,87	100	100	100
	b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99,67	99,86	99,93	100	100	100	100
5	Hasil Pembelajaran								
	a. Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum								

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pada asesmen tingkat nasional								
	- Literasi membaca	Persen	0	9,09	9,51	10,36	11,98	12,98	14,39
	- Numerasi	Persen	0	0,35	1,65	3,67	5,67	7,45	9,10
	b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :								
	- Literasi membaca	Persen	0	21,32	23,67	25,68	27,98	29,31	30,50
	- numerasi	Persen	0	14,38	15,79	17,15	19,01	20,51	21,93
	c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	Tahun	9,60	9,73	9,85	9,92	9,99	10,04	10,17
	d. Harapan lama sekolah	Tahun	13,13	13,30	13,33	13,33	13,34	13,34	13,34
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Persen	12,39	60,35	60,41	60,43	60,46	60,49	60,51
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Persen	50,57	60,35	60,36	60,38	60,39	60,41	60,43
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,17	13,72	12,93	12,17	11,91	11,85	10,68

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi	Persen	65,01	60	63,47	66,57	69,37	70,52	72,59
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di Sektor formal	Persen	0	15	17,27	18,17	20,05	21,97	22,53
11	Rasio PDB Industri Pengolahan	Rasio	0,74	1,50	1,70	1,93	2,37	2,41	2,97
12	Pengembangan Pariwisata								
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan minum	Rasio	9,95	0,20	0,93	1,45	1,87	2,07	2,19
	b. Tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang)	Orang	161	120	180	230	350	450	600
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	Persen	1,24	1,27	1,31	1,33	1,37	1,4	1,45
14	Produksi UMKM, Koperasi dan BUMD								
	a. Proporsi Jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	Persen	0	11,55	11,63	11,97	12,10	12,29	12,35
	b. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten	Persen	0,38	1,09	1,17	1,21	1,25	1,30	1,32

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	c. Rasio kewirausahaan daerah	Persen	0	3,32	3,45	3,51	3,69	3,89	4,12
	d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	0,04	1,04	1,07	1,08	1,10	1,19	1,25
	e. Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	0	2,83	2,85	2,86	2,88	2,89	2,93
15	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	2,76	2,21	2,14	2,19	2,14	2,1	2,06
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	41,88	55,15	56,37	56,95	57,29	57,74	58,1
17	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	18,12	14,11	25,10	29,37	31,27	31,95	33,58
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau								
	a. Indeks ekonomi hijau daerah	Indeks	0	80,80	80,95	81,03	81,35	81,59	81,75
	b. Proporsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	14,10	15,92	16,35	17,29	17,95	18,09	18,40
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,88	5,92	5,99	6,03	6,05	6,10	6,19
20	Koefisien Variasi harga antarwilayah tingkat Kabupaten	Persen	0	7,91	7,85	7,81	7,65	7,53	7,21
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	12,49	36,4	36,12	35,27	35,09	34,95	34,86
22	Ekspor Barang dan Jasa	Persen	0,03	59,7	59,75	60,15	60,42	60,69	60,81

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan								
	a. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Perkotaan terhadap Nasional	Persen							
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	70	64,90	70,23	71,45	71,89	72,57	73,24
	c. Status desa membangun	Persen	0,7140	0,680	0,7173	0,7253	0,7391	0,7417	0,7518
24	Tingkat maturitas SPIP	level	3	3	3	3	3	3	3
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,85	2,5	2,93	3,07	3,11	3,19	3,25
26	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,18	2,99	3,01	3,17	3,28	3,32	3,47
27	Indeks Integritas Daerah	Indeks	70,52	68	69,73	71,89	72,99	74,01	75,36
28	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	Indeks	70,52	84	84,95	85,23	85,69	86,02	86,91
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Persen	70,08	70,08	70,97	71,56	72,19	73,23	73,98
30	Indeks Demokrasi Nasional	Indeks	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	0,53	2,05	2,13	2,26	2,31	2,39	2,49

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
32	Tingkat Inflasi	Persen	3,09	2,5	2,48	2,41	2,36	2,32	2,25
33	Pendalaman/intermediasi sektor keuangan								
	a. Total dana pihak ketiga/PDRB	Persen	39,24	21,4	22,45	23,59	25,93	26,96	28,61
	b. Aset dana pensiun/PDRB	Persen	0	0,18	0,18	0,19	0,21	0,21	0,23
	c. Nilai transaksi saham per provinsi berupa nilai rata-rata tahunan		0	302,98	305,4	310,59	329,79	331,29	343,91
	d. Total kredit/PDRB	Persen	0	22,5	22,5	23,45	24,59	25,91	27,13
34	Inklusi keuangan	Persen	90	90,64	90,81	91,23	91,65	91,89	92,17
35	Jumlah kerjasama daerah	PKS	3	5	5	6	6	7	8
36	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	38,46	90	90,29	90,45	91,29	92,3	93,7
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	55,1	53,4	53,49	53,54	54,92	55,02	55,45
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	79,9	79,9	79,96	80,91	81,45	81,92	82,73
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	57,68	61,75	61,9	62,35	63,12	63,98	64,31
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,49	0,51	0,49	0,45	0,42	0,39	0,37
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	-	0,531	0,532	0,532	0,534	0,534	0,535
42	Kualitas Lingkungan Hidup								

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	a. Indeks Kualitas Lingkungan hidup daerah	Indeks	79,97	62,72	79,99	80,35	80,53	80,72	81,35
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	2,75	4,5	4,8	5,2	5,4	5,9	6,1
	c. Pengelolaan Sampah								
	- Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	0	4,74	4,92	5,21	5,69	5,87	6,1
	- Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Persen	5,5	31,28	31,56	32,23	33,41	34,45	35,07
43	Ketahanan energi, air, dan pangan								
	a. Ketahanan energi								
	- Konsumsi listrik per kapita	Kwh	0	1605	1654	1751	1799	1878	2135
	- Intensitas energi primer	SBM/Rp Milyar	0	189	189	189	189	189	189
	b. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	75,04	77	77,21	77,43	77,65	77,81	77,99
	c. Ketahanan Air								
	- Kapasitas air baku	m3/detik	0	0,47	0,51	0,72	0,89	1,03	1,22
	- Akses Rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Persen	0	31,77	33,45	35,79	38,91	42,67	45,97

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	159,14	156,1	155,47	154,97	153,67	152,39	151,27
45	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	30,45	32,88	32,91	33,56	34,79	35,65	36,57
	a. Kumulatif	Persen	9,73	9,73	10,34	12,45	13,78	14,81	15,37
	b. Tahunan	Persen	16,69	16,69	17,02	17,35	18,56	20,56	23,15

Tabel 4.3 Penetapan Target Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2030

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	75,04	77,00	77,21	77,43	77,65	77,81	77,99
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	5,56	5,6	5,79	6,81	7,41	8,69	9,25
3	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/kapita	0	1605	1654	1751	1799	1878	2135
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	0	31,77	33,45	35,79	38,91	42,67	45,97
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	79,97	62,72	79,99	80,35	80,53	80,72	81,35
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	2,75	4,50	4,80	5,20	5,40	5,90	6,10
7	Timbuan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	0,00	4,74	4,92	5,21	5,69	5,87	6,10
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	5,50	31,28	31,56	32,23	33,41	34,45	35,07
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	30,45	32,88	32,91	33,56	34,79	35,65	36,57
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	159,14	156,10	155,47	154,97	153,67	152,39	151,27
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,400	1,01	1,52	1,92	2,39	2,76	2,99
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	3,84	3,86	3,93	3,97	4,13	4,19	4,29
13	Rasio Penduduk	Persen	105,95	106,15	106,31	106,65	106,98	107,32	107,92
14	Kepadatan Penduduk	Orang/Km2	15,95	16,75	17,25	17,56	18,17	18,56	19,07
B.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,74	6,25	6,59	6,62	6,7	6,75	6,79
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,17	12,88	12,75	12,65	12,31	11,98	11,72
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	72,795	73,125	74,865	76,157	77,536	78,439	79,19
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,76	2,21	2,14	2,19	2,14	2,1	2,06
5	Indeks Gini	Angka	0,376	0,368	0,354	0,352	0,350	0,346	0,340
6	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,71	72,65	73	73,16	73,25	73,96	74,27
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,6	70,80	71,09	71,21	71,47	71,73	71,95
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	5,4	5,78	5,91	6,26	6,76	7,35	7,97
9	Prevalensi Stunting	Persen	5,4	5	4,8	4,52	4,27	3,91	3,67
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,60	9,73	9,85	9,92	9,99	10,04	10,17
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,13	13,30	13,33	13,33	13,34	13,34	13,34
12	Angka Literasi/Numerasi	Persen	0	21,32	25,98	28,71	30,19	32,95	35,48
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	82,78	83,41	83,91	84,27	84,98	85,32	87,82
14	Indeks Literasi Digital	Angka	0	0,35	0,56	0,75	0,91	1,02	1,31
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6,00
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	79,9	79,9	79,96	80,91	81,45	81,92	82,73
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	55,1	53,4	53,49	53,54	54,92	55,02	55,45
18	Indeks Perlindungan Anak	Angka	0	0,55	0,89	1,02	1,2	1,25	1,50
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	57,68	61,75	61,9	62,35	63,12	63,98	64,31
20	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,491	0,678	1,03	1,23	1,36	1,65	1,78
21	Indeks Pembangunan Gender	Angka	87,38	87,49	87,63	87,98	88,21	88,56	88,65
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,33	56,98	57,63	58,28	58,93	59,58	60,23

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Ketergantungan	Persen	53,37	54,89	56,01	57,31	58,29	59,60	60,21
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,74	0,75	0,79	0,82	0,83	0,85	0,87
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	9,95	10,35	10,52	10,78	10,92	11,29	11,89
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	1,24	1,31	1,36	1,39	1,41	1,49	1,54
5	Rasio Kewirausahaan	Persen	0	3,32	3,45	3,51	3,69	3,89	4,12
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	78,17	78,56	79,21	79,54	79,76	79,91	80,20
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	18,12	18,32	18,5	18,97	19,3	19,5	20,50
8	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	0	80,8	80,95	81,03	81,35	81,59	81,75
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka	0	0,78	1,50	2,10	2,60	3,01	3,10
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	0	0,5	1,25	1,89	2	2,56	2,89
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	5,88	5,92	5,99	6,03	6,05	6,096	6,19
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	12,49	36,4	36,12	35,27	35,09	34,95	34,86
13	Ekspor Barang dan Jasa	Persen	0,03	59,7	59,75	60,15	60,42	60,69	60,81
14	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	4	4,09	4,16	4,27	4,41	4,51	4,59
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	70	64,9	70,23	71,45	71,89	72,57	73,24
16	Persentase Desa Mandiri	Persen	0,63	1,25	1,88	2,51	3,14	3,77	5,66
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	72,06	72,35	72,69	73,02	73,34	73,56	74,81
18	Tingkat Inflasi	Persen	3,09	2,5	2,48	2,41	2,36	2,32	2,25
D.	ASPEK LAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	66,4	67,12	68,21	69,43	69,99	70,2	70,67

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,85	2,5	2,93	3,07	3,11	3,19	3,25
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,18	2,99	3,01	3,17	3,28	3,32	3,47
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	70,52	68	69,73	71,89	72,99	74,01	75,36
5	Persentase Penegakan Perda	Angka	38,46	38,65	38,98	39,29	39,43	39,56	39,65
6	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	45	45,69	46,12	46,79	47,3	48,2	49,20
7	Indeks Demokrasi Indonesia	Predikat	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Indeks Rasa Aman	Angka	0	1,2	2,3	2,8	3,1	3,3	3,90
9	Indeks Ketentraman Dan Ketertiban	Angka	89	89,35	89,5	89,87	89,91	89,95	89,99
10	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,16	3,23	3,39	3,45	3,65	3,78	3,85
E. INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	PENDIDIKAN								
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	87,03	90,00	92,97	95,51	98,06	100,00	100,00
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen	99,14	99,69	100	100	100	100	100,00
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	56,39	62,88	69,37	75,86	76,62	77,38	78,15
4	Kemampuan Literasi								
SD		Persen	49,18	51,68	54,18	56,68	59,18	61,68	64,18

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	SMP	Persen	64,17	65,27	66,37	67,47	68,57	69,67	70,77
5	Kemampuan Numerasi								
	SD	Persen	45,46	48,36	51,26	54,16	57,06	59,96	62,86
	SMP	Persen	59,74	61,24	62,74	64,24	65,74	67,24	68,74
6	Iklim Keamanan								
	SD	Persen	74,54	75,44	76,34	77,24	78,14	79,04	79,94
	SMP	Persen	72,08	73,58	75,08	76,58	78,08	79,58	81,08
7	Iklim Kebhinekaan								
	SD	Persen	69,55	70,55	71,55	72,55	73,55	74,55	75,55
	SMP	Persen	73,06	74,06	75,06	76,06	77,06	78,06	79,06
8	Iklim Inklusivitas								
	SD	Persen	56,8	59,3	61,8	64,3	66,8	69,3	71,80
	SMP	Persen	60,11	62,51	64,91	67,31	69,71	72,11	75
9	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Persen	56,51	62,82	63,57	64,32	65,07	65,82	67
10	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	53,78	60,07	71,49	86,72	100	100	100,00
1.02	KESEHATAN								
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	rasio	0,738	0,750	0,773	0,910	0,935	0,955	0,967
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan layanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan kesehatan sesuai standar	Persen	93,58	94,56	95,67	96,98	97,23	97,75	98,01
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	95,98	96,23	96,59	96,81	97,23	97,53	97,81
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	80,88	81,03	81,49	81,78	81,92	82,35	82,99
15	Kabupaten/Kota Sehat	Kategori	-	-	Padapa	Padapa	Padapa	Wiwirda	Wiwirda

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
L03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio	69,62	71,64	73,21	75,78	77,01	78,58	80,00
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, Erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan	Rasio	55,56	57,00	59,18	61,36	63,05	65,43	67,11
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	28,02	31,86	33,74	36,10	38,24	39,41	40,41
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	69,61	74,32	79,68	84,27	89,77	92,39	95,69
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	63,64	65,45	67,13	70,08	72,44	73,92	75,65
6	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Rasio	100	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota	Persen	15,48	15,96	16,94	18,34	21,37	24,59	21,91
8	Rasio tenaga operator/teknik/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	7,80	13,36	24,09	29,14	32,87	34,31	35,00
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	0	2,37	5,12	8,00	11,65	12,99	14,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.04	PERUMAHAN RAKYAT								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0	2,00	2,67	2,98	2,98	3,34	4,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0	0,00	0,50	1,23	2,00	2,68	3,00
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	Persen	41,87	47,49	53,07	59,11	65,23	71,22	76,09
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persen	0,39	6,34	21,19	47,45	63,79	70,65	82,99
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	0	34,07	38,65	39,99	42,87	45,02	48,79
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	Persen	38,46	38,95	39,56	40,31	41,98	42,61	43,98
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah desa tanggap bencana	Desa	4	4	4	4	4	4	4
4	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Persen	58,20	59,12	59,54	59,89	60,12	60,31	60,56
1.06	SOSIAL								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pantai	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	98,18	98,50	98,67	98,87	98,93	98,99	99,02
3	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persen	63,63	64,31	64,89	65,21	65,59	65,98	66,23
4	Persentase keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persen	0,55	0,76	0,95	1,21	1,53	1,89	2,21
2	UNSUR PEMERINTAHAN BUKAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.01	TENAGA KERJA								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	63,63	65,37	67,91	68,91	69,35	69,59	69,89
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	0,55	0,60	0,65	0,72	0,75	1,00	1,23
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	73,36	74,50	75,90	77,90	78,10	79,50	80,21
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata keola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur/ Skaia Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	58,33	58,79	59,31	59,87	60,23	60,50	61,21

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	60,48	61,12	61,60	62,21	62,75	63,21	65,20
2.0	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	6,58	7,50	8,20	8,60	9,23	9,50	9,92
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Kab/Kota Layak Anak	Nilai	540,00	700,00	750,00	780,00	800,00	830,00	860,00
2.0	PANGAN								
3									
1	Persentase ketersediaan pangan	Persen	41,94	43,25	47,50	49,56	53,45	55,23	59,50
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	81,40	82,30	83,35	84,67	85,98	86,75	87,56
3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	42,00	42,35	42,68	43,10	43,76	44,50	45,10
2.0	PERTANAHAN								
4									
1	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	bidang tanah	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria	kepala keluarga	300,00	300	300	300	300	300	300
2.0 LINGKUNGAN HIDUP									
5									
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	0,00	1,50	1,80	2,10	2,50	2,95	3,50
2	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	60,00	61,50	62,70	63,70	64,50	65,90	66,78
2.0 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL									
6									
1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	95,00	96,75	98,10	99,45	100,00	100,00	100,00
2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang dari 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	98,00	98,25	98,65	99,10	99,56	100,00	100,00
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	98,00	98,35	98,98	99,50	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan	PD	48	48	48	48	48	48	48
2.0 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
5									
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	98,11	98,74	99,37	100	100	100	100
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0,63	1,25	1,88	2,51	3,14	3,77	5,66
3	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.0	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 6 KELUARGA BERENCANA								
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	60	61	62	62,50	63,50	64,34	66,21
2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Persen	18	17	16	16	15	15	13
3	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Persen	2,10	2	2	1,9	1,9	1,9	1,8
4	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	61,80	63,4	64,3	65,37	66,23	67,12	68,98
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	7,40	6,5	5,5	5,20	4,80	4,50	4,20
2.0	PERHUBUNGAN								
7									
1	Rasio konektivitas simpul transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	3,00	3,00	3,00	3,25	3,40	3,65	3,87
2	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Persen	12,76	15,79	23,99	27,30	29,56	32,21	35,60
2.0	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
8									
1	Indeks Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks	75,00	75,65	75,89	76,39	76,81	77,97	78,69
2	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	90,00	91,50	91,75	92,12	92,54	92,76	93,02
3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	95,00	96,50	97,12	97,89	98,11	98,43	98,60

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	Persen	80,00	80,30	80,56	80,93	81,39	81,73	81,99
2.0	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
9									
1	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	-0,85	1,05	1,50	1,80	2,50	2,98	3,23
2	Proporsi jumlah UKM	Persen	80,05	81,67	82,50	82,70	82,95	83,23	83,54
3	Pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	1,88	1,95	2,05	2,10	2,15	2,21	2,35
2.10	PENANAMAN MODAL								
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp. Miliar	1,164	1,260	1,376	1,417	1,460	1,504	1,549
2.11	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	23,34	23,64	23,94	24,24	24,54	24,84	25,14
2	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	2,50	3,73	4,96	6,19	7,42	8,65	9,88
3	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	66,67	67,76	68,85	69,94	71,03	72,12	73,21
2.12	STATISTIK								
1	Indeks Pembangunan statistik	Indeks	2,51	2,60	2,65	2,70	2,72	2,75	2,78
2.13	KEBUDAYAAN								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	67,90	68,15	68,25	68,50	68,62	68,77	69,10
2	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	Persen	0	1,50	2,50	3,00	3,23	3,68	4,00
2.14 PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	67,58	68,23	68,54	68,96	69,20	69,42	69,66
2.15 KEARSIPAN									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	nilai	75,00	75,30	75,90	76,21	76,69	77,60	78,03
3 URUSAN PILIHAN									
3.1 KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Produksi perikanan tangkap	Ton	15457	15.509	15.599	15.649	15.699	15.749	15.799
2	Produksi perikanan budidaya	Ton	10055	9.121	9.182	9.232	9.282	9.332	9.382
3.2 PARIWISATA									
1	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	Orang	678.978	685.000	725.000	750.000	765.000	770.000	772.000
2	Lama menginap	Hari	2	3	3	3	4	4	4
3	Rasio PDB Pariwisata	Persen	4	4,04	4,15	4,20	4,31	4,45	4,60

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.3	PERTANIAN								
1	Jumlah Produksi Jagung	Ton	1.033	3.425	3.625	3.650	3.675	3.680	3.685
2	Jumlah Produksi Padi	Ton	8.103	10.623	10.824	10.940	11.050	11.130	11.200
3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Kg/Ha	7.135	8.500	8.700	9.500	10.500	11.700	12.900
4	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Kg/Ha	600	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
5	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	1.836	1.900	1.935	1.950	1.965	1.980	1.993
6	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	284	586	586	590	592	592	600
7	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Kg	195.527	85.800	87.800	88.500	90.000	93.500	95.000
8	Jumlah Produksi Telur	Kg	119.309	83.291	85.291	86.900	87.200	87.500	87.950
3.4	PERDAGANGAN								
1	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	20	45	60	65	68	72	75
2	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	78,84	85,79	90,30	93,45	95,68	98,94	100,00
3	Pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi	Persen	0	0	10	12,35	14,51	17,89	20,50
3.5	PERINDUSTRIAN								
1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Rp.	42.050.000.000	48.357.500.000	55.611.125.000	112.334.472.500	226.915.634.450	458.369.581.589	925.906.554.810

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Rp.	0,00	300.000	800.000	829.000	895.000	929.000	950.000
3.6 TRANSMIGRASI									
1	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persen	80,00	80,31	80,59	80,72	80,89	80,99	81,19
4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.1 SEKRETARIAT DAERAH									
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan Yang Dibangun/Rehabilitasi	Unit	28	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
2	Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya	Persen	99,59	99,61	99,62	99,64	99,66	99,67	99,69
4.2 SEKRETARIAT DPRD									
1	Persentase Peraturan Daerah Yang Dihasilkan	Persen	38,46	39,53	39,99	40,42	40,89	41,52	42,88
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.1 PERENCANAAN									
1	Persentase Sinergitas Perencanaan	Persen	98,04	98,35	98,68	98,79	98,85	98,92	98,99
2	Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Tingkat Partisipatif Perencanaan	Persen	24,13	24,45	24,67	24,71	25,09	25,39	25,52

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.2	KEUANGAN								
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	58,55	59,23	59,98	60,19	61,35	62,57	63,98
2	Penetapan APBD dan APBDP Tepat Waktu	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
3	Persentase Aset Pemda Yang Terinventarisir	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah	Persen	15,13	15,35	15,79	16,02	16,46	16,81	17,09
5.3	KEPEGAWAIAN								
1	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi	Persen	87,03	87,51	88,07	88,52	88,94	89,75	90,52
2	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	Persen	93,51	94,07	94,59	95,34	96,01	96,69	97,91
5.4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	18,12	18,45	18,85	19,30	19,78	20,35	21,05
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.1	PENGAWASAN								
1	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	3	3	4	4
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.1	KECAMATAN								
1	Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
1	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif	Kecamatan	13	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kecamatan	13	13	13	13	13	13	13



BAB V PENUTUP

RPJMD sebagai dokumen rencana pembangunan daerah yang merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

5.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2029 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2030.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
2. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target- target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
3. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berkewajiban melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 hingga tahun 2026;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD.

5. **Sistem Pengendalian dan evaluasi** terhadap rencana pembangunan daerah dilaksanakan dengan menerapkan "**Kendali Konasara**", yaitu sistem pengendalian perencanaan dan capaian kinerja terintegrasi. Dengan manajemen pengendalian dalam proses perencanaan dan implementasi yang terintegrasi dalam satu sistem maka diharapkan Pembangunan yang dihasilkan dapat bernilai, yaitu mengacu pada pembangunan yang mempertimbangkan nilai-nilai penting seperti keberlanjutan, kesejahteraan, dan keadilan sosial, selain aspek ekonomi. Ini berarti pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang.
6. Dalam pelaksanaanya, Kendali Konasara akan dituangkan ke dalam Aplikasi Kendali Konasara berbasis Cloud dan dapat dipantau secara realtime oleh Pemerintah Daerah, Legislatif, serta masyarakat luas sehingga pengendalian pelaksanaan perencanaan dan capaian pembangunan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel dan terupdate.
7. Manajemen risiko dalam RPJMD disajikan sebagai proses integral dalam perencanaan pembangunan. Ini melibatkan identifikasi, analisis, penilaian, dan pengendalian risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan pembangunan daerah

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2029 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga visi jangka menengah Kabupaten Konawe Utara yaitu: "Konawe Utara Sebagai Rumah Bersama yang Semakin Maju dan Sejahtera" dapat terwujud.

BUPATI KONAWE UTARA,

H. IKBAR, S.H., M.H.



RANHIR RPJMD 2025-2029

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2025-2029**

"Konawe Utara Sebagai Rumah Bersama yang Semakin Maju dan Sejahtera"

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2025**